



BUPATI SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA
NOMOR 9 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2025-2045

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMBAWA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengintegrasian perencanaan pembangunan daerah dalam sistem pembangunan nasional serta menjamin agar pembangunan berjalan efektif, efisien, dan berkelanjutan, Kabupaten Sumbawa memerlukan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah sebagai arah dan prioritas pembangunan secara menyeluruh yang akan dilakukan secara bertahap untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa sesuai amanat dalam Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa sesuai amanat dalam Pasal 264 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah periode sebelumnya berakhir;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2025 – 2045;

xl

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
7. Undang-Undang Nomor 85 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sumbawa di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 271, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7022);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

X/

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 56);
13. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 207);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA
DAN
BUPATI SUMBAWA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2025-2045.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Sumbawa.
2. Bupati adalah Bupati Sumbawa.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.



5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa.
6. Pembangunan Daerah adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua, komponen masyarakat daerah dalam rangka mencapai tujuan bernegara
7. Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah adalah bagian dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan di daerah untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah dan masyarakat di Daerah.
8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disebut RPJP Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2045.
9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disebut RPJP Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2045.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, yang selanjutnya disebut RPJM Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahunan, yaitu RPJM Nasional ke-1 Tahun 2025-2029, RPJM Nasional ke-2 Tahun 2030-2034, RPJM Nasional ke-3 Tahun 2035-2039, dan RPJM Nasional ke-4 Tahun 2040-2045.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumbawa, yang selanjutnya disebut RPJM Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJP Daerah serta memperhatikan RPJM Nasional, yaitu RPJM Daerah ke-1 Tahun 2025-2029, RPJM Daerah ke-2 Tahun 2030-2034, RPJM Daerah ke-3 Tahun 2035-2039, dan RPJM Daerah ke-4 Tahun 2040-2045.
12. Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disebut RKP Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

XL

BAB II PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 2

- (1) Program Pembangunan Daerah periode 2025-2045 dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan RPJP Daerah.
- (2) Program pembangunan Daerah dalam jangka menengah diuraikan dalam RPJM Daerah dan dalam jangka pendek diuraikan dalam RKP Daerah.

Pasal 3

- (1) RPJP Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun mengacu kepada RPJP Nasional dan RPJPD Provinsi Nusa Tenggara Barat yang bertujuan untuk memberi arah sekaligus acuan bagi Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan daerah sesuai visi, misi dan arah pembangunan daerah.
- (2) RPJP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan:
 - a. RPJM Daerah yang memuat visi, misi dan program kerja Bupati;
 - b. RTRW Kabupaten; dan
 - c. Dokumen Perencanaan Pembangunan lainnya.

Pasal 4

- (1) Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan untuk menghindarkan kekosongan rencana pembangunan daerah, Bupati yang sedang memerintah pada tahun terakhir pemerintahannya diwajibkan menyusun RKP Daerah untuk tahun pertama periode Pemerintahan Bupati berikutnya.
- (2) RKP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun pertama periode Pemerintahan Bupati berikutnya.

BAB III SISTEMATIKA

Pasal 5

- (1) Dokumen RPJP Daerah Tahun 2025-2045 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Lampiran RPJP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut :
BAB I : pendahuluan;
BAB II : gambaran umum kondisi Daerah;
BAB III : permasalahan dan isu strategis Daerah;

XL

BAB IV : arah kebijakan dan sasaran pokok Daerah;
dan

BAB VI : penutup.

BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJP Daerah.
- (2) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (3) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB V PERUBAHAN RPJP DAERAH

Pasal 7

- (1) Perubahan RPJP Daerah dapat dilakukan apabila:
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan peraturan perundangan-undangan; dan
 - c. terjadi perubahan yang mendasar.
- (2) Perubahan RPJP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJPD kurang dari 7 (tujuh) tahun;
- (3) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan nasional.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, RPJM Daerah yang telah ada masih tetap berlaku dan wajib disesuaikan dengan RPJP Daerah paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal pengundangan peraturan daerah ini.

18

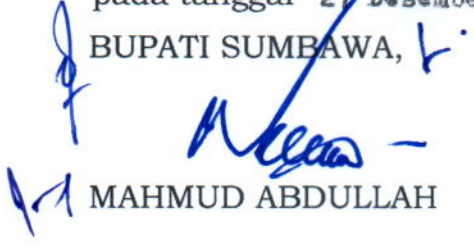
BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 27 Desember 2024

BUPATI SUMBAWA, 

MAHMUD ABDULLAH

Diundangkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 27 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA



BUDI PRASETIYO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2024 NOMOR 9

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 77 TAHUN 2024

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA
NOMOR 9 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2025 – 2045

I. UMUM

Pembangunan diartikan sebagai proses perubahan ke arah kondisi yang lebih baik secara terencana. Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional. Pembangunan pada daerah tersebut satu sama lainnya ada dalam suatu keterkaitan dan keterpaduan membentuk dan menghasilkan pembangunan nasional, sehingga keberhasilan pembangunan nasional tergantung dan ditentukan oleh keberhasilan pembangunan daerah.

Sistem perencanaan pembangunan nasional merupakan satu kesatuan mengenai tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan 5 (lima) tujuan pelaksanaan sistem perencanaan pembangunan nasional, yaitu: (1) untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan, (2) menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antar daerah, antar ruang, antar waktu, dan antar fungsi pemerintah, serta antara pusat dan daerah, (3) menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan, (4) mengoptimalkan partisipasi masyarakat, dan (5) menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Pada tahun 2017 terbit Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang berimplikasi pada penyusunan Rancangan Awal RPJPD Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2045 dan disajikan dalam bentuk singkat untuk memudahkan pemanfaatan informasi bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

RPJP Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2045 merupakan kelanjutan dari tahap pembangunan yang sudah dilakukan sebelumnya. Dalam RPJP Daerah ini, dilakukan penataan kembali berbagai langkah-langkah, baik di bidang pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya budaya dan kelembagaannya sehingga masyarakat Kabupaten Sumbawa dapat sejajar kemajuannya dengan daerah-daerah lainnya di Indonesia serta memiliki daya saing yang kuat.

Peraturan Daerah tentang RPJP Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2045 dimaksudkan untuk memberikan arah sekaligus acuan bagi seluruh komponen daerah (pemerintah, masyarakat dan dunia usaha) di Kabupaten Sumbawa dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan bersama

sesuai dengan visi, misi dan arah pembangunan yang disepakati bersama, sehingga seluruh upaya yang dilakukan oleh masing-masing pelaku pembangunan bersifat sinergis, koordinatif dan melengkapi satu sama lainnya di dalam satu pola sikap dan pola tindak. Disamping itu peraturan daerah ini dimaksudkan untuk menjadi acuan dan pedoman dalam penyusunan RPJM Daerah Kabupaten Sumbawa dalam periode tersebut. Melalui peraturan daerah ini diharapkan akan tersedianya dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang daerah periode 2025-2045 yang memuat rumusan visi, misi dan arah pembangunan daerah, yang disusun berdasarkan kondisi dan analisis kondisi umum daerah saat ini serta prediksinya kedepan sebagai instrumen pengintegrasian perencanaan Kabupaten Sumbawa dengan sistem perencanaan nasional serta menjamin perencanaan pembangunan agar efektif, efisien dan berkelanjutan. Disamping itu dokumen ini diharapkan dapat memberikan inspirasi para pelaku pembangunan (*stakeholders*) dalam mengarahkan proses perubahan sosial masyarakat sehingga dapat a) meningkatkan kemampuan sosial-ekonomi masyarakat sehingga terbebas dari belenggu kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan; b) menciptakan tatanan sosial-politik yang demokratis dan berkeadilan; dan c) meningkatkan kapasitas kelembagaan pembangunan melalui perubahan sosio-kultural yang mendukung.

Peraturan daerah ini memuat visi bersama seluruh elemen masyarakat Kabupaten Sumbawa dalam jangka panjang pembangunan daerah yaitu "Menuju Sumbawa Maju, Sejahtera, Adil dan Berkelanjutan Tahun 2045". Selanjutnya visi tersebut dijabarkan dalam misi, arah dan strategi pembangunan yang terurai dalam lampiran peraturan daerah ini sebagai bagian tak terpisahkan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Program pembangunan daerah periode 2025-2045 merupakan program pembangunan jangka panjang yaitu instrumen kebijakan pembangunan daerah yang dilaksanakan secara bertahap dan dijabarkan dalam program pembangunan jangka menengah lima tahunan dan program pembangunan jangka pendek satu tahunan.

Pasal 4

RKPD yang disusun pada akhir periode Bupati yang sedang memerintah merupakan RKPD transisi yang penyusunannya tetap mengacu pada program pembangunan jangka panjang yang akan menjadi bagian dalam program pembangunan jangka menengah periode berikutnya. Hal ini dimaksudkan agar program pembangunan jangka panjang dapat dilakukan secara berkesinambungan dan terjadi kekosongan pelaksanaan program pembangunan tahunan meskipun terjadi pergantian Bupati yang memerintah.

Pasal 5

Ayat (1)

Pengendalian dan evaluasi dimaksudkan untuk menjaga konsistensi pelaksanaan program pembangunan daerah agar sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan dan



melakukan penyesuaian terhadap perkembangan yang terjadi. Pengendalian untuk mengamati perkembangan pelaksanaan rencana, mengidentifikasi dan mengantisipasi permasalahan yang muncul untuk ditindaklanjuti. Tindaklanjut dapat berupa koreksi, klarifikasi maupun mengusutan atas penyebab masalah. Dengan demikian kegiatan pengendalian meliputi pemantauan, pengawasan, dan tindak lanjut.

Evaluasi yang dilakukan mencakup evaluasi terhadap pelaksanaan substansi perencanaan dimaksudkan untuk dapat mengetahui dengan pasti apakah pencapaian hasil, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan rencana pembangunan dapat dinilai dan dipelajari untuk perbaikan pelaksanaan rencana pembangunan di masa mendatang. Fokus utama evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan diarahkan kepada hasil, manfaat, dan dampak dari rencana pembangunan.

Pengendalian dan evaluasi secara menyeluruh dilakukan oleh Bappeda Kabupaten Sumbawa sedangkan pengendalian dan evaluasi secara sektoral dilaksanakan oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA NOMOR 727

Fl

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA
NOMOR 9 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG (RPJP) DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2025 – 2045

I. UMUM

Pembangunan diartikan sebagai proses perubahan ke arah kondisi yang lebih baik secara terencana. Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional. Pembangunan pada daerah tersebut satu sama lainnya ada dalam suatu keterkaitan dan keterpaduan membentuk dan menghasilkan pembangunan nasional, sehingga keberhasilan pembangunan nasional tergantung dan ditentukan oleh keberhasilan pembangunan daerah.

Sistem perencanaan pembangunan nasional merupakan satu kesatuan mengenai tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan 5 (lima) tujuan pelaksanaan sistem perencanaan pembangunan nasional, yaitu: (1) untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan, (2) menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antar daerah, antar ruang, antar waktu, dan antar fungsi pemerintah, serta antara pusat dan daerah, (3) menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan, (4) mengoptimalkan partisipasi masyarakat, dan (5) menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Pada tahun 2017 terbit Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang berimplikasi pada penyusunan Rancangan Awal RPJPD Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2045 dan disajikan dalam bentuk singkat untuk memudahkan pemanfaatan informasi bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

RPJP Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2045 merupakan kelanjutan dari tahap pembangunan yang sudah dilakukan sebelumnya. Dalam RPJP Daerah ini, dilakukan penataan kembali berbagai langkah-langkah, baik di bidang pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya budaya dan kelembagaannya sehingga masyarakat Kabupaten Sumbawa dapat sejajar kemajuannya dengan daerah-daerah lainnya di Indonesia serta memiliki daya saing yang kuat.

Peraturan Daerah tentang RPJP Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2045 dimaksudkan untuk memberikan arah sekaligus acuan bagi seluruh komponen daerah (pemerintah, masyarakat dan dunia usaha) di Kabupaten Sumbawa dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan bersama sesuai dengan visi, misi dan arah pembangunan yang disepakati bersama, sehingga seluruh upaya yang dilakukan oleh masing-masing pelaku pembangunan bersifat sinergis, koordinatif dan melengkapi satu sama lainnya di dalam satu pola sikap dan pola tindak. Disamping itu peraturan daerah ini dimaksudkan untuk menjadi acuan dan pedoman dalam penyusunan RPJM Daerah Kabupaten Sumbawa dalam periode tersebut. Melalui peraturan daerah ini diharapkan akan tersedianya dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang daerah periode 2025-2045 yang memuat rumusan visi, misi dan arah pembangunan daerah, yang disusun berdasarkan kondisi dan analisis kondisi umum daerah saat ini serta prediksinya kedepan sebagai instrumen pengintegrasian perencanaan Kabupaten Sumbawa dengan sistem perencanaan nasional serta menjamin perencanaan pembangunan agar efektif, efisien dan berkelanjutan. Disamping itu dokumen ini diharapkan dapat memberikan inspirasi para pelaku pembangunan (*stakeholders*) dalam mengarahkan proses perubahan sosial masyarakat sehingga dapat a) meningkatkan kemampuan sosial-ekonomi masyarakat sehingga terbebas dari belenggu kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan; b) menciptakan tatanan sosial-politik yang demokratis dan berkeadilan; dan c) meningkatkan kapasitas kelembagaan pembangunan melalui perubahan sosio-kultural yang mendukung.

Peraturan daerah ini memuat visi bersama seluruh elemen masyarakat Kabupaten Sumbawa dalam jangka panjang pembangunan daerah yaitu “Menuju Sumbawa Maju, Sejahtera, Adil dan Berkelanjutan Tahun 2045”. Selanjutnya visi tersebut dijabarkan dalam misi, arah dan strategi pembangunan yang terurai dalam lampiran peraturan daerah ini sebagai bagian tak terpisahkan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Program pembangunan daerah periode 2025-2045 merupakan program pembangunan jangka panjang yaitu instrumen kebijakan pembangunan daerah yang dilaksanakan secara bertahap dan dijabarkan dalam program pembangunan jangka menengah lima tahunan dan program pembangunan jangka pendek satu tahunan.

Pasal 4

RKPD yang disusun pada akhir periode Bupati yang sedang memerintah merupakan RKPD transisi yang penyusunannya tetap mengacu pada program pembangunan jangka panjang yang akan menjadi bagian dalam program pembangunan jangka menengah periode berikutnya. Hal ini dimaksudkan agar program pembangunan jangka panjang dapat dilakukan secara berkesinambungan dan terjadi kekosongan pelaksanaan program pembangunan tahunan meskipun terjadi pergantian Bupati yang memerintah.

Pasal 5

Ayat (1)

Pengendalian dan evaluasi dimaksudkan untuk menjaga konsistensi pelaksanaan program pembangunan daerah agar sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan dan melakukan penyesuaian terhadap perkembangan yang terjadi. Pengendalian untuk mengamati perkembangan pelaksanaan rencana, mengidentifikasi dan mengantisipasi permasalahan yang muncul untuk ditindaklanjuti.

Tindaklanjut dapat berupa koreksi, klarifikasi maupun mengusutan atas penyebab masalah. Dengan demikian kegiatan pengendalian meliputi pemantauan, pengawasan, dan tindak lanjut.

Evaluasi yang dilakukan mencakup evaluasi terhadap pelaksanaan substansi perencanaan dimaksudkan untuk dapat mengetahui dengan pasti apakah pencapaian hasil, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan rencana pembangunan dapat dinilai dan dipelajari untuk perbaikan pelaksanaan rencana pembangunan di masa mendatang. Fokus utama evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan diarahkan kepada hasil, manfaat, dan dampak dari rencana pembangunan.

Pengendalian dan evaluasi secara menyeluruh dilakukan oleh Bappeda Kabupaten Sumbawa sedangkan pengendalian dan evaluasi secara sektoral dilaksanakan oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA NOMOR 727

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....**Error! Bookmark not defined.**

DAFTAR ISI..... *i*

DAFTAR TABEL *iii*

DAFTAR GAMBAR *iv*

BAB I. PENDAHULUAN..... *1*

1.1. Latar Belakang..... 1

1.2. Dasar Hukum Penyusunan 2

1.3. Hubungan Antar Dokumen RPJPD dengan Dokumen Rencana
Pembangunan Sektor Lainnya..... 4

1.4. Maksud dan Tujuan..... 6

1.5. Sistematika Penulisan 6

BAB II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH..... *1*

2.1. Aspek Geografi dan Demografi..... 1

2.1.1. Aspek Geografi 1

2.1.2. Aspek Demografi 33

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat..... 39

2.2.1. Kesejahteraan Ekonomi 39

2.2.2. Kesejahteraan Sosial Budaya 52

2.3. Aspek Pelayanan Umum..... 108

2.3.1. Pengantar analisis..... 108

2.3.2. Kondisi Umum Aspek Pelayanan Umum berdasarkan Bidang Urusan
Penyelenggaraan Kewenangan Pemerintahan Daerah 118

2.3.1. Fokus Urusan Layanan Wajib dan Fokus Urusan Layanan Pilihan 148

2.4. Aspek Daya Saing Daerah..... 66

2.4.1. Daya Saing Ekonomi Daerah..... 66

2.4.2. Daya Saing Sumber Daya Manusia 90

2.4.3. Daya Saing Fasilitas/ Infrastruktur Wilayah 94

2.4.4. Daya Saing Iklim Investasi 107

2.5. Evaluasi Hasil RPJPD Tahun 2005-2025..... 152

2.6. Tren Demografi dan Kebutuhan Sarana dan Prasarana 165

2.6.1. Tren Demografi..... 165

2.6.2. Kebutuhan Sarana dan Prasarana 180

2.7. Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah..... 186

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS..... *204*

3.1. Permasalahan..... 204

1.	Permasalahan Bidang Pendidikan	205
2.	Permasalahan Bidang Kesehatan.....	205
3.	Permasalahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.....	205
4.	Permasalahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.....	206
5.	Permasalahan Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	207
6.	Permasalahan Bidang Sosial	208
7.	Permasalahan Bidang Ketenagakerjaan.....	208
8.	Permasalahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.....	209
9.	Permasalahan Bidang Pangan.....	209
10.	Permasalahan Bidang Pertanahan.....	210
11.	Permasalahan Bidang Lingkungan Hidup.....	210
12.	Permasalahan Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil	211
13.	Permasalahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	211
14.	Permasalahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	212
15.	Permasalahan Bidang Perhubungan.....	212
16.	Permasalahan Bidang Komunikasi dan Informatika	213
17.	Permasalahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	213
18.	Permasalahan Bidang Penanaman Modal	213
19.	Permasalahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga	214
20.	Permasalahan Bidang Perpustakaan	215
21.	Permasalahan Bidang Statistik.....	215
22.	Permasalahan Bidang Kearsipan	215
23.	Permasalahan Bidang Kelautan dan Perikanan	216
24.	Permasalahan Bidang Pariwisata.....	216
25.	Permasalahan Bidang Pertanian	217
26.	Permasalahan Bidang Kesbangpoldagri.....	217
27.	Permasalahan Bidang Persandian	218
28.	Permasalahan Bidang Perindustrian	218
29.	Permasalahan Bidang Perdagangan	218
3.2.	Isu Strategis.....	219
<i>BAB IV. VISI DAN MISI DAERAH</i>		<i>223</i>
4.1.	Visi.....	223
4.2.	Misi.....	232
<i>BAB V. ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK</i>		<i>243</i>
5.1.	Arah Kebijakan	243
5.2.	Sasaran Pokok	299

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Pembagian dan Luas Wilayah Administrasi..... 13

Tabel 2. 2 Klasifikasi Kemiringan Lahan Kabupaten Sumbawa 16

Tabel 2. 3 Sub Satuan Wilayah Sungai di Kabupaten Sumbawa 19

Tabel 2. 4 Luas Lahan Menurut Penggunaannya Tahun 2023 (Ha) 20

Tabel 2. 5 Penggunaan Lahan Tahun 2019-2023 (Ha) 21

Tabel 2. 6 Perkembangan Populasi Penduduk dan Sex Ratio Kabupaten Sumbawa
Tahun 2019-2023 33

Tabel 2. 7 Rasio Jenis Kelamin Penduduk Tiap Kecamatan Tahun 2021-2023 34

Tabel 2. 8 Laju Pertumbuhan Riil PDRB Kabupaten Sumbawa Menurut Lapangan
Usaha, Tahun 2019-2023 (%) 39

Tabel 2. 9 Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Perkapita Kabupaten
Sumbawa, Tahun 2019-2023 42

Tabel 2. 10 Indikator Ketenagakerjaan Tahun 2019-2023 49

Tabel 2. 11 Kondisi Pendidikan Menurut Tingkat Sekolah..... 53

Tabel 2. 12 Jumlah Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Sumbawa Tahun 2022-2023 64

Tabel 2. 13 Jumlah Tenaga Kesehatan yang Bekerja di Unit Kesehatan Kabupaten
Sumbawa Tahun 2023..... 64

Tabel 2. 14 Aksesibilitas Sarana Kesehatan di Kabupaten Sumbawa Tahun 2023 65

Tabel 2. 15 PDRB dan Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Sumbawa Atas Dasar
Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan 2010 Tahun 2019-2023... 68

Tabel 2. 16 Jalan Kewenangan Pusat di Kabupaten Sumbawa 94

Tabel 2. 17 Jalan Kewenangan Provinsi di Kabupaten Sumbawa 95

Tabel 2. 18 Jalan Kewenangan Kabupaten di Kabupaten Sumbawa 96

Tabel 2. 19 Proyeksi Penduduk Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2045 166

Tabel 2. 20 Kepadatan Penduduk Kabupaten Sumbawa 169

Tabel 2. 21 Rasio Ketergantungan di Kab. Sumbawa Tahun 2025-2045..... 175

Tabel 2. 22 Proyeksi Kebutuhan Air Bersih di Kabupaten Sumbawa 180

Tabel 2. 23 Timbunan Sampah di Kabupaten Sumbawa 184

Tabel 3. 1 Masalah Pokok, Masalah dan Akar Masalah 205

Tabel 3. 2 Masalah Pokok, Masalah dan Akar Masalah 205

Tabel 3. 3 Masalah Pokok, Masalah dan Akar Masalah 206

Tabel 3. 4 Masalah Pokok, Masalah dan Akar Masalah 206

Tabel 3. 5 Masalah Pokok, Masalah dan Akar Masalah Bidang Trantibumlinmas.... 207

Tabel 3. 6 Masalah Pokok, Masalah dan Akar Masalah Bidang Sosial 208

Tabel 3. 7 Masalah Pokok, Masalah dan Akar Masalah Bidang Ketenagakerjaan.... 208

Tabel 3. 8 Masalah Pokok, Masalah dan Akar Masalah Bidang pemberdayaan
perempuan dan perlindungan anak 209

Tabel 3. 9 Masalah Pokok, Masalah dan Akar Masalah Bidang pangan 209

Tabel 3. 10 Masalah Pokok, Masalah dan Akar Masalah Bidang pertanian 210

Tabel 3. 11 Masalah Pokok, Masalah dan Akar Masalah Bidang Lingkungan hidup 210

Tabel 3. 12 Masalah Pokok, Masalah dan Akar Masalah Bidang Administrasi
kependudukan dan pencatatan sipil 211

Tabel 3. 13 Masalah Pokok, Masalah dan Akar Masalah Bidang pemberdayaan
masyarakat dan desa 211

Tabel 3. 14 Masalah Pokok, Masalah dan Akar Masalah Bidang Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana 212

Tabel 3. 15 Masalah Pokok, Masalah dan Akar Masalah Bidang Perhubungan 212

Tabel 3. 16 Masalah Pokok, Masalah dan Akar Masalah Bidang Komunikasi dan Informatika.....213

Tabel 3. 17 Masalah Pokok, Masalah dan Akar Masalah Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 213

Tabel 3. 18 Masalah Pokok, Masalah dan Akar Masalah Bidang Penanaman modal 214

Tabel 3. 19 Masalah Pokok, Masalah dan Akar Masalah Bidang Kepemudaan dan olah raga 214

Tabel 3. 20 Masalah Pokok, Masalah dan Akar Masalah Bidang Perpustakaan 215

Tabel 3. 21 Masalah Pokok, Masalah dan Akar Masalah Bidang Statistik 215

Tabel 3. 22 Masalah Pokok, Masalah dan Akar Masalah Bidang Statistik 215

Tabel 3. 23 Masalah Pokok, Masalah dan Akar Masalah Bidang Kelautan dan Perikanan 216

Tabel 3. 24 Masalah Pokok, Masalah dan Akar Masalah Bidang Pariwisata 216

Tabel 3. 25 Masalah Pokok, Masalah dan Akar Masalah Bidang Pertanian 217

Tabel 3. 26 Masalah Pokok, Masalah dan Akar Masalah Bidang Kesbangpoldagri...217

Tabel 3. 27 Masalah Pokok, Masalah dan Akar Masalah Bidang Persandian 218

Tabel 3. 28 Masalah Pokok, Masalah dan Akar Masalah Bidang Perindustrian 218

Tabel 3. 29 Masalah Pokok, Masalah dan Akar Masalah Bidang Perdagangan 219

Tabel 3. 30 Keterkaitan Permasalahan Daerah dengan Isu Strategi Kabupaten Sumbawa.....220

Tabel 4. 1 Perumusan Visi Berdasarkan Isu Strategis 223

Tabel 4. 2 Visi dan Misi Jangka Panjang Kabupaten Sumbawa 2025-2045 232

Tabel 4. 3 Perumusan Misi RPJPD Kabupaten Sumbawa 2025-2045 Berdasarkan Permasalahan Daerah.....233

Tabel 4. 4 Perumusan Misi RPJPD Kabupaten Sumbawa 2025-2045 Berdasarkan Permasalahan Daerah.....234

Tabel 5. 1 Tahapan Arah Kebijakan dalam 4 Periode 5 Tahunan Kabupaten Sumbawa 244

Tabel 5. 2 Sasaran Pokok yang Bersesuaian dengan Arah Pembangunan Nasional .299

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Keterkaitan dokumen perencanaan pembangunan 4

Gambar 1.2 Uraian potensi pengembangan wilayah 7

Gambar 2. 1 Peta Wilayah Kabupaten Sumbawa.....12

Gambar 2. 2 Jarak (km) Ibu Kota Kecamatan Ke Ibukota Kabupaten Sumbawa..... 14

Gambar 2. 3 Rata-Rata Jarak (km) Ibu Kota Desa ke Ibukota Kecamatan 15

Gambar 2. 4 Peta Elevasi Kabupaten Sumbawa 16

Gambar 2. 5 Peta Kemiringan Lereng Kabupaten Sumbawa..... 18

Gambar 2. 6 Luas Lahan Sawah (Ha) Berdasarkan Jenis Irigasi dan Tadah Hujan ...21

Gambar 2. 7 Luas Lahan (Ha) dan Proporsi (%) Lahan sawah irigasi di Kabupaten Sumbawa Tahun 2023.....22

Gambar 2. 8 Luas Lahan (Ha) dan Proporsi (%) Lahan Sawah Tadah Hujan di Kabupaten Sumbawa Tahun 2023.....23

Gambar 2. 9 Luas Lahan Pertanian Bukan Sawah (Ha) di Kabupaten Sumbawa Tahun 2019-2023.....23

Gambar 2. 10 Luas Lahan (Ha) dan Proporsi (%) Lahan Tegal/Kebun di Kabupaten Sumbawa Tahun 2023.....24

Gambar 2. 11 Luas Lahan (Ha) dan Proporsi (%) Lahan Ladang/Huma Tahun 2023.25

Gambar 2. 12 Luas Lahan (Ha) dan Proporsi (%) Lahan Perkebunan di Kabupaten Sumbawa Tahun 2023.....26

Gambar 2. 13 Luas Lahan (Ha) dan Proporsi (%) Lahan Hutan Rakyat di Tahun 2023 27

Gambar 2. 14 Luas Lahan (Ha) dan Proporsi (%) Lahan Pengembalaan/ Padang Rumput di Kabupaten Sumbawa Tahun 2023 28

Gambar 2. 15 Luas Lahan (Ha) dan Proporsi (%) Hutan Negara di Kabupaten Sumbawa Tahun 2023.....29

Gambar 2. 16 Luas Lahan (Ha) dan Proporsi (%) Lahan Sementara Tidak Diusahakan di Kabupaten Sumbawa Tahun 2023 30

Gambar 2. 17 Luas Lahan (Ha) dan Proporsi (%) Lahan Lain-lain (Tambak, Kolam, Empang dll) di Kabupaten Sumbawa Tahun 2023 31

Gambar 2. 18 Luas Lahan (Ha) dan Proporsi (%) Lahan Bukan Pertanian Tahun 2023 32

Gambar 2. 19 Sebaran Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan (%) di Kabupaten Sumbawa Tahun 2023.....36

Gambar 2. 20 Kepadatan Penduduk per Kecamatan (jiwa per km²) di Kabupaten Sumbawa Tahun 2023.....37

Gambar 2. 21 Struktur Penduduk Kabupaten Sumbawa Tahun 2023 38

Gambar 2. 22 Proporsi Penduduk Berdasarkan Umur Produktif dan Tidak Produktif di Kabupaten Sumbawa Tahun 2023 Sumber Data: Long Form Sensus Penduduk 2020, BPS Kab. Sumbawa 39

Gambar 2. 23 Perkembangan Garis Kemiskinan Kabupaten Sumbawa Tahun 2019 – 2023 44

Gambar 2. 24 Perkembangan Tingkat Kemiskinan dan Jumlah Penduduk Miskin di Kab. Sumbawa 2019-2023.....45

Gambar 2. 25 Tingkat Kemiskinan Kab. Sumbawa dan Provinsi NTB Tahun 2019-2023.....45

Gambar 2. 26 Tingkat Kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2022 – 2023 46

Gambar 2. 27 Kedalaman Kemiskinan Kab. Sumbawa dan Provinsi NTB Tahun 2019-2023 47

Gambar 2. 28 Keparahan Kemiskinan Kab. Sumbawa dan Provinsi NTB Tahun 2019-2023.....48

Gambar 2. 29 Capaian IPM Kabupaten/Kota se NTB Tahun 2023 50

Gambar 2. 30 Perkembangan IPM di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2022-2023 51

Gambar 2. 31 Perbandingan IPM dan Laju Pertumbuhan IPM antara Kab. Sumbawa dengan Provinsi NTB Tahun 2020-2023.....52

Gambar 2. 32 Perbandingan Rasio Murid per Guru di Kabupaten Sumbawa Tahun 2022 dan Tahun 2023 Sumber Data: Sumbawa dalam angka 2024 (diolah) 54

Gambar 2. 33 Perbandingan Rasio Murid per Sekolah di Kabupaten Sumbawa Sumber Data: Sumbawa dalam angka 2024 (diolah) 54

Gambar 2. 34 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kabupaten Sumbawa Tahun 2019 - 2023.....56

Gambar 2. 35 Angka Partisipasi Kasar (APK) Kabupaten Sumbawa Tahun 2019-2023 57

Gambar 2. 36 Angka Partisipasi Murni (APM) Kabupaten Sumbawa Tahun 2019-2023	58
Gambar 2. 37 Perbandingan Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Laju Pertumbuhan HLS antara Kabupaten Sumbawa dengan Provinsi NTB Tahun 2020-2023	58
Gambar 2. 38 Perbandingan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Laju Pertumbuhan RLS	59
Gambar 2. 39 Perkembangan Angka (Tahun) dan Laju (%) Usia Harapan Hidup Kabupaten Sumbawa dan Provinsi NTB Tahun 2020-2023	60
Gambar 2. 40 Angka Kasus Kematian Ibu Tahun 2019 – 2023 Sumber: Seksi Kesehatan Keluarga, Dinas Kesehatan Provinsi NTB.....	61
Gambar 2. 41 Angka Kasus Kematian Bayi baru Lahir (Neonatus) tahun 2019-2023	62
Gambar 2. 42 Perbandingan Jumlah Kematian Neonatal, Bayi dan Balita	62
Gambar 2. 43 Perkembangan Angka Kesakitan Kabupaten Sumbawa tahun 2019-2023	63
Gambar 2. 44 Perkembangan Laju Pertumbuhan PDRB ADHB dan PDRB ADHK Kabupaten Sumbawa Tahun 2019-2023.....	67
Gambar 2. 45 Kontribusi Kategori Lapangan Usaha Terhadap PDRB di Kabupaten Sumbawa ADHB Tahun 2023 (%)	69
Gambar 2. 46 Kontribusi dan Laju Pertumbuhan PDRB Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan di Kabupaten Sumbawa Tahun 2019-2023	72
Gambar 2. 47 Kontribusi dan Laju Pertumbuhan PDRB Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian di Kabupaten Sumbawa Tahun 2019-2023	73
Gambar 2. 48 Kontribusi dan Laju Pertumbuhan PDRB Lapangan Usaha Industri Pengolahan di Tahun 2019-2023	74
Gambar 2. 49 Kontribusi dan Laju Pertumbuhan PDRB Lapangan Usaha Pengadaan Listrik dan Gas di Kabupaten Sumbawa Tahun 2019-2023	75
Gambar 2. 50 Kontribusi dan Laju Pertumbuhan PDRB Lapangan Usaha Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang di Kabupaten Sumbawa Tahun 2019-2023.....	76
Gambar 2. 51 Kontribusi dan Laju Pertumbuhan PDRB Lapangan Usaha Konstruksi di Kabupaten Sumbawa Tahun 2019-2023.....	77
Gambar 2. 52 Kontribusi dan Laju Pertumbuhan PDRB Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor di Kabupaten Sumbawa Tahun 2019-2023.....	78
Gambar 2. 53 Kontribusi dan Laju Pertumbuhan PDRB Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan di Kabupaten Sumbawa Tahun 2019-2023.....	79
Gambar 2. 54 Kontribusi dan Laju Pertumbuhan PDRB Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum di Kabupaten Sumbawa Tahun 2019-2023	80
Gambar 2. 55 Kontribusi dan Laju Pertumbuhan PDRB Lapangan Usaha Informasi dan Komunikasi di Kabupaten Sumbawa Tahun 2019-2023	81
Gambar 2. 56 Kontribusi dan Laju Pertumbuhan PDRB Lapangan Usaha Jasa Keuangan dan Asuransi di Kabupaten Sumbawa Tahun 2019-2023...	82
Gambar 2. 57 Kontribusi dan Laju Pertumbuhan PDRB Lapangan Usaha Real Estate di Kabupaten Sumbawa Tahun 2019-2023.....	83
Gambar 2. 58 Kontribusi dan Laju Pertumbuhan PDRB Lapangan Usaha Jasa Perusahaan di Kabupaten Sumbawa Tahun 2019-2023	84
Gambar 2. 59 Kontribusi dan Laju Pertumbuhan PDRB Lapangan Usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib di Kabupaten Sumbawa Tahun 2019-2023.....	85

Gambar 2. 60 Kontribusi dan Laju Pertumbuhan PDRB Lapangan Usaha Jasa Pendidikan di Kabupaten Sumbawa Tahun 2019-2023	86
Gambar 2. 61 Kontribusi dan Laju Pertumbuhan PDRB Lapangan Usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial di Kabupaten Sumbawa Tahun 2019-2023	87
Gambar 2. 62 Kontribusi dan Laju Pertumbuhan PDRB Lapangan Usaha Jasa Lainnya di Kabupaten Sumbawa Tahun 2019-2023	88
Gambar 2. 63 Perkembangan Gini Ratio di Kabupaten Sumbawa dan NTB Tahun 2018-2023	89
Gambar 2. 64 Rasio Ketergantungan (Dependency Ratio) di Kabupaten Sumbawa Tahun 2019-2023	91
Gambar 2. 65 TPAK dan TPT Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Sumbawa Tahun 2023 (%)	93
Gambar 2. 66 Persentase Penduduk usia kerja yang bekerja menurut lapangan usaha dan jenis kelamin Kabupaten Sumbawa Tahun 2023 (%)	94
Gambar 2. 67 Kemantapan Jalan Kabupaten Tahun 2019-2023 Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Sumbawa	101
Gambar 2. 68 Indikator Rumah Layak Huni dan Tidak Layak Huni Tahun 2018-2023	102
Gambar 2. 69 Penanganan Sampah Kab. Sumbawa Tahun 2023 Sumber data : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Sumbawa	103
Gambar 2. 70 Persentase Sumber Air Minum di Kabupaten Sumbawa Tahun 2023	105
Gambar 2. 71 Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Air Cuci/ Masak/ Mandi Sumber Data : Survei Sosial Ekonomi Nasional, Maret 2023	106
Gambar 2. 72 Persentase Rumah Tangga Menurut Penggunaan Fasilitas BAB	107
Gambar 2. 73 Perkembangan IPM Kab. Sumbawa Tahun 2005-2023	153
Gambar 2. 74 Perkembangan UHH Kab. Sumbawa Tahun 2005-2023	154
Gambar 2. 75 Perkembangan HLS Kab. Sumbawa Tahun 2005-2023	155
Gambar 2. 76 Perkembangan RLS Kab. Sumbawa Tahun 2005-2023	156
Gambar 2. 77 Perkembangan PPP Kab. Sumbawa Tahun 2005-2023	157
Gambar 2. 78 Perkembangan Kemiskinan Kab. Sumbawa Tahun 2005-2023	158
Gambar 2. 79 Perkembangan TPT Kab. Sumbawa Tahun 2005-2023	159
Gambar 2. 80 Perkembangan Laju Ekonomi Kab. Sumbawa Tahun 2005-2023	160
Gambar 2. 81 Kontribusi Kategori Lapangan Usaha Terhadap PDRB di Kab. Sumbawa ADH Berlaku Tahun 2023 (%)	161
Gambar 2. 82 Perkembangan Gini Ratio di Kabupaten Sumbawa Tahun 2005-2023	162
Gambar 2. 83 Laju Pertumbuhan PDRB Per Kapita ADH Konstan di Kabupaten Sumbawa Tahun 2005-2023	164
Gambar 2. 84 Proporsi (%) Sebaran Penduduk Perkecamatan Tahun 2025-2045	168
Gambar 2. 85 Kepadatan (jiwa/km persegi penduduk per kecamatan tahun 2025-2045	170
Gambar 2. 86 Piramida Penduduk di Kabupaten Sumbawa tahun 2025	171
Gambar 2. 87 Piramida Penduduk di Kabupaten Sumbawa tahun 2030	172
Gambar 2. 88 Piramida Penduduk di Kabupaten Sumbawa tahun 2035	173
Gambar 2. 89 Piramida Penduduk di Kabupaten Sumbawa tahun 2040	174
Gambar 2. 90 Piramida Penduduk di Kabupaten Sumbawa tahun 2045	174
Gambar 2. 91 Rasio Ketergantungan per kecamatan di tahun 2025	176
Gambar 2. 92 Rasio Ketergantungan per kecamatan di tahun 2030	177
Gambar 2. 93 Rasio Ketergantungan per kecamatan di tahun 2035	178
Gambar 2. 94 Rasio Ketergantungan per kecamatan di tahun 2040	179
Gambar 2. 95 Rasio Ketergantungan per kecamatan di tahun 2045	179

Gambar 5. 1 Tahapan Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Sumbawa	243

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH SUMBAWA
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2025-2045.

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan diartikan sebagai proses perubahan ke arah kondisi yang lebih baik secara terencana. Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional. Pembangunan pada daerah tersebut satu sama lainnya ada dalam suatu keterkaitan dan keterpaduan membentuk dan menghasilkan pembangunan nasional, sehingga keberhasilan pembangunan nasional tergantung dan ditentukan oleh keberhasilan pembangunan daerah.

Sistem perencanaan pembangunan nasional merupakan satu kesatuan mengenai tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan 5 (lima) tujuan pelaksanaan sistem perencanaan pembangunan nasional, yaitu: (1) untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan, (2) menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antar daerah, antar ruang, antar waktu, dan antar fungsi pemerintah, serta antara pusat dan daerah, (3) menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan, (4) mengoptimalkan partisipasi masyarakat, dan (5) menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Pada tahun 2017 terbit Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang berimplikasi pada penyusunan RPJPD Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2045 dan disajikan dalam bentuk singkat untuk memudahkan pemanfaatan informasi bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

Penyusunan dokumen RPJPD Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2045 berpedoman pada SEB Mendagri dan Menteri PPN/ BAPPENAS Nomor 600.1/176/SJ, Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyelarasan RPJPD dengan RPJPN Tahun 2025-2045 dimana dokumen RPJPD Kabupaten Sumbawa mempedomani dokumen RPJP Nasional dan RPJP Provinsi NTB. Penyusunan dokumen RPJPD Kabupaten Sumbawa disusun secara simultan bersamaan dengan dokumen RPJP Nasional dan RPJP Provinsi NTB sehingga baik visi, misi, arah kebijakan, sasaran pokok dan indikator sasaran pokok dapat selaras, konsisten dan terintegrasi.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1665);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

7. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Menteri Bersama/Surat Edaran Bersama Nomor 600.1/176/SJ/2024 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
13. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024 Nomor 9);
14. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2010 Nomor 26);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 2);

1.3. Hubungan Antar Dokumen RPJPD dengan Dokumen Rencana Pembangunan Sektor Lainnya

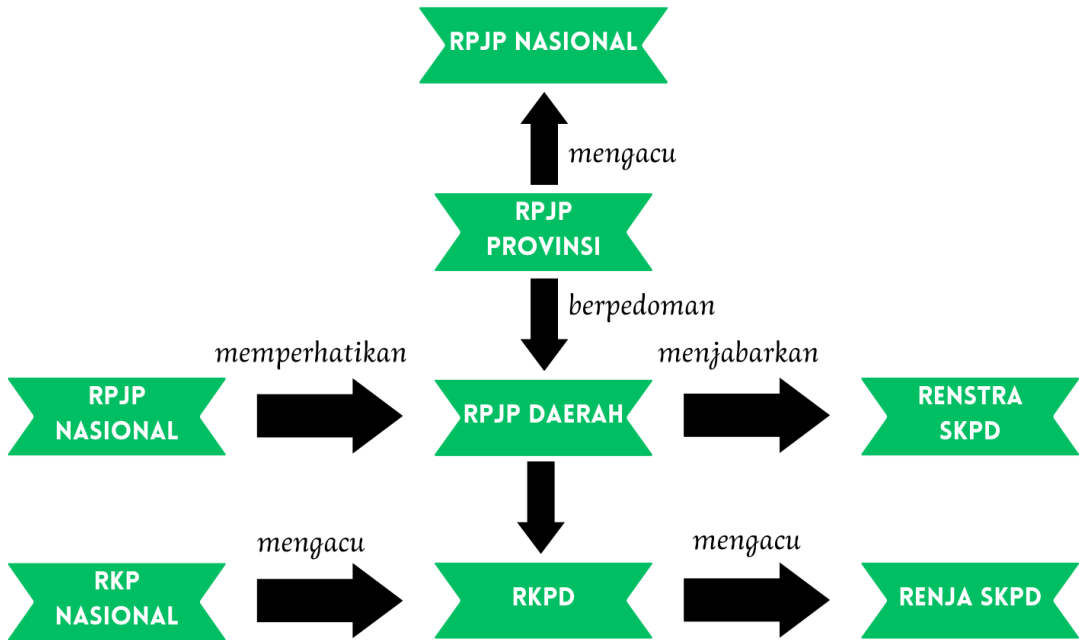
RPJPD merupakan dokumen perencanaan untuk kurun waktu dua puluh tahun yang berisikan kondisi umum, visi dan misi pembangunan daerah dan arah pembangunan jangka panjang. Dalam pelaksanaannya RPJPD dibagi menjadi 4 tahap RPJMD, masing-masing tahap untuk jangka waktu 5 tahun sesuai dengan masa kerja kepala daerah terpilih, memuat visi, misi dan arah kebijakan dari kepala daerah. Di dalam penyusunannya, **dokumen RPJPD harus mengacu kepada RPJP Nasional dan RPJP Provinsi NTB**, mempedomani Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sumbawa serta memperhatikan RPJPD dan RTRW Kabupaten berbatasan. Hal ini dimaksudkan agar RPJPD Kabupaten Sumbawa menjadi dokumen perencanaan yang sinergis dan terpadu, baik dalam aspek kewilayahan maupun aspek sektoral dengan harapan agar dalam implementasinya diperoleh hasil yang tepat dan terarah.

Penelaahan terhadap RPJPN, RPJP Provinsi NTB dan RPJPD berbatasan dilakukan untuk menjamin dan menjaga sinkronisasi kebijakan pembangunan nasional, Provinsi NTB dan kabupaten berbatasan. Penelaahan RTRW Kabupaten Sumbawa bertujuan untuk melihat integrasinya dengan RPJP untuk jangka waktu 20 (dua puluh) dan untuk menjamin agar arah kebijakan pembangunan jangka panjang selaras dan tidak menyimpang dari arah kebijakan RTRW Nasional, RTRW Provinsi NTB dan RTRW Kabupaten Sumbawa. Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Sumbawa juga harus memperhatikan Rencana Struktur Ruang, Rencana Pemanfaatan Ruang dan Indikasi Program Pemanfaatan Ruang.

Penelaahan terhadap dokumen perencanaan tersebut diatas pada dasarnya ditujukan untuk melihat sinergitas setiap kebijakan dalam mendukung peningkatan kualitas sumberdaya manusia serta pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkelanjutan dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional. RPJP Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2045 sendiri harus menjadi pedoman dalam penyusunan setiap tahap RPJM Kabupaten Sumbawa, Renstra PD, RKPD Kabupaten Sumbawa serta Renja PD.

Hubungan antara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dengan dokumen perencanaan lain seperti RPJM, Renstra dan RKPD digambarkan pada diagram berikut :

KETERKAITAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN



Gambar 1.1 Keterkaitan dokumen perencanaan pembangunan

Terbitnya Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) merupakan langkah strategis yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia sebagai antisipasi dan mempercepat pencapaian target dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Sinergisitas upaya pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan Perencanaan Pembangunan Daerah menjadi mutlak dilakukan sehingga tujuan dan sasaran pembangunan yang ingin dicapai bisa terwujud baik antar sektor, antar aktor, maupun antar waktu. Dalam kaitan tersebut, maka pengintegrasian SDGs dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu keharusan dan mutlak dilakukan.

Sementara itu Dalam rangka penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sumbawa tahun 2025-2045 maka harus didahului dengan penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sebagai dokumen wajib yang menjadi masukan. Bappeda menyelenggarakan kegiatan sinkronisasi penyusunan dokumen KLHS dengan dokumen RPJPD, yang diantaranya bertujuan agar isu-isu strategis daerah terutama yang berkaitan dengan lingkungan, dapat terakomodir di dalam RPJPD.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumbawa selaku pelaksana penyusunan KLHS menyampaikan bahwa pelaksanaan penyusunan KLHS berada dalam tahap pengumpulan data, terutama data yang berkaitan langsung dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Kelengkapan data TPB dalam dokumen KLHS ini akan memperkuat analisis sehingga menghasilkan perencanaan yang berbasis data.

1.4. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Mengidentifikasi indikator sesuai dengan prioritas Nasional, Provinsi pada RPJPD 2025-2045, Identifikasi ketersediaan data berdasarkan indikator yang telah disinkronisasi, melakukan analisis dan evaluasi terhadap capaian berdasarkan indikator yang telah ditentukan.

b. Tujuan

RPJPD ini bertujuan untuk Perencanaan Pembangunan Daerah dalam kurun waktu 20 (Dua Puluh) tahunan berdasarkan permasalahan, isu strategis dan arah pembangunan daerah.

1.5. Sistematika Penulisan

Penyajian RPJPD Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2045 terdiri atas 8 (delapan) bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN, Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum materi RPJPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Menjelaskan pengertian ringkas tentang RPJPD, proses penyusunan RPJPD, alasan mengapa RPJPD ini disusun, risiko jika RPJPD tidak tersedia dan pendekatan yang digunakan dalam penyusunan.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Bagian ini menjelaskan dasar hukum perencanaan pembangunan daerah pada umumnya dan RPJPD pada khususnya sesuai peraturan perundangan dan produk hukum daerah terkait.

1.3. Hubungan Antar Dokumen RPJPD dengan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah lainnya

Bagian ini menjelaskan hubungan RPJPD dengan dokumen lain yang relevan beserta penjelasannya. Keterhubungan dengan dokumen lain, seperti: RPJPN, RPJPD provinsi, RTRW nasional, RTRW provinsi dan RTRW kabupaten/kota, KLHS dan SDG's.

1.4. Maksud dan Tujuan

Memberikan uraian ringkas tentang maksud penyusunan dokumen RPJPD dan tujuan penyusunan dokumen RPJPD bagi daerah yang bersangkutan.

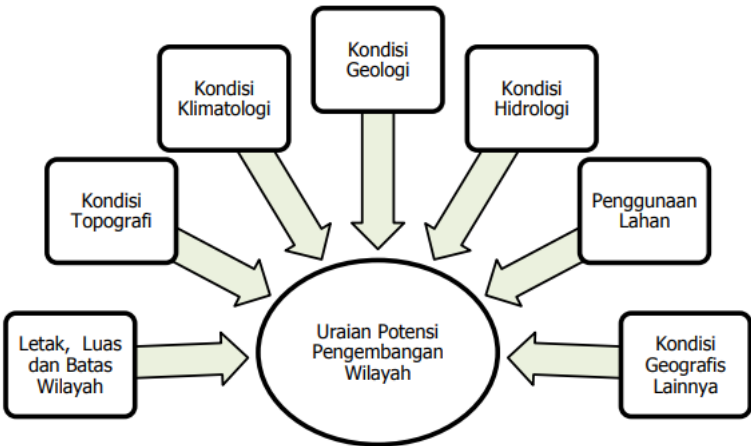
1.5. Sistematika Penulisan

Mengemukakan organisasi penyusunan dokumen RPJPD terkait dengan pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab di dalamnya.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH, Bagian ini sangat penting untuk menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Bagian ini dijabarkan berdasarkan hasil analisis dan kajian gambaran umum kondisi daerah pada tahap perumusan. Tidak seluruh informasi dalam perumusan tentang gambaran umum kondisi daerah ditampilkan dalam penyajian. Hanya informasi yang relevan dan penting saja yang perlu dicantumkan untuk mendapatkan fokus yang baik dalam dokumen. Informasi dianggap relevan dan penting jika menjelaskan gambaran umum kondisi daerah yang selaras dan mendukung permasalahan pembangunan daerah, isu strategis, visi/misi daerah, tujuan, sasaran pokok dan kebutuhan perumusan arah kebijakan.

2.1. Aspek Geografi dan Demografi

Pada bagian ini diawali dengan pengantar analisis. Selanjutnya, pada bagian ini dijelaskan kondisi umum geografis mengenai kondisi geografi daerah, potensi pengembangan wilayah, dan wilayah rawan bencana. Penjelasan dapat dilengkapi dengan tabel, grafik, dan gambar yang mendukung setiap potensi kawasan budaya yang dimiliki daerah. Penjelasan perlu dilengkapi dengan kerangka pemikiran hubungan antara kondisi geografi daerah dengan potensi pengembangan kawasan budidaya, dengan mengisi dan menyajikan diagram sebagai berikut:



Gambar 1.2 Uraian potensi pengembangan wilayah

Selanjutnya, dijelaskan tentang kondisi demografi seperti ukuran, struktur, dan distribusi penduduk serta bagaimana jumlah penduduk berubah setiap waktu akibat kelahiran, kematian, migrasi, serta penuaan. Analisis kependudukan dapat merujuk pada populasi masyarakat secara keseluruhan atau kelompok tertentu yang didasarkan

kriteria seperti pendidikan, kewarganegaraan, agama, atau etnis tertentu. Tabel-tabel atau grafik tertentu yang dianggap relevan dipaparkan pada bab ini.

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Bagian ini diawali dengan pengantar analisis. Selanjutnya, pada bagian ini dijelaskan kondisi umum kesejahteraan masyarakat sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan. Berbagai indikator yang telah diolah pada tahap perumusan, dapat ditampilkan, khususnya indikator yang paling dapat menjelaskan kondisi dan perkembangan kesejahteraan masyarakat daerah bersangkutan. Lebih lanjut dipaparkan tentang fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, fokus kesejahteraan sosial, fokus seni budaya dan olah raga.

2.3. Aspek Pelayanan Umum

Bagian ini diawali dengan pengantar analisis. Selanjutnya, pada bagian ini dijelaskan kondisi umum aspek pelayanan umum sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan. Berbagai indikator yang telah diolah pada tahap perumusan, sesuai Aspek dan Indikator Kinerja menurut bidang urusan penyelenggaraan pemerintah daerah, khususnya indikator yang paling dapat menjelaskan kondisi dan perkembangan aspek pelayanan umum daerah bersangkutan. Lebih lanjut dipaparkan tentang fokus urusan layanan wajib dan fokus urusan layanan pilihan.

2.4. Aspek Daya Saing Daerah

Bagian ini diawali dengan pengantar analisis. Selanjutnya, pada bagian ini dijelaskan kondisi umum aspek daya saing daerah sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan. Berbagai indikator yang telah diolah pada tahap perumusan, sesuai aspek dan indikator kinerja menurut bidang urusan penyelenggaraan pemerintah daerah, khususnya indikator yang paling dapat menjelaskan kondisi dan perkembangan aspek daya saing daerah bersangkutan. Lebih lanjut dipaparkan tentang fokus kemampuan ekonomi daerah, fokus fasilitas wilayah/infrastruktur, fokus iklim berinvestasi, dan fokus sumber daya manusia.

BAB 3 PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH, Bab ini merupakan salah satu bagian terpenting dokumen RPJPD karena menjadi dasar utama perumusan visi dan misi pembangunan jangka panjang daerah. Oleh karena itu, penyajian analisis ini harus dapat menjelaskan butir-butir penting permasalahan dan isu-sisu strategis yang akan dihadapi dalam pembangunan daerah untuk waktu 20 (dua

puluh) tahun mendatang. Penyajian isu-isu strategis meliputi permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis.

3.1. Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan yang disajikan adalah permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang relevan atau pada akhirnya dijadikan dasar dalam perumusan visi dan misi pembangunan jangka panjang daerah. Dengan demikian permasalahan pembangunan daerah disajikan dengan merujuk pada identifikasi permasalahan pembangunan daerah.

Pada bagian atau tahap perumusan isu-isu strategis, permasalahan-permasalahan pembangunan lain yang tidak diprioritaskan atau menjadi agenda utama rencana pembangunan daerah dalam 20 (dua puluh) tahun kedepan tidak perlu disajikan, namun tetap ada dalam kertas kerja (*worksheet*) perumusan.

Perumusan permasalahan pembangunan dapat dijabarkan secara deskriptif dalam bentuk uraian kalimat, bagian demi bagian dengan sistematika berurut sesuai urusan yang terpilih atau sesuai jenis permasalahan tanpa mengedepankan urusannya.

3.2. Isu Strategis

Isu strategis dapat berasal dari permasalahan pembangunan maupun yang berasal dari dunia internasional, kebijakan nasional maupun regional. Sesuai isu-isu strategis yang telah dihasilkan dalam tahap perumusan dituangkan dalam penyajian. Dalam penyajian isu strategis hal terpenting yang diperhatikan dalam isu tersebut dapat memberikan manfaat/pengaruh di masa datang terhadap daerah. Isu-isu strategis yang tidak dijadikan dasar dalam perumusan visi dan misi agar dieliminasi.

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, Penyajian visi dan misi dalam dokumen RPJPD sangat penting karena keadaan atau cita-cita yang diinginkan dari hasil pembangunan daerah selama 20 (dua puluh) tahun mendatang akan tergambar.

4.1. Visi

Sesuai perumusan visi yang telah dihasilkan dalam tahap perumusan, pernyataan visi dituangkan dalam penyajian. Hal terpenting dalam penyajian visi adalah dibuatnya uraian yang jelas tentang apa dan bagaimana visi yang ingin diwujudkan tersebut pada akhir periode perencanaan pembangunan jangka panjang daerah.

4.2. Misi

Sebagai rumusan tentang bagaimana visi diwujudkan dan di sisi lain sebagai komitmen terhadap keseluruhan *stakeholders* utama pelaku pembangunan daerah, misi harus disajikan dengan teknis penulisan yang mampu menjelaskan hubungan yang erat dengan visi dan bahwa misi cukup lengkap untuk menaungi berbagai jenis agenda pembangunan yang dibutuhkan untuk mencapai sasaran pokok. Misi di atas dituangkan dalam bentuk paparan secara sistematis dan penjelasan yang memadai.

BAB V ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK DAERAH, Bagian ini menjelaskan arah kebijakan pembangunan jangka panjang untuk menjelaskan keterhubungan antara sasaran dengan sasaran pokok dan bagaimana pentahapan pembangunan dilakukan pada tiap lima tahunan selama 4 (empat) periode.

Suatu sasaran pokok harus dapat menjelaskan keterhubungannya dengan visi/misi dan menunjukkan indikator kinerja beserta target masing-masing.

5.1. Arah Kebijakan Daerah

Pada tahap ini disajikan pentahapan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah untuk menentukan tahapan dan prioritas pembangunan selama 20 (dua puluh) tahun guna mencapai sasaran pokok tahapan lima tahunan RPJPD.

- 1. Arah kebijakan pembangunan lima tahunan ke I
Diuraikan tentang arah kebijakan pembangunan daerah yang menjadi prioritas pada tahap/periode pertama RPJPD
- 2. Arah kebijakan pembangunan lima tahunan ke II
Diuraikan tentang arah kebijakan pembangunan daerah yang menjadi prioritas pada tahap/periode kedua RPJPD
- 3. Arah kebijakan pembangunan lima tahunan ke III
Diuraikan tentang arah kebijakan pembangunan daerah yang menjadi prioritas pada tahap/periode ketiga RPJPD
- 4. Arah kebijakan pembangunan lima tahunan ke IV
Diuraikan tentang arah kebijakan pembangunan daerah yang menjadi prioritas pada tahap/periode keempat RPJPD

5.2. Sasaran Pokok

Suatu sasaran pokok pembangunan jangka panjang pada dasarnya adalah kuantifikasi visi dan misi pada akhir periode tahun ke-20 (dua puluh). Sasaran menjelaskan target dari capaian pembangunan jangka panjang pada akhir tahun ke-20. Penuangan sasaran dapat dilakukan dengan urutan sebagai berikut.

- 1. Sasaran Pokok 1.

- 2. Sasaran Pokok 2.
- 3. Sasaran Pokok 3.
- 4. Sasaran Pokok 4., dst.

BAB VI PENUTUP

BAB II.

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Aspek Geografi dan Demografi

Aspek geografi ditujukan untuk menggambarkan eksisting fisik, potensi pengembangan wilayah, sementara aspek demografi dengan memuat jumlah, struktur dan distribusi penduduk.

2.1.1. Aspek Geografi

Kabupaten Sumbawa merupakan salah satu dari sepuluh kabupaten yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Bentang alam Kabupaten Sumbawa terdiri dari wilayah pegunungan dan pesisir yang tersebar dari bagian barat ke timur. Secara geografis Kabupaten Sumbawa berada pada posisi 116° 42' – 118° 22' Bujur Timur dan 8° 8' – 9° 7' Lintang Selatan, dengan luas wilayah 11.556,44 Km² (daratan seluas 6.643,98 Km² dan lautan seluas 4.912,46 Km²), dengan posisi geostrategis berada pada jalur lalu lintas Lombok – Bima, dan secara regional berada pada jalur lintas perdagangan Surabaya-Waingapu.

Kabupaten Sumbawa merupakan wilayah yang paling luas diantara sepuluh Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan persentase luas sebesar 33,01% dengan batas administrasi sebagai berikut.

- sebelah Utara berbatasan dengan Laut Flores,
- sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Dompu,
- sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Hindia,
- sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Sumbawa Barat dan Selat Alas.



Gambar 2. 1 Peta Wilayah Kabupaten Sumbawa

Kabupaten Sumbawa yang beribukota di Sumbawa Besar secara administratif terdiri dari 24 (dua puluh empat) kecamatan, 157 (seratus lima puluh tujuh) desa dan 8 (delapan) kelurahan dengan karekteristik dan luas wilayah sebagai berikut.

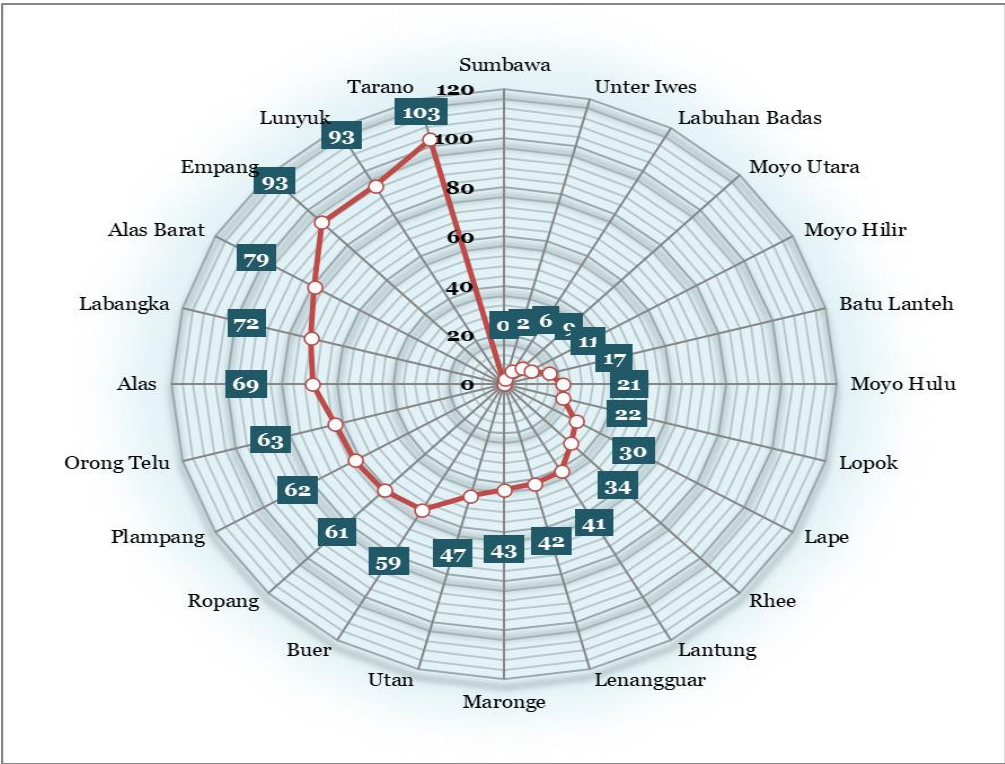
Tabel 2. 1 Pembagian dan Luas Wilayah Administrasi

No	Kecamatan	Luas (Km ²)	Karakteristik Wilayah	Jumlah Desa	Jumlah Dusun	Jumlah Kelurahan	Jumlah Lingkungan
1.	Lunyuk	513,74	Pegunungan	7	32	-	-
2.	Orong Telu	465,97	Pegunungan	4	17	-	-
3.	Alas	123,04	Pesisir	8	29	-	-
4.	Alas Barat	168,88	Pesisir	8	31	-	-
5.	Buer	137,01	Pesisir	6	17	-	-
6.	Utan	155,42	Pesisir	9	35	-	-
7.	Rhee	230,82	Pesisir	4	15	-	-
8.	Batulanteh	391,4	Pegunungan	6	27	-	-
9.	Sumbawa	44,83	Pesisir	-	-	8	28
10.	Lab. Badas	435,89	Pesisir	7	31	-	-
11.	Unter Iwes	82,38	Dataran	8	31	-	-
12.	Moyohilir	186,79	Pesisir	10	45	-	-
13.	Moyo Utara	90,8	Pesisir	6	24	-	-
14.	Moyohulu	311,96	Pegunungan	12	47	-	-
15.	Ropang	444,48	Pegunungan	5	15	-	-
16.	Lenangguar	504,32	Pegunungan	4	18	-	-
17.	Lantung	167,45	Pegunungan	4	12	-	-
18.	Lape	204,43	Pesisir	4	22	-	-
19.	Lopok	155,59	Pegunungan	7	35	-	-
20.	Plampang	418,69	Pesisir	11	38	-	-
21.	Labangka	243,08	Pesisir	5	21	-	-
22.	Maronge	274,75	Pesisir	4	19	-	-
23.	Empang	558,55	Pesisir	10	39	-	-
24.	Tarano	333,71	Pesisir	8	33	-	-
	Jumlah	6.643,98		157	635	8	28

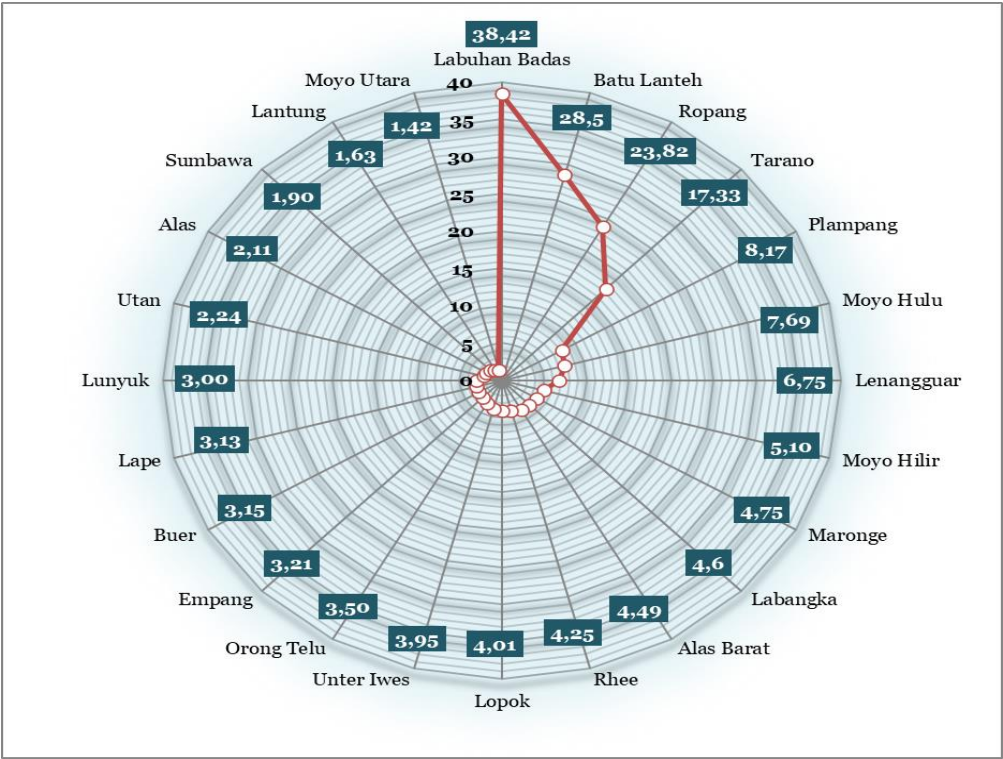
Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumbawa 2022 dan Bahan Kongres Nasional Perumahan dan Permukiman II, Master file desa NTB

Jarak rata-rata jangkauan ibu kota kecamatan terhadap ibu kota kabupaten adalah 45,0 km. Kota kecamatan terjauh adalah 103,0 km yaitu Kecamatan Tarano, sedangkan jarak ibu kota desa dengan ibu kota kecamatan secara rata-rata adalah 7,8 km dengan sebaran rata-rata jarak terjauh dari ibu kota desa terhadap ibu kota kecamatan sebesar 38,42 km yakni desa-desa di Kecamatan Labuhan Badas, diikuti oleh desa-desa di Kecamatan Batulanteh dan desa-desa di Kecamatan Ropang masing-masing sebesar 28,50 km dan 23,82 km.

Jarak ibu kota kecamatan-kecamatan di Sumbawa terhadap Ibu Kota Kabupaten Sumbawa yang berada di Kecamatan Sumbawa sangat bervariasi, berkisar dari 2 km sampai dengan 103 km. Kecamatan yang jangkauannya dekat dengan Ibu Kota yaitu Kecamatan Unter Iwes (2 km) dan Labuan Badas (6 km). Tiga kecamatan terjauh dengan jarak lebih dari 90 km yaitu Kecamatan Tarano (103km), Kecamatan Empang (93 km) dan Kecamatan Lunyuk (93km), dengan waktu tempuh terlama adalah ke Kecamatan Lunyuk. Kondisi tersebut membutuhkan dukungan infrastruktur jalan yang baik terutama daerah-daerah yang cukup jauh. Dengan perbaikan infrastruktur jalan maka jarak tempuh akan semakin singkat.

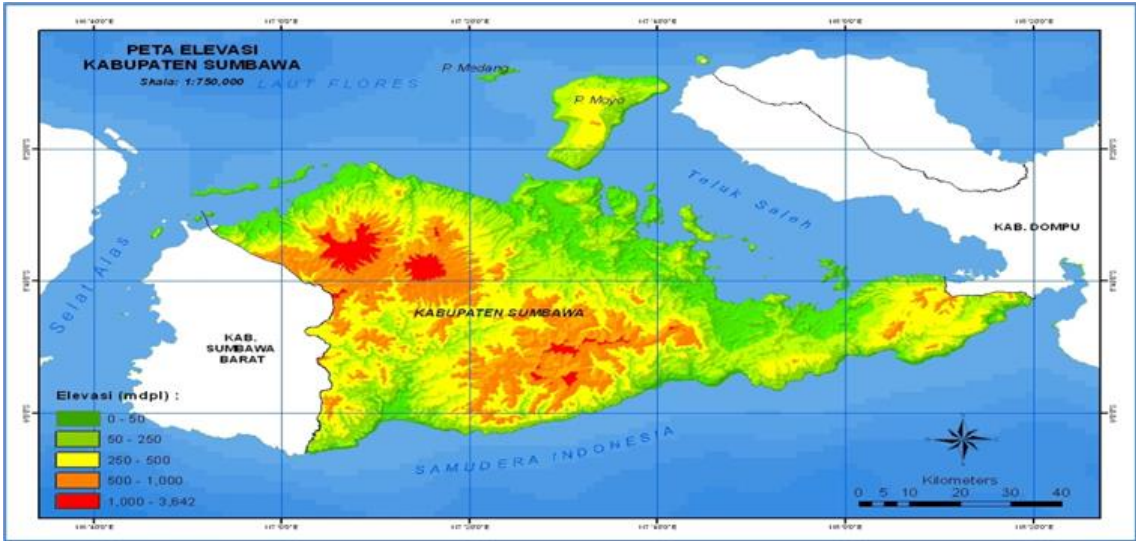


Gambar 2. 2 Jarak (km) Ibu Kota Kecamatan Ke Ibukota Kabupaten Sumbawa



Gambar 2. 3 Rata-Rata Jarak (km) Ibu Kota Desa ke Ibukota Kecamatan

Bila dilihat dari segi topografinya, permukaan tanah di wilayah Kabupaten Sumbawa tidak rata atau cenderung berbukit-bukit dengan ketinggian berkisar antara 0 hingga 1.730 meter diatas permukaan air laut, dimana sebagian besar diantaranya yaitu seluas 355.108 ha atau 41,81 persen berada pada ketinggian 100 hingga 500 meter. Sementara itu ketinggian untuk kota-kota kecamatan di Kabupaten Sumbawa berkisar antara 10 sampai 650 meter diatas permukaan air laut. Ibu kota Kecamatan Batulanteh yaitu Semongkat merupakan ibu kota kecamatan yang tertinggi sedangkan Sumbawa Besar merupakan ibu kota kecamatan yang terendah. Kecamatan Ropang adalah wilayah yang mempunyai ketinggian >1.000 meter di atas permukaan laut.



Gambar 2. 4 Peta Elevasi Kabupaten Sumbawa

Dari tingkat kemiringan lahan Kabupaten Sumbawa dibagi menjadi 4 kelas, yaitu 0 – 2% (datar), 2 – 15% (landai), 15 – 40% (bergelombang/ berbukit), dan >40% (curam sampai sangat curam) dengan rincian pada tabel berikut.

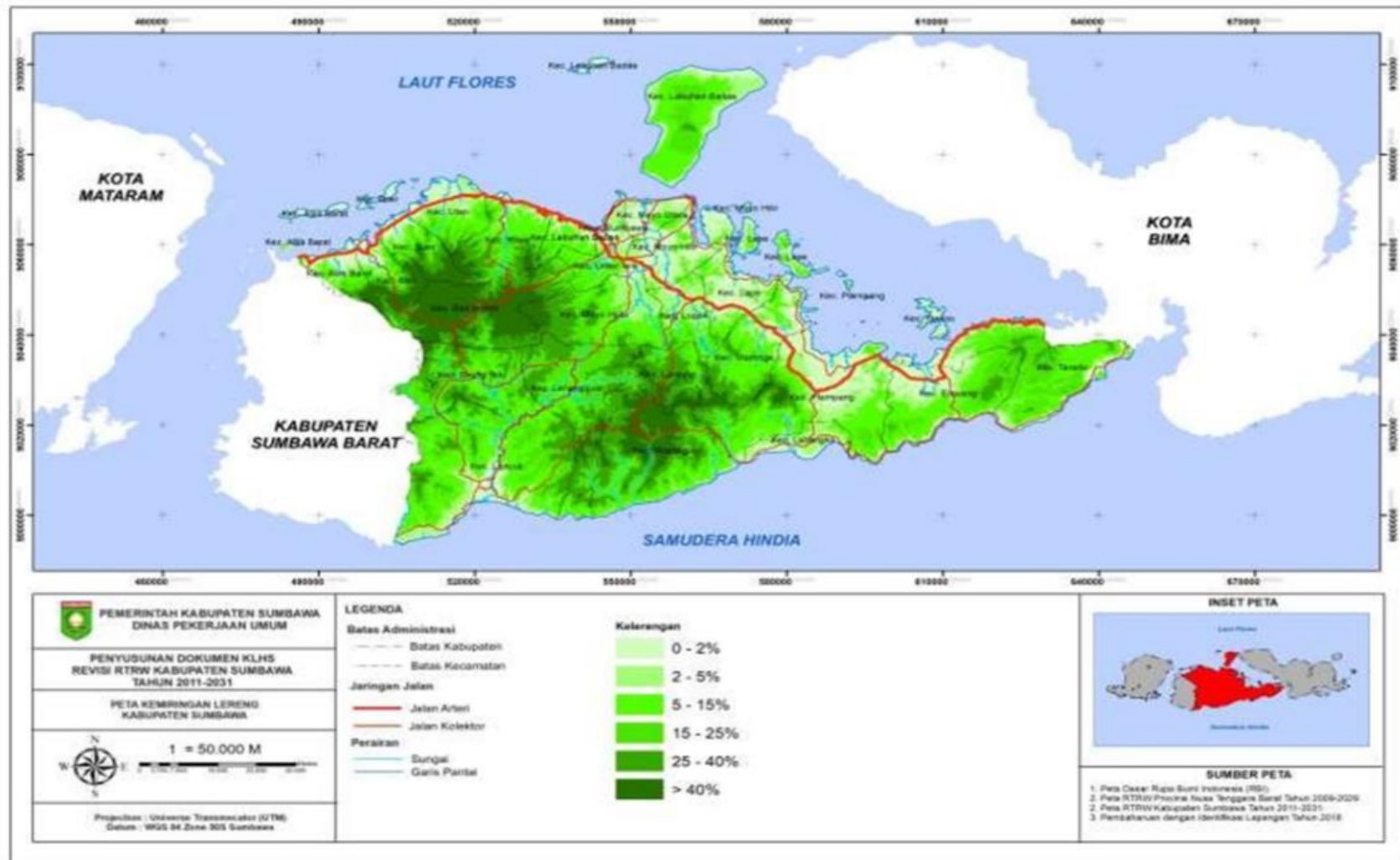
Tabel 2. 2 Klasifikasi Kemiringan Lahan Kabupaten Sumbawa

No	Kecamatan	Kemiringan Lahan					Jumlah
		0 – 2	2 – 8	8 – 15	15 – 40	>40	
1.	Lunyuk	12.020,15	12.467,16	17.712,94	22.479,72	7.623,33	72.303,30
2.	Orong Telu	2.555,82	4.389,62	7.367,89	13.278,17	5.202,61	32.794,11
3.	Alas	2.900,15	2.180,90	3.133,94	5.056,04	2.827,43	16.098,46
4.	Alas Barat	5.537,00	1.009,31	1.791,14	2.450,34	632,52	11.420,31
5.	Buer	3.686,20	842,43	1.693,91	4.567,46	3.578,38	14.368,38
6.	Utan	6.691,56	2.010,97	2.286,12	4.141,72	1.699,06	16.829,43
7.	Rhee	3.268,77	2.911,11	3.605,74	7.869,30	5.119,21	22.774,13
8.	Batulan-teh	1.763,47	4.578,85	8.856,31	16.849,13	8.324,15	40.371,91
9.	Sumba-wa	4.237,50	1.290,38	320,06	63,86	0,28	5.912,08
10.	Lab. Badas	15.703,20	12.181,84	7.439,14	4.512,63	795,62	40.632,43
11.	Unter Iwes	3.302,07	2.161,33	1.670,79	1.948,67	421,97	9.504,83
12.	Moyohilir	12.007,24	4.215,56	2.623,68	1.657,96	215,93	20.720,37
13.	Moyo Utara	5.654,64	1.522,93	825,11	495,27	51,63	8.549,58
14.	Moyo hulu	9.032,14	5.808,83	5.896,37	7.227,26	2.463,84	30.428,44
15.	Ropang	2.699,79	5.682,59	12.284,17	23.981,27	9.405,76	54.053,58
16.	Lenang-guar	4.167,06	7.798,31	11.242,71	12.847,15	3.450,20	39.505,43
17.	Lantung	1.264,96	2.251,80	3.874,27	6.335,81	1.858,89	15.585,73

No	Kecamatan	Kemiringan Lahan					Jumlah
		0 – 2	2 – 8	8 – 15	15 – 40	>40	
18.	Lape	10.103,12	3.637,43	3.888,73	4.047,48	815,39	22.492,15
19.	Lopok	6.794,49	1.899,36	2.061,40	2.865,78	947,17	14.568,20
20.	Plam-pang	23.613,04	9.594,92	9.134,55	9.278,98	2.897,64	54.519,13
21	Labangka	6.774,18	1.845,51	612,19	213,05	33,9	9.478,83
22.	Maronge	6.747,76	4.287,53	6.896,18	11.358,84	3.692,75	32.983,06
23.	Empang	12.380,06	7.189,62	7.130,01	7.146,27	2.377,09	36.223,05
24.	Tarano	10.348,35	7.969,62	9.792,88	11.776,10	3.302,43	43.189,38
Luas lahan (ha)		173.252,72	109.727,91	132.140,23	182.448,26	67.737,18	665.306,30
Persentase (%)		26,04	16,49	19,86	27,42	10,18	100,00

Sumber: RTRW Kabupaten Sumbawa

Gambaran topografi ini mempengaruhi upaya penyediaan infrastruktur dan fasilitas publik, karena wilayah yang dominasi kemiringan lahannya >40% seperti Batulanteh, Lantung, Ropang, Lenangguar dan Orong Telu, masih menghadapi kondisi rendahnya aksesibilitas masyarakat di wilayah tersebut dibandingkan dengan wilayah lainnya di Kabupaten Sumbawa. Kondisi topografi Kabupaten Sumbawa digambarkan pada peta berikut ini.



Gambar 2. 5 Peta Kemiringan Lereng Kabupaten Sumbawa

Secara hidrologis Kabupaten Sumbawa berada dalam Wilayah Sungai (WS) Sumbawa yang merupakan Wilayah Sungai Strategis Nasional. WS Sumbawa meliputi 4 Kabupaten dan 1 Kota yaitu Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Dompu, Kabupaten Bima dan Kota Bima. Jumlah Daerah Aliran Sungai (DAS) di WS Sumbawa adalah 555 DAS sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 4 Tahun 2015 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai. DAS terbesar di Kabupaten Sumbawa adalah DAS Beh dan DAS Moyo.

Tabel 2. 3 Sub Satuan Wilayah Sungai di Kabupaten Sumbawa

No.	Kecamatan	Sub Satuan Wilayah Sungai (SSWS)	Luas (Km²)	Ketersediaan Air (juta m³)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Lape/Lopok	Bako	754	453
2.	Lunyuk	Beh	2.255	2.189
3.	Moyo Hulu	Moyo Hulu	956	290
4.	Plampang/Empang	Ampang	1.059	399
5.	Labuan badas	Pulau Moyo	454	214
6.	Alas/Alas Barat	Rea	1.049	415
7.	Utan/Rhee	Rhee	1.335	437

Penggunaan Lahan

Pemanfaatan lahan dapat menggambarkan pola tata ruang suatu wilayah yang menjadi salah satu aspek dalam perencanaan pembangunan. Lahan menurut jenis pemanfaatannya dapat memberikan gambaran bagi aktivitas penduduk dan perekonomiannya. Penggunaan lahan di Kabupaten Sumbawa mengikuti penyebaran dan peningkatan jumlah penduduk, penggunaan lahan perlu dikendalikan dan disesuaikan dengan rencana tata ruang wilayah untuk menghindari terjadinya perubahan fungsi lahan yang ekstrem dan tanpa mengikuti kaidah yang berlaku, karena akan mengganggu keseimbangan ekosistem. Adapun luasan lahan menurut penggunaannya di Kabupaten Sumbawa pada tahun 2023, seperti tabel berikut.

Tabel 2. 4 Luas Lahan Menurut Penggunaannya Tahun 2023 (Ha)

No .	Penggunaan Lahan	Realisasi Dalam Satu Tahun					Jumlah
		Ditanami Padi			Tidak ditanami padi		
		Satu kali	Dua Kali	Tiga Kali	Ditanami tanaman lainnya	Tidak ditanami apapun	
1	LAHAN PERTANIAN						
1.1	Lahan Sawah						
	a. Irigasi	20.600,67	18.876,35	3.085,74	172,05	-	42.734,81
	b. Tadah Hujan	12.374,23	-	-	1.020,72	-	13.394,95
	c. Rawa pasang surut	-	-	-	-	-	-
	d. Rawa lebak	-	-	-	-	-	-
	Jumlah Lahan Sawah	32.974,90	18.876,35	3.085,74	1.192,77	-	56.129,76
1.2	Lahan Pertanian Bukan Sawah						
	a. Tegal / Kebun						64.200,68
	b. Ladang / Huma						14.897,00
	c. Perkebunan						22.416,95
	d. Hutan Rakyat						84.916,69
	e. Padang Pengembalaan / Padang Rumput						3.369,00
	f. Hutan Negara						277.024,00
	g. Sementara Tidak Diusahakan						16.218,16
	h. Lainnya (tambak, kolam, empang, dll)						25.611,11
	Jumlah Lahan Pertanian Bukan Sawah						508.653,59
2.	Lahan Bukan Pertanian (Jalan pemukiman, perkantoran, sungai dll)						99.614,65
3.	TOTAL = Jumlah Lahan Sawah + Jumlah Lahan Pertanian Bukan Sawah + Jumlah Lahan Bukan Pertanian						664.398,00
4.	LUAS WILAYAH KABUPATEN/KOTA						664.398,00

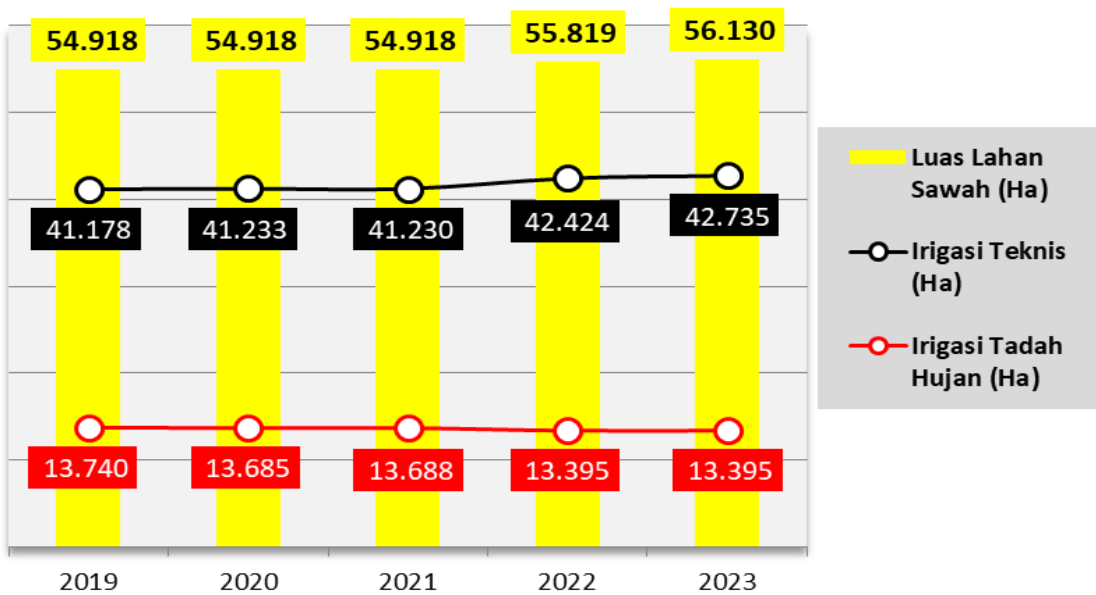
Luasan penggunaan lahan di Kabupaten Sumbawa pada tahun 2019 mengalami perubahan dengan adanya Keputusan Menteri Agraria dan tata Kelola/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 686/SK-PG.03.03/XII/2019 Tentang Penetapan Luas Lahan Baku Sawah Nasional Tahun 2019, sehingga luasan lahan sawah mengalami penyesuaian dengan tahun sebelumnya. Adapun kategori penggunaan, meliputi: 1). lahan sawah, terdiri dari: lahan irigasi teknis, lahan tadah hujan, rawa pasang surut dan dan rawa lebak; 2). lahan bukan sawah, terdiri dari : tegalan/kebun, ladang/huma, perkebunan, ditanami pohon/hutan rakyat, padang

pengembalaan/padang rumput, Hutan Negara, sementara tidak diusahakan, dan lainnya (tambak, kolam, empang, hutan negara dll); 3). lahan bukan pertanian, terdiri dari: jalan pemukiman, perkantoran, sungai dll, sebagaimana penggunaan lahan dari tahun 2019-2023 sebagai berikut.

Tabel 2. 5 Penggunaan Lahan Tahun 2019-2023 (Ha)

Penggunaan Lahan	2019		2020		2021		2022		2023	
	Luas	%	Luas	%	Luas	%	Luas	%	Luas	%
Lahan Sawah (Ha)	54.918	8,27	54.918	8,27	54.918	8,27	55.819	8,40	56.130	8,45
Lahan Bukan Sawah (Ha)	509.975	76,76	509.929	76,75	509.862	76,74	508.970	76,61	508.654	76,56
Lahan Bukan Pertanian (Ha)	99.505	14,98	99.551	14,98	99.618	14,99	99.609	14,99	99.615	14,99
Luas Total (Ha)	664.398	100	664.398	100	664.398	100	664.398	100	664.398	100

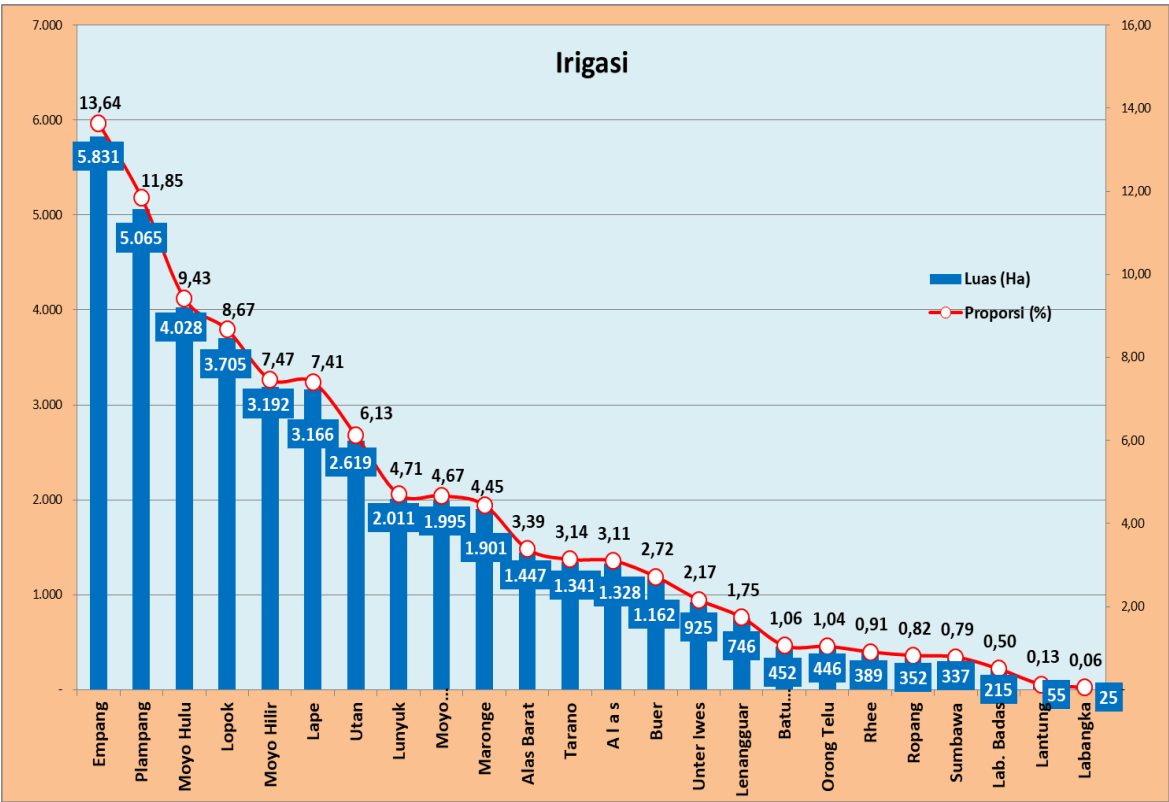
Lahan di Kabupaten Sumbawa dalam penggunaannya pada tahun 2023 masih didominasi oleh lahan pertanian bukan sawah dengan proporsi sebesar 76,56%, diikuti lahan bukan pertanian sebesar 14,99% dan sisanya 8,45% merupakan lahan sawah. Adapun luas lahan sawah dalam 5 (lima) tahun terakhir tergambar sebagai berikut.



Gambar 2. 6 Luas Lahan Sawah (Ha) Berdasarkan Jenis Irigasi dan Tadah Hujan

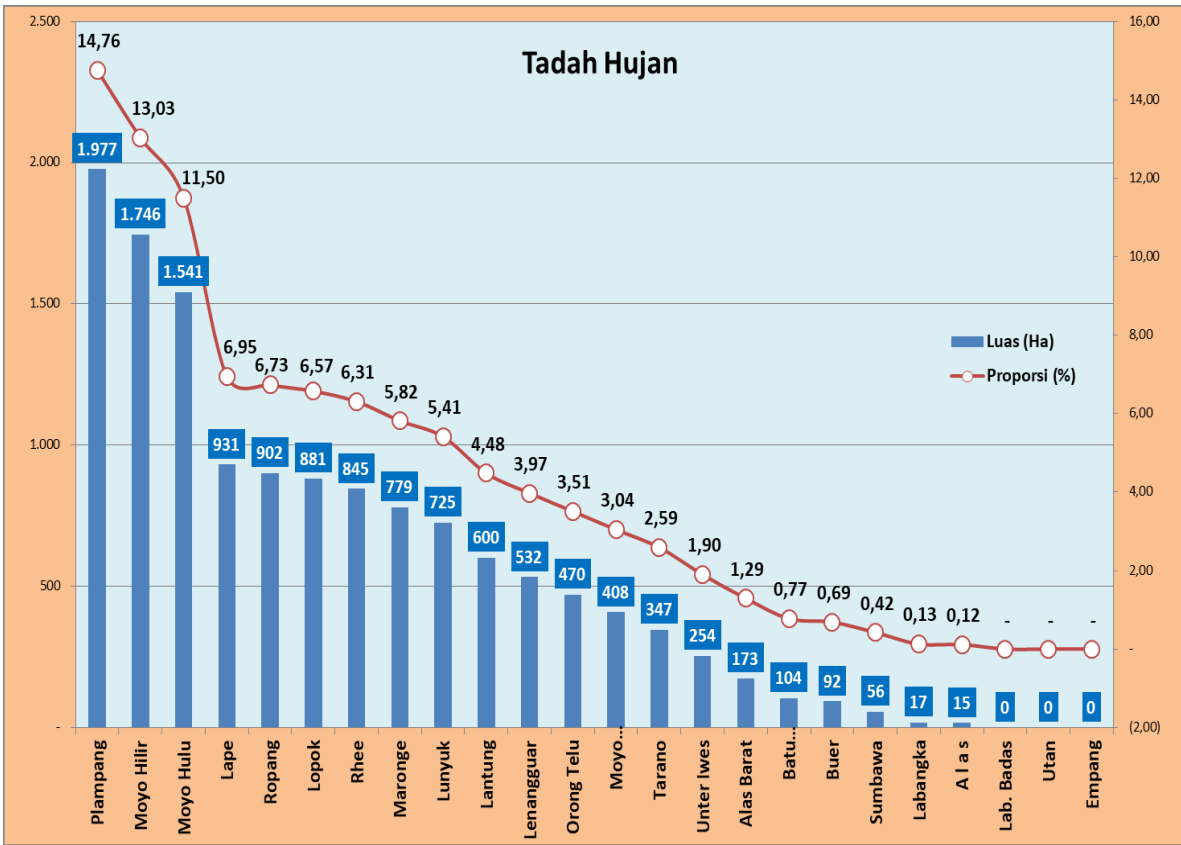
Luas lahan sawah berdasarkan jenisnya terdiri dari:

Lahan sawah irigasi seluas 42.735 Ha dengan luasan terbesar terdapat di Kecamatan Empang seluas 5.831 Ha dengan proporsi sebesar 13,64% dari total luas lahan sawah irigasi, diikuti oleh Kecamatan Plampang sebesar 11,85% dan Kecamatan Moyohulu, Lopok, Moyohilir dan Lape dengan proporsi masing-masing dari proporsi 7,41% - 9,43%, sementara kecamatan lainnya pemanfaatannya pada kisaran dari 0,06% - 6,13%, sebagaimana tergambar sebagai berikut.



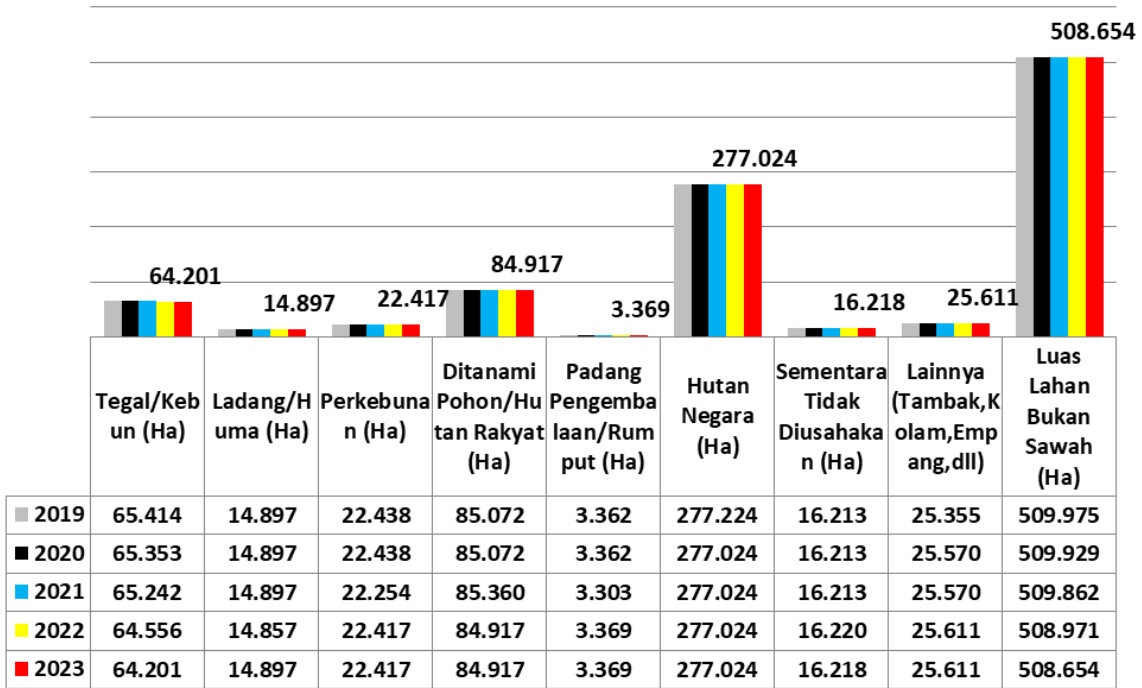
Gambar 2. 7 Luas Lahan (Ha) dan Proporsi (%) Lahan sawah irigasi di Kabupaten Sumbawa Tahun 2023

Lahan Sawah Tadah Hujan seluas 13.395 Ha, dengan luasan terbesar terdapat di Kecamatan Plampang seluas 1.977 Ha dengan proporsi sebesar 14,76% dari total luas sawah tadah hujan, diikuti oleh Kecamatan Moyo Hilir sebesar 13,03% dan Kecamatan Moyo Hulu sebesar 11,50%, sementara kecamatan lainnya pada kisaran 0,12%-6,95%. Adapun Kecamatan Labuhan Badas, Utan dan Empang tidak dimanfaatkan lahan tadah hujan, sebagaimana tergambar sebagai berikut.



Gambar 2. 8 Luas Lahan (Ha) dan Proporsi (%) Lahan Sawah Tadah Hujan di Kabupaten Sumbawa Tahun 2023

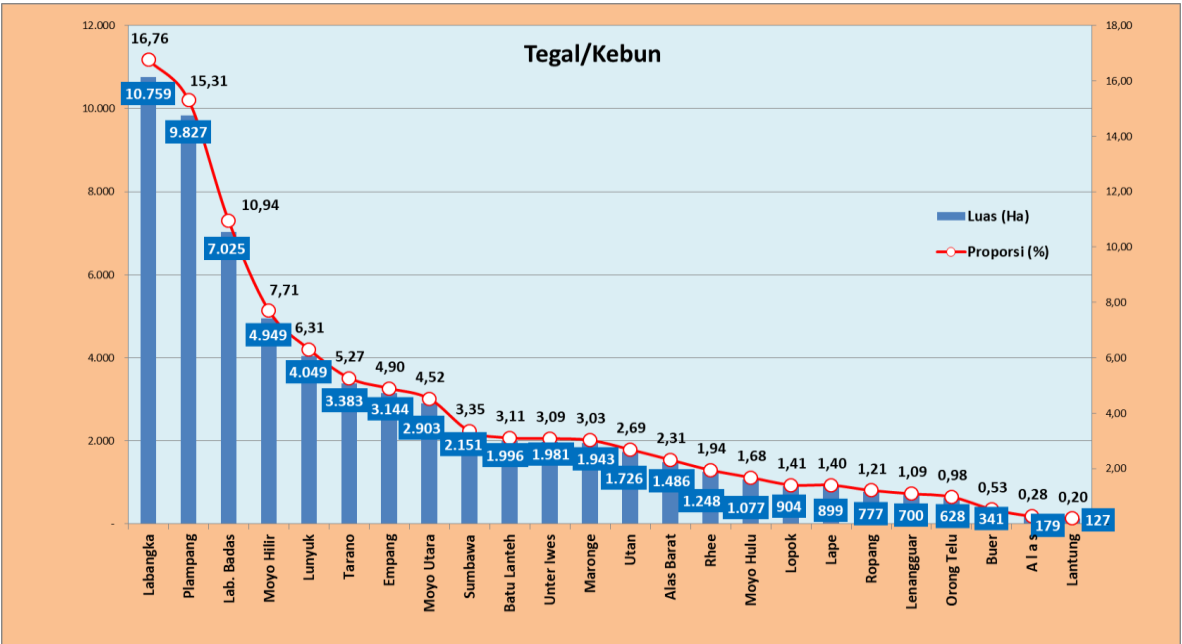
Luas lahan pertanian bukan sawah di Kabupaten Sumbawa pada tahun 2023 mengalami penurunan seluas 317 Ha (-0,06%) dibandingkan dengan luas lahan pertanian bukan sawah pada tahun 2022, sebagaimana pemanfaatannya tergambar dalam 5 (lima) tahun terakhir sebagai berikut.



Gambar 2. 9 Luas Lahan Pertanian Bukan Sawah (Ha) di Kabupaten Sumbawa Tahun 2019-2023

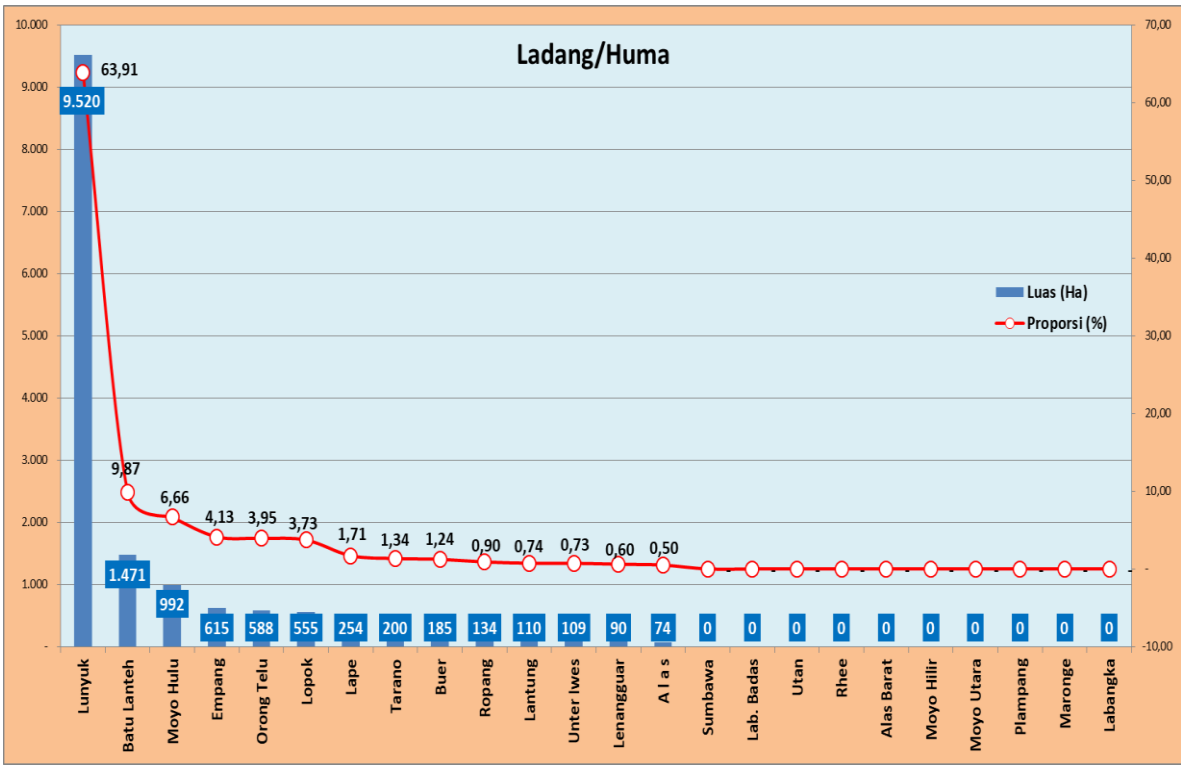
Lahan Pertanian Bukan Sawah, berdasarkan jenisnya terdiri dari:

Tegal/kebun seluas 64.201 Ha, dengan luasan terbesar terdapat di Kecamatan Labangka seluas 10.759 Ha dengan proporsi sebesar 16,76% dari total luas tegal/kebun, diikuti oleh Kecamatan Plampang sebesar 15,31% dan Kecamatan Labuhan Badas sebesar 10,94%, sebagaimana tergambar sebagai berikut.



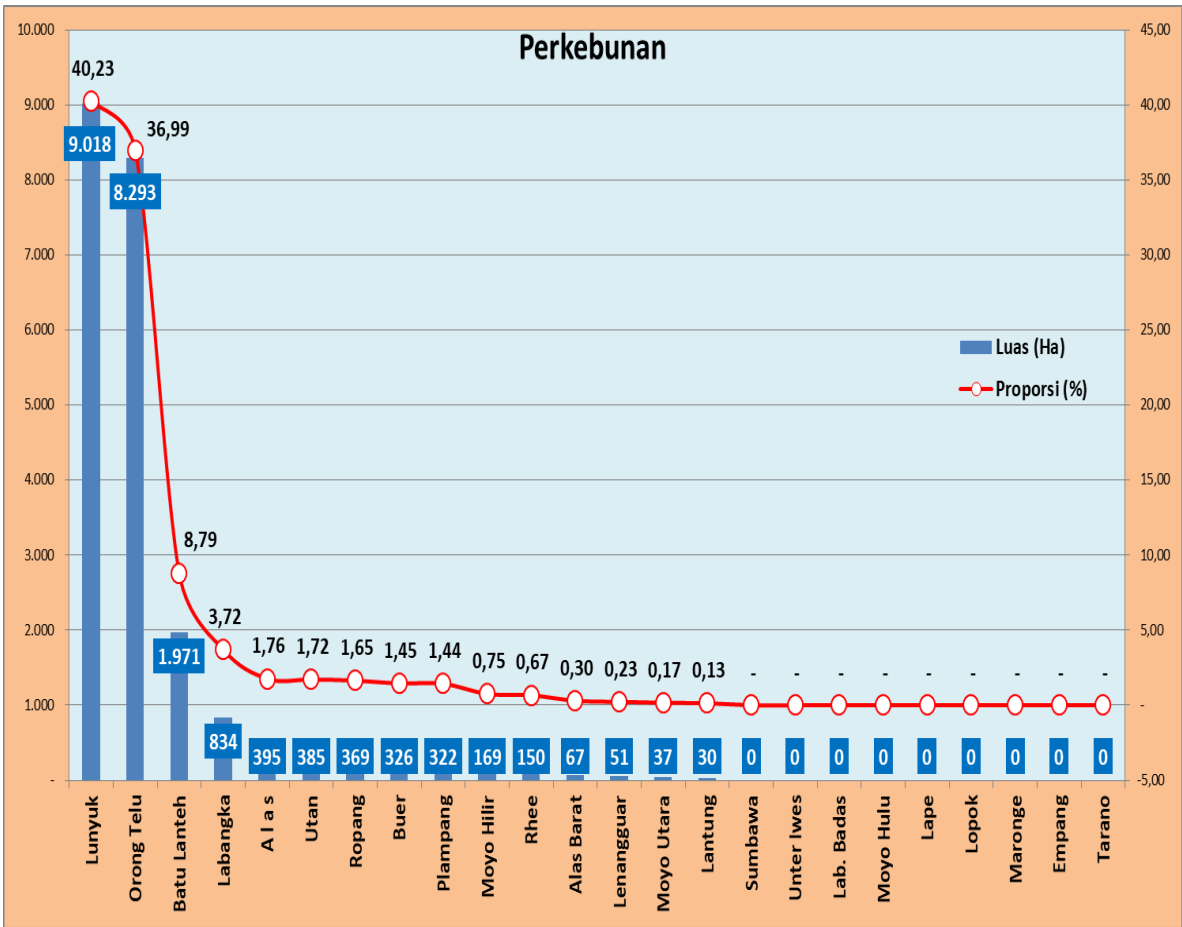
Gambar 2. 10 Luas Lahan (Ha) dan Proporsi (%) Lahan Tegal/Kebun di Kabupaten Sumbawa Tahun 2023

Ladang/huma seluas 14.897 Ha, dengan luasan terbesar terdapat di Kecamatan Lunyuk seluas 9.520 Ha dengan proporsinya sebesar 63,91% dari total luas ladang/huma, diikuti Kecamatan Batu Lanteh sebesar 9,87% dan Kecamatan Moyo Hulu sebesar 6,66%, dan terdapat 10 Kecamatan yang tidak melakukan Peladangan/Huma di tahun 2023, sebagaimana tergambar sebagai berikut.



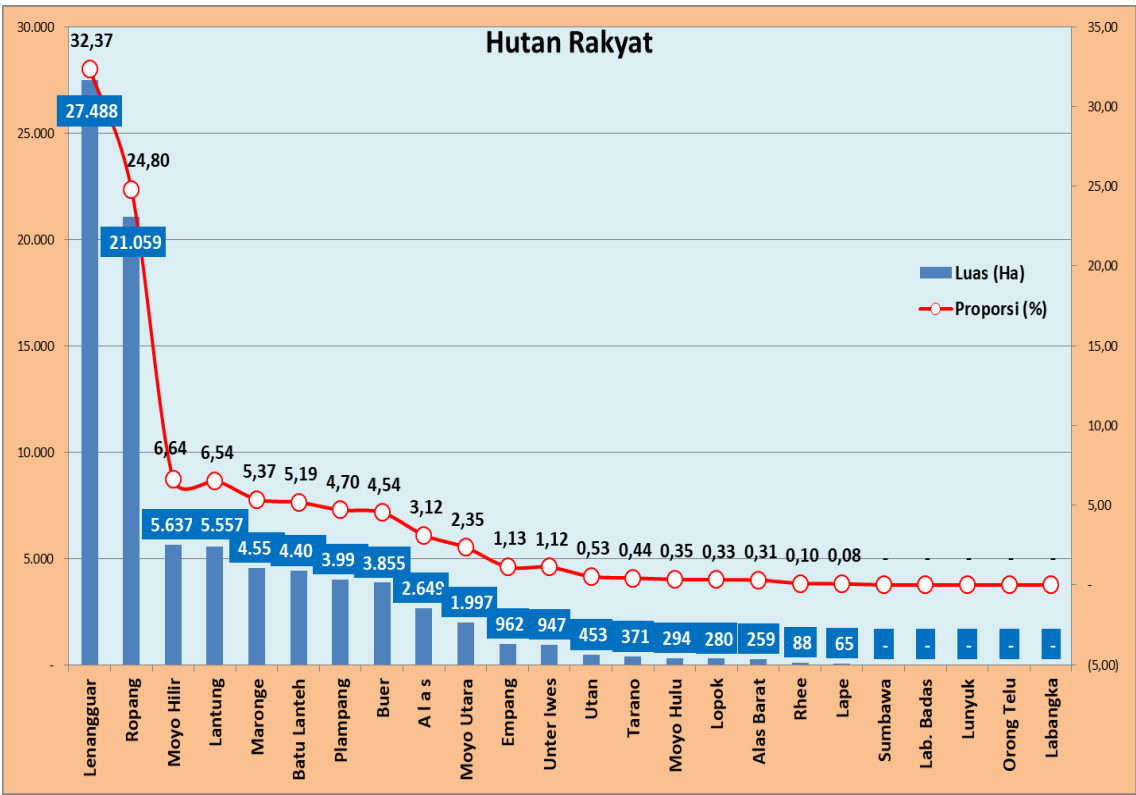
Gambar 2. 11 Luas Lahan (Ha) dan Proporsi (%) Lahan Ladang/Huma Tahun 2023

Perkebunan 22.417 Ha, dengan luasan terbesar terdapat di Kecamatan Lunyuk seluas 9.018 Ha dengan proporsinya sebesar 40,23% dari total luas perkebunan, diikuti oleh Kecamatan Orong Telu sebesar 36,99% dan Kecamatan Batu Lanteh sebesar 8,79%, sementara kecamatan lainnya proporsinya pada kisaran antara 0,13% - 3,72%. Beberapa kecamatan di Kabupaten Sumbawa tidak memiliki lahan perkebunan yaitu Kecamatan Sumbawa, Unter Iwes, Labuhan Badas, dll sebagaimana tergambar sebagai berikut.



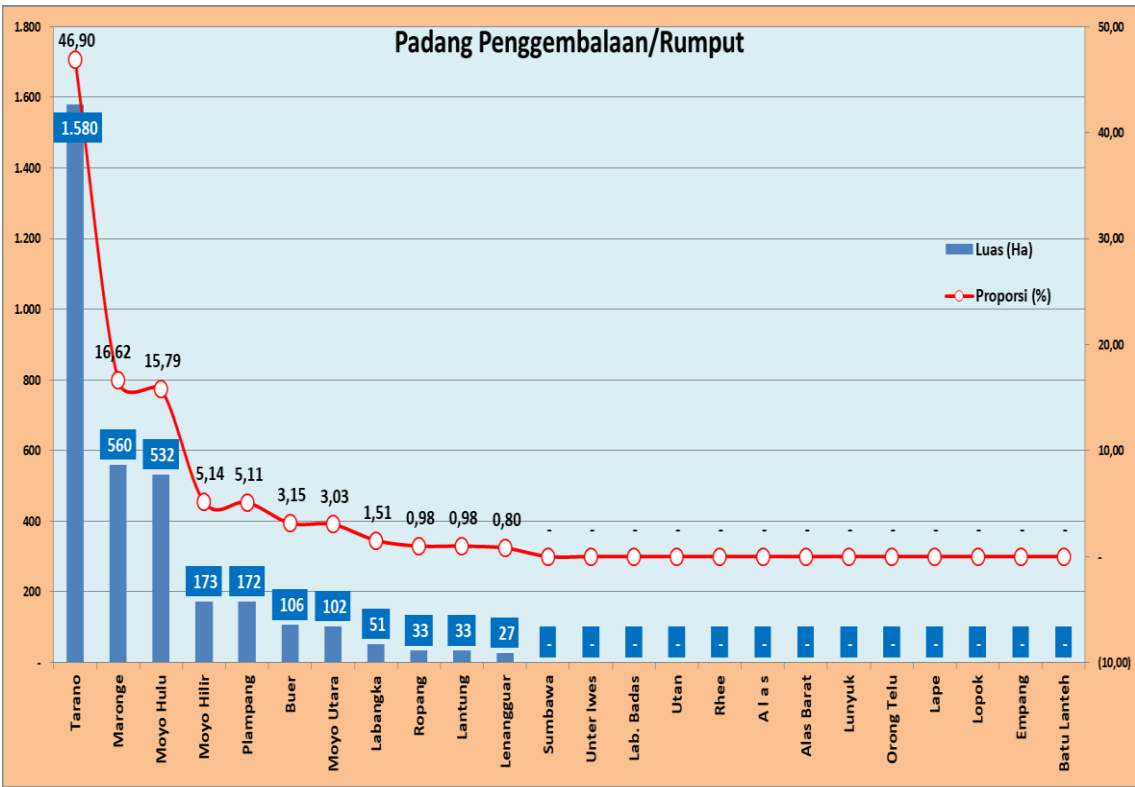
Gambar 2. 12 Luas Lahan (Ha) dan Proporsi (%) Lahan Perkebunan di Kabupaten Sumbawa Tahun 2023

Ditanami Pohon/Hutan Rakyat seluas 84.917 Ha, dengan luasan terbesar terdapat di Kecamatan Lenangguar seluas 27.488 Ha dengan proporsinya sebesar 32,37% dari total hutan rakyat, diikuti oleh Kecamatan Ropang sebesar 24,80% dan Kecamatan Moyo Hilir sebesar 6,64%, sementara proporsi lahan hutan rakyat dari kecamatan lainnya berkisar antara 0,08% - 6,64%. Beberapa kecamatan di Kabupaten Sumbawa tidak memiliki lahan hutan rakyat, yaitu Kecamatan Sumbawa, Orong Telu, Labuhan Badas, Lunyuk dan Labangka sebagaimana tergambar sebagai berikut.



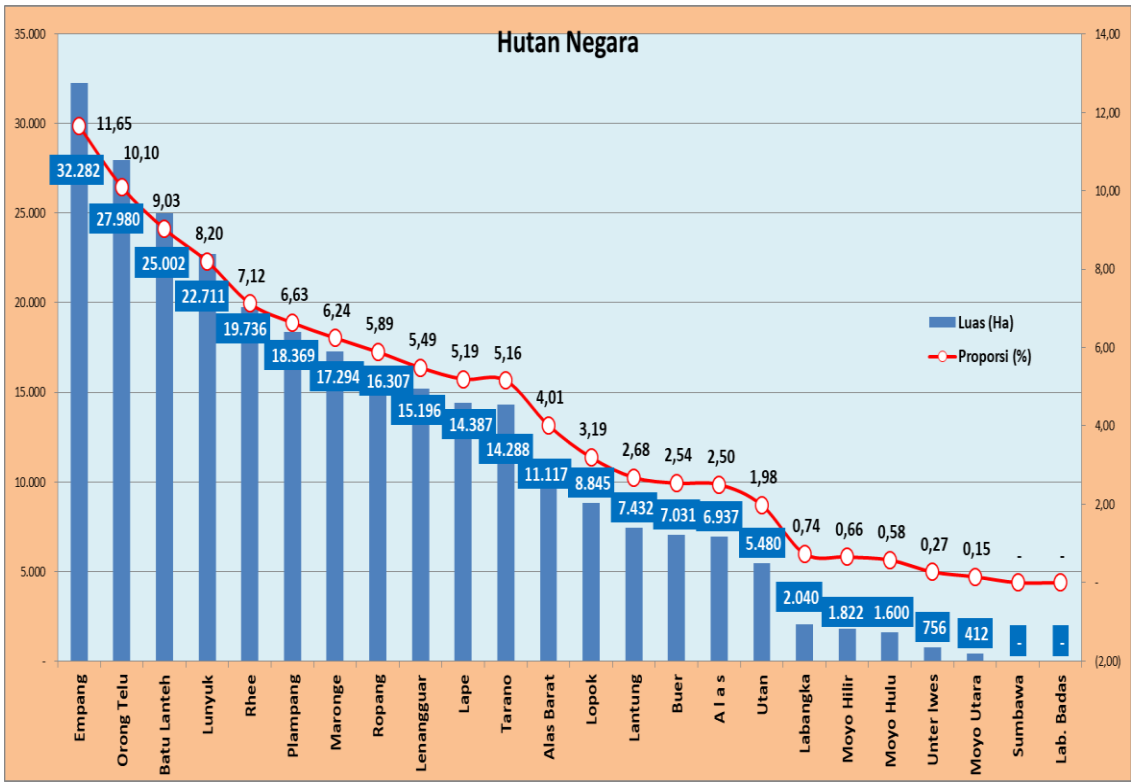
Gambar 2. 13 Luas Lahan (Ha) dan Proporsi (%) Lahan Hutan Rakyat di Tahun 2023

Padang Pengembalaan/padang rumput seluas 3.369 Ha, dengan luasan terbesar terdapat di Kecamatan Tarano seluas 1.580 Ha dengan proporsinya sebesar 46,90% dari total luas padang pengembalaan/ padang rumput, diikuti Kecamatan Maronge sebesar 16,62% dan Kecamatan Moyo Hulu sebesar 15,79%, sementara 8 (delapan) kecamatan lainnya proporsinya pada kisaran 0,80% - 5,14% dan 13 kecamatan lainnya tidak terdapat padang pengembalaan/padang rumput, sebagaimana tergambar sebagai berikut.



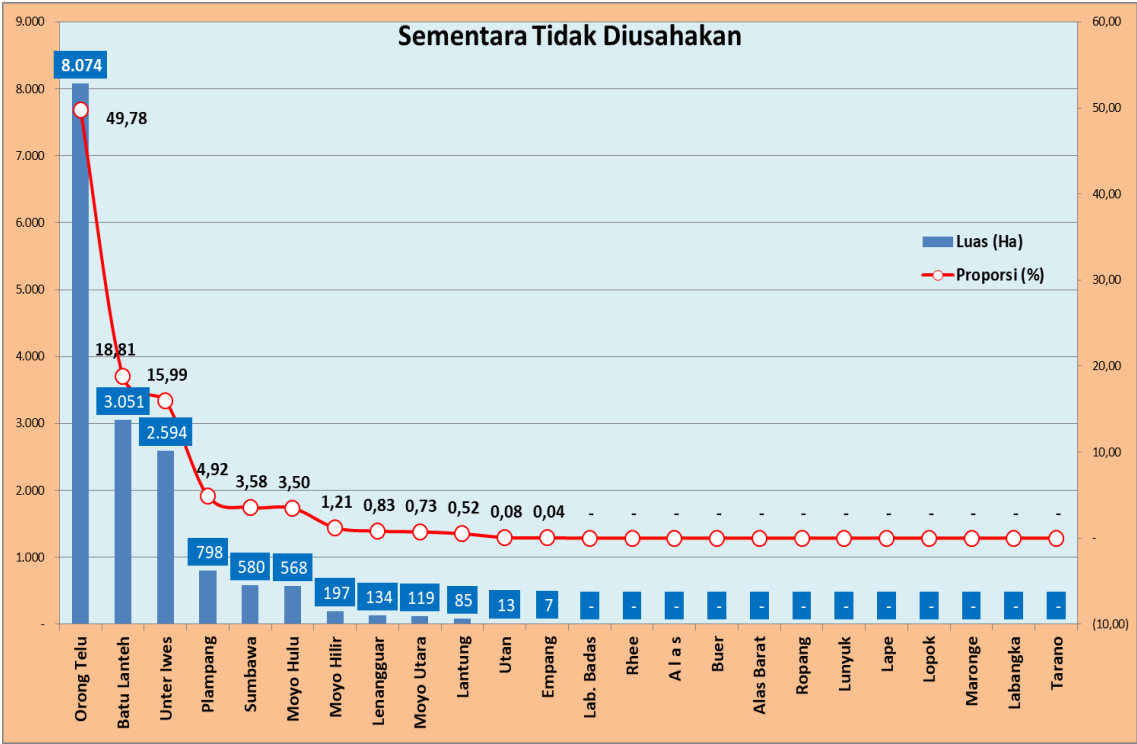
Gambar 2. 14 Luas Lahan (Ha) dan Proporsi (%) Lahan Pengembalaan/ Padang Rumput di Kabupaten Sumbawa Tahun 2023

Hutan Negara seluas 277.024 Ha, dengan luasan terbesar terdapat di Kecamatan Empang seluas 32.282 Ha dengan proporsinya sebesar 11,65% dari total luas hutan negara, diikuti oleh Kecamatan Orong Telu sebesar 10,10% dan Kecamatan Batu Lanteh sebesar 9,03%, sementara proporsi lahan hutan negara di kecamatan lainnya berkisar antara 0,15% - 8,20%. Kecamatan Sumbawa dan Labuhan Badas adalah kecamatan yang tidak memiliki lahan hutan negara, sebagaimana tergambar sebagai berikut.



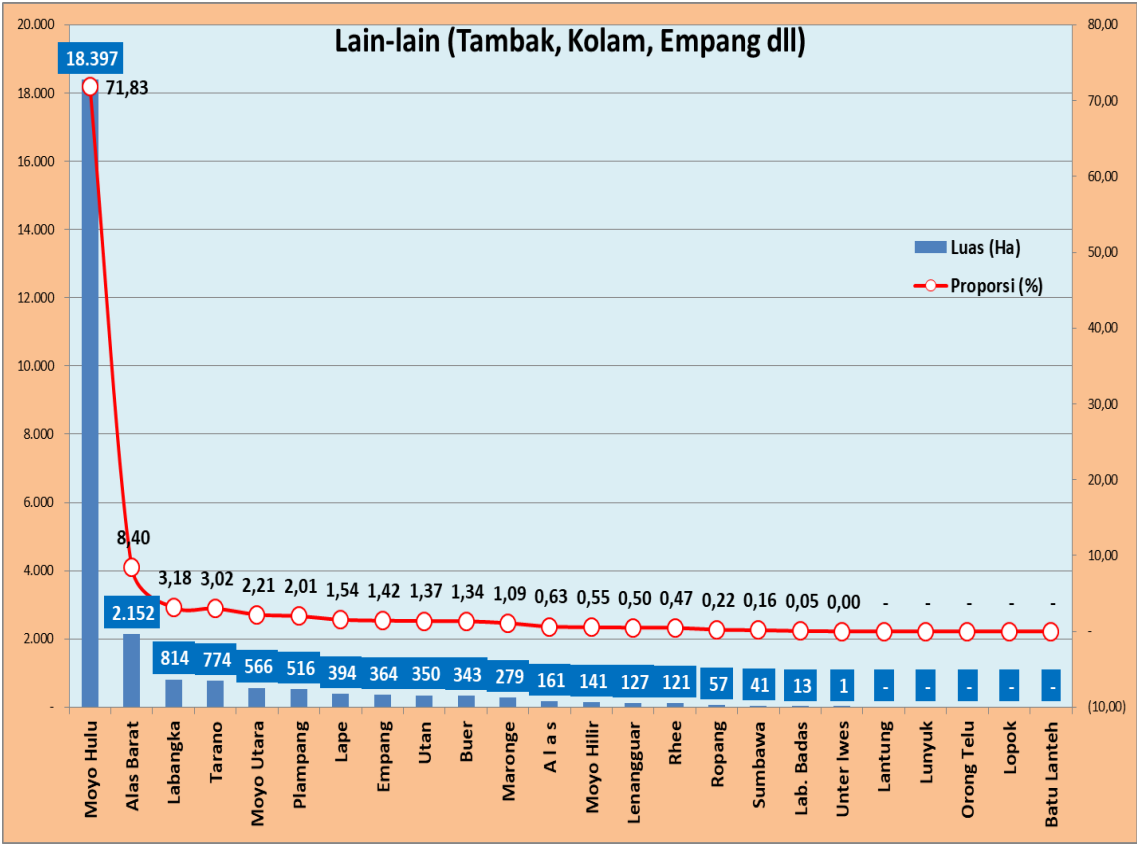
Gambar 2. 15 Luas Lahan (Ha) dan Proporsi (%) Hutan Negara di Kabupaten Sumbawa Tahun 2023

Lahan yang sementara tidak diusahakan seluas 16.218 Ha, dengan luasan terbesar terdapat di Kecamatan Orong Telu seluas 8.074 Ha dengan proporsi seluas 49,78% dari total luas lahan sementara tidak diusahakan, diikuti oleh Kecamatan Batu Lanteh sebesar 18,81% dan Kecamatan Unter Iwes sebesar 15,98%. Proporsi lahan yang sementara tidak diusahakan di kecamatan lain berkisar antara 0,04% - 4,92%. Terdapat 12 kecamatan di Kabupaten Sumbawa yang tidak memiliki lahan sementara yang tidak diusahakan, sebagaimana tergambar sebagai berikut.



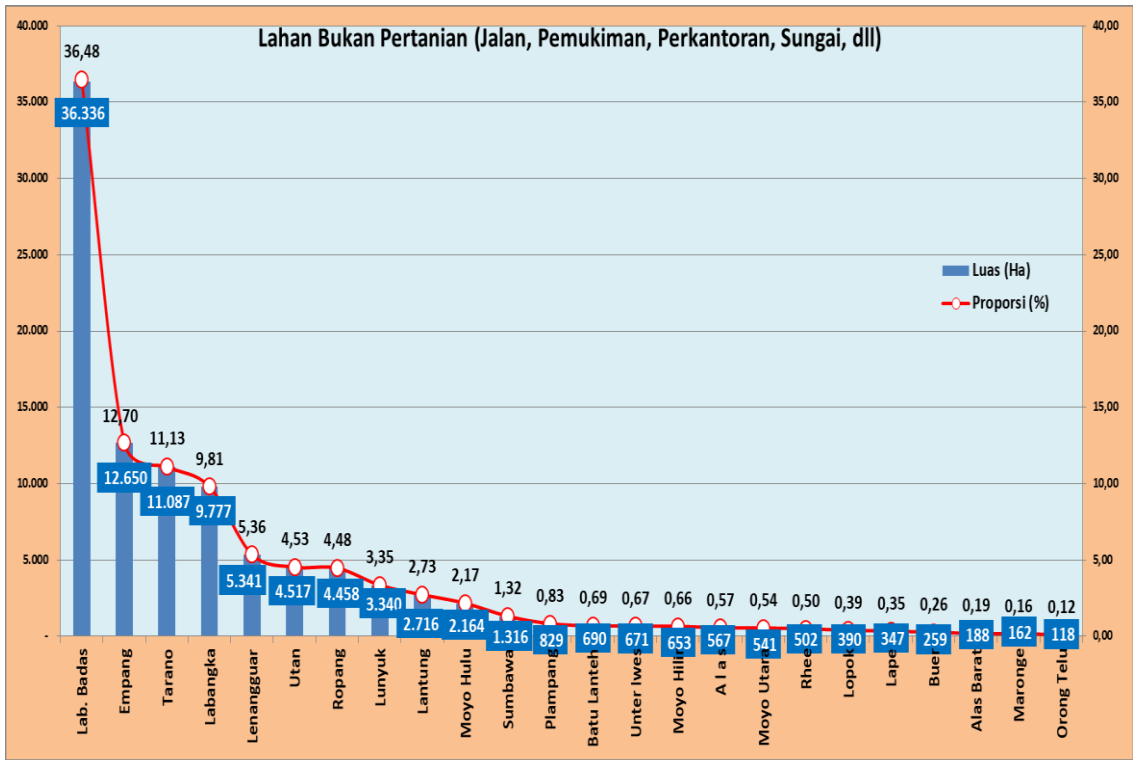
Gambar 2. 16 Luas Lahan (Ha) dan Proporsi (%) Lahan Sementara Tidak Diusahakan di Kabupaten Sumbawa Tahun 2023

Lahan lainnya (tambak, kolam, empang, dll) seluas 25.611 Ha, dan luasan terbesar terdapat di Kecamatan Moyo Hulu seluas 18.397 Ha dengan proporsinya sebesar 71,83% dari total luas lahan lainnya, diikuti Kecamatan Alas Barat sebesar 8,40% dan Kecamatan Labangka sebesar 3,18%. Proporsi lahan lainnya di kecamatan lain berkisar antara 0,05% - 3,18%. Terdapat 5 kecamatan di Kabupaten Sumbawa yang tidak memiliki untuk penggunaan lainnya yaitu Kecamatan Lantung, Lunyuk, Orong Telu, Batu Lanteh, dan Lopok sebagaimana tergambar sebagai berikut.



Gambar 2. 17 Luas Lahan (Ha) dan Proporsi (%) Lahan Lain-lain (Tambak, Kolam, Empang dll) di Kabupaten Sumbawa Tahun 2023

Luas lahan bukan pertanian seperti jalan, permukiman, perkantoran dan sungai di Kabupaten Sumbawa pada tahun 2023 seluas 99.615 Ha. Luasan terbesar lahan bukan pertanian terdapat di Kecamatan Labuhan Badas seluas 36.336 Ha dengan proporsi sebesar 36,48% dari total luas lahan bukan pertanian, diikuti Kecamatan Empang sebesar 12,70% dan Kecamatan Tarano sebesar 11,13%, sebagaimana tergambar sebagai berikut.



Gambar 2. 18 Luas Lahan (Ha) dan Proporsi (%) Lahan Bukan Pertanian Tahun 2023

Kawasan Rawan Bencana

Kawasan rawan bencana di Kabupaten Sumbawa yaitu kawasan bencana banjir, kawasan rawan bencana longsor, kawasan rawan bencana tsunami dan kawasan rawan bencana gempa bumi, meliputi : i. Kawasan rawan bencana banjir meliputi Kecamatan Sumbawa, Kecamatan Moyo Hilir, Kecamatan Moyo Utara Kecamatan Lunyuk, Kecamatan Rhee, Kecamatan Alas, Kecamatan Buer, Kecamatan Labuhan Badas, Kecamatan Unter Iwes, Kecamatan Plampang, Kecamatan Ropang, Kecamatan Lape, Kecamatan Lopok, dan Kecamatan Empang ii. Kawasan rawan bencana longsor meliputi Kecamatan Batulanteh, Kecamatan Orong Telu, Kecamatan Ropang, Kecamatan Lenangguar, Kecamatan Lantung, Kecamatan Alas, Kecamatan Lunyuk, Kecamatan Labangka, dan Kecamatan Empang. iii. Kawasan rawan bencana tsunami yang berlokasi di hampir sepanjang pantai selatan Sumbawa dan pantai utara Sumbawa.

2.1.2. Aspek Demografi

Penduduk adalah salah satu elemen paling fundamental dalam kehidupan suatu negara, daerah atau wilayah. Demografi penduduk adalah studi tentang populasi manusia, termasuk berbagai aspek seperti jumlah penduduk, komposisi usia, jenis kelamin, etnisitas, distribusi geografis, pertumbuhan, migrasi, dan berbagai faktor lain yang memengaruhi struktur populasi.

Demografi penduduk adalah alat penting bagi pemerintah, peneliti, dan pembuat kebijakan untuk memahami dan merencanakan masa depan suatu masyarakat. Melalui analisis demografi, kita dapat mengidentifikasi masalah-masalah yang mungkin timbul, mengantisipasi kebutuhan masyarakat, dan merancang kebijakan yang relevan dan efektif.

Dengan demikian, demografi penduduk adalah lebih dari sekadar statistik angka. Ia menggambarkan kisah hidup manusia dalam masyarakat, membantu kita memahami bagaimana masyarakat berubah seiring waktu, dan menjadi dasar untuk pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.

Penyebaran dan Tingkat Kepadatan Penduduk

Ketika kita memeriksa demografi penduduk suatu wilayah, kita dapat memahami banyak hal tentang masyarakat di sana. Salah satu elemen penting adalah jumlah penduduk. Berapa banyak orang yang tinggal di wilayah tersebut adalah informasi kunci dalam perencanaan pembangunan, alokasi sumber daya, dan penentuan kebijakan publik.

Berdasarkan perhitungan Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumbawa, jumlah penduduk Kabupaten Sumbawa dalam rentang waktu 5 tahun terakhir (2019-2023) mengalami peningkatan sebesar 71.816 jiwa atau tumbuh 15,69%, yakni dari 457.671 jiwa pada tahun 2019 menjadi 529.487 jiwa pada tahun 2023.

Tabel 2. 6 Perkembangan Populasi Penduduk dan Sex Ratio Kabupaten Sumbawa Tahun 2019-2023

Tahun	Penduduk (jiwa)/Proporsi (%)			Pertumbuhan (%)			Sex Ratio
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	
2019	233.508	224.163	457.671	0,87	0,83	0,85	104,17
	51,02%	48,98%	100%				
2020	253.570	254.458	508.028	8,59	13,51	11,00	99,65
	49,91%	50,09%	100%				
2021	256.835	258.376	515.211	1,29	1,54	1,41	99,40
	49,85%	50,15%	100%				
2022	260.058	262.299	522.357	1,25	1,52	1,39	99,15
	49,78%	50,22%	100%				
2023	263.272	266.215	529.487	1,24	1,49	1,36	98,89
	49,72%	50,28%	100%				

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumbawa

Hingga tahun 2023, keseimbangan jenis kelamin menjadi lebih merata, dengan 263.272 laki-laki (49,72%) dan 266.215 perempuan (50,28%). Rasio jenis kelamin yang mencapai 98,89 menandakan bahwa populasi perempuan hanya sedikit lebih banyak dibanding populasi laki-laki.

Rasio jenis kelamin yang seimbang ini biasanya dianggap sebagai indikator kesejahteraan sosial. Ini berarti bahwa ada jumlah pria dan wanita yang relatif setara dalam populasi. Ketika rasio jenis kelamin berada dalam kisaran yang wajar, hal ini dapat mencerminkan stabilitas sosial dan ketahanan populasi.

Kondisi ini dapat dijadikan sebagai dasar dalam pemenuhan berbagai ragam aspek pelayanan, dengan perkembangan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan dalam 5 tahun terakhir sebagaimana pada Tabel 2.6 dan rasio jenis kelamin di setiap kecamatannya seperti pada Tabel 2.7 sebagai berikut.

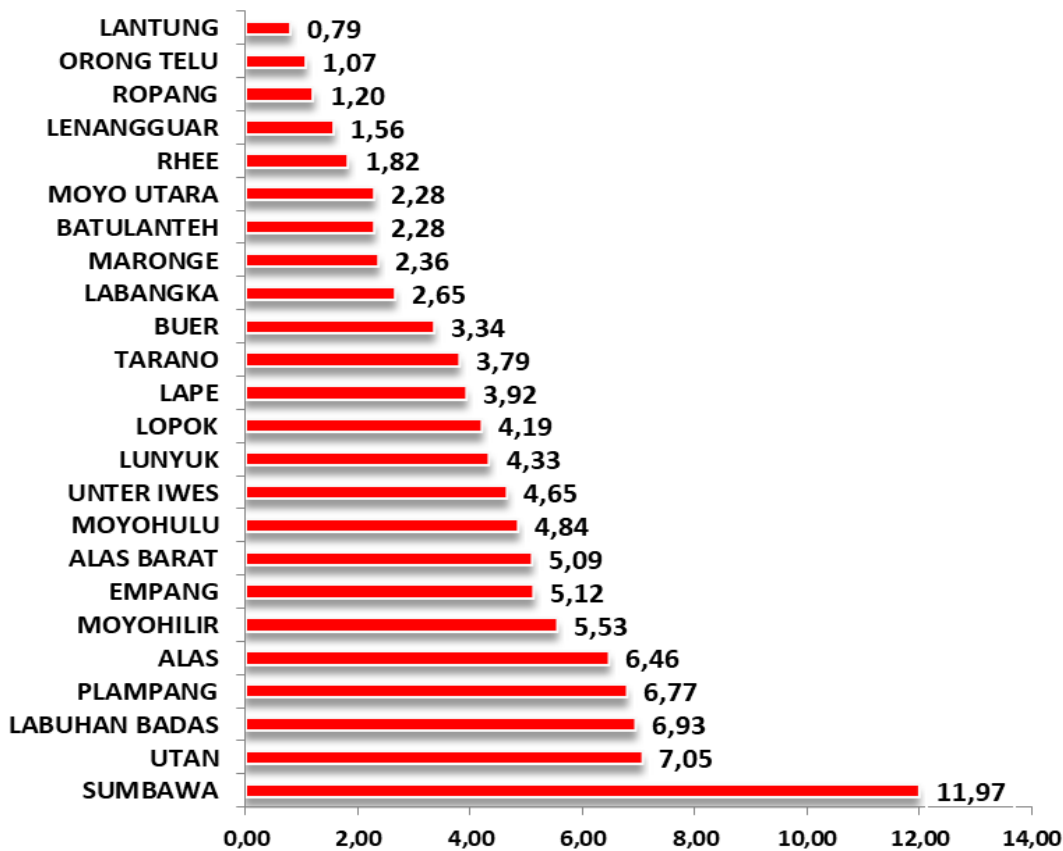
**Tabel 2. 7 Rasio Jenis Kelamin Penduduk Tiap Kecamatan
Tahun 2021-2023**

No.	Kecamatan	Rasio Jenis Kelamin		
		tahun 2021	tahun 2022	tahun 2023
1	Lunyuk	105,37	105,46	105,57
2	Orong Telu	108,77	108,83	108,92
3	Alas	97,28	97,00	96,74
4	Alas Barat	99,22	98,98	98,74
5	Buer	94,67	94,36	94,01
6	Utan	96,81	96,52	96,23
7	Rhee	98,29	97,57	96,94
8	Batulanteh	108,95	109,10	109,26
9	Sumbawa	99,17	99,00	98,88
10	Labuhan Badas	100,38	100,45	100.52
11	Unter Iwes	100,75	100,48	100.21
12	Moyohilir	96,83	96,44	96,07
13	Moyo Utara	97,53	97,17	96,80
14	Moyohulu	97,26	96,69	96,10
15	Ropang	101,85	101,15	100,57
16	Lenangguar	101,46	100,89	100.27
17	Lantung	96,39	95,96	95,47

No.	Kecamatan	Rasio Jenis Kelamin		
		tahun 2021	tahun 2022	tahun 2023
18	Lape	101,05	100,81	100,58
19	Lopok	97,27	97,03	96,76
20	Plampang	100,24	99,99	99,72
21	Labangka	102,08	101,85	101,61
22	Maronge	98,80	98,20	97,62
23	Empang	98,46	98,00	97,55
24	Tarano	101,43	101,41	101,38
	Jumlah	99,40	99,15	98,89

Sumber : Long Form Sensus Penduduk 2020, BPS Kab. Sumbawa

Sebaran penduduk merujuk pada cara penduduk mendistribusikan diri mereka dalam wilayah tersebut. Wilayah dengan sebaran penduduk merata memiliki penduduk yang terdistribusi secara seragam di seluruh wilayah, sedangkan wilayah dengan sebaran penduduk tidak merata memiliki konsentrasi penduduk yang lebih tinggi di beberapa area tertentu. Berdasarkan Gambar 2.19, persebaran penduduk Kabupaten Sumbawa di 24 Kecamatan masih berkonsentrasi di Kecamatan Sumbawa sebagai pusat kegiatan pemerintahan yaitu sebanyak 11,97% dari keseluruhan populasi mendiami kecamatan ini. Sebaran penduduk yang lebih rendah terlihat di Kecamatan Lantung, Orong Telu dan Ropang dimana keadaan ini dipengaruhi oleh kontur tanah yang masih sulit diakses oleh moda transportasi.



Gambar 2. 19 Sebaran Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan (%) di Kabupaten Sumbawa Tahun 2023

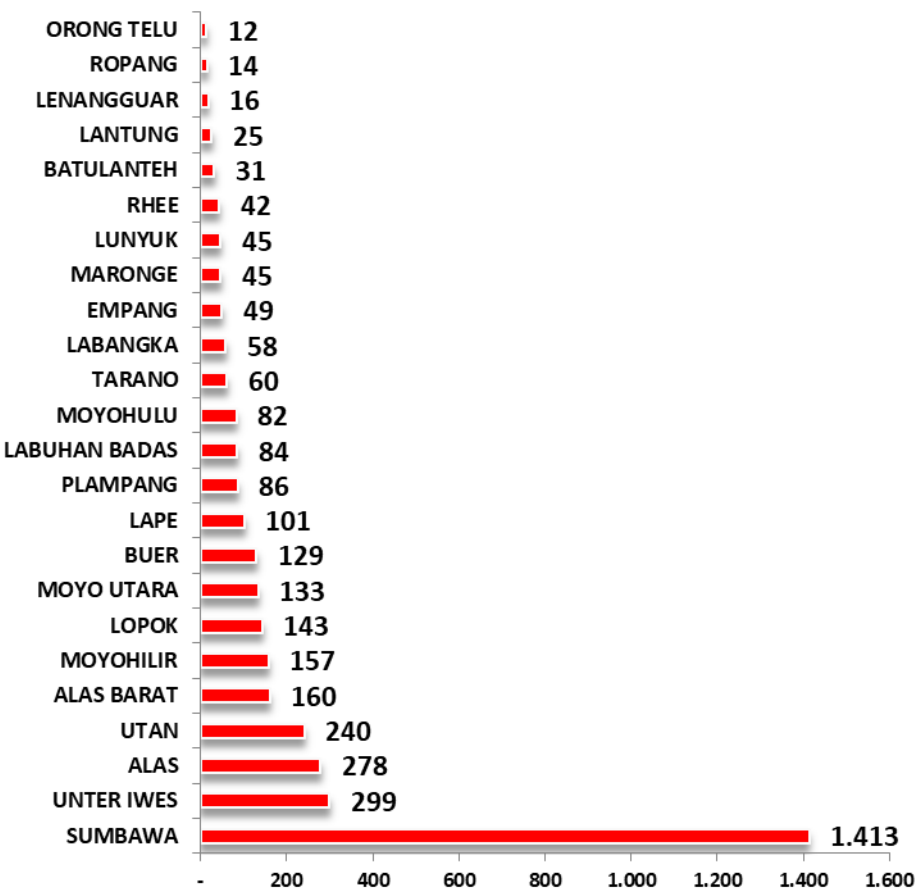
Sumber data: Long Form Sensus Penduduk 2020, BPS Kab. Sumbawa

Berdasarkan tingkat kepadatannya, Kecamatan Sumbawa merupakan kecamatan yang terpadat, yang rata-rata dihuni oleh 1.413 jiwa per km², diikuti kecamatan Unter Iwes sebesar 299 jiwa per km² dan Kecamatan Alas sebesar 278 jiwa per km². Sementara 7 (tujuh) kecamatan lainnya memiliki kepadatan penduduk dari 101 jiwa per km² sampai dengan 240 jiwa per km² yaitu Kecamatan Lape, Buer, Moyo Utara, Lopok, Moyo Hilir, Alas Barat, dan Utan. Sedangkan kecamatan lainnya memiliki kepadatan dibawah 100 jiwa per km², dengan kepadatan penduduk paling rendah yakni Kecamatan Orong Telu sebesar 12 jiwa per km².

Bila diakumulasi penduduk Kabupaten Sumbawa sejumlah 529.487 jiwa dengan luas wilayah 6.643,98 km², maka setiap km² dihuni oleh sekitar 80 jiwa, hal ini menunjukkan bahwa penduduk Kabupaten Sumbawa masih jarang dibandingkan dengan luas wilayah. Sebagian besar penduduknya terpusat di sekitar bagian tengah hingga barat kabupaten Sumbawa seperti di Kecamatan Sumbawa, Kecamatan Unter Iwes, hingga Kecamatan Alas. Sementara kepadatan terendah berada di wilayah bagian timur hingga selatan. Hal ini juga menunjukkan arah perpindahan

penduduk dari bagian timur dan selatan ke pusat kabupaten Sumbawa baik untuk alasan bekerja ataupun bersekolah.

Besaran penduduk ini harus dapat dipertahankan pada tingkat tertentu, agar kondisi daerah dapat tetap terjaga, baik dari segi estetika, kenyamanan dan kesehatan guna menghasilkan penduduk yang berkualitas.



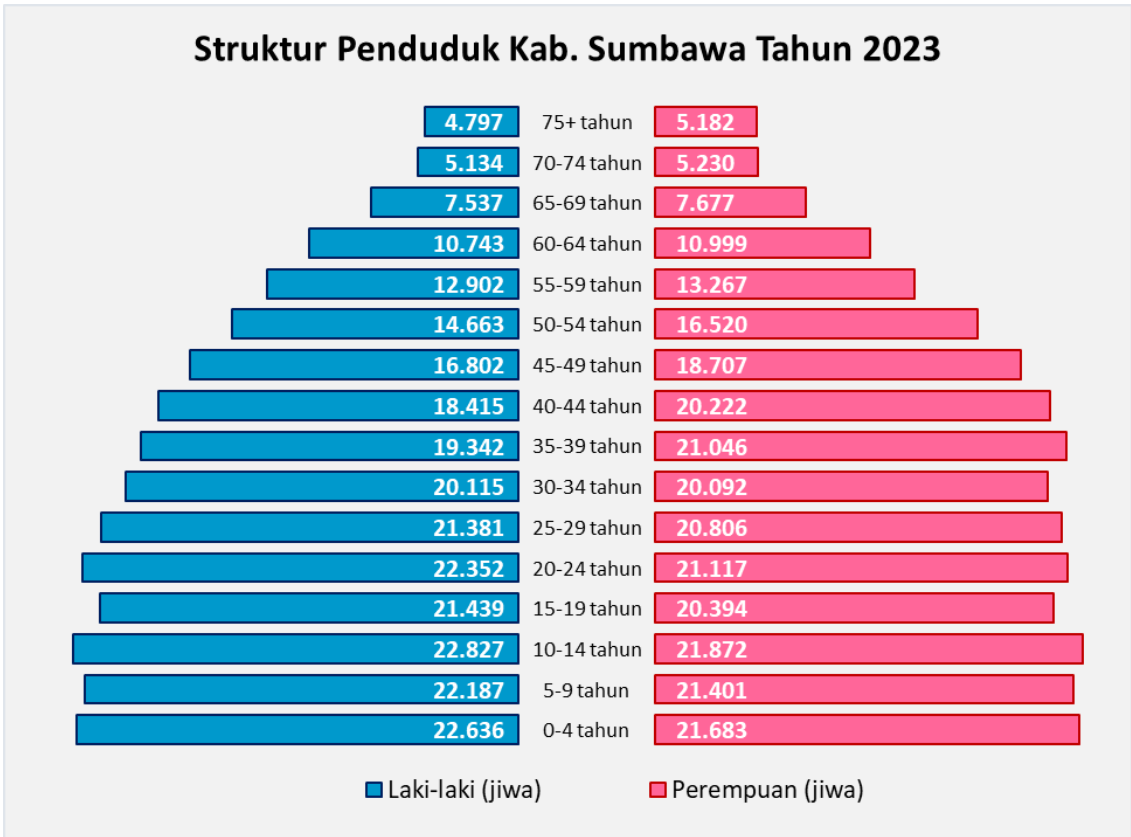
Gambar 2. 20 Kepadatan Penduduk per Kecamatan (jiwa per km²) di Kabupaten Sumbawa Tahun 2023

Struktur Usia Penduduk

Persebaran penduduk menurut usia sangat diperlukan untuk mengambil kebijakan yang berkaitan dengan banyak sektor seperti tenaga kerja, pendidikan, kesehatan dan lain-lain. Dengan mengetahui sebaran penduduk kelompok usia dominan di suatu wilayah maka dapat dilakukan kebijakan yang lebih tepat dan efisien untuk pengembangan wilayah tersebut.

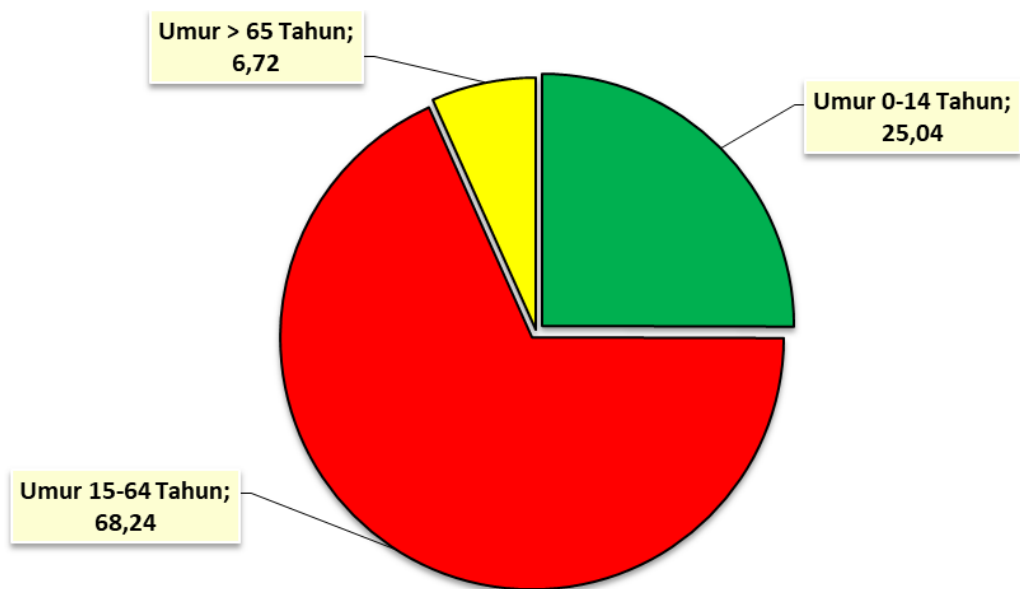
Piramida penduduk Kabupaten Sumbawa berbentuk ekspansif. Hal ini tampak dari sebagian besar penduduk terdapat pada kelompok usia muda atau bagian bawah piramida melebar dan semakin meruncing pada bagian atas yang merupakan kelompok pensiunan dan lanjut usia. Bagian bawah melebar menunjukkan terjadinya kelahiran yang cukup tinggi pada tahun-tahun sebelumnya yang mana juga menjadikan kelompok usia 10-14

tahun mendominasi populasi penduduk Kabupaten Sumbawa sejumlah 44.699 jiwa (Laki-laki: 22.827 jiwa dengan proporsi 8,67% dan Perempuan: 21.872 jiwa dengan proporsi 8,22%). Piramida ekspansif Kabupaten Sumbawa menunjukkan pertumbuhan penduduk yang cepat dan potensi bonus demografi. Tantangannya saat ini adalah bagaimana Pemerintah Kabupaten Sumbawa menyediakan pendidikan dan lapangan kerja bagi generasi muda ini. Struktur usia penduduk Kabupaten Sumbawa tergambar sebagaimana di bawah ini.



Gambar 2. 21 Struktur Penduduk Kabupaten Sumbawa Tahun 2023
Sumber Data: Long Form Sensus Penduduk 2020, BPS Kab. Sumbawa

Dari piramida penduduk di atas, penduduk Kabupaten Sumbawa dibagi ke dalam dua kelompok, yaitu kelompok usia non produktif dan kelompok usia produktif. *Kelompok usia non produktif* adalah penduduk muda dengan rentang usia antara 0-14 tahun dan penduduk tua dengan usia >65 Tahun, sementara *kelompok usia produktif* adalah penduduk dengan rentang usia antara 15 - 64 tahun. Berdasarkan rincian penduduk Kabupaten Sumbawa menurut kelompok usia menunjukkan bahwa proporsi penduduk di bawah usia 15 tahun masih tinggi, yaitu sebesar 25,04% (132.606 jiwa), sedangkan penduduk dengan usia 15 - 64 tahun (usia produktif) cukup signifikan yaitu lebih dari separuh total jumlah penduduk sebesar 68,24% (361.324 jiwa). Untuk penduduk usia lanjut (65 tahun ke atas) menunjukkan proporsi sebesar 6,72% (35.557 jiwa), sebagaimana tergambar dibawah ini.



Gambar 2. 22 Proporsi Penduduk Berdasarkan Umur Produktif dan Tidak Produktif di Kabupaten Sumbawa Tahun 2023
Sumber Data: Long Form Sensus Penduduk 2020, BPS Kab. Sumbawa

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.2.1. Kesejahteraan Ekonomi

Laju Pertumbuhan Ekonomi

Laju pertumbuhan ekonomi secara riil digambarkan melalui laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan 2010. Adapun laju pertumbuhan 17 kategori PDRB tersebut terlihat sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2. 8 Laju Pertumbuhan Riil PDRB Kabupaten Sumbawa Menurut Lapangan Usaha, Tahun 2019-2023 (%)

Kategori	Lapangan Usaha	2019	2020	2021	2022*	2023**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,01	-0,82	1,32	2,50	1,63
B	Pertambangan dan Penggalian	8,90	-7,61	1,71	0,40	3,59
C	Industri Pengolahan	3,58	-0,85	1,30	2,21	2,60
D	Pengadaan Listrik dan Gas	19,60	12,45	8,91	6,90	5,85
E	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,62	0,28	0,43	2,58	3,72

Kategori	Lapangan Usaha	2019	2020	2021	2022*	2023**
F	Konstruksi	11,93	-15,85	5,31	0,47	8,32
G	Perdagangan Besar dan Eceran	6,45	-2,86	1,24	4,49	5,01
H	Transportasi dan Pergudangan	3,88	-29,56	0,59	13,11	3,32
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,69	-18,63	0,42	22,97	7,39
J	Informasi dan Komunikasi	4,13	10,79	4,26	3,22	3,99
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,40	6,42	0,94	5,14	4,48
L	Real Estat	2,94	0,72	1,18	0,87	4,25
M,N	Jasa Perusahaan	4,71	1,46	0,39	6,16	6,37
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,91	2,83	1,33	1,68	0,10
P	Jasa Pendidikan	6,10	0,49	1,16	2,19	4,69
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6,84	-0,10	4,35	5,34	5,47
R,S,T,U	Jasa Lainnya	6,16	-5,31	1,13	11,97	2,95
Produk Domestik Regional Bruto		4,86	-4,18	1,87	3,21	3,61

Sumber: PDRB Kabupaten Sumbawa Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019-2023

Pertumbuhan ekonomi tertinggi pada Tahun 2023 dicapai oleh lapangan usaha Konstruksi, mencapai angka 8,32 Persen, yakni dengan meningkatnya investasi dalam proyek infrastruktur, seperti jalan raya, jembatan dan proyek lainnya, diikuti oleh lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum dengan peningkatan sebesar 7,39 persen. Pertumbuhan yang cukup tinggi ini dipicu karena adanya perhelatan Motocross Grand Prix (MxGP) Samota 2023 dan konser-konser musik yang mendorong penjualan UMKM terus meningkat. Selain itu penyediaan akomodasi dan makan minum tidak terlepas dari peningkatan permintaan konsumen, karena adanya kenaikan upah atau perubahan tren konsumsi mampu mendorong konsumsi makanan dan minuman.

Kemajuan dalam teknologi dan inovasi dalam konsep restoran atau model bisnis baru dapat memicu perekonomian lapangan usaha ini.

Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi (PDRB per tahun) dengan jumlah penduduk pada pertengahan tahun tersebut. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per satu orang penduduk.

Pertumbuhan ekonomi merupakan syarat perlu bagi tercapainya kesejahteraan. Ukuran kesejahteraan memang sulit tercakup dalam satu indikator yang komprehensif, karena masalah aspek multidimensi yang melatar belakangnya. Meskipun demikian, banyak literatur dan kajian akademik yang menggunakan berbagai alternatif, di antaranya adalah dengan pendekatan variabel PDRB per kapita.

Nilai PDRB per kapita ADHB sejak Tahun 2019 hingga 2023 nilainya cukup berfluktuasi. Pada tahun 2019 PDRB per kapita tercatat sebesar 31,83 juta rupiah. Secara nominal mengalami penurunan di tahun 2019, akan tetapi di tahun 2020-2023 terus mengalami peningkatan hingga mencapai 33,07 juta rupiah. Demikian pula dengan PDRB Per Kapita ADHK dengan nilai mencapai 20,64 juta rupiah di tahun 2023 dengan pertumbuhan sebesar 2,21% dibandingkan tahun sebelumnya, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2. 9 Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Perkapita Kabupaten Sumbawa, Tahun 2019-2023

Nilai PDRB (Milyar Rupiah)					
	2019	2020	2021	2022*	2023**
ADHB	14.803,29	14.446,25	15.021,40	16.107,72	17.510,43
ADHK 2010	10.470,75	10.032,95	10.220,82	10.548,58	10.929,06
PDRB Perkapita (Ribu Rupiah)					
ADHB	31.826,26	28.442,26	29.155,82	30.836,61	33.070,56
ADHK 2010	22.511,54	19.753,22	19.838,12	20.194,20	20.640,84
Pertumbuhan PDRB per Kapita ADHK 2010 (%)	2,30	-12,25	0,43	1,79	2,21
Jumlah Penduduk (ribu orang)	465	508	515	522	529
Pertumbuhan Jumlah Penduduk (Persen)	2,50	9,20	1,41	1,39	1,36

Sumber: PDRB Kabupaten Sumbawa Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019-2023

Angka Kemiskinan

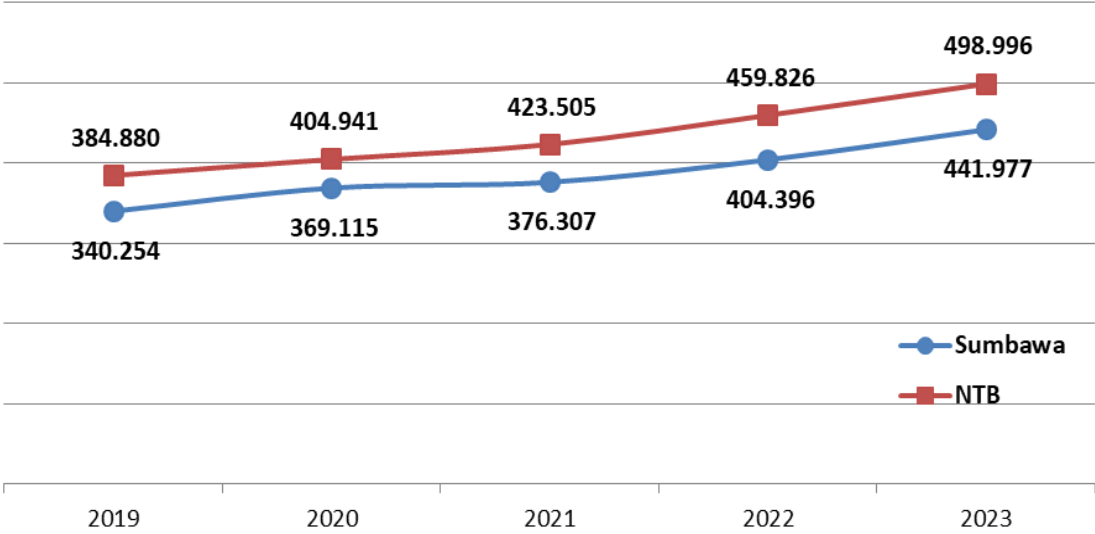
Kemiskinan merupakan ketidakmampuan penduduk dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Dengan pendekatan ini, dapat dihitung persentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan. Persentase penduduk diatas garis kemiskinan dihitung dengan menggunakan formula (100-angka kemiskinan). Angka kemiskinan adalah persentase penduduk yang masuk kategori miskin terhadap jumlah penduduk. Penduduk miskin dihitung berdasarkan garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan-kebutuhan konsumsi

pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh individu untuk hidup layak.

Tingkat Kemiskinan dan Garis Kemiskinan

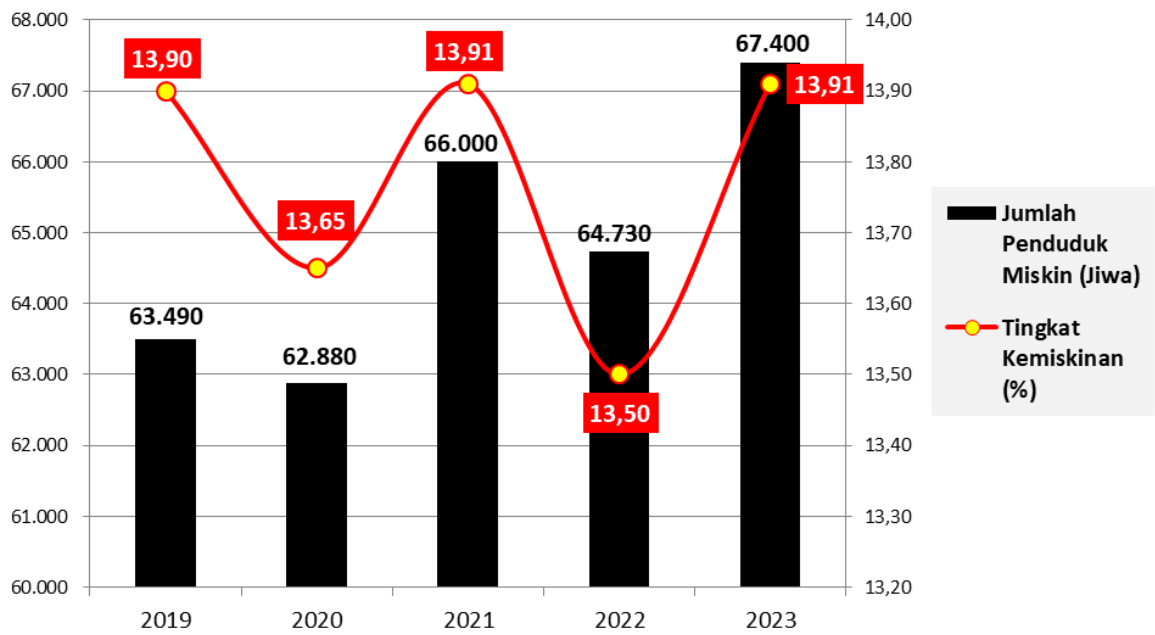
Garis kemiskinan adalah ambang batas pendapatan yang digunakan untuk mengukur tingkat kemiskinan di suatu daerah atau wilayah. Garis Kemiskinan, terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin. GKM merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kilokalori perkapita perhari. GKNM adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Garis kemiskinan di Kabupaten Sumbawa menunjukkan tren meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sebagaimana tergambar sebagai berikut.

Garis kemiskinan Kabupaten Sumbawa selama 5 tahun terakhir (2019-2023) terus mengalami kenaikan dari Rp.340.254,- menjadi Rp.441.977,- pada akhir tahun 2023, begitu pula garis kemiskinan provinsi NTB berkembang dari Rp.384.880,- hingga Rp.498.996,-. Peningkatan garis kemiskinan seringkali merupakan hasil dari beberapa faktor yang saling terkait seperti kenaikan harga barang dan jasa, tingkat pengangguran, ketidaksetaraan ekonomi dan lainnya. Oleh karena itu, solusi untuk mengatasi kemiskinan sering melibatkan kombinasi tindakan ekonomi, kebijakan sosial, dan pendekatan yang berkelanjutan untuk meminimalkan risiko kemiskinan dan mempromosikan inklusi sosial dan ekonomi.



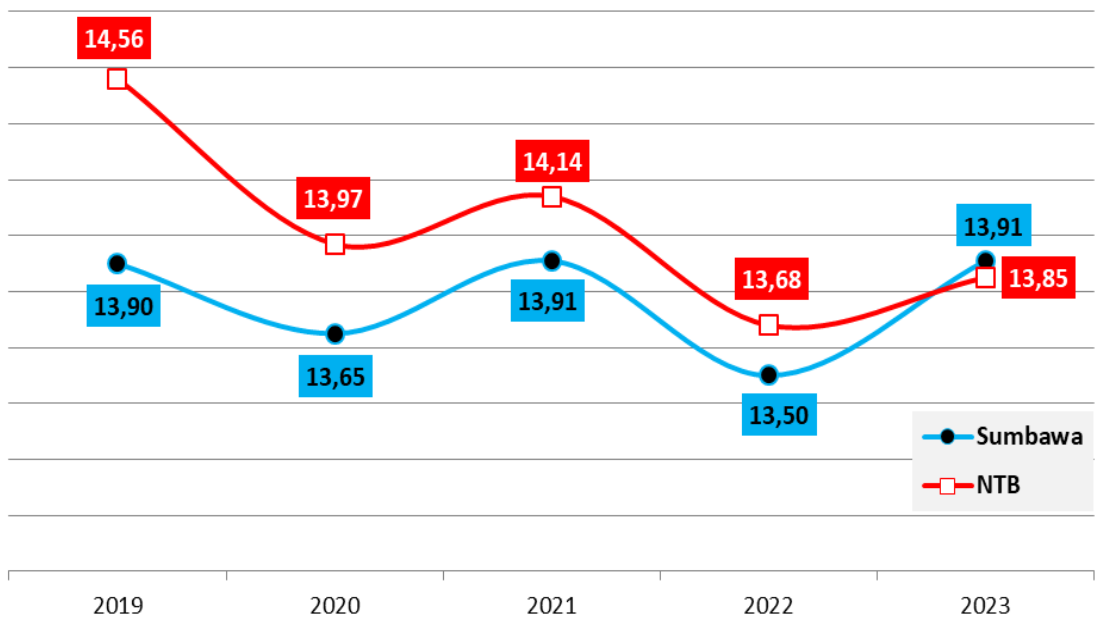
Gambar 2. 23 Perkembangan Garis Kemiskinan Kabupaten Sumbawa Tahun 2019 – 2023
Sumber Data: NTB dalam angka tahun 2023

Tingkat kemiskinan ditentukan oleh besarnya garis kemiskinan sedangkan penduduk miskin adalah penduduk yang berpenghasilan di bawah garis kemiskinan. Tingkat kemiskinan, di Kabupaten Sumbawa dalam kurun waktu 5 tahun terakhir (2019-2023) berfluktuasi, akan tetapi terjadi penurunan rata-rata sebesar 0,17 poin, yakni dari 13,90% pada tahun 2019 menurun menjadi 13,65% pada tahun 2020 dan kembali meningkat di tahun 2021 sebesar 13,91% sebagai dampak adanya pandemi covid 19 yang membatasi aktivitas masyarakat sehari-hari, sehingga berpengaruh terhadap menurunnya pendapatan masyarakat itu sendiri. Di Tahun 2022 kembali mengalami penurunan sebagai dampak pemulihan ekonomi pasca Covid 19 dan di tahun 2023 kembali meningkat menjadi 13,91% sebagai dampak adanya inflasi, sebagaimana tergambar sebagai berikut.



Gambar 2. 24 Perkembangan Tingkat Kemiskinan dan Jumlah Penduduk Miskin di Kab. Sumbawa 2019-2023
Sumber Data: NTB dalam angka tahun 2023

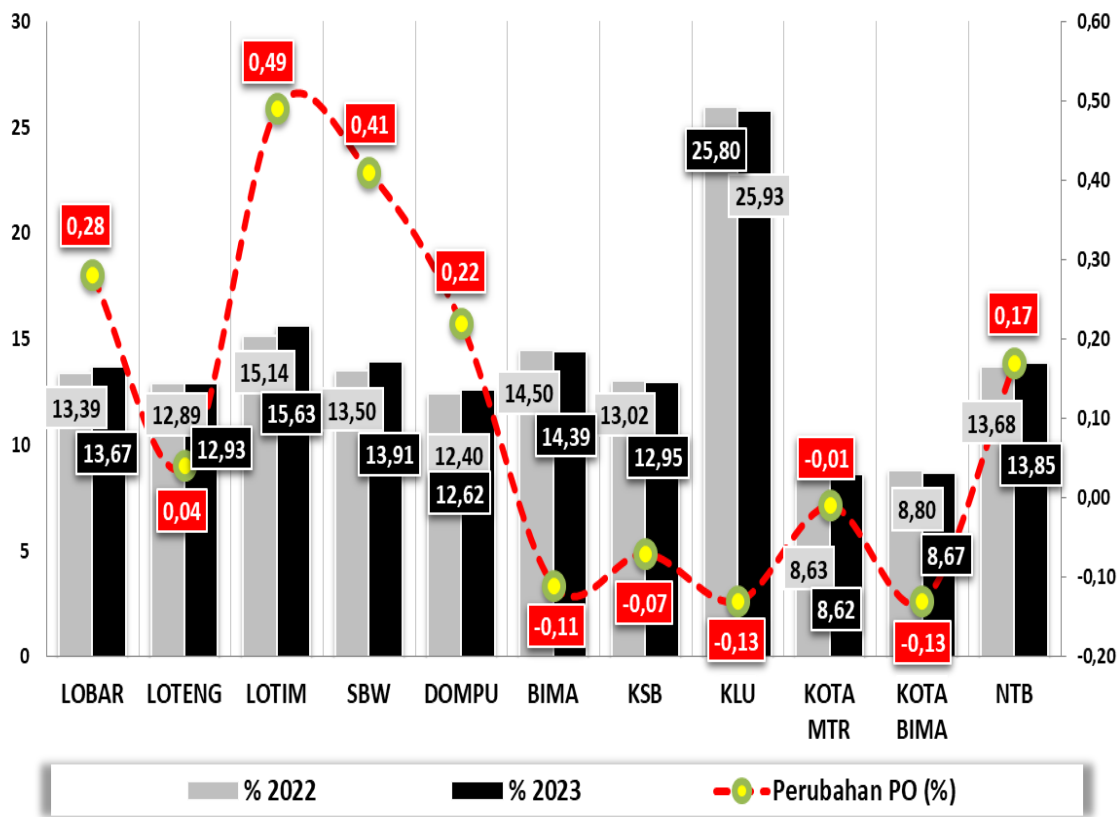
Tingkat kemiskinan Kabupaten Sumbawa kembali mengalami peningkatan 0,41% di tahun 2023 dari tahun sebelumnya. Angka ini cenderung fluktuatif selama lima tahun terakhir namun tetap menunjukkan tren menurun dengan rata-rata laju penurunan dalam rentang waktu tahun 2019-2023 sebesar 0,03%.



Gambar 2. 25 Tingkat Kemiskinan Kab. Sumbawa dan Provinsi NTB Tahun 2019-2023
Sumber Data: NTB dalam angka tahun 2023

Tingkat kemiskinan di Provinsi NTB memperlihatkan terjadinya peningkatan di 5 Kabupaten (Lombok Barat, Lombok

Tengah, Lombok Timur, Sumbawa dan Dompu) sementara 5 lainnya mengalami penurunan (Bima, Sumbawa Barat, Lombok Utara, Kota Mataram dan Kota Bima), sebagaimana tergambar sebagai berikut.



Gambar 2. 26 Tingkat Kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2022 – 2023
Sumber Data: NTB dalam angka tahun 2023

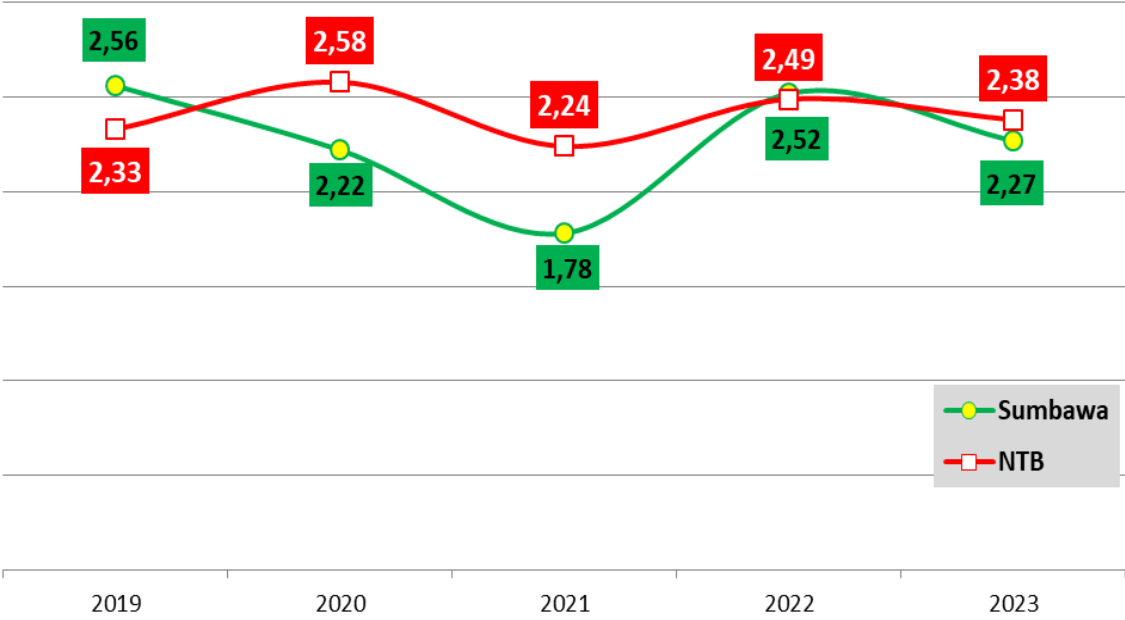
Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan

Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan. Selain upaya memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan penanggulangan kemiskinan juga terkait dengan bagaimana mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan.

Indeks Kedalaman Kemiskinan (Poverty Gap Index-P1), merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, maka semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan.

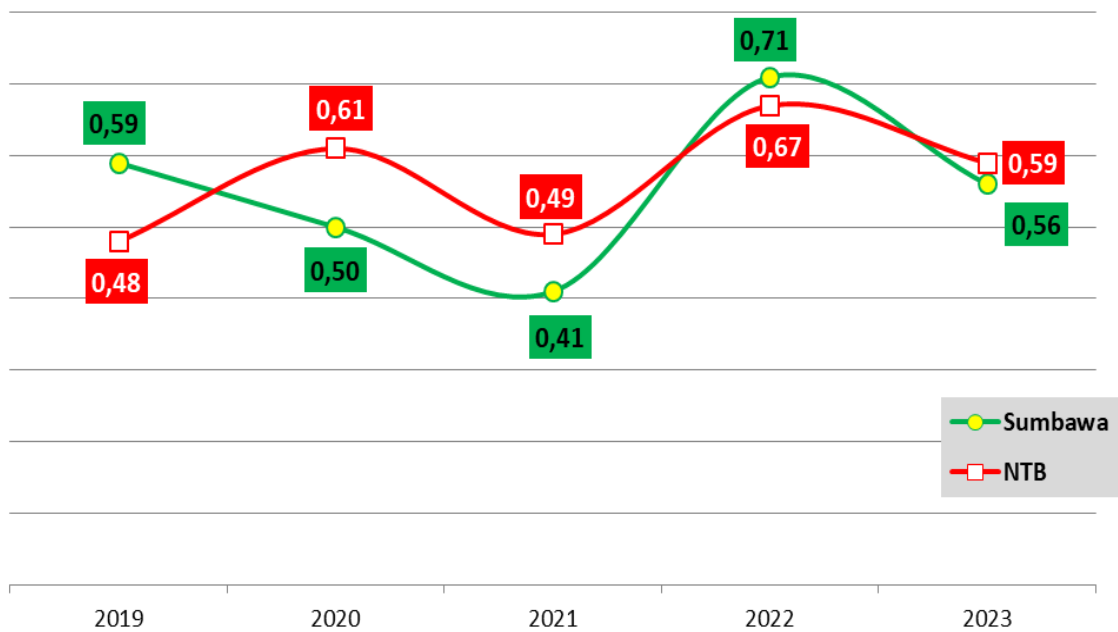
Indeks kedalaman kemiskinan Kabupaten Sumbawa sejak tahun 2019 hingga tahun 2021 mengalami penurunan dari 2,56

menjadi 1,78, akan tetapi di tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 2,52 dan kembali menurun di tahun 2023 sebesar 2,27. Bila dibandingkan dengan indeks kedalaman kemiskinan di Provinsi NTB dalam 4 (empat tahun) terakhir, maka indek kedalama kemiskinan di kabupaten Sumbawa lebih baik, sebagaimana tergambar sebagai berikut.



Gambar 2. 27 Kedalaman Kemiskinan Kab. Sumbawa dan Provinsi NTB Tahun 2019-2023

Sementara, Indeks Keparahan Kemiskinan (Proverty Severity Index-P2) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Gambar 3.22 menampilkan perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan Kabuptean Sumbawa dan Provinsi NTB tahun 2019-2023. Perkembangan indek keparahan kemiskinan Kabupaten Sumbawa terus menurun sampai dengan tahun 2021, akan tetapi meningkat di tahun 2022 dan kembali menurun menjadi 0,56 di tahun 2023 dibawah Provinsi NTB, sebagaimana tergambar sebagai berikut.



Gambar 2. 28 Keparahan Kemiskinan Kab. Sumbawa dan Provinsi NTB Tahun 2019-2023

Strategi Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Sumbawa memerlukan upaya dan langkah taktis yang terpadu, dilakukan secara bertahap, terencana, menyeluruh, terukur dan berkesinambungan, serta menuntut keterlibatan semua pihak, baik penyelenggara pemerintahan daerah (pemerintah dan DPRD), dunia usaha, LSM, organisasi kemasyarakatan, maupun masyarakat miskin itu sendiri agar dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi perbaikan kondisi sosial, ekonomi, politik dan budaya, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin.

Adapun rencana aksi penanggulangan kemiskinan secara garis besar dilakukan secara simultan antara meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengakses layanan dan pada saat yang bersamaan diupayakan menurunkan beban pengeluaran yang harus ditanggung masyarakat. Implementasi kebijakan ini antara lain melalui perluasan lapangan kerja, peningkatan pendapatan, peningkatan akses pendidikan, kesehatan dan infrastruktur dasar bagi masyarakat miskin.

Ketenagakerjaan

Tenaga kerja merupakan salah satu faktor penting bagi pembangunan ekonomi daerah, sehingga sektor ketenagakerjaan

dipandang strategis menjadi salah satu cara untuk mengurangi angka pengangguran dan dapat memperkecil tingkat kemiskinan pada masyarakat. Penduduk yang dikategorikan sebagai penduduk usia kerja adalah penduduk yang berusia 15 tahun keatas. Pada tahun 2023 jumlah penduduk usia kerja Kabupaten Sumbawa meningkat menjadi 398,06 ribu orang terdiri dari Angkatan Kerja sebanyak 283,29 ribu orang (bekerja: 275,38 ribu orang, pengangguran: 7,91 ribu orang) dan Bukan Angkatan Kerja sebanyak 114,77 ribu orang. Dengan kata lain, angkatan kerja terdiri dari penduduk usia produktif yang bekerja atau mempunyai pekerjaan tapi sementara tidak bekerja dan penduduk yang berstatus pengangguran. Sedangkan yang termasuk dalam kelompok bukan angkatan kerja yaitu penduduk usia produktif yang bersekolah, mengurus rumah tangga atau melaksanakan kegiatan lain selain rumah tangga.

Tabel di bawah menjelaskan rincian indikator ketenagakerjaan di Kabupaten Sumbawa dalam rentang tahun 2019-2023.

Tabel 2. 10 Indikator Ketenagakerjaan Tahun 2019-2023

Indikator Ketenagakerjaan	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Penduduk Usia Kerja (15 Tahun ke atas) dalam ribu jiwa	328,47	347,47	352,43	357,33	398,06
Jumlah Penduduk Bekerja (ribu jiwa)	210,92	230,51	227,63	252,11	275,38
Jumlah Pengangguran Terbuka (ribu jiwa)	6,74	9,63	7,99	5,44	7,91
Jumlah Penduduk Angkatan Kerja (ribu jiwa)	217,66	240,14	235,62	257,55	283,29
Jumlah Penduduk Bukan Angkatan Kerja (ribu jiwa)	110,81	107,33	116,81	99,78	114,77
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) %	3,1	4,01	3,39	2,11	2,79
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) %	66,26	69,11	66,86	72,08	71,17

Sumber Data: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumbawa
Catatan: *) hasil survei Sakernas Agustus 2023

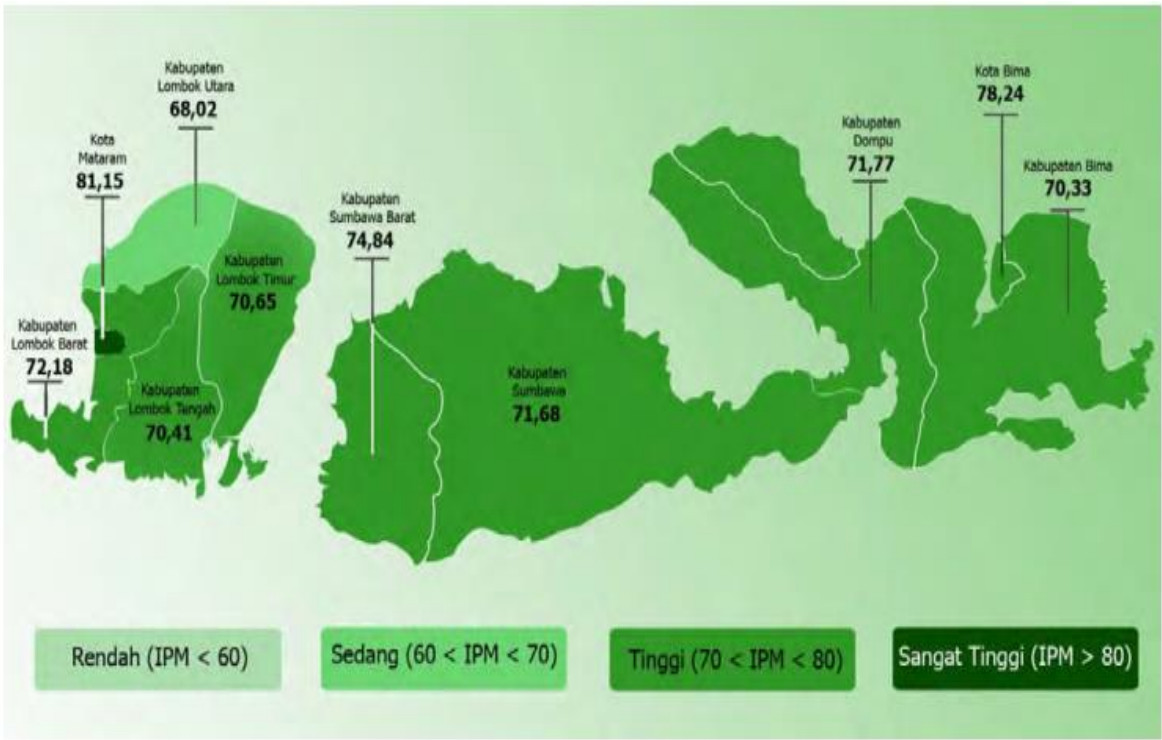
Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang mengukur pembangunan kualitas hidup manusia melalui tiga pendekatan dimensi dasar yaitu umur panjang dan sehat diwakili oleh indikator Umur Harapan Hidup (UHH), dimensi pengetahuan diukur melalui indikator Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah

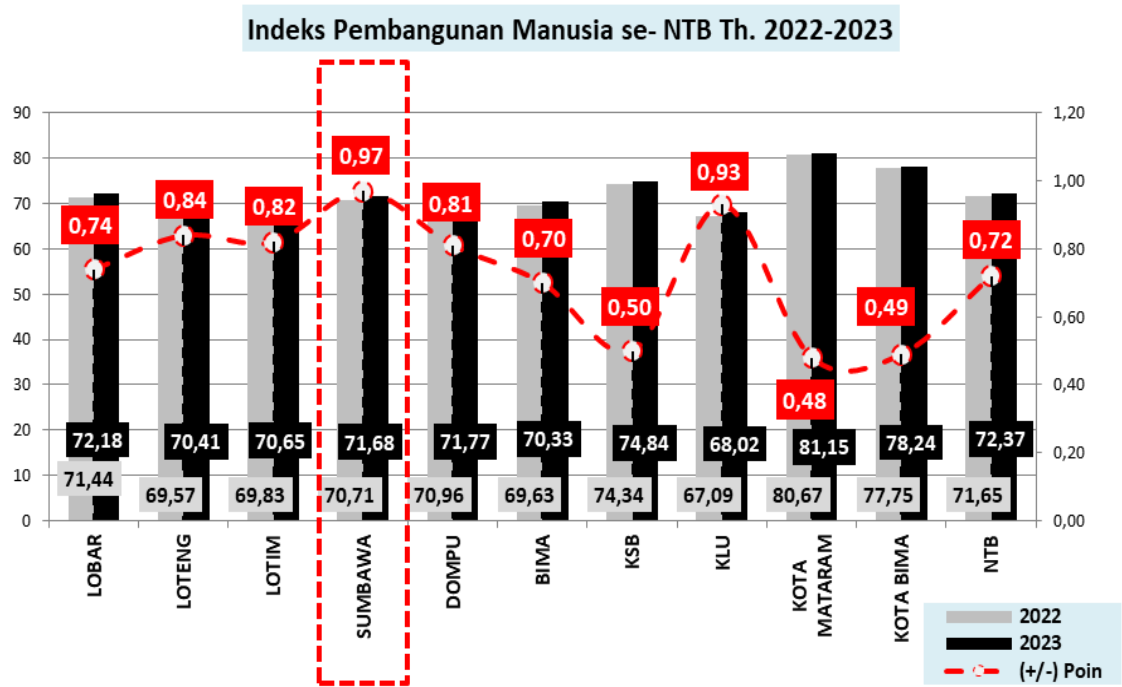
(RLS). Adapun dimensi penghidupan layak didekati melalui indikator Pengeluaran Per Kapita (PPP).

Klasifikasi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dibagi kedalam empat kategori, yakni kategori rendah jika memiliki angka IPM kurang dari 60, kategori sedang jika nilai IPM 60 sampai kurang dari 70 dan tinggi jika nilai IPM 70 sampai dengan kurang dari 80, dan IPM dikatakan sangat tinggi apabila angka IPM mencapai angka 80 atau lebih.

Kabupaten/kota di Provinsi NTB dengan status capaian pembangunan manusia dengan kategori sangat tinggi adalah Kota Mataram, dan kategori tinggi di 8 Kabupaten serta yang berkategori sedang 1 Kabupaten yakni Lombok Utara, sebagaimana tergambar berikut.



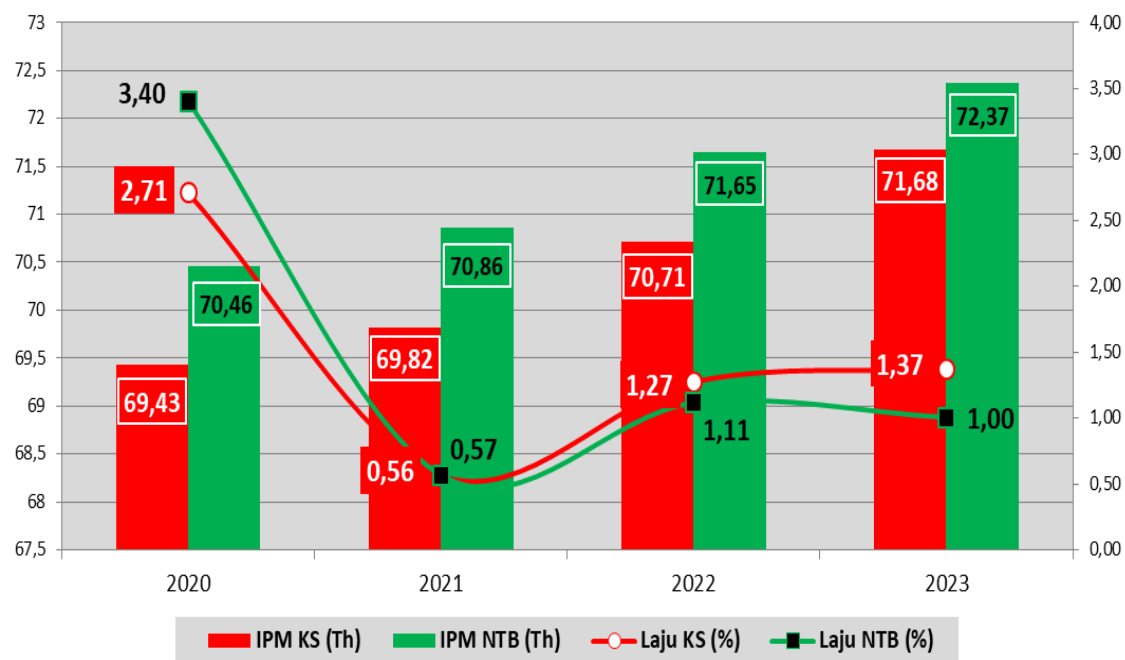
Gambar 2. 29 Capaian IPM Kabupaten/Kota se NTB Tahun 2023



Gambar 2. 30 Perkembangan IPM di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2022-2023

Berdasarkan perkembangan IPM di 10 Kabupaten/Kota di Provinsi NTB tahun 2022-2023, memperlihatkan bahwa Kabupaten Sumbawa merupakan kabupaten tertinggi dalam peningkatan poin yakni sebesar 0,97, diikuti Kabupaten Lombok Utara sebesar 0,93 poin, sementara yang terendah adalah Kota Mataram sebesar 0,48 poin.

Peningkatan capaian IPM Kabupaten Sumbawa pada tahun 2023 disebabkan oleh meningkatnya pertumbuhan seluruh komponen pembentuk IPM, sebagaimana tergambar sebagai berikut.



Gambar 2. 31 Perbandingan IPM dan Laju Pertumbuhan IPM antara Kab. Sumbawa dengan Provinsi NTB Tahun 2020-2023

2.2.2. Kesejahteraan Sosial Budaya

Pendidikan

Pendidikan adalah fondasi utama dalam pembangunan individu dan masyarakat. Ia membentuk mentalitas, membuka wawasan, dan memberikan keterampilan yang diperlukan untuk menghadapi tantangan kehidupan. Lebih dari sekadar proses akademik di ruang kelas, pendidikan adalah perjalanan panjang menuju pengetahuan, pemahaman, dan pertumbuhan pribadi.

Dalam setiap tahapnya, pendidikan memainkan peran kunci. Pendidikan anak usia dini menumbuhkan dasar kecerdasan dan kemampuan sosial. Pendidikan dasar memberikan bekal keterampilan membaca, menulis, dan berhitung yang esensial dalam kehidupan sehari-hari. Sementara itu, pendidikan menengah mempersiapkan siswa untuk menghadapi kompleksitas dunia dan memilih jalur karir yang sesuai dengan minat dan bakat mereka.

Sistem pendidikan yang kuat memerlukan peran aktif dari semua pemangku kebijakan, termasuk pemerintah, guru, orang tua, dan komunitas. Diperlukan investasi dalam fasilitas, kurikulum yang relevan, dan pengembangan profesional bagi pendidik. Lebih dari itu, pendidikan harus mengakomodasi keberagaman dan mempertimbangkan berbagai kebutuhan dan gaya belajar.

Capaian di bidang pendidikan terkait erat dengan ketersediaan fasilitas pendidikan. Idealnya semakin tinggi tingkat pendidikan diikuti dengan semakin berkurangnya beban jumlah murid yang diajar. Selain itu, semakin tinggi jenjang pendidikan, keberadaan sekolah juga semakin sedikit.

Tabel 2. 11 Kondisi Pendidikan Menurut Tingkat Sekolah

Tingkat Sekolah	Sekolah		Guru		Murid	
	2022/ 2023	2023/ 2024	2022/ 2023	2023/ 2024	2022/ 2023	2023/ 2024
TK (Taman Kanak - kanak)	588	604	1.585	2.808	22.646	14.316
RA (Raudhatul Anfhal)	36	36	157	161	1.303	1.328
SD (Sekolah Dasar)	372	374	3.586	4.376	50.890	49.602
MI (Madrasah Ibtidaiyah)	29	29	381	395	3.922	3.919
SMP (Sekolah Menengah Pertama)	109	114	1.805	1.952	17.901	17.928
MTs (Madrasah Tsanawiyah)	32	32	630	631	4.830	4.949
SMA (Sekolah Menengah Atas)	27	27	736	745	10.197	10.619
SMK (Sekolah Menengah Kejuruan)	20	21	693	702	7.278	6.979
MA (Madrasah Aliyah)	19	19	327	344	2.204	2.158
Jumlah	1.232	1.256	9.900	12.114	121.171	111.798

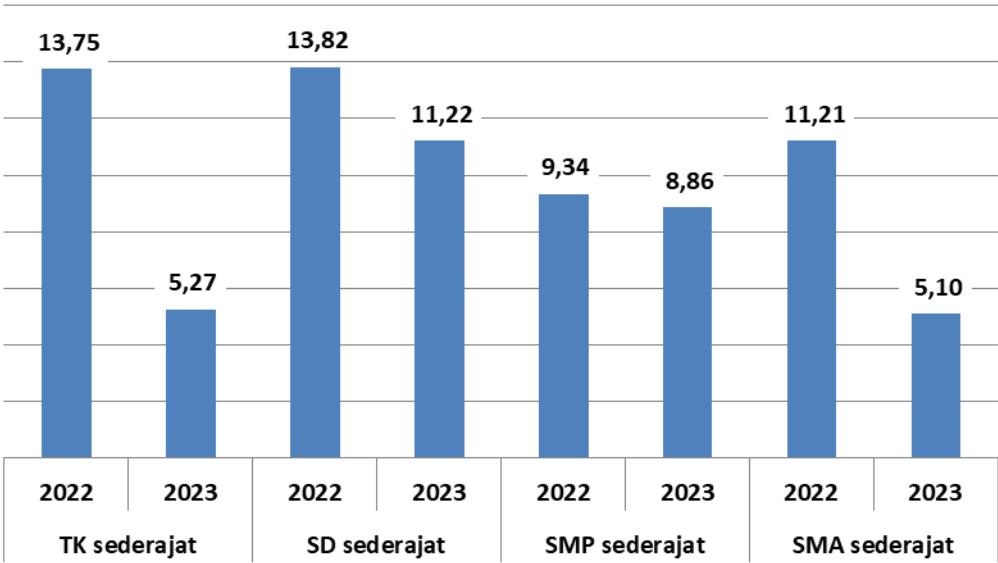
Sumber Data: Sumbawa dalam angka 2024

Catatan : Data Tingkat TK masih digabung dengan data tingkat PAUD

Salah satu indikator untuk melihat pemerataan sarana dan prasarana pendidikan adalah rasio antara murid dengan guru. Semakin tinggi nilai rasio ini berarti semakin berkurang tingkat pengawasan dan perhatian guru terhadap murid sehingga mutu pengajaran cenderung semakin rendah.

Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru menyebutkan bahwa pada jenjang pendidikan SD, SMP, dan SMA idealnya satu guru bertanggung jawab terhadap 20 murid. Sedangkan, pada jenjang SMK idealnya satu guru bertanggung jawab pada 15 murid. Maka berdasarkan Gambar 2.32 rasio murid terhadap guru dalam suatu kelas di tiap jenjang pendidikan di Kabupaten Sumbawa masih terbilang ideal dimana kondisi ini memberikan keleluasaan bagi guru dalam mengawasi dan memperhatikan murid-muridnya.

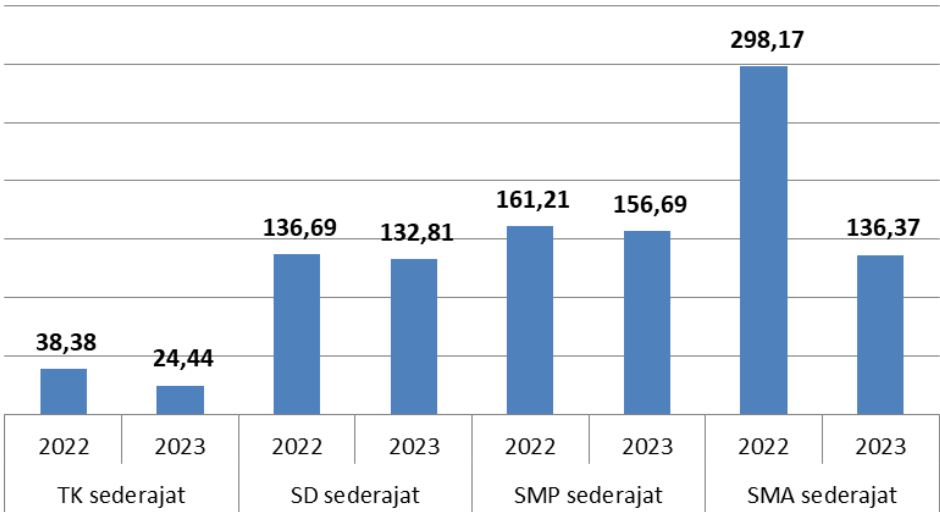
Rasio Murid per Guru



Gambar 2. 32 Perbandingan Rasio Murid per Guru di Kabupaten Sumbawa Tahun 2022 dan Tahun 2023
Sumber Data: Sumbawa dalam angka 2024 (diolah)

Kemudian, pengelolaan rasio murid terhadap sekolah pun merupakan bagian penting dari perencanaan dan kebijakan pendidikan. Pemerintah dan otoritas pendidikan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa rasio ini seimbang dan sesuai dengan kapasitas dan sumber daya yang tersedia di setiap wilayah. Hal ini membantu memastikan akses yang setara, lingkungan pembelajaran yang efektif, dan kualitas pendidikan yang baik bagi semua siswa

Rasio murid per sekolah



Gambar 2. 33 Perbandingan Rasio Murid per Sekolah di Kabupaten Sumbawa
Sumber Data: Sumbawa dalam angka 2024 (diolah)

Penting untuk diingat bahwa pendidikan yang berkualitas tidak hanya bergantung pada rasio murid-guru-sekolah, tetapi juga pada berbagai faktor lainnya, termasuk kurikulum, manajemen sekolah, dukungan orang tua, dan udaya sekolah yang mendukung pembelajaran. Oleh karena itu, dalam mengevaluasi sistem pendidikan, penting untuk mempertimbangkan rasio murid-guru sebagai bagian dari gambaran yang lebih luas tentang kualitas pendidikan.

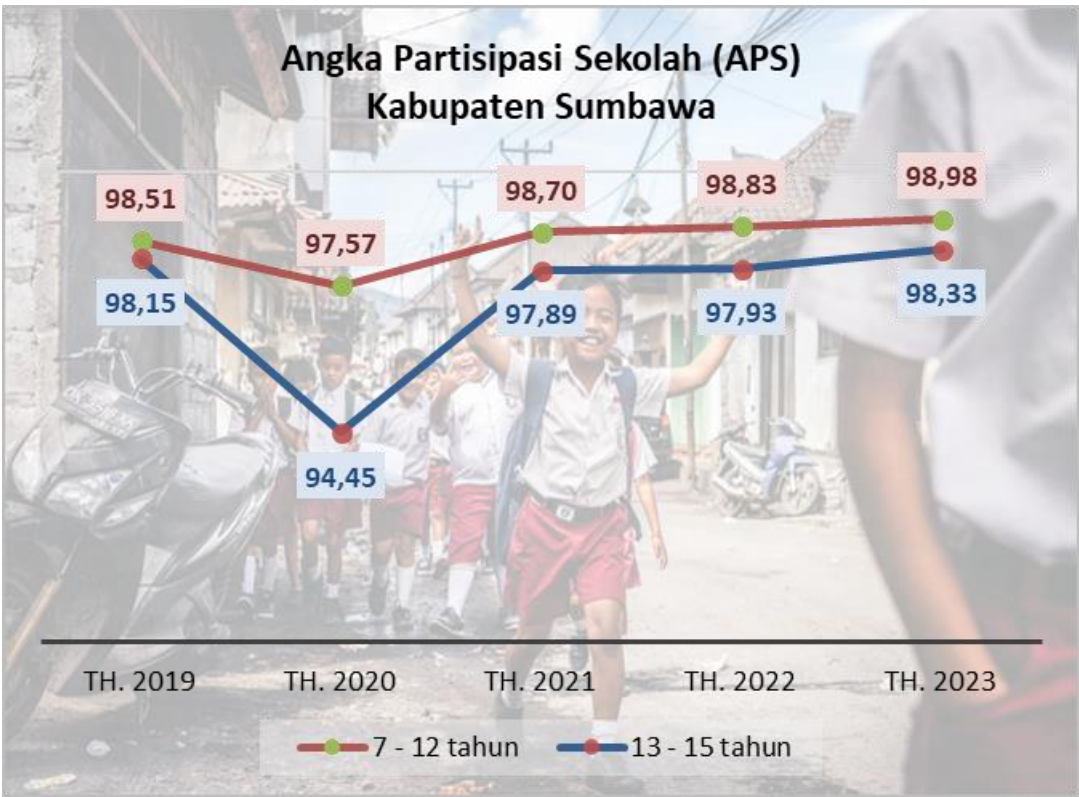
Selain rasio murid-guru-sekolah, terdapat beberapa ukuran dasar atau indikator yang sering digunakan untuk mengevaluasi sistem pendidikan yaitu Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Sekolah (APS), Rata-rata Lama sekolah (RLS), Angka Harapan Sekolah (HLS).

Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Angka partisipasi sekolah digunakan untuk melihat seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan yang ada. Dalam konteks ini, partisipasi merujuk pada kehadiran dan partisipasi aktif dalam proses pendidikan. Meningkatnya angka tingkat partisipasi sekolah berarti menunjukkan adanya keberhasilan di bidang pendidikan terutama yang berkaitan dengan upaya memperluas jangkauan pelayanan pendidikan.

Angka Partisipasi Sekolah (APS) memberikan gambaran secara umum tentang banyaknya kelompok umur tertentu yang sedang bersekolah, tanpa memperhatikan jenjang pendidikan yang sedang dijalani. APS merupakan indikator yang digunakan sebagai petunjuk keberhasilan program wajib belajar. Sebagai standar, program wajib belajar dikatakan berhasil jika nilai APS umur 7-12 tahun lebih dari 95 persen dan umur APS 13-15 tahun lebih dari 70%.

Berdasarkan data APS yang dikutip dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Sumbawa, dalam 5 tahun terakhir (2019 – 2023) APS umur 7-12 tahun di Kabupaten Sumbawa selalu berada di atas 95% atau berkisar dari 97,57% sampai 98,98% dan untuk APS umur 13-15 tahun berkisar antara 94,45% hingga 98,33%. Gambar di bawah menunjukkan bahwa program wajib belajar di Kabupaten Sumbawa dapat dikatakan berhasil dalam 5 tahun terakhir (2019-2023).



Gambar 2. 34 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kabupaten Sumbawa Tahun 2019 - 2023
Sumber Data: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Sumbawa

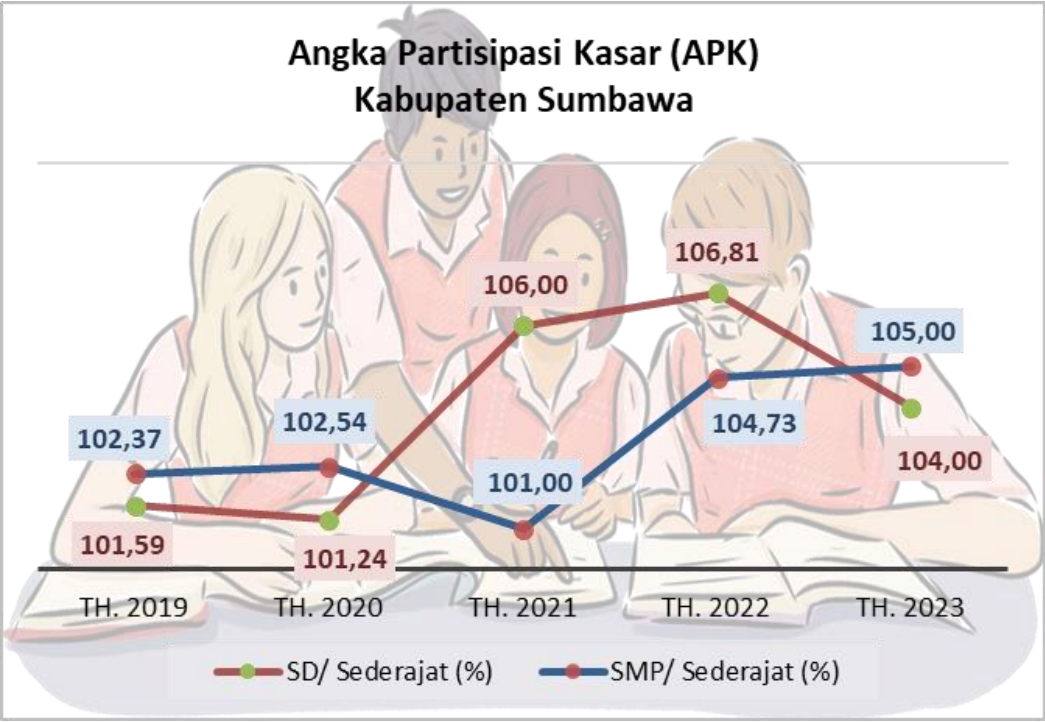
hal yang harus diperhatikan adalah kenyataan bahwa semakin tingginya jenjang pendidikan maka semakin rendahnya nilai APS. Hal ini mengindikasikan masih rendahnya kemauan anak usia sekolah untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Faktor ketersediaan sarana dan fasilitas Pendidikan hingga faktor ekonomi serta keadaan sosial masyarakat menjadi penyebab dari fenomena ini.

Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah murid pada jenjang pendidikan tertentu (SD, SMP, SMA dan sebagainya) dengan penduduk kelompok usia sekolah yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. Hasil perhitungan APK ini digunakan untuk mengetahui persentase anak usia sekolah yang sebenarnya terdaftar atau mengikuti pendidikan pada tingkat tertentu, tanpa mempertimbangkan tingkat kelas atau tahun ajaran tertentu.

Semakin tinggi APK berarti semakin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu jenjang pendidikan pada suatu wilayah. Nilai APK bisa lebih besar dari 100% karena terdapat murid yang berusia di luar usia resmi sekolah, terletak di daerah kota, atau terletak pada daerah perbatasan. Angka Partisipasi Kasar selama 5 tahun terakhir pada semua jenjang pendidikan mengalami fluktuasi dalam pencapaiannya. Pada tahun 2023 pencapaian Angka Partisipasi Kasar tingkat SD berkisar di 104,00% sedangkan pada tingkat SMP mengalami peningkatan menjadi 105,00%. Hal ini

menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat pada tingkat SD dan SMP yang cukup baik. Secara umum perkembangan APK pada semua jenjang pendidikan di Kabupaten Sumbawa dari Tahun 2019-2023 disajikan sebagai berikut.

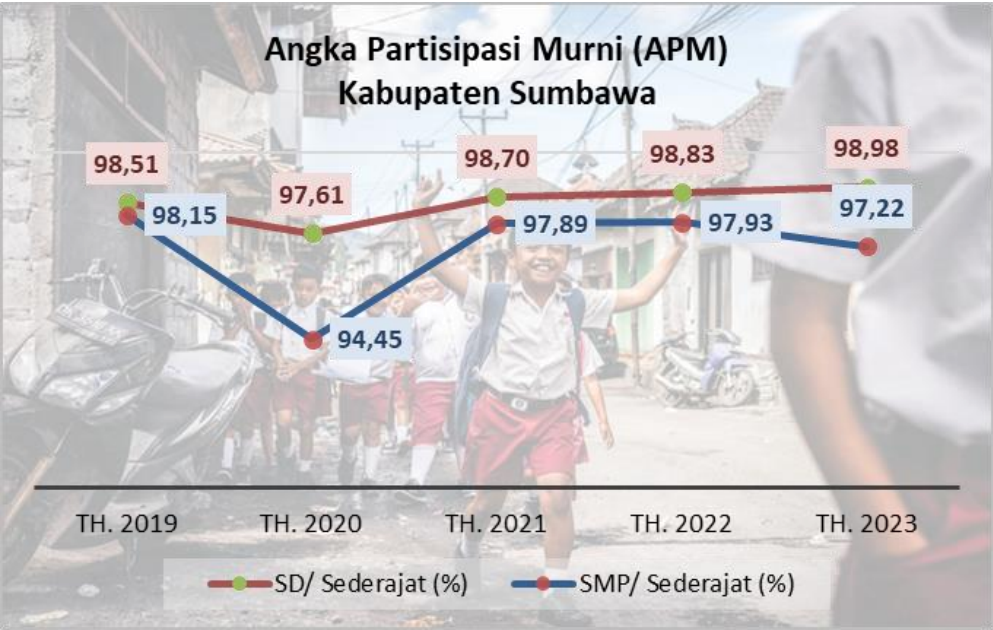


Gambar 2. 35 Angka Partisipasi Kasar (APK) Kabupaten Sumbawa Tahun 2019-2023
Sumber Data: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Sumbawa, 2024

Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni (APM) dapat menunjukkan proporsi anak sekolah pada satu kelompok umur tertentu yang bersekolah tepat pada tingkat yang sesuai dengan kelompok umurnya. Tepat waktu bersekolah sesuai umur sekolah adalah kunci utama yang digunakan untuk melihat angka partisipasi murni (APM). Semakin tinggi APM maka anak usia sekolah yang bersekolah di suatu jenjang tertentu juga semakin besar. APM juga merupakan indikator daya serap yang baik dari penduduk usia sekolah di setiap jenjang pendidikannya.

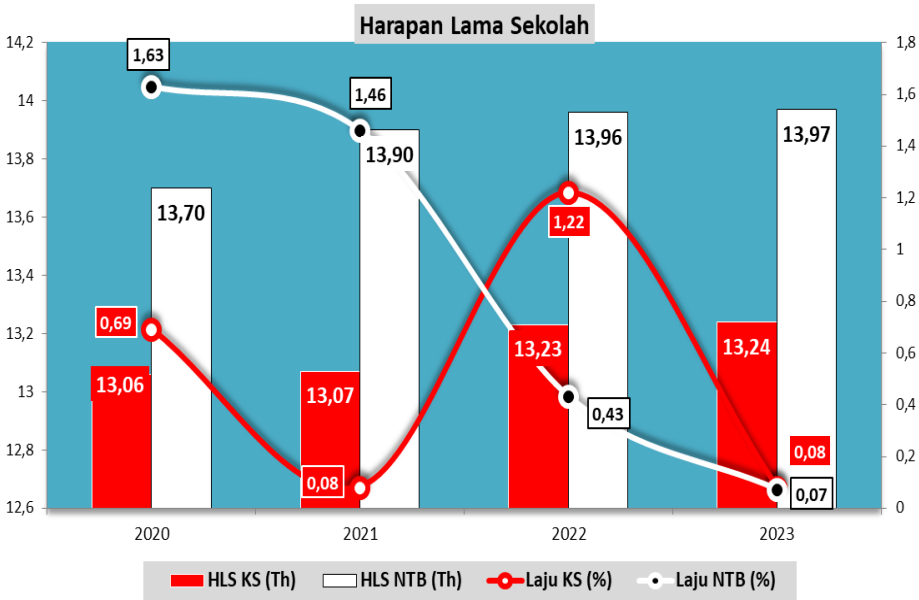
Pada tahun 2023 pencapaian Angka Partisipasi Murni Kabupaten Sumbawa tingkat SD meningkat pada 98,98% sebaliknya pada tingkat SMP menurun menjadi 97,22%. Nilai APM yang mencapai 90 persen ke atas menunjukkan sebagian besar anak yang bersekolah pada tingkat SD dan SMP di Kabupaten Sumbawa telah bersekolah tepat pada tingkatan usianya, sebagaimana berikut.



Gambar 2. 36 Angka Partisipasi Murni (APM) Kabupaten Sumbawa Tahun 2019-2023
Sumber Data: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Sumbawa, 2024

Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS) dan Angka Rata-rata Lama Sekolah (ARLS)

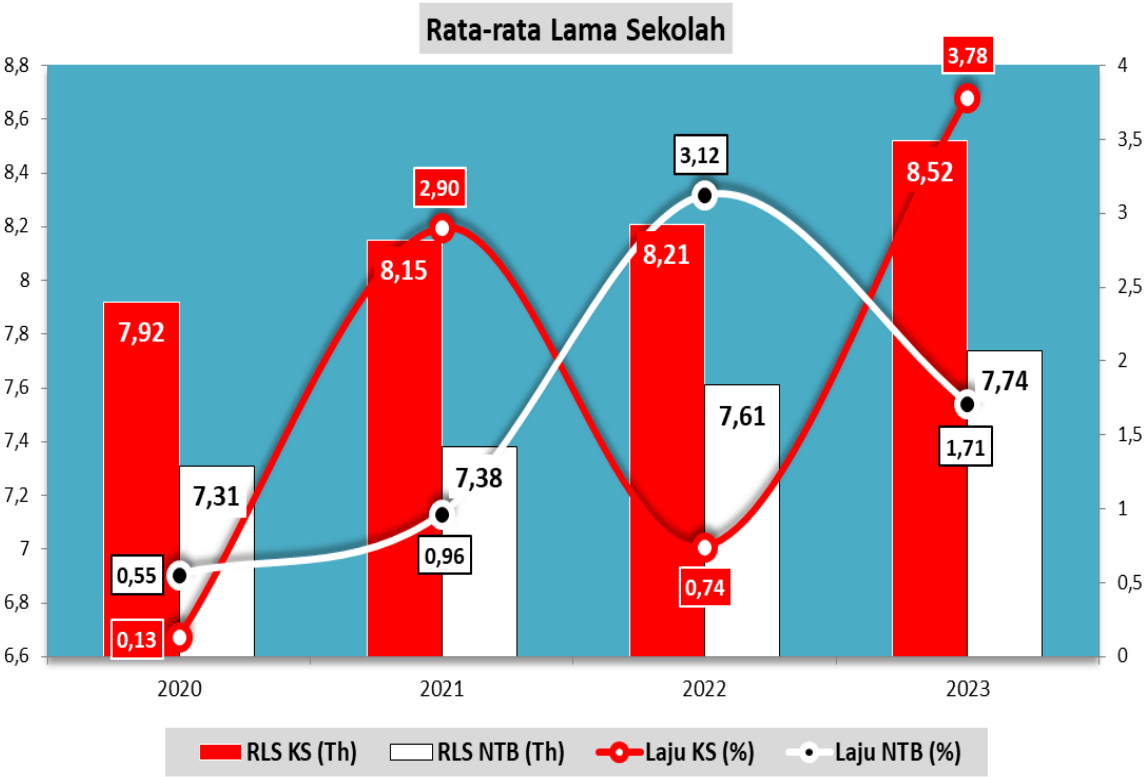
Harapan Lama Sekolah (HLS) merupakan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak usia 7 tahun keatas dimasa yang akan datang. Harapan Lama Sekolah digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang di suatu wilayah. Menurut perhitungan BPS, AHLS Kabupaten Sumbawa pada tahun 2023 mencapai 13,24 tahun yang artinya anak usia 7 tahun ke atas pada tahun 2023 di Kabupaten Sumbawa diharapkan mampu mengenyam pendidikan formal sampai tingkat Diploma-II. sebagaimana tergambar sebagai berikut.



Gambar 2. 37 Perbandingan Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Laju Pertumbuhan HLS antara Kabupaten Sumbawa dengan Provinsi NTB Tahun 2020-2023
Sumber Data: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumbawa

Angka Rata-rata Lama Sekolah (ARLS) adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah diselesaikan untuk menempuh pendidikan formal (tidak termasuk tahun yang mengulang). Indikator ini dihitung dari variabel pendidikan tertinggi yang ditamatkan dan tingkat pendidikan yang sedang diduduki. Cakupan penduduk yang dihitung RLS adalah penduduk usia 25 tahun ke atas dengan asumsi pada umur 25 tahun proses pendidikan sudah berakhir.

Rata-rata lama sekolah (*mean years of schooling*) menunjukkan rata-rata jumlah tahun efektif untuk bersekolah yang dicapai penduduk. Jumlah tahun efektif adalah jumlah tahun standar yang harus dijalani oleh seseorang untuk menamatkan suatu jenjang pendidikan, misalnya tamat SD adalah 6 tahun, tamat SMP adalah 9 tahun dan seterusnya. Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Sumbawa pada tahun 2023 adalah 8,52 tahun angka ini menunjukkan bahwa secara rata-rata pendidikan penduduk usia 25 tahun ke atas di Kabupaten Sumbawa setara dengan kelas 8 pendidikan menengah, taraf ini masih jauh dari wajib belajar 9 tahun. Berdasarkan data, RLS Kabupaten Sumbawa lebih tinggi dari Provinsi NTB, sebagaimana tergambar sebagai berikut.



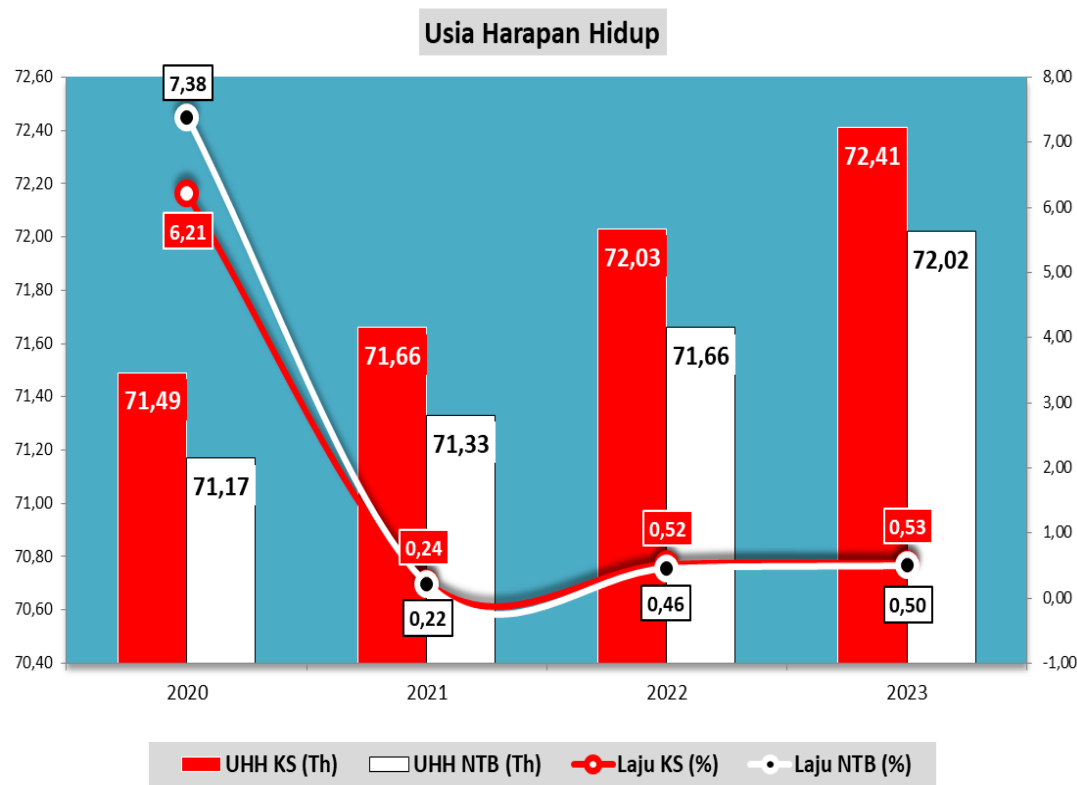
Gambar 2. 38 Perbandingan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Laju Pertumbuhan RLS
Sumber Data: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumbawa

Kesehatan

Angka Harapan Hidup

Pembangunan kesehatan di Kabupaten Sumbawa diarahkan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, karena pembangunan kesehatan merupakan upaya untuk memenuhi hak dasar rakyat, yaitu hak dasar untuk memperoleh akses atas kebutuhan pelayanan kesehatan. Pembangunan kesehatan juga harus dipandang sebagai suatu investasi dalam mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pembangunan ekonomi serta memiliki peran penting dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selain itu terlihat dari peningkatan pada dimensi umur panjang dan hidup sehat yang diwakili oleh indikator Umur Harapan Hidup, dimana Usia Harapan Hidup (UHH) adalah rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang selama hidup.

Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan UHH yaitu dengan menekan angka kematian ibu dan bayi. Selain itu, dengan meningkatkan kualitas hidup penduduk dengan menambah fasilitas dan tenaga kesehatan. Keberhasilan Pemerintah dalam meningkatkan kualitas hidup penduduk mengalami peningkatan dalam periode tahun 2020-2023, yakni dari 71,49 Tahun menjadi 72,41 Tahun yang artinya penduduk Sumbawa yang lahir ditahun 2023 memiliki harapan untuk hidup hingga umur 72 tahun 41 bulan, sebagaimana tergambar sebagai berikut.

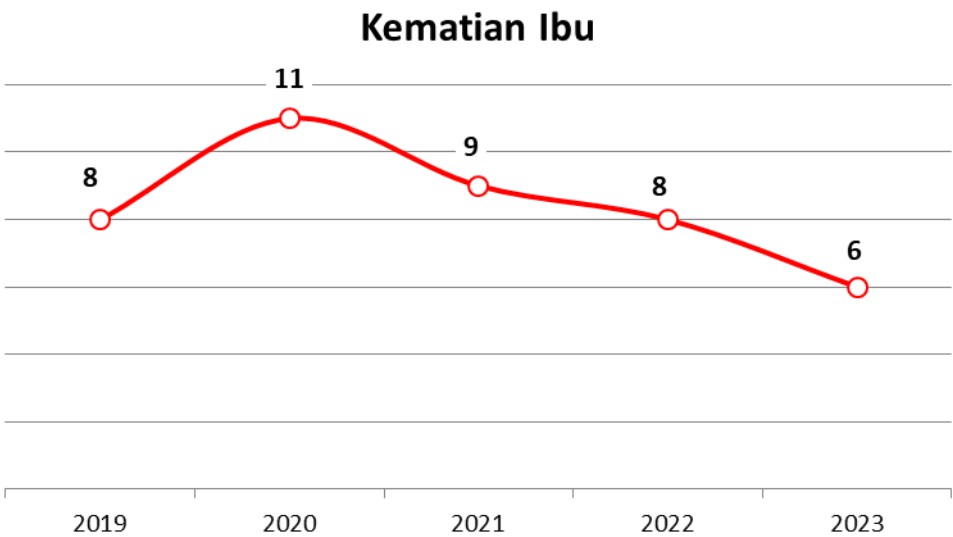


Gambar 2. 39 Perkembangan Angka (Tahun) dan Laju (%) Usia Harapan Hidup Kabupaten Sumbawa dan Provinsi NTB Tahun 2020-2023
Sumber Data: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumbawa

Angka Kematian

Angka Kematian Ibu (AKI)

Merujuk pada definisi BPS Angka Kematian Ibu (AKI) adalah banyaknya perempuan yang meninggal dari suatu penyebab kematian terkait dengan gangguan kehamilan atau penanganannya (tidak termasuk kecelakaan, bunuh diri atau kasus insidental) selama kehamilan, melahirkan, dan dalam masa nifas (42 hari setelah melahirkan) tanpa memperhitungkan lama kehamilan per 100.000 kelahiran hidup. Pada tahun 2023, ditemukan 6 kasus kematian ibu di Kabupaten Sumbawa, jumlah ini terus menurun selama 3 tahun berturut-turut. Adapun perkembangan jumlah kasus kematian ibu dilaporkan pada tahun 2019 hingga 2023 adalah sebagai berikut:



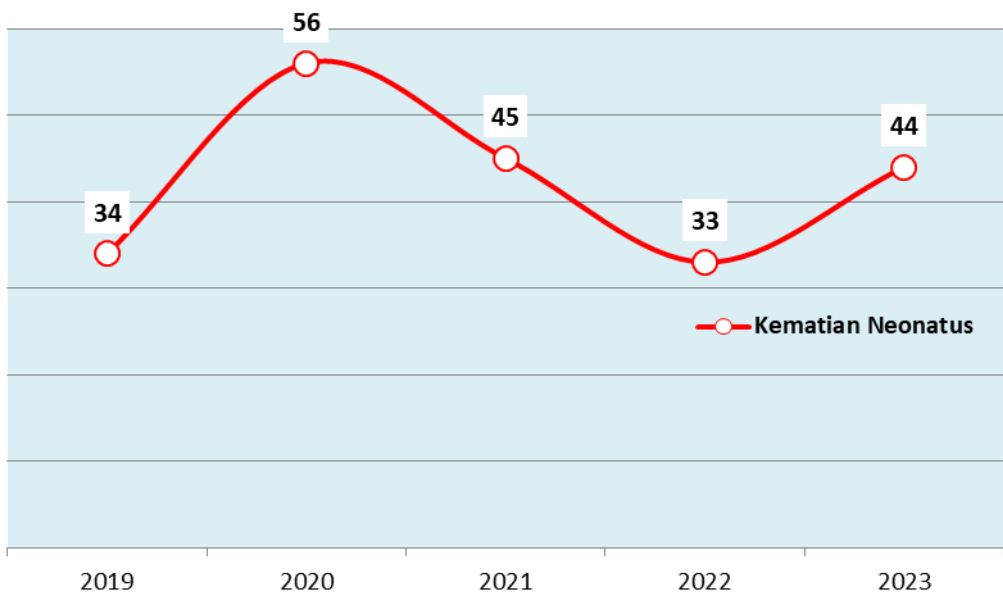
Gambar 2. 40 Angka Kasus Kematian Ibu Tahun 2019 – 2023
Sumber: Seksi Kesehatan Keluarga, Dinas Kesehatan Provinsi NTB

Untuk mendapatkan angka kematian ibu di Kab. Sumbawa tahun 2023 dibutuhkan angka lahir hidup. Angka lahir hidup adalah jumlah kelahiran bayi di suatu populasi tanpa memperhitungkan lamanya di dalam kandungan, dimana bayi menunjukkan tanda-tanda kehidupan, misal: bernafas, ada denyut jantung atau gerakan otot. Berdasarkan data Bidang Kesehatan Keluarga Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa pada tahun 2023 jumlah kelahiran hidup di Kabupaten Sumbawa adalah 7.767 jiwa, maka diperoleh Angka Kematian Ibu (AKI) di Kabupaten Sumbawa tahun 2023 adalah $77,24 \approx 77$ per 100.000 kelahiran hidup.

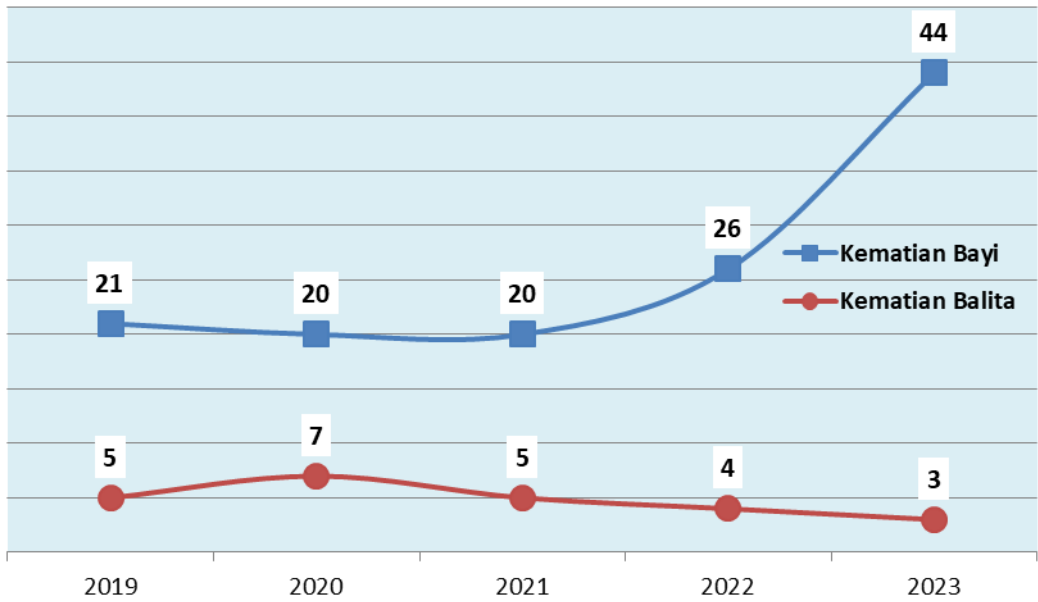
Angka Kematian Bayi dan Balita

Angka Kematian Bayi menunjukkan jumlah bayi meninggal dalam usia kurang satu tahun tiap 1.000 kelahiran hidup dalam kurun satu tahun. Data yang kami sajikan saat ini merupakan angka kematian bayi baru lahir (neonatus) yaitu angka kematian

bayi berumur kurang dari 28 hari tiap 1.000 kelahiran hidup dalam kurun satu tahun.



Gambar 2. 41 Angka Kasus Kematian Bayi baru Lahir (Neonatus) tahun 2019-2023
Sumber data: Seksi Kesehatan Keluarga, Dinas Kesehatan Provinsi NTB

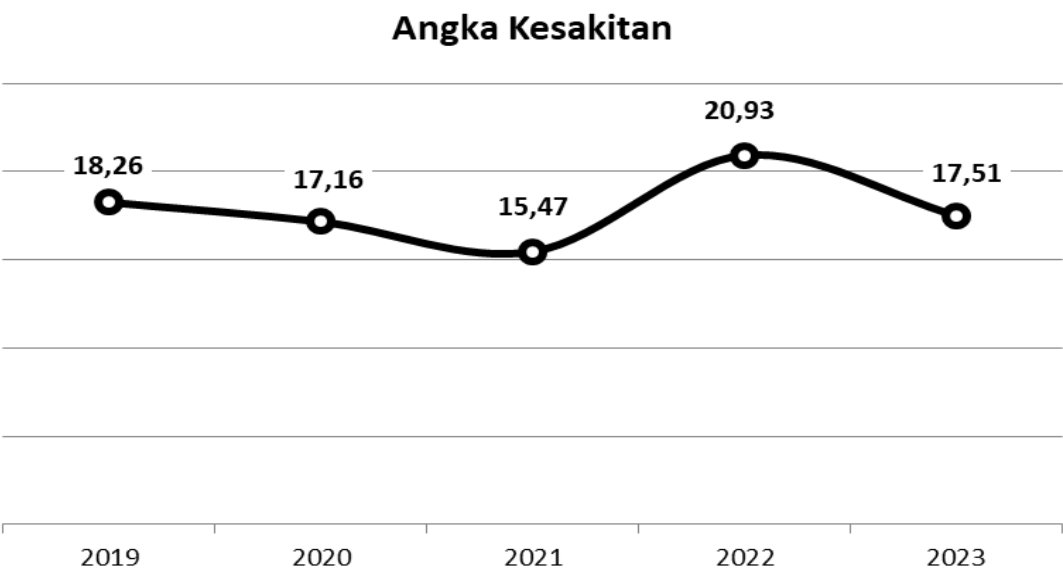


Gambar 2. 42 Perbandingan Jumlah Kematian Neonatal,Bayi dan Balita
Sumber: Seksi Kesehatan Keluarga, Dinas Kesehatan Provinsi NTB

Keluhan Kesehatan

Keluhan kesehatan yang dirasakan oleh seseorang menunjukkan orang tersebut mempunyai gangguan kesehatan atau kejiwaan. Keluhan kesehatan dapat disebabkan gangguan atau penyakit yang sering dialami, seperti panas, batuk, pilek, diare, sakit kepala, maupun karena penyakit akut, penyakit kronis (meskipun dalam sebulan terakhir tidak mempunyai keluhan), karena kecelakaan, kriminalitas, atau keluhan kesehatan lainnya.

Angka kesakitan adalah persentase penduduk yang mengalami keluhan kesehatan dan merasa terganggu dalam aktivitas sehari-hari, sehingga tidak dapat melakukan kegiatan secara normal seperti bekerja, sekolah, atau kegiatan sehari-hari lainnya sebagaimana biasanya. Tingginya angka kesakitan ini dapat mengindikasikan rendahnya derajat kesehatan masyarakat di suatu wilayah tersebut.



Gambar 2. 43 Perkembangan Angka Kesakitan Kabupaten Sumbawa tahun 2019-2023
Sumber data: Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi NTB 2023

Angka kesakitan Kabupaten Sumbawa terus mengalami penurunan dalam kondisi membaik dari tahun ke tahun yang mencapai 15,47% pada tahun 2021 dari 17,16% pada tahun 2020 namun naik menjadi 20,93% pada tahun 2022 dan kembali menurun di tahun 2023 menjadi 17,51%, hal ini perlu menjadi perhatian bagi pemerintah dan masyarakat Kabupaten Sumbawa untuk terus menerapkan pola hidup sehat serta menjaga kebersihan lingkungan sekitarnya agar terhindar dari penyakit-penyakit menular maupun tidak menular.

Adapun 10 penyakit terbanyak yang diderita masyarakat Kabupaten Sumbawa berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa antara lain,

Demam biasa	Luka ringan
Kolesterol	Faringitis
Myalgia	Diabetes Melitus non komplikasi
Gatal-gatal	Batuk pilek biasa
Diare	Hipertensi

Sumber Daya Kesehatan

Jumlah fasilitas kesehatan kian bertambah dari tahun ke tahun. Pada Tahun 2019, Poliklinik Muhammadiyah berubah fungsi menjadi Rumah Sakit Muhammadiyah. Dengan demikian, di Kabupaten Sumbawa memiliki tiga fasilitas Rumah Sakit, dua diantaranya milik pemerintah dan sisanya milik swasta. Peningkatan status tersebut juga disertai dengan peningkatan fasilitas seperti perbanyakkan ruang rawat inap serta penambahan poli.

Tabel 2. 12 Jumlah Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Sumbawa Tahun 2022-2023

Fasilitas Kesehatan	2022	2023
Rumah Sakit	3	3
Puskesmas	26	26
Posyandu	742	751
Klinik Pratama	8	9
Total	779	789

Sumber Data: Dinas Kesehatan Kab. Sumbawa

Jumlah tenaga medis harus disesuaikan dengan penambahan jumlah penduduk yang ada. Pada Tahun 2023, terdapat sebanyak 127 dokter umum. Perawat dan bidan merupakan dua terbanyak, yaitu 610 perawat dan 414 bidan. Sebagian besar tenaga kesehatan ditempatkan di unit kerja Puskesmas, dimana tersebar di tiap kecamatan di Kabupaten Sumbawa.

Tabel 2. 13 Jumlah Tenaga Kesehatan yang Bekerja di Unit Kesehatan Kabupaten Sumbawa Tahun 2023

Tenaga Kesehatan	26 Puskesmas	RSUD	RSUP	RS PKU Muhammadiyah	Total	Rasio tenaga kesehatan (per 100.000 penduduk)
Dokter Spesialis	0	24	11	10	45	8,50
Dokter Umum	57	19	26	25	127	23,99
Dokter Gigi	25	4	2	1	32	6,04
Dokter Gigi Spesialis	0	4	0	2	6	1,13
Perawat	821	253	127	33	1234	233,06
Bidan	795	62	121	12	990	186,97
Kesehatan Masyarakat	116	0	4	2	122	23,04
Kesehatan Lingkungan	43	6	1	1	51	9,63
Gizi	75	14	6	0	95	17,94

Tenaga Kesehatan	26 Puskesmas	RSUD	RSUP	RS PKU Muhammadiyah	Total	Rasio tenaga kesehatan (per 100.000 penduduk)
Ahli Laboratorium Medik	70	23	28	0	121	22,85
Tenaga Teknik Biomedik Lainnya	0	21	4	0	25	4,72
Keterapian Fisik	2	12	0	0	14	2,64
Keteknisan Medis	8	11	0	0	19	3,59
Tenaga Teknis Kefarmasian	32	16	5	9	62	11,71
Apoteker	26	12	5	2	45	8,50
Total	2.070	481	340	97	2.988	564,32

Sumber Data: Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa (diolah)

Derajat kesehatan penduduk salah satunya dipengaruhi oleh keberadaan sarana kesehatan yang memadai seperti rumah sakit dan puskesmas induk serta didukung dengan keberadaan puskesmas pembantu dan puskesmas keliling. Untuk melayani kesehatan penduduk yang berada di Kabupaten Sumbawa selain Rumah Sakit Umum Daerah, juga didukung oleh keberadaan puskesmas yang menyebar di semua kecamatan. Adapun rasio sarana kesehatan seperti Rumah Sakit, puskesmas, posyandu, dan poliklinik terhadap jumlah penduduk sebesar 671 penduduk pada tahun 2023, sedangkan secara kewilayahan, posisi Kabupaten Sumbawa pada tahun 2023 dalam pelayanan kesehatan menunjukkan bahwa perbandingan 1 sarana kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, posyandu, poliklinik mampu melayani wilayah seluas 8,42 km², hal ini terinci seperti pada tabel berikut.

Tabel 2. 14 Aksesibilitas Sarana Kesehatan di Kabupaten Sumbawa Tahun 2023

No	Kecamatan	Luas Wilayah (km ²)	Jumlah Penduduk (jiwa)	Sarana Kesehatan (RS, Puskesmas, Posyandu, Klinik pratama)	Rasio penduduk terhadap sarana kesehatan (jiwa/sarana kesehatan)	Rasio Luas Wilayah terhadap sarana kesehatan (km ² /sarana kesehatan)
1	Lunyuk	513,74	22.939	36	637	14,27
2	Orong Telu	465,97	5.645	15	376	31,06
3	Alas	123,04	34.201	34	1.006	3,62
4	Alas Barat	168,88	26.939	34	792	4,97
5	Buer	137,01	17.696	24	737	5,71
6	Utan	155,42	37.338	56	667	2,78
7	Rhee	230,82	9.638	22	438	10,49
8	Batulanteh	391,4	12.093	21	576	18,64

No	Kecamatan	Luas Wilayah (km ²)	Jumlah Penduduk (jiwa)	Sarana Kesehatan (RS, Puskesmas, Posyandu, Klinik pratama)	Rasio penduduk terhadap sarana kesehatan (jiwa/sarana kesehatan)	Rasio Luas Wilayah terhadap sarana kesehatan (km ² /sarana kesehatan)
9	Sumbawa	44,83	63.362	94	674	0,48
10	Labuhan Badas	435,89	36.710	26	1.412	16,77
11	Unter Iwes	82,38	24.606	37	665	2,23
12	Moyohilir	186,79	29.297	42	698	4,45
13	Moyo Utara	90,8	25.648	23	1.115	13,56
14	Moyohulu	311,96	12.046	38	317	2,39
15	Ropang	44,48	6.374	9	708	49,39
16	Lenangguar	504,32	8.265	16	517	31,52
17	Lantung	167,45	4.187	7	598	23,92
18	Lape	204,43	20.740	35	593	5,84
19	Lopok	155,59	22.208	36	617	4,32
20	Plampang	418,69	35.870	44	815	9,52
21	Labangka	243,08	14.030	49	286	4,96
22	Maronge	274,75	12.474	17	734	16,16
23	Empang	558,55	27.124	37	733	15,10
24	Tarano	333,71	20.057	37	542	9,02

Sumber Data: Dinas Kesehatan Kab. Sumbawa (diolah)

2.3. Aspek Daya Saing Daerah

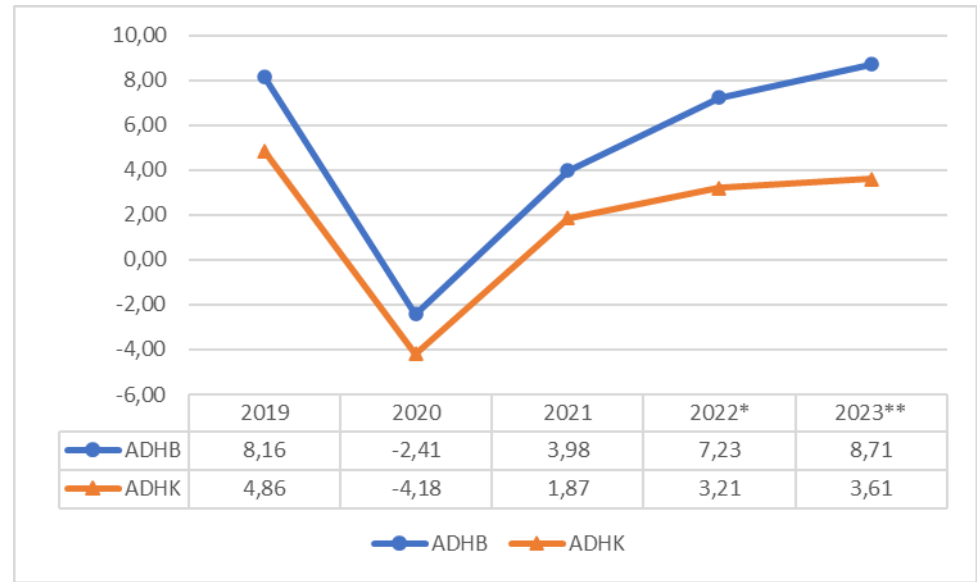
2.3.1. Daya Saing Ekonomi Daerah

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah nilai tambah bruto yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di daerah tersebut. Menghitung PDRB bertujuan untuk membantu membuat kebijakan daerah atau perencanaan, evaluasi hasil pembangunan, memberikan informasi yang dapat menggambarkan kinerja perekonomian daerah.

Produk Domestik Regional Bruto merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan.

PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi pada suatu daerah.

PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar. PDRB menurut harga berlaku digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya ekonomi, pergeseran, dan struktur ekonomi suatu daerah. Sementara itu, PDRB konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun atau pertumbuhan ekonomi yang tidak dipengaruhi oleh faktor harga. Gambaran laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Sumbawa selama kurun waktu lima tahun yaitu dari tahun 2019 hingga tahun 2023 baik ADHB maupun ADHK dapat dilihat pada grafik berikut ini.



Gambar 2. 44 Perkembangan Laju Pertumbuhan PDRB ADHB dan PDRB ADHK Kabupaten Sumbawa Tahun 2019-2023
Sumber Data: PDRB Kabupaten Sumbawa Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019-2023
Keterangan: * Data Sementara; ** Data Sangat Sementara

Selama tahun 2019-2024 pertumbuhan PDRB ADHB maupun ADHK Nilai PDRB Kabupaten Sumbawa atas dasar harga berlaku pada Tahun 2023 mencapai 17,51 triliun rupiah. Secara nominal, nilai PDRB ini mengalami peningkatan sebesar 1,40 triliun rupiah dibandingkan dengan Tahun 2022 sebesar 16,11 triliun rupiah. Kenaikan nilai PDRB ini dipengaruhi oleh meningkatnya produksi di hampir seluruh lapangan usaha seiring pulihnya kondisi ekonomi pasca pandemi Covid- 19 dan adanya inflasi.

Berdasarkan harga konstan 2010, angka PDRB juga mengalami peningkatan dari 10,55 trilyun rupiah pada Tahun 2022 menjadi 10,93 trilyun rupiah pada Tahun 2023. Hal ini menunjukkan selama Tahun 2023 Kabupaten Sumbawa mengalami pertumbuhan ekonomi sebesar 3,61 persen. Pertumbuhan ini disebabkan oleh pulihnya kondisi ekonomi pasca pandemi Covid-19, namun tidak dipengaruhi inflasi. Berikut disajikan data PDRB dan Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Sumbawa:

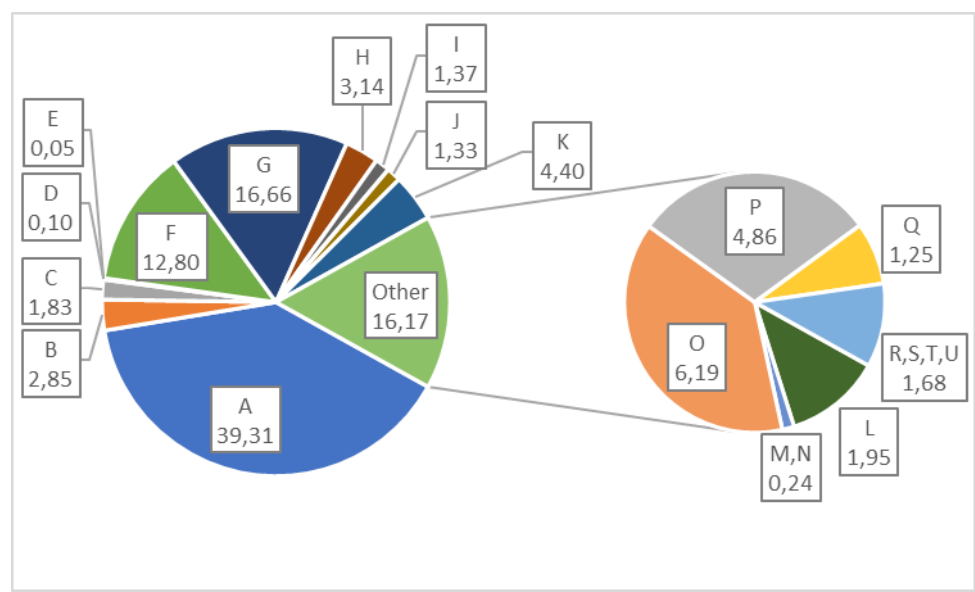
Tabel 2. 15 PDRB dan Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Sumbawa Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan 2010 Tahun 2019-2023

Tahun	PDRB ADHB (Milyar Rp.)	PDRB ADHK 2010 (Milyar Rp.)	Laju Pertumbuhan ADHB (%)	Laju Pertumbuhan ADHK 2010 (%)
2019	14.803.285,32	10.470.747,52	8,16	4,86
2020	14.446.250,14	10.032.954,54	-2,41	-4,18
2021	15.021.397,00	10.220.819,19	3,98	1,87
2022*	16.107.717,29	10.548.580,66	7,23	3,21
2023**	17.510.432,81	10.929.058,89	8,71	3,61

Sumber: PDRB Kabupaten Sumbawa Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019-2023

Selama rentang Tahun 2019-2023, struktur perekonomian di Kabupaten Sumbawa tidak banyak berubah. Diketahui, penopang ekonomi yang paling utama di Kabupaten Sumbawa pada Tahun 2023 masih berasal dari kategori pertanian, kehutanan, dan perikanan dengan sharenya sebesar 39,31 persen. Berikutnya, perekonomian Sumbawa disokong dari kategori perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor dengan kontribusinya sebesar 16,66 persen, kemudian oleh kategori konstruksi yang ikut andil sebesar 12,80 persen. Sedangkan kontribusi dari 14 kategori lapangan usaha lainnya tidak lebih dari 7 persen untuk tiap kategorinya. Dominasi kategori pertanian yang ekstrim tersebut

menyebabkan ketergantungan ekonomi regional terhadap kategori tersebut sangat besar.



Gambar 2. 45 Kontribusi Kategori Lapangan Usaha Terhadap PDRB di Kabupaten Sumbawa ADHB Tahun 2023 (%)

Sumber Data: PDRB Kabupaten Sumbawa Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019-2023

Selama periode Tahun 2019-2023, meskipun tidak ada perubahan struktur ekonomi yang signifikan, kontribusi tiga kategori kontributor utama mengalami perubahan. Kontribusi kategori pertanian pada Tahun 2019 sebesar 38,38 persen, pada Tahun 2023 ini mengalami peningkatan ke angka 39,31 persen. Selain kategori pertanian, perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor juga mengalami peningkatan sejak 2019, yaitu dari 16,21 meningkat menjadi 16,66 persen di Tahun 2023. Berbeda dengan dua kategori sebelumnya, kategori konstruksi mengalami penurunan peranan selama lima tahun terakhir, yaitu dari 13,88 persen menjadi 12,80 persen.

Tabel 6. 1 Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Sumbawa ADHB Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019-2023

Kategori	Lapangan Usaha	2019		2020		2021		2022*		2023**	
		ADHB (Milyar)	Persen (%)	ADHB (Milyar)	Persen (%)	ADHB (Milyar)	Persen (%)	ADHB (Milyar)	Persen (%)	ADHB (Milyar)	Persen (%)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5.681,93	38,38	5.760,90	39,88	5.948,84	39,60	6.256,87	38,84	6.883,49	39,31
B	Pertambangan dan Penggalian	460,77	3,11	430,73	2,98	443,62	2,95	462,48	2,87	498,19	2,85
C	Industri Pengolahan	272,75	1,84	273,01	1,89	279,36	1,86	294,04	1,83	320,79	1,83
D	Pengadaan Listrik dan Gas	12,81	0,09	14,17	0,10	15,26	0,10	16,40	0,10	17,51	0,10
E	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	6,77	0,05	6,89	0,05	6,99	0,05	7,55	0,05	8,07	0,05
F	Konstruksi	2.055,43	13,88	1.752,70	12,13	1.906,96	12,69	2.019,77	12,54	2.241,24	12,80
G	Perdagangan Besar dan Eceran	2.399,73	16,21	2.348,29	16,26	2.415,99	16,08	2.677,49	16,62	2.916,68	16,66
H	Transportasi dan Pergudangan	570,67	3,85	414,61	2,87	431,57	2,87	509,47	3,16	550,00	3,14
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	203,14	1,37	166,46	1,15	169,03	1,13	217,71	1,35	239,75	1,37
J	Informasi dan Komunikasi	177,17	1,20	198,13	1,37	207,81	1,38	218,38	1,36	232,54	1,33
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	555,54	3,75	591,59	4,10	628,65	4,19	723,23	4,49	771,02	4,40
L	Real Estat	306,12	2,07	309,10	2,14	314,03	2,09	322,81	2,00	340,72	1,95

Kategori	Lapangan Usaha	2019		2020		2021		2022*		2023**	
		ADHB (Milyar)	Persen (%)	ADHB (Milyar)	Persen (%)	ADHB (Milyar)	Persen (%)	ADHB (Milyar)	Persen (%)	ADHB (Milyar)	Persen (%)
M,N	Jasa Perusahaan	33,32	0,23	34,47	0,24	34,66	0,23	38,45	0,24	42,24	0,24
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	928,65	6,27	992,55	6,87	1.022,28	6,81	1.063,46	6,60	1.084,60	6,19
P	Jasa Pendidikan	716,67	4,84	735,24	5,09	760,77	5,06	796,32	4,94	850,57	4,86
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	178,52	1,21	182,09	1,26	192,78	1,28	205,41	1,28	219,16	1,25
R,S,T,U	Jasa Lainnya	243,30	1,64	235,31	1,63	242,80	1,62	277,87	1,73	293,86	1,68
Produk Domestik Regional Bruto		14.803,29	100,00	14.446,25	100,00	15.021,40	100,00	16.107,72	100,00	17.510,43	100,00

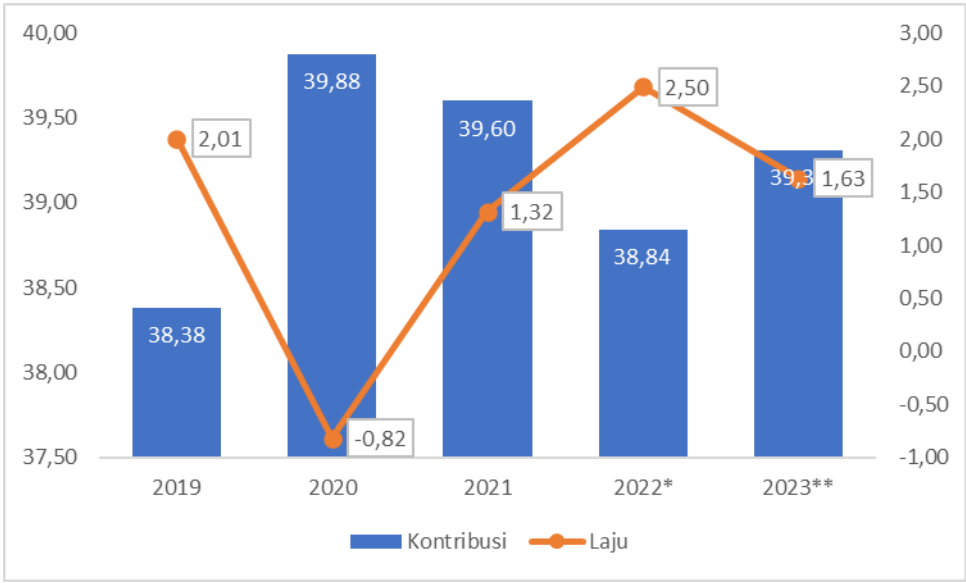
Sumber: PDRB Kabupaten Sumbawa Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019-2023

PDRB menurut lapangan usaha terdiri dari 17 Kategori, yakni:

1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan

Kategori lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan mencakup 3 subkategori yaitu subkategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; subkategori Kehutanan dan Penebangan Kayu; subkategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan meliputi Tanaman Pangan, Tanaman Holtikultura, Tanaman Perkebunan, Peternakan, dan Jasa Pertanian dan Perburuan.

Selama Tahun 2019-2023, peranan kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan berfluktuasi namun cenderung meningkat. Pada Tahun 2019, kategori ini menyumbang kontribusi sebesar 38,38 persen, kemudian terjadi peningkatan dan penurunan. Pada Tahun 2023 meningkat menjadi 39.31 persen. Kategori ini mempunyai peran yang sangat sentral di Kabupaten Sumbawa. Hal ini terlihat dari distribusi perekonomian di mana kategori ini masih menduduki posisi sebagai kontributor utama terhadap PDRB Kabupaten Sumbawa selama 5 tahun terakhir.



Gambar 2. 46 Kontribusi dan Laju Pertumbuhan PDRB Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan di Kabupaten Sumbawa Tahun 2019-2023
Sumber Data: PDRB Kabupaten Sumbawa Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019-2023

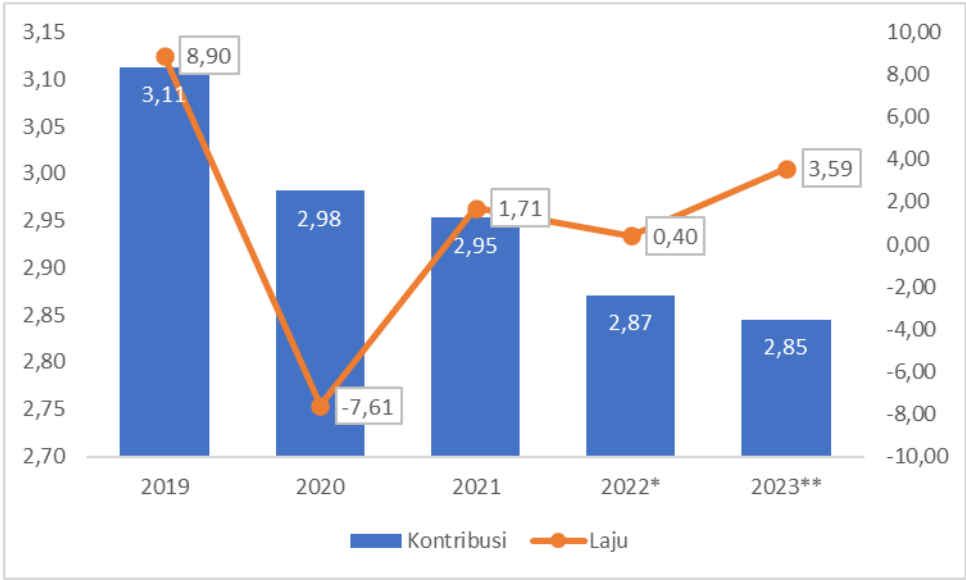
Pada Tahun 2019 laju pertumbuhan lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan cenderung tumbuh sebesar 2,01 persen. Kemudian pada Tahun 2020, dampak dari musim kemarau berkepanjangan yang menggeser musim tanam menyebabkan produksi padi pun turun selain karena puso (tidak mengeluarkan hasil – sawah) sehingga menyebabkan kontraksi sebesar 0,82 persen. Laju pertumbuhan kembali tumbuh selama Tahun 2021 – 2023, bahkan tumbuh 2,50 persen karena hasil

panen yang semakin banyak hasil pergeseran musim hujan dari tahun sebelumnya. Pada Tahun 2023, pertumbuhan melambat hingga 1,63 persen.

2. **Pertambangan dan Penggalian**

Kategori Pertambangan dan Penggalian dirinci menjadi 4 (empat) subkategori, antara lain: subkategori Pertambangan Minyak, Gas, dan Panas Bumi; subkategori Pertambangan Batubara dan Lignit; subkategori Pertambangan Bijih Logam; dan subkategori Pertambangan dan Penggalian lainnya. Di Sumbawa hanya terdapat Pertambangan Bijih Logam dan Pertambangan dan Penggalian lainnya.

Peran kategori Pertambangan dan Penggalian memang tidak terlalu signifikan, hanya menyumbang sekitar 2 hingga 3 persen pada 5 tahun terakhir dengan kontribusi tertinggi pada Tahun 2019 yaitu sebesar 3,11. Untuk lebih jelas peranan kategori ini dari Tahun 2019 hingga 2023 dapat dilihat pada Gambar 2.47.

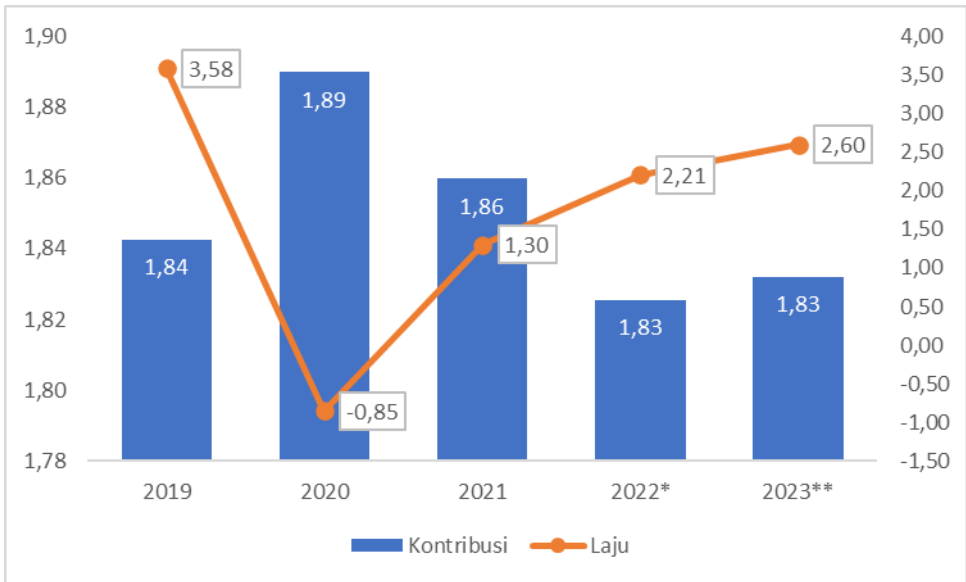


Gambar 2. 47 Kontribusi dan Laju Pertumbuhan PDRB Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian di Kabupaten Sumbawa Tahun 2019-2023
Sumber Data: PDRB Kabupaten Sumbawa Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019-2023

Pertambangan dan Penggalian tumbuh menjanjikan pada 2019, hampir mencapai 9 persen, tertinggi dalam 5 tahun terakhir. Namun, pada 2020, terjadi bahkan kontraksi hingga -7,61 persen akibat pandemi Covid-19. Meskipun demikian, pada 2021-2023, pertumbuhan sektor ini kembali positif, masing-masing sebesar 1,71 persen, 0,40 persen, dan 3,59 persen. Hal ini dipicu oleh proyek-proyek pembangunan seperti Bendungan Beringin Sila dan sirkuit MXGP Samota.

3. Industri Pengolahan

Industri pengolahan adalah proses transformasi bahan mentah menjadi produk akhir dengan nilai tambah yang tinggi, berperan penting dalam rantai pasok global sebagai produsen dan pemasok bahan baku. Namun, kontribusinya dalam pertumbuhan ekonomi suatu daerah cenderung stagnan dari 2019 hingga 2023, berkisar antara 1,83 persen hingga 1,89 persen.

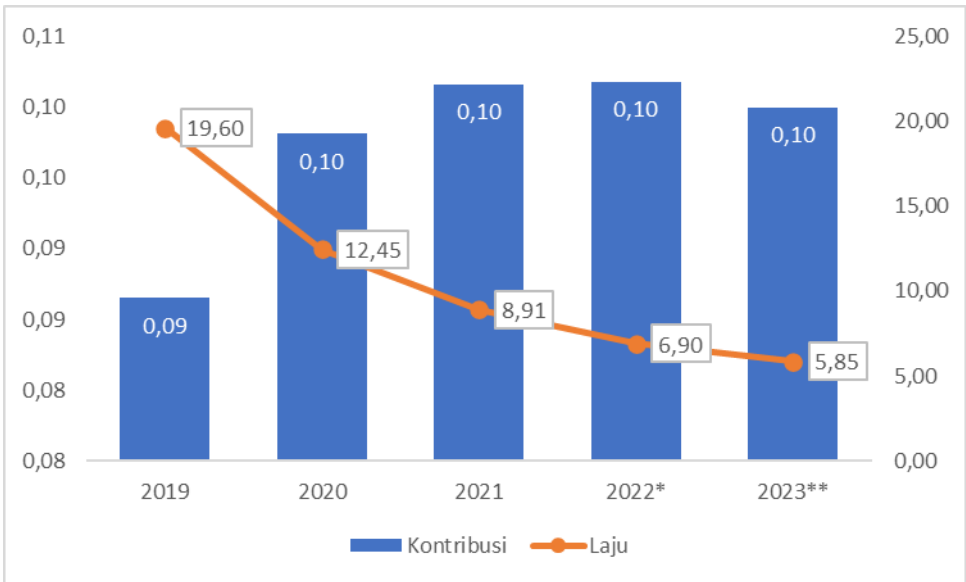


Gambar 2. 48 Kontribusi dan Laju Pertumbuhan PDRB Lapangan Usaha Industri Pengolahan di Tahun 2019-2023
Sumber Data: PDRB Kabupaten Sumbawa Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019-2023

Pertumbuhan ekonomi Industri Pengolahan di Kabupaten Sumbawa fluktuatif dalam 5 tahun terakhir, dengan rata-rata pertumbuhan 1,77 persen. Tertinggi tercatat pada 2019, mencapai 3,58, namun mengalami perlambatan signifikan di 2020 dengan kontraksi -0,85 persen akibat pandemi Covid-19. Pemulihan terjadi di 2021 dengan pertumbuhan 1,30 persen setelah situasi ekonomi membaik pasca-pandemi, dan terus meningkat ke 2,21 persen di 2022 serta 2,60 persen di 2023.

4. Pengadaan Listrik dan Gas

Listrik sudah menjadi kebutuhan masyarakat modern. Di zaman berkembangnya teknologi yang memudahkan kehidupan seperti sekarang ini, mayoritas teknologi tersebut membutuhkan daya. Sedangkan daya dapat dipenuhi diantaranya dari listrik. Belum semua wilayah di Sumbawa teraliri listrik. Disalurkanannya listrik di daerah yang masih belum dialiri listrik akan meningkatkan nilai tambah kategori tersebut terhadap total PDRB Sumbawa. Kategori pengadaan listrik dan gas terdiri dari dua subkategori, yaitu: subkategori Pengadaan Gas dan Produksi Es.



Gambar 2. 49 Kontribusi dan Laju Pertumbuhan PDRB Lapangan Usaha Pengadaan Listrik dan Gas di Kabupaten Sumbawa Tahun 2019-2023
Sumber Data: PDRB Kabupaten Sumbawa Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019-2023

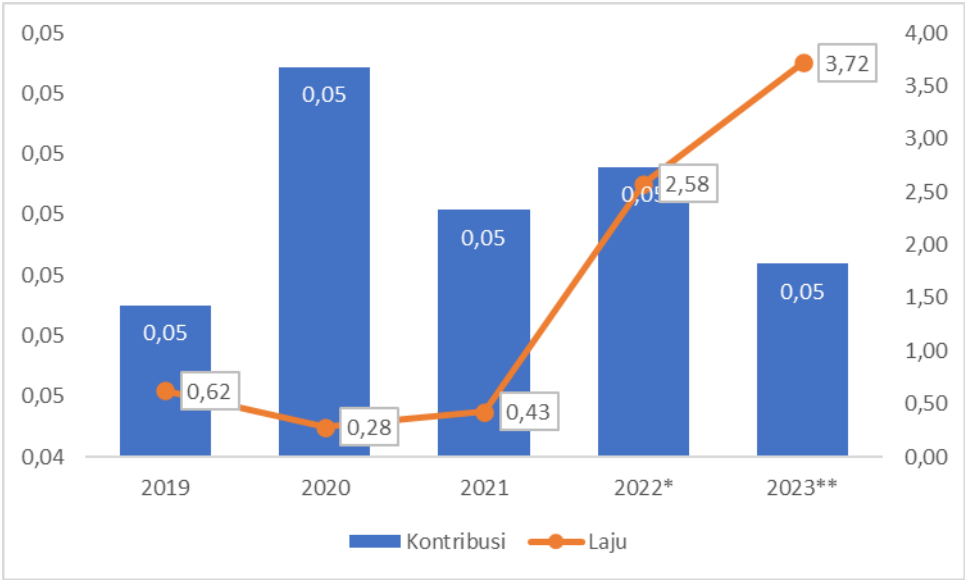
Kategori Pengadaan Listrik dan Gas mempunyai andil tipis selama 5 tahun terakhir, berkisar antara angka 0,09 sampai 0,10 persen. Untuk Tahun 2023 sendiri, angka kontribusi kategori ini sebesar 0,10 persen atau sebesar 17,51 milyar rupiah jika dilihat atas dasar harga berlaku.

Dalam 5 tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi di sektor Pengadaan Listrik dan Gas Kabupaten Sumbawa melambat. Puncak pertumbuhan terjadi pada 2019 dengan 19,60 persen karena pembangunan pembangkit listrik baru. Namun, kemudian terjadi penurunan, mencapai 12,45 persen pada 2020, 8,91 persen pada 2021, 6,90 persen pada 2022, dan 5,85 persen pada 2023. Meski mengalami perlambatan, angka tersebut masih tinggi. Penyebabnya termasuk penambahan pasokan listrik 24 jam di Pulau Medang pada 2022, permintaan listrik meningkat untuk acara MXGP Samota, eksplorasi tambang, dan peningkatan penggunaan listrik di sektor industri dan budidaya perikanan, khususnya tambak.

5. **Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang**

Kategori Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang. Kategori ini mencakup kegiatan ekonomi pengumpulan, pengolahan dan pendistribusian air melalui berbagai saluran pipa untuk kebutuhan rumah tangga dan industri. Termasuk juga kegiatan pengumpulan, penjernihan dan pengolahan air dan sungai, danau, mata air, hujan, dll.

Peranan kategori ini terhadap perekonomian berada di angka 0,05 persen sejak 2019 hingga 2023. Secara nilai tambah terhadap perekonomian memang perannya kecil, tetapi pengadaan air bersih merupakan usaha yang vital demi keberlangsungan hidup bersih dan sehat di Kabupaten Sumbawa. Pengadaan air bersih oleh PERUMDAM Batu Lanteh adalah salah satu pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat Sumbawa.



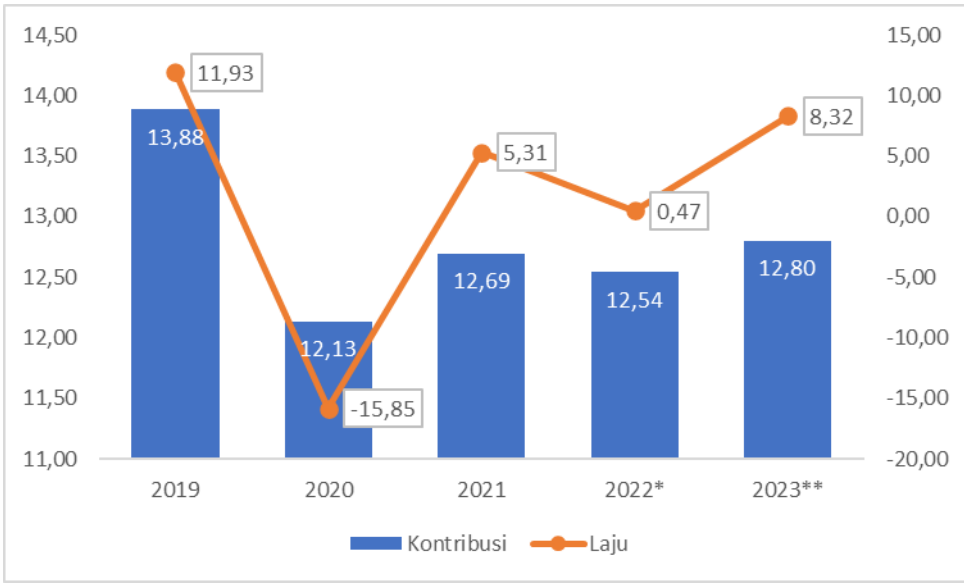
Gambar 2. 50 Kontribusi dan Laju Pertumbuhan PDRB Lapangan Usaha Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang di Kabupaten Sumbawa Tahun 2019-2023
Sumber Data: PDRB Kabupaten Sumbawa Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019-2023

Pertumbuhan ekonomi dalam kategori Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang di Kabupaten Sumbawa dalam 5 tahun terakhir menunjukkan tren meningkat. Pada 2019, laju pertumbuhan mencapai 0,62 persen, meskipun mengalami perlambatan pada 2020 menjadi 0,28 persen, namun kemudian kembali meningkat hingga mencapai 3,72 persen pada 2023. Peningkatan pesat ini dipicu oleh peningkatan jumlah pelanggan dan permintaan yang meningkat, terutama dengan beberapa daerah menghadapi kekeringan akibat fenomena El Nino.

6. Konstruksi

Kategori Konstruksi. Kebutuhan akan infrastruktur mutlak diperlukan dalam rangka mendukung proses pembangunan. Keberadaan infrastruktur yang memadai adalah salah satu factor daya tarik investasi disamping faktor-faktor lainnya seperti: stabilitas politik dan keamanan yang terjamin, birokrasi perijinan yang ramping dan efisien, jaminan dan perlindungan investasi yang memadai, dan lain-lain. Sebagai daerah yang terus mengupayakan peningkatan pembangunan, kategori infrastruktur menjadi salah

satu sasaran pemerintah Sumbawa sebagai media pendobrak perekonomian.



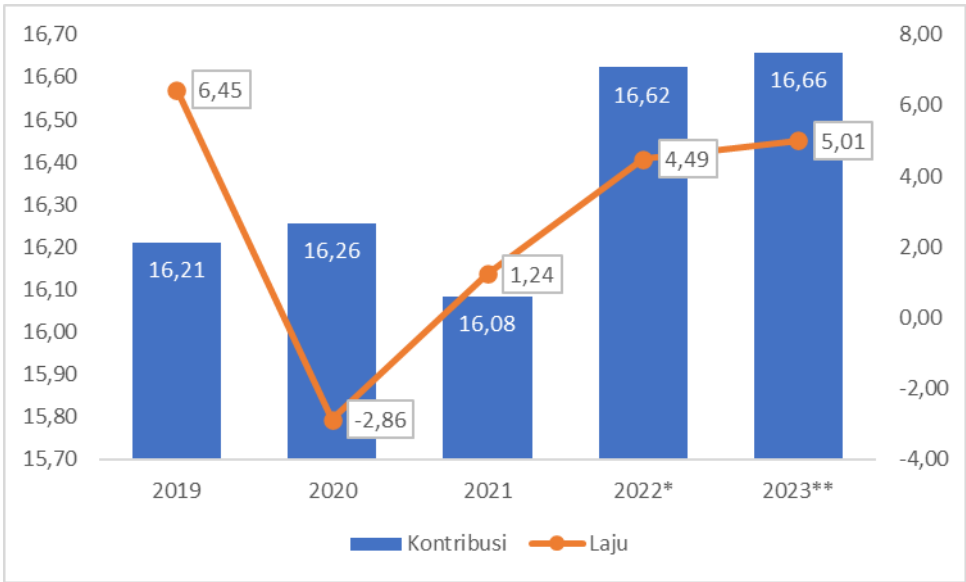
Gambar 2. 51 Kontribusi dan Laju Pertumbuhan PDRB Lapangan Usaha Konstruksi di Kabupaten Sumbawa Tahun 2019-2023
Sumber Data: PDRB Kabupaten Sumbawa Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019-2023

Kategori konstruksi memiliki peran yang signifikan dalam ekonomi Sumbawa selama lima tahun terakhir, berkisar antara 12 hingga 13 persen dari total. Puncak kontribusinya terjadi pada Tahun 2019, mencapai 13,88 persen atau setara dengan 2,05 triliun rupiah. Meskipun mengalami sedikit penurunan pada Tahun 2020 menjadi 12,13 persen, namun kembali meningkat hingga mencapai 12,80 persen pada Tahun 2023. Dengan capaian tersebut, kategori konstruksi tetap kokoh sebagai kontributor terbesar ketiga dalam perekonomian Sumbawa selama lima tahun terakhir.

Selama periode 2019 hingga 2023, pertumbuhan ekonomi dalam kategori konstruksi mengalami fluktuasi. Pada tahun 2019, kategori ini mencatat pertumbuhan yang tinggi, mencapai 11,93 persen. Namun, terjadi perlambatan ekstrem hingga kontraksi pada tahun 2020, mencapai -15,85 persen, yang disebabkan oleh dampak pandemi Covid-19. Selanjutnya, dari tahun 2021 hingga 2023, pertumbuhan ekonomi dalam kategori ini kembali mengalami pertumbuhan positif. Penyebab peningkatan ini termasuk proyek pembangunan Bendungan Beringin Sila di Sumbawa dan infrastruktur lainnya, pembangunan sirkuit MXGP, serta berbagai proyek infrastruktur seperti pembangunan jalan dan irigasi yang masih aktif di Sumbawa.

7. **Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor**

Kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil terdiri dari dua subkategori, yaitu Perdagangan Mobil, Sepeda Motor, dan Reparasinya; serta Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor. Pada Tahun 2023, kontribusinya terhadap perekonomian Sumbawa mencapai 16,66 persen, menjadikannya penopang kedua terbesar ekonomi Kabupaten Sumbawa. Pertumbuhan kategori perdagangan selama 5 tahun terakhir cenderung fluktuatif, terutama di tahun 2020 dimana terkontraksi sebesar 2,86 persen akibat pandemi Covid-19. Namun, kategori ini berhasil tumbuh sebesar 1,24 persen pada 2021, kemudian 4,49 persen pada 2022, dan 5,01 persen pada 2023. Perkembangan teknologi telah mengubah penyelenggaraan event MXGP dan konser musik dengan promosi yang efisien, penjualan tiket online, dan kemitraan digital, membuka peluang baru bagi sektor perdagangan untuk meningkatkan pendapatan dan menarik lebih banyak kemitraan untuk event-event tersebut

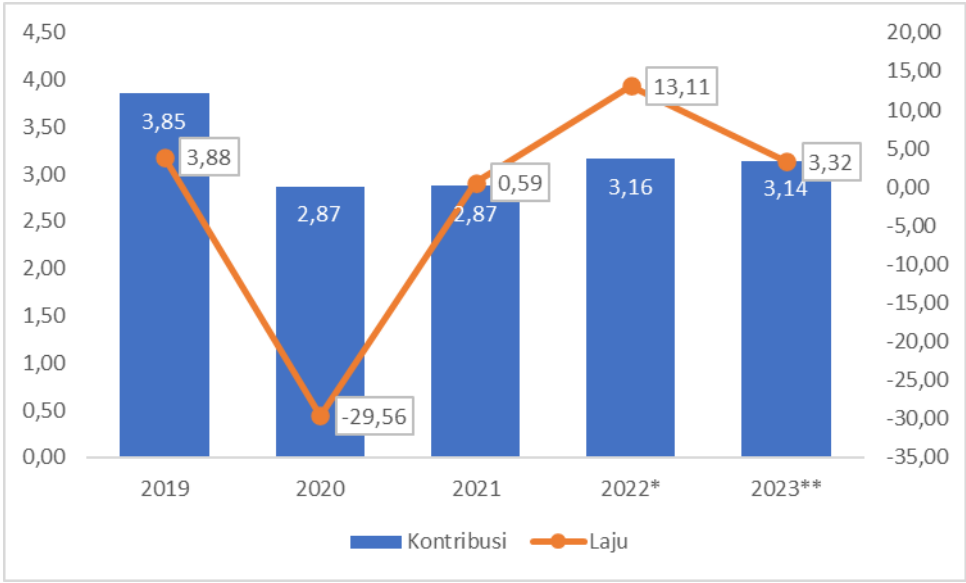


Gambar 2. 52Kontribusi dan Laju Pertumbuhan PDRB Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor di Kabupaten Sumbawa Tahun 2019-2023
Sumber Data: PDRB Kabupaten Sumbawa Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019-2023

8. **Transportasi dan Pergudangan**

Kategori Transportasi dan Pergudangan merupakan kegiatan penunjang dalam aktivitas perekonomian. keberadaan kategori ini tentunya semakin mendukung kemajuan lapangan usaha lainnya. Meningkatnya produksi sektor riil dan bertambahnya dinamika mobilitas penduduk merupakan potensi untuk mendorong kinerja sektor ini.

Kontribusi kategori Transportasi dan Pergudangan terhadap total PDRB Kabupaten Sumbawa dalam 5 tahun terakhir cenderung mengalami penurunan dari 3,85 persen pada 2019 menjadi 3,14 persen pada Tahun 2023.



Gambar 2. 53 Kontribusi dan Laju Pertumbuhan PDRB Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan di Kabupaten Sumbawa Tahun 2019-2023
Sumber Data: PDRB Kabupaten Sumbawa Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019-2023

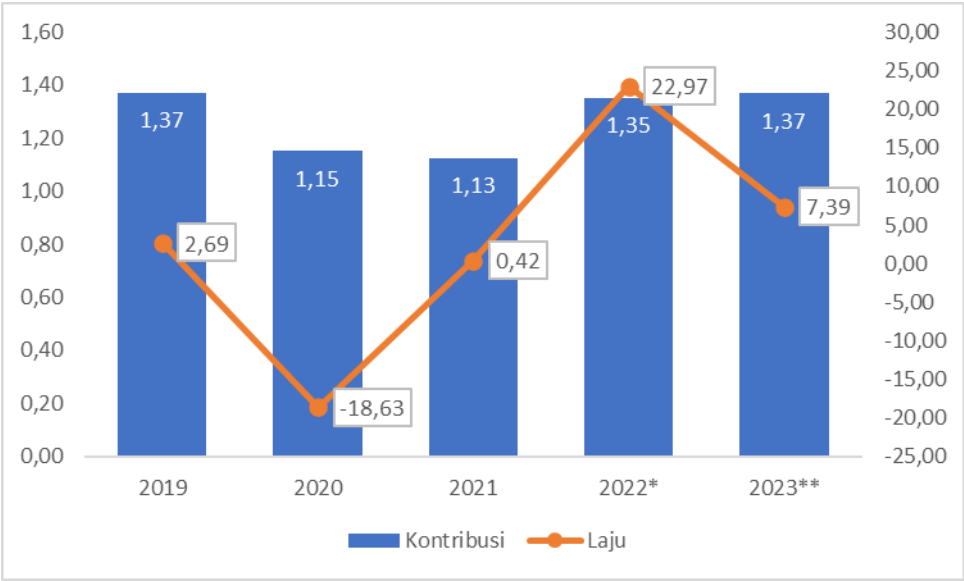
Selama 5 tahun terakhir, laju pertumbuhan dalam kategori Transportasi dan Pergudangan di Kabupaten Sumbawa telah mengalami fluktuasi yang signifikan. Terutama pada tahun 2020, dampak dari pandemi Covid-19 menyebabkan perlambatan pertumbuhan yang ekstrim dan bahkan berkontraksi sebesar -29,56 persen.

Namun, laju pertumbuhan ekonomi dalam kategori ini telah pulih kembali, dengan peningkatan yang pesat mencapai 13,11 persen pada Tahun 2022, meskipun melambat menjadi 3,32 persen pada tahun 2023. Peningkatan ini sebagian disebabkan oleh meningkatnya jumlah penumpang kendaraan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) dan Angkot, seiring dengan pemulihan mobilitas pasca-pandemi Covid-19. Selain itu, event MXGP juga telah meningkatkan permintaan akan transportasi antar daerah baik di Kabupaten Sumbawa maupun masuk dan keluar dari kabupaten tersebut.

9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

Kategori Penyedia Akomodasi dan Makan Minum terbagi menjadi dua subkategori, yaitu: subkategori Penyediaan Akomodasi dan subkategori Penyediaan Makan Minum. Kategori lapangan usaha penyedia akomodasi dan makan minum mencakup bisnis seperti hotel, restoran, kafe, dan layanan sejenisnya yang menyediakan tempat menginap serta makanan dan minuman kepada pelanggan.

Kontribusi kategori ini tidak terlalu signifikan, hanya 1,37 persen dari total perekonomian di Sumbawa pada Tahun 2023 atau menyumbang sekitar 239,75 Milyar rupiah.

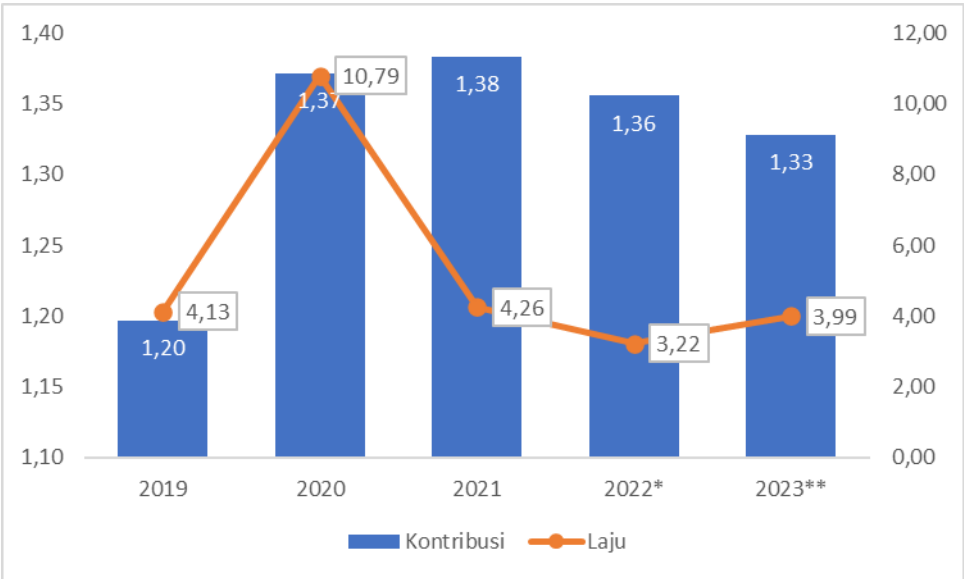


Gambar 2. 54 Kontribusi dan Laju Pertumbuhan PDRB Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum di Kabupaten Sumbawa Tahun 2019-2023
Sumber Data: PDRB Kabupaten Sumbawa Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019-2023

Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum mengalami fluktuasi selama 2019-2023, terutama karena pandemi Covid-19. Pada 2020, sektor ini berkontraksi -18,63 persen karena pembatasan perjalanan dan penutupan bisnis. Pada 2021, pertumbuhan kembali positif 0,42 persen, meskipun belum mencapai level sebelum Covid- 19. Pelonggaran pembatasan perjalanan dan kegiatan menyebabkan pertumbuhan yang signifikan: 22,97 persen di 2022 dan 7,39 persen di 2023. Ini didorong oleh layanan pesan antar, Car Free Day mingguan, dan event MXGP Samota sejak 2022 yang menjadi stimulus perekonomian di sektor ini.

10. Informasi dan Komunikasi

Kategori Informasi dan Komunikasi memiliki peranan sebagai penunjang aktivitas di setiap bidang ekonomi. Dalam era globalisasi, peranan kategori ini sangat penting dan menjadi indikator kemajuan suatu bangsa, terutama jasa komunikasi.



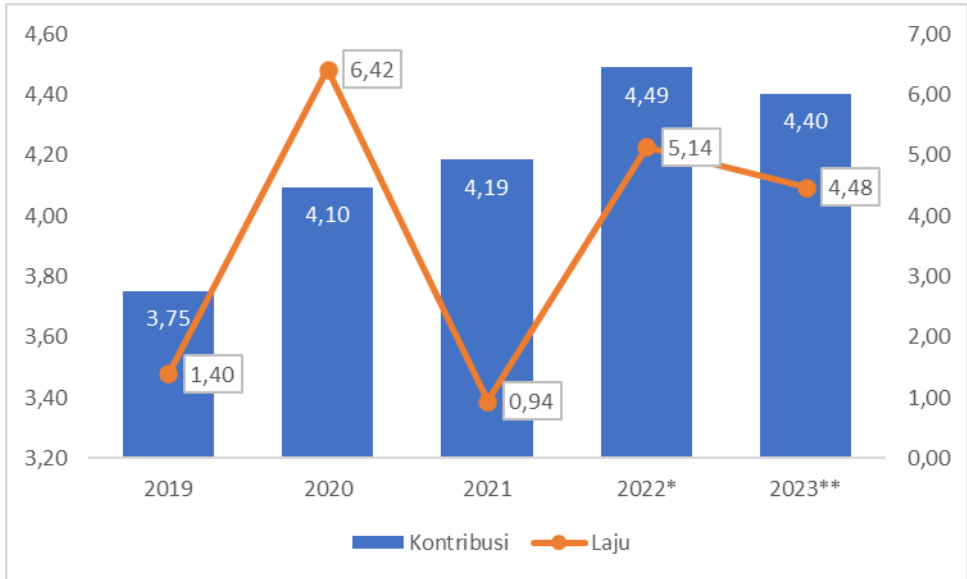
Gambar 2. 55 Kontribusi dan Laju Pertumbuhan PDRB Lapangan Usaha Informasi dan Komunikasi di Kabupaten Sumbawa Tahun 2019-2023
Sumber Data: PDRB Kabupaten Sumbawa Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019-2023

Peranan kategori informasi dan komunikasi di Kabupaten Sumbawa selama lima tahun terakhir relatif stabil di kisaran 1 persen. Tahun 2021 merupakan tahun dengan kontribusi tertinggi selama lima tahun terakhir yaitu sebesar 1,38 persen.

Pertumbuhan kategori ini tidak lepas dari upaya peningkatan fasilitas dan kecepatan layanan yang terus dilakukan oleh perusahaan telekomunikasi, seperti pengembangan jaringan fiber optic. Selain itu, karena pembatasan mobilitas di masa pandemi, menyebabkan meningkatnya penggunaan internet secara signifikan termasuk untuk meeting online, bermedia sosial, dan transaksi online. Ini menyebabkan pertumbuhan ini selalu positif selama 2019 – 2023.

11. Jasa Keuangan dan Asuransi

Kategori Jasa Keuangan dan Asuransi berperan penting dalam menyediakan layanan keuangan dan asuransi baik kepada perorangan, korporasi, maupun pemerintah. Layanan jasa keuangan memberikan akses modal ke pelaku ekonomi, memberikan ruang investasi dan inovasi, serta mitigasi risiko. Banyak industri yang bergantung pada kategori ini. Kontribusinya dalam PDRB Kabupaten Sumbawa relatif stabil selama 5 tahun terakhir, dengan rata-rata sekitar 4,09 persen. Pada 2023, kontribusi kategori ini menjadi 4,40 persen atau setara dengan 771,02 milyar rupiah.



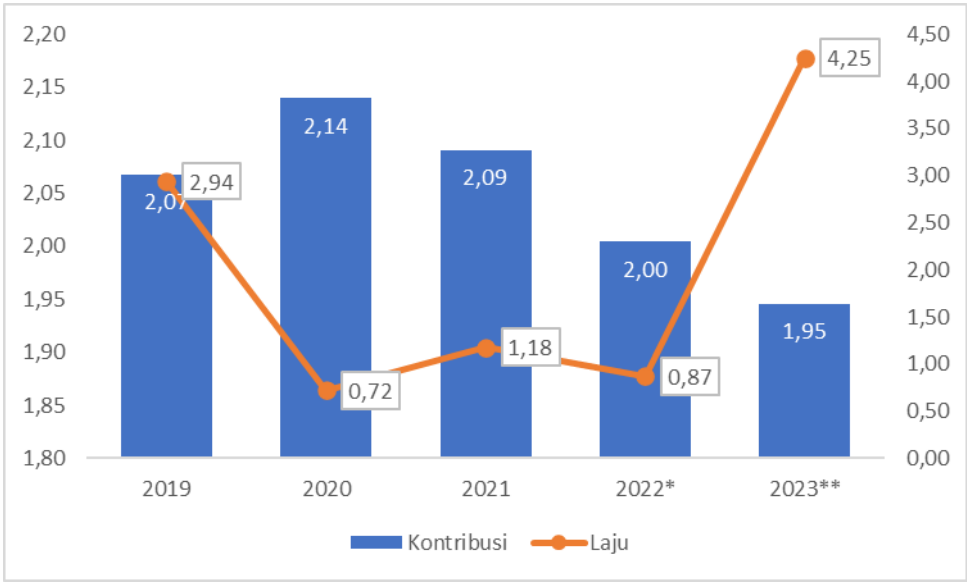
Gambar 2. 56 Kontribusi dan Laju Pertumbuhan PDRB Lapangan Usaha Jasa Keuangan dan Asuransi di Kabupaten Sumbawa Tahun 2019-2023
Sumber Data: PDRB Kabupaten Sumbawa Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019-2023

Dalam kategori ini, terdapat empat subkategori, antara lain; subkategori Jasa Perantara Keuangan; subkategori Asuransi dan Dana Pensiun; subkategori Jasa Keuangan Lainnya; dan subkategori Jasa Penunjang Keuangan. Kontribusi sektor ini cenderung mengalami peningkatan dari selama 2019 hingga 2023 dari 3,75 persen menjadi 4,40 persen.

Untuk nilai laju pertumbuhan ekonomi sendiri, nilai indikator Jasa Keuangan dan Asuransi cenderung fluktuatif selama kurun waktu Tahun 2019-2023. Pada Tahun 2023 laju pertumbuhan melambat menjadi 4,48 persen, dari 5,14 persen pada tahun 2022.

12. Real Estat

Kategori Real Estat memberikan kontribusi yang relatif stabil bagi PDRB Kabupaten Sumbawa dengan peranan sekitar 2 persen periode Tahun 2019 - 2023. Sumbangan kategori ini cenderung menurun hingga pada Tahun 2023 kontribusinya sebesar 1,95 persen.

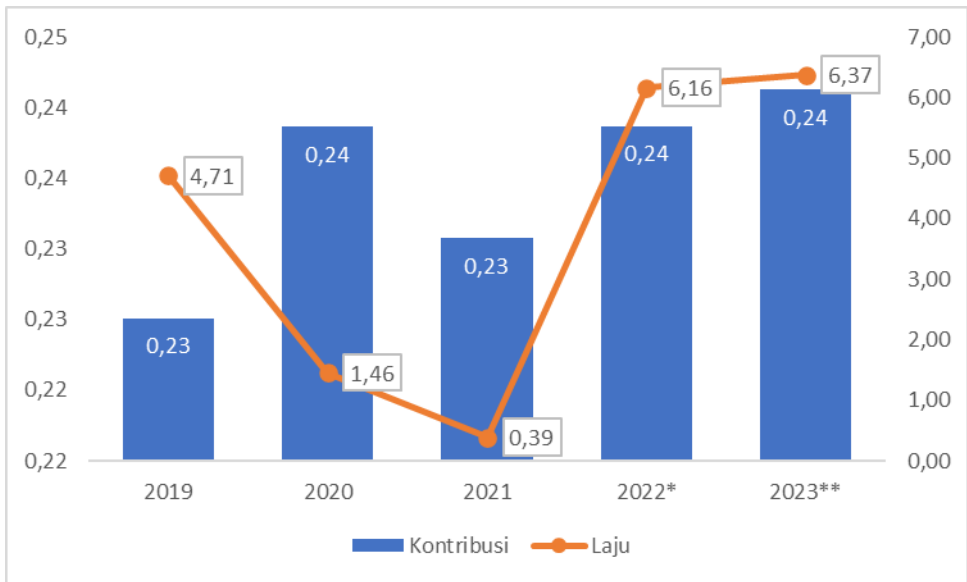


Gambar 2. 57 Kontribusi dan Laju Pertumbuhan PDRB Lapangan Usaha Real Estate di Kabupaten Sumbawa Tahun 2019-2023
Sumber Data: PDRB Kabupaten Sumbawa Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019-2023

Pada 2019, pertumbuhan 2,94 persen mencerminkan ketahanan sektor real estat. Meskipun diwarnai pandemi Covid-19, pada 2020 real estate masih tumbuh 0,72 persen, menunjukkan ketahanannya dalam menghadapi ketidakpastian. Tahun 2021 ditandai dengan pertumbuhan meningkat menjadi 1,18 persen, sementara 2022 stabil dengan kenaikan 0,87 persen. Namun, di 2023, real estate melesat dengan pertumbuhan signifikan mencapai 4,25 persen, menandai pemulihan pasar properti setelah masa-masa pandemi.

13. Jasa Perusahaan

Kontribusi kategori Jasa Perusahaan relatif stabil selama 5 tahun terakhir, yaitu kurang dari 1 persen untuk Tahun 2019-2023. Untuk Tahun 2023, kategori Jasa Perusahaan sebesar 0,24 persen atau sebesar 42,24 Milyar rupiah. Peranan kategori ini relatif kecil dibandingkan dengan peranan kategori lain.



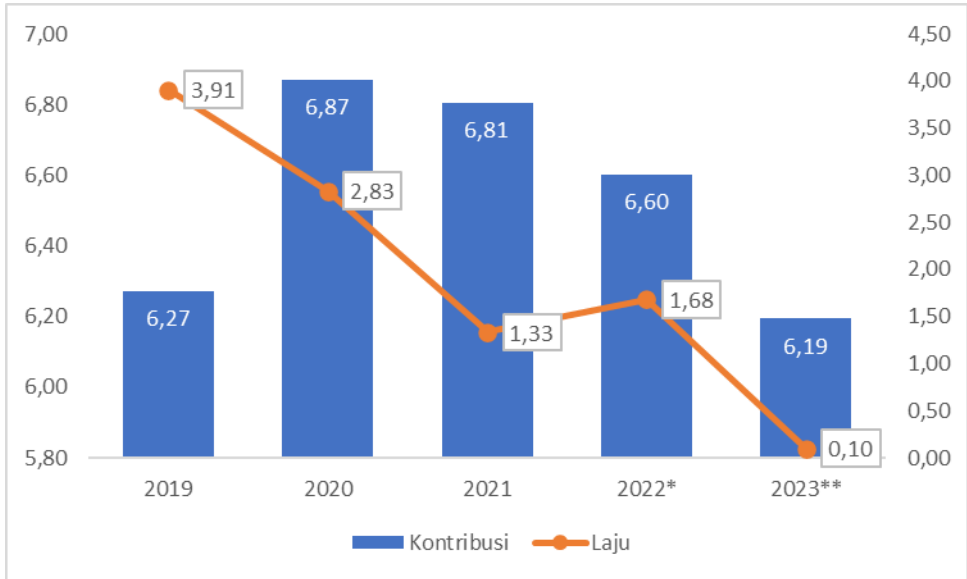
Gambar 2. 58 Kontribusi dan Laju Pertumbuhan PDRB Lapangan Usaha Jasa Perusahaan di Kabupaten Sumbawa Tahun 2019-2023
Sumber Data: PDRB Kabupaten Sumbawa Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019-2023

Pada 2019, kenaikan 4,71 persen menandai performa yang kuat, sementara 2020 mencatat kenaikan 1,46 persen. Tahun 2021 melambat menjadi 0,39 persen, namun pada 2022, pertumbuhan signifikan mencapai 6,16 persen, diikuti dengan pertumbuhan 6,37 persen di tahun 2023, menandai pemulihan ekonomi yang stabil dan meningkatnya aktivitas bisnis.

14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib

Kategori ini mencakup kegiatan administrasi pemerintahan, pertahanan, dan layanan jaminan sosial yang dikelola oleh pemerintah. Kegiatan yang diklasifikasikan di kategori lain dalam KBLI tidak termasuk pada kategori ini, meskipun dilakukan oleh badan pemerintahan.

Sebagai contoh administrasi sistem sekolah, (peraturan, pemeriksaan, dan kurikulum) termasuk pada kategori ini, tetapi pengajaran itu sendiri masuk ke kategori Jasa Pendidikan (P) dan rumah sakit penjara atau militer diklasifikasikan pada kateogri Q.

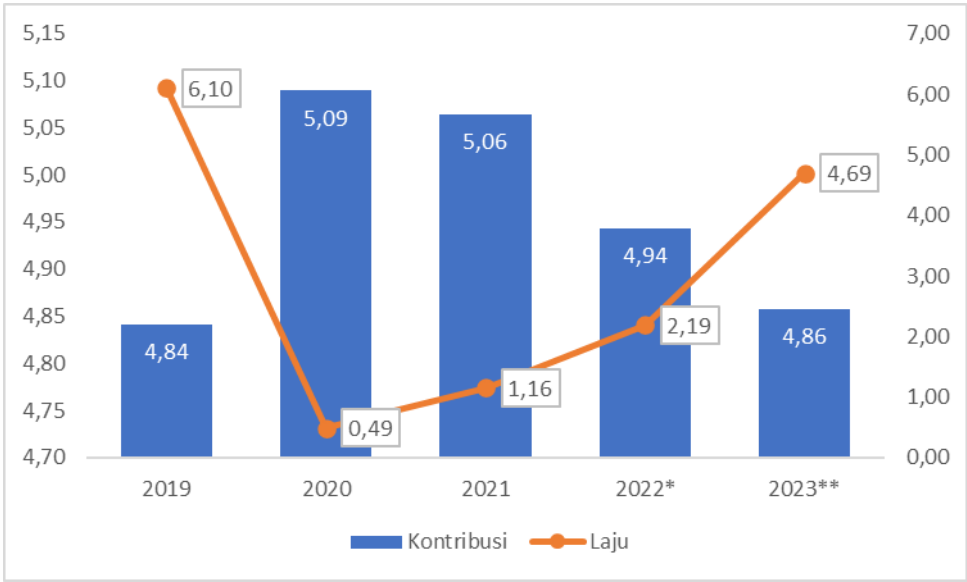


Gambar 2. 59 Kontribusi dan Laju Pertumbuhan PDRB Lapangan Usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib di Kabupaten Sumbawa Tahun 2019-2023
Sumber Data: PDRB Kabupaten Sumbawa Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019-2023

Sektor ini memiliki peran vital dalam ekonomi, menunjukkan kontribusi yang stabil selama 5 tahun terakhir, mulai dari 6,27% di 2019, naik menjadi 6,87% di 2020, dan turun perlahan hingga mencapai 6,19% di 2023. Peningkatan ini sejalan dengan upaya pemerintah meningkatkan layanan publik dan menghadapi pandemi Covid-19. Meskipun mengalami perlambatan, sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib tetap menunjukkan pertumbuhan yang positif, meningkat sebesar 0,10% pada tahun 2023.

15. Jasa Pendidikan

Selama Tahun 2019-2023, Jasa pendidikan menyumbang peranan yang cukup besar terhadap total perekonomian Sumbawa, yaitu berkisar antara nilai 4,84 hingga 5,09 persen. Nilai ini berhasil bertahan sebagai penyumbang perekonomian terbesar kelima selama 5 tahun terakhir. Kontribusi kategori ini meningkat cukup tinggi pada Tahun 2020 menjadi 5,09 persen, namun kembali turun hingga pada Tahun 2023 menjadi 4,86 persen. Kontribusi pada kategori pendidikan mengindikasikan tingkat kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam dunia pendidikan.

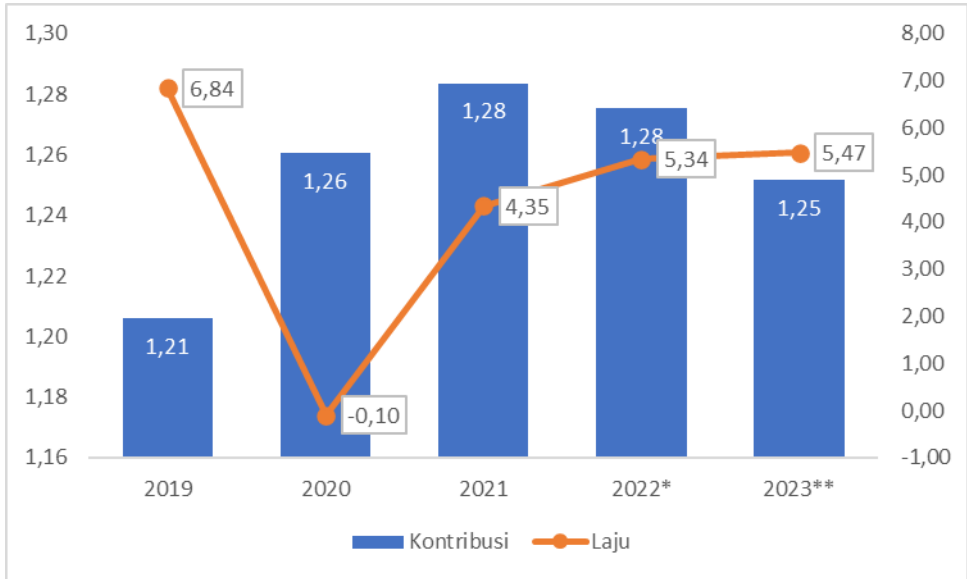


Gambar 2. 60 Kontribusi dan Laju Pertumbuhan PDRB Lapangan Usaha Jasa Pendidikan di Kabupaten Sumbawa Tahun 2019-2023
Sumber Data: PDRB Kabupaten Sumbawa Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019-2023

Laju pertumbuhan dimulai dengan pertumbuhan kuat 6,10 persen pada 2019, kemudian terjadi penurunan drastis menjadi 0,49 persen pada 2020 akibat pandemi Covid-19. Meskipun ada sedikit pemulihan pada 2021 dengan pertumbuhan 1,16 persen, perbaikan yang lebih signifikan terlihat pada 2022 dengan pertumbuhan 2,19 persen. Pada 2023, terjadi lonjakan pertumbuhan mencapai 4,69 persen, menandakan pemulihan yang lebih kuat. Tantangan aksesibilitas dan kualitas pendidikan masih relevan, sementara secara nasional, pertumbuhan ini menunjukkan komitmen untuk memperbaiki sistem pendidikan dalam menghadapi situasi darurat seperti pandemi.

16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial

Kesehatan menjadi fokus utama seiring dengan peningkatan kesejahteraan dan kesadaran masyarakat. Perhatian terhadap dinamika jasa kesehatan juga mencerminkan seriusnya pemerintah dalam mencapai target SDGs, khususnya dalam peningkatan angka harapan hidup. Selama lima tahun terakhir, kontribusi Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial di Kabupaten Sumbawa stabil di sekitar 1%, mencapai 1,25% pada tahun 2023.

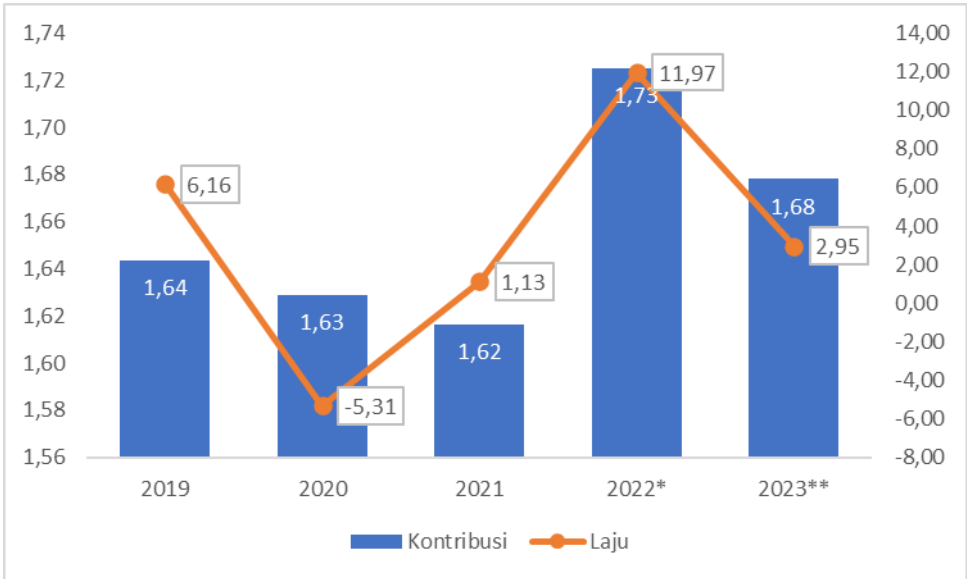


Gambar 2. 61 Kontribusi dan Laju Pertumbuhan PDRB Lapangan Usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial di Kabupaten Sumbawa Tahun 2019-2023
Sumber Data: PDRB Kabupaten Sumbawa Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019-2023

Pertumbuhan jasa kesehatan dan kegiatan sosial di Kabupaten Sumbawa selama lima tahun terakhir cukup berfluktuasi. Dimulai dengan lonjakan 6,84 persen pada 2019, disusul penurunan -0,10 persen di 2020 akibat pandemi Covid-19. Pada 2021, sektor ini pulih dengan pertumbuhan 4,35 persen, dan terus meningkat hingga mencapai 5,34 persen di 2022 dan 5,47 persen di 2023. Hal ini mencerminkan komitmen yang berkelanjutan dalam meningkatkan layanan kesehatan dan kegiatan sosial di Kabupaten Sumbawa serta ketangguhan dalam menghadapi tantangan.

17. Jasa lainnya

Kontribusi Jasa Lainnya terhadap perekonomian Kabupaten Sumbawa Tahun 2023 relatif kecil hanya 1,68 persen atau sebesar 293,86 milyar rupiah. Kontribusinya relatif stabil di kisaran 1,6 persen selama Tahun 2019- 2023.



Gambar 2. 62 Kontribusi dan Laju Pertumbuhan PDRB Lapangan Usaha Jasa Lainnya di Kabupaten Sumbawa Tahun 2019-2023
Sumber Data: PDRB Kabupaten Sumbawa Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019-2023

Kontribusi sektor jasa lainnya dalam lima tahun terakhir kurang signifikan, hanya sekitar 1 persen dari total PDRB. Pertumbuhan positif terjadi pada 2019 dengan 6,61 persen, tetapi mengalami kontraksi drastis pada 2020 menjadi -5,31 persen karena dampak pandemi Covid-19. Namun, seiring perbaikan situasi dan peningkatan pengunjung di sektor-sektor seperti jasa kecantikan, hiburan, dan pariwisata, pertumbuhan kembali meningkat, mencapai puncaknya pada 2022 dengan 11,97 persen karena adanya MXGP Samota, kemudian melambat menjadi 2,95 persen pada 2023.

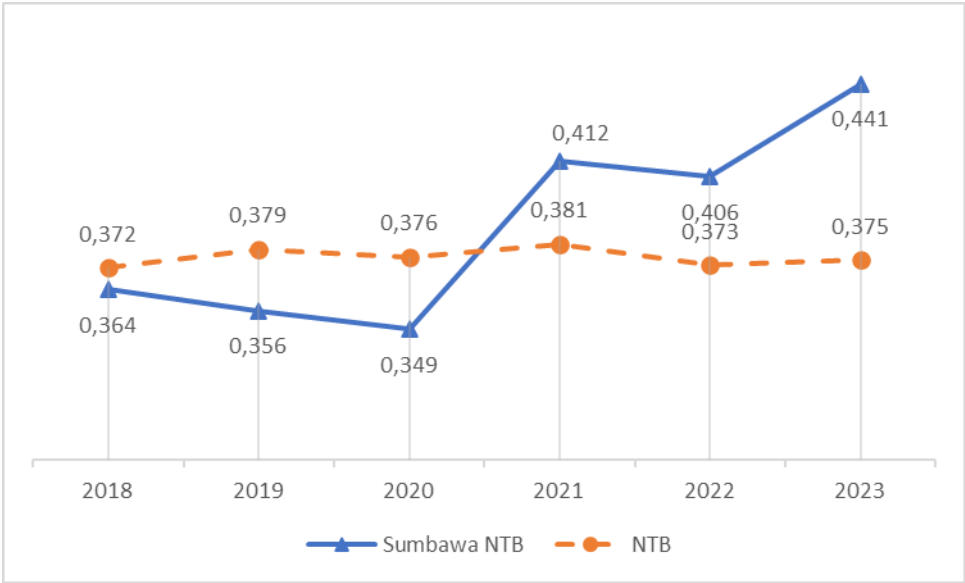
Rasio Gini

Keberhasilan pembangunan ekonomi secara makro telah ditunjukkan dengan laju pertumbuhan yang terus meningkat dari tahun ke tahun, hal ini menunjukkan bahwa terdapat kemajuan dalam pembangunan ekonomi Kabupaten Sumbawa. Keberhasilan pembangunan ekonomi daerah tidak semata-mata dilihat dari tingginya pertumbuhan ekonomi saja, akan tetapi pembangunan ekonomi berhasil atau tidak dengan melihat apakah kenaikan laju pertumbuhan ekonomi yang terjadi tersebut menyentuh semua lapisan masyarakat atau berdampak kepada masyarakat berpendapatan rendah. Apabila kenaikan laju pertumbuhan ekonomi daerah tidak berdampak kepada masyarakat berpenghasilan rendah, maka akan terjadi kesenjangan ekonomi semakin tinggi di masyarakat, sehingga terjadi ketimpangan ekonomi, yang selanjutnya akan menimbulkan kecemburuan sosial semakin besar, akibatnya munculnya permasalahan sosial di daerah yang lebih luas seperti meningkatnya kemiskinan.

Koefisien Gini (Gini Ratio) adalah salah satu ukuran yang paling sering digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Koefisien Gini didasarkan pada Kurva Lorenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu variabel tertentu (misalnya pendapatan) dengan distribusi uniform (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk.

Secara umum, nilai Gini Ratio Kabupaten Sumbawa selama periode 2018-2023 relatif berfluktuasi. Angka Gini Ratio Kabupaten Sumbawa ini dapat diinterpretasikan berdasarkan karakteristik Koefisien Gini bahwa Gini Ratio bernilai antara 0 sampai 1, dimana koefisien Gini = 0, berarti pembagian pendapatan merata sempurna, tetapi jika Koefisien Gini = 1, berarti pembagian pendapatan timpang sempurna.

Menurut kriteria H.T. Oshima: (1) Ketimpangan “rendah” bila angka Gini kurang dari 0,3; (2) Ketimpangan “sedang” bila indeks Gini antara 0,3-0,4;(3) Ketimpangan “tinggi” bila indeks Gini di atas 0,4. Berdasarkan hal tersebut, maka Gini Ratio Kabupaten Sumbawa termasuk dalam kategori “sedang”, yang berarti masih terjadi ketimpangan distribusi pendapatan di masyarakat dan perlu terus mendapat perhatian, sebagaimana tergambar sebagai berikut.



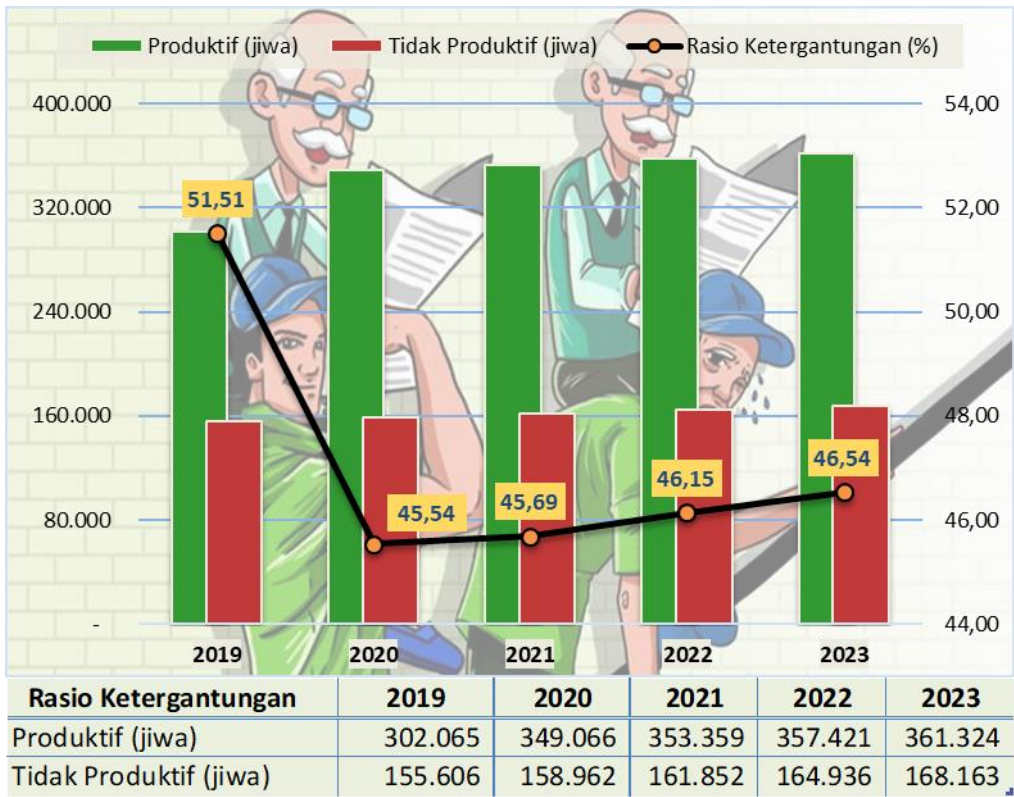
Gambar 2. 63 Perkembangan Gini Ratio di Kabupaten Sumbawa dan NTB Tahun 2018-2023
Sumber Data: BPS Kabupaten Sumbawa

Data Gini Ratio menunjukkan bahwa Kabupaten Sumbawa dalam periode 2018-2023 mengalami fluktuasi tingkat ketidaksetaraan pendapatan yang signifikan, dengan nilai Gini berkisar antara 0,349 hingga 0,441, mencapai puncaknya pada tahun 2023. Ini mengindikasikan adanya ketidaksetaraan yang cukup mencolok dalam distribusi pendapatan atau kekayaan di Kabupaten Sumbawa. Di sisi lain, ketika dibandingkan dengan Provinsi Nusa Tenggara Barat secara

keseluruhan, Kabupaten Sumbawa menunjukkan tingkat ketidaksetaraan yang lebih tinggi. Meskipun Provinsi Nusa Tenggara Barat juga mengalami fluktuasi kecil dalam rasio Gini dari tahun ke tahun, nilai-nilai ini cenderung lebih rendah daripada yang tercatat di Kabupaten Sumbawa. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada variasi, distribusi pendapatan atau kekayaan di wilayah lain di provinsi ini mungkin lebih merata atau setidaknya tingkat ketidaksetaraannya tidak sebesar yang terjadi di Kabupaten Sumbawa. Dengan demikian, Kabupaten Sumbawa memperlihatkan tingkat ketidaksetaraan yang lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata Provinsi Nusa Tenggara Barat, mencerminkan tantangan yang lebih besar dalam mencapai kesetaraan ekonomi di tingkat lokal.

2.3.2. Daya Saing Sumber Daya Manusia Angka Ketergantungan

Angka ketergantungan (dependensi rasio) diartikan sebagai perbandingan antara jumlah penduduk usia non produktif terhadap penduduk usia produktif. Tingkat ketergantungan atau dependensi rasio berpengaruh terhadap pembangunan ekonomi suatu daerah. Komposisi menurut jumlah kelompok usia tersebut menunjukkan bahwa rasio ketergantungan penduduk di Kabupaten Sumbawa adalah 46,54%, artinya untuk setiap 100 orang penduduk usia produktif menanggung 46 orang penduduk tidak produktif. Kondisi ini terus mengalami peningkatan setelah di tahun-tahun sebelumnya mengalami penurunan.



Gambar 2. 64 Rasio Ketergantungan (Dependency Ratio) di Kabupaten Sumbawa Tahun 2019-2023

Sumber : Long Form Sensus Penduduk 2020, BPS Kab. Sumbawa (diolah)

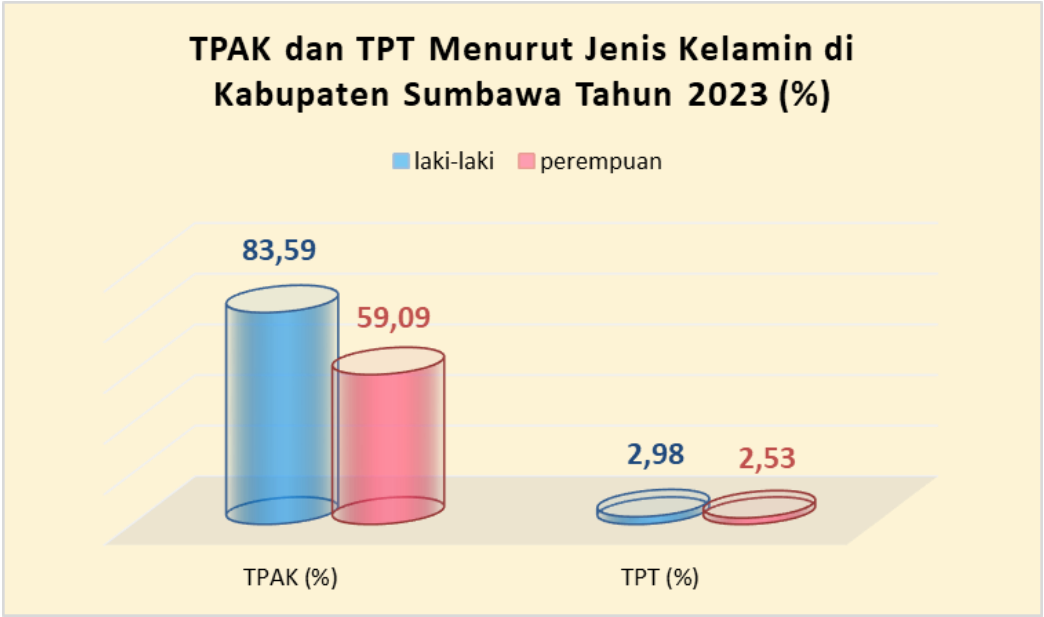
Bonus demografi adalah suatu kondisi ketika jumlah penduduk usia produktif (usia 15 – 64 tahun) di suatu wilayah jauh lebih besar jika dibandingkan dengan penduduk nonproduktif (usia 0 – 14 tahun dan diatas 65 tahun). Bonus demografi adalah masa dimana angka beban ketergantungan (*Dependency Ratio*) antara penduduk usia produktif dengan penduduk usia non produktif mengalami penurunan sehingga mencapai angka di bawah 50. Capaian tersebut mengindikasi bahwa setiap penduduk usia kerja (produktif) menanggung sedikit penduduk usia tidak produktif, artinya beban penduduk relatif lebih ringan dan kemampuan untuk meningkatkan kesejahteraan semakin terbuka. Guna mendapatkan “bonus” demografi dalam artian sebenarnya, maka kualitas SDM harus ditingkatkan secara maksimal melalui pendidikan, pelayanan kesehatan dan penyediaan lapangan pekerjaan. Lebih lanjut disebutkan bahwa Bonus demografi bisa menjadi “bencana” demografi, ketika usia produktif tersebut tidak memiliki pendidikan yang memadai, tidak memperoleh keterampilan yang cukup. Ketika hal ini terjadi maka penduduk usia produktif akan menjadi pengangguran, dan akan ada konsekuensinya antara lain kemiskinan karena ketidakberdayaan dalam

ekonomi, sehingga tidak mampu untuk memenuhi standar kebutuhan dasar yang diperlukan oleh seorang penduduk.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

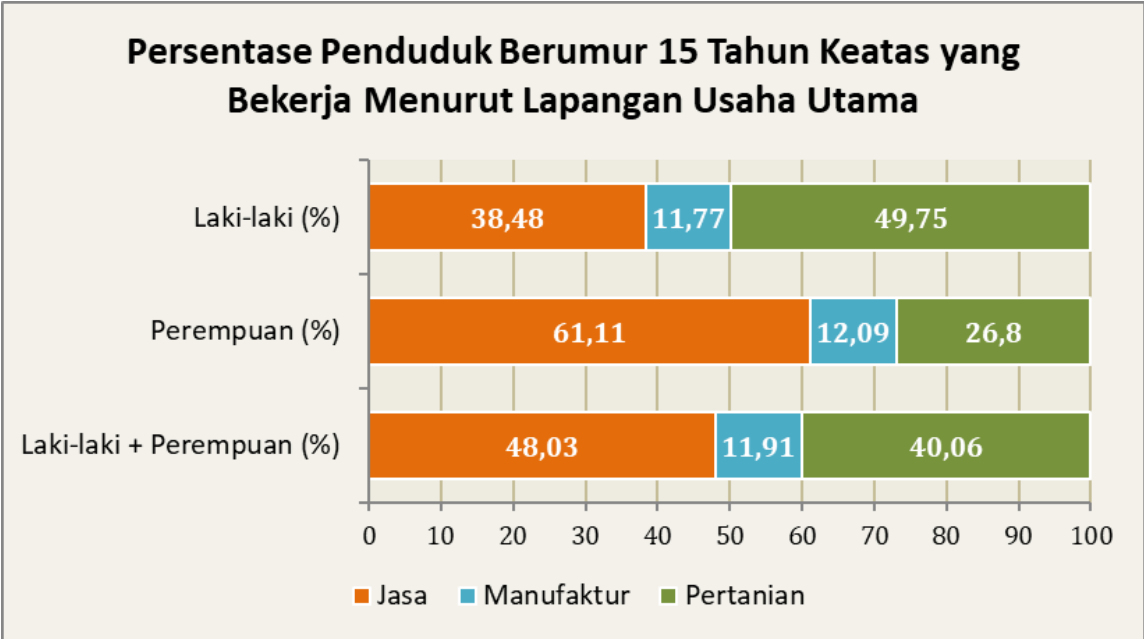
Untuk melihat besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi baik yang sedang bekerja atau mencari pekerjaan di suatu wilayah dapat dilihat dari Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Semakin tinggi TPAK menunjukkan bahwa semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian wilayah tersebut. TPAK Kabupaten Sumbawa Tahun 2023 menurun sebesar 0,91 poin menjadi 71,17%. Sementara Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) meliputi penduduk usia produktif yang tidak bekerja dan sedang mencari pekerjaan atau mempersiapkan pekerjaan atau yang tidak mencari pekerjaan karena putus asa. Termasuk juga yang telah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. TPT Kabupaten Sumbawa pada Tahun 2023 sebesar 2,79%, mengalami peningkatan dibandingkan dengan TPT Tahun 2022 sebesar 0,68 poin.

TPAK perempuan hanya mencapai 59,09% atau lebih separuh dari TPAK laki - laki. Tingkat aktivitas pada perempuan jauh lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki. Hal ini dikarenakan perempuan pada usia produktif masih banyak yang memilih mengurus rumah tangga. Meskipun demikian TPT laki-laki lebih tinggi dibanding perempuan hal ini searah dengan jumlah angkatan kerja laki-laki yang lebih banyak dibanding angkatan kerja perempuan.



Gambar 2. 65 TPAK dan TPT Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Sumbawa Tahun 2023 (%)
Sumber Data: Statistik Ketenagakerjaan Kab. Sumbawa Tahun 2023

Jika dilihat menurut lapangan usaha, sektor jasa telah menggeser sektor pertanian menempati urutan pertama penyerapan tenaga kerjanya yaitu mencapai 48,03% lalu diikuti dengan sektor pertanian sebesar 40,06%. Pada sektor jasa didominasi oleh tenaga kerja perempuan dimana 61,11% tenaga kerja perempuan bekerja di sektor tersebut. Sebaliknya, sektor pertanian masih lebih banyak menyerap tenaga kerja laki-laki dimana 49,75% tenaga kerja laki-laki bekerja di sektor pertanian. Masih tingginya penyerapan tenaga kerja pada sektor pertanian disebabkan pertanian masih bersifat padat karya dan masih sedikit menggunakan teknologi modern terutama pada sub sektor tanaman bahan makanan.



Gambar 2. 66 Persentase Penduduk usia kerja yang bekerja menurut lapangan usaha dan jenis kelamin Kabupaten Sumbawa Tahun 2023 (%)
Sumber Data: Statistik Ketenagakerjaan Kab. Sumbawa Tahun 2023

2.3.3. Daya Saing Fasilitas/ Infrastruktur Wilayah
Infrastruktur Dasar

Jalan merupakan sarana penunjang utama transportasi darat yang sangat krusial. Kondisi jalan sangat mempengaruhi distribusi barang antar daerah yang secara langsung mendukung kegiatan ekonomi daerah tersebut. Kondisi jalan yang baik akan mempercepat waktu tempuh yang berdampak pada percepatan kegiatan ekonomi.

Berdasarkan status jalan di Kabupaten Sumbawa terdapat sepanjang 1.580,73 km, terdiri dari jalan Kewenangan Pusat (Jalan Nasional) yang didasarkan pada Keputusan Menteri PUPR Nomor 430/KPTS/M/2022 sepanjang 222,04 km, Jalan Kewenangan Provinsi (Jalan Provinsi) berdasarkan Keputusan Gubernur NTB Nomor 620-351 Tahun 2016 sepanjang 407,18 km, dan jalan Kewenangan Kabupaten sesuai Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 1468 Tahun 2012 sepanjang 951,51 km.

Tabel 2. 16 Jalan Kewenangan Pusat di Kabupaten Sumbawa

No	Nama Ruas	Panjang (Km)
1	Simpang Negara - Bts Kota Sumbawa Besar	74,63
2	Jl. Garuda 1 (Sumbawa Besar)	4,70
3	Jl. Hasanuddin (Sumbawa Besar)	1,18

No	Nama Ruas	Panjang (Km)
4	Jl. Garuda 2 (Sumbawa Besar)	1,61
5	Simpang Negara/Simpang Jalan Garuda - Sering - SP. Terminal	9,02
6	Jl. Dr. Sutomo (SP. Terminal - Pal IV)	0,65
7	Jl. Kartini (Sumbawa Besar)	0,50
8	Jl. Dr. Sutomo (Sumbawa Besar - Pal IV)	3,57
9	Pal IV (KM. 4.00 - KM. 70.00)	65,37
10	KM. 70.00 - Bts. Cabdin Dompnu (KM. 130 Sumbawa)	60,81
Total		222,04

Tabel 2. 17 Jalan Kewenangan Provinsi di Kabupaten Sumbawa

No	Nama Ruas	Panjang (Km)
1	Tetar (Bts. KSB)-Lunyuk	32,40
2	Sbw Besar - Semongkat – Batudulang	24,90
3	Jln. Sultan. Kaharuddin	1,75
4	Sumbawa - Sebewe - Lua Air	20,70
5	Jln. Sudirman	1,00
6	Simpang Negara - Moyo - Lua Air	25,86
7	Pal. IV – Lenangguar	35,37
8	Lenangguar – Lunyuk	56,20
9	Lunyuk – Ropang	45,00
10	Ropang – Sekokat	59,40
11	Sekokat – Mbawi	91,00
12	Plampang – Sekokat	13,60
Total		407,18

Tabel 2. 18 Jalan Kewenangan Kabupaten di Kabupaten Sumbawa

No	Nama ruas	Panjang (km)	No	Nama ruas	Panjang (km)	No	Nama ruas	Panjang (km)
1	Moyo - serading	3,20	86	Jl. Cempaka	0,30	171	Jl. Kerato - saliper ate	4,00
2	Moyo - kakiang	3,20	87	Jl. Melati	0,20	172	Jl. Samapuin	1,00
3	Moyo - sebewe	6,02	88	Jl. Panjaitan	0,55	173	Pacuan kuda	0,46
4	Moyo - pungkit	7,30	89	Muer - lab. Ala	5,97	174	Kerato	0,80
5	Berare - lab. Ijuk	13,36	90	Lab. Ala - sinar jaya	6,70	175	Jorok	1,50
6	Berare – prajak	11,07	91	Sinarjaya - lab. Jontal	5,00	176	Sering	1,00
7	Lu,air – prajak	6,95	92	Pamunga - sp I periode	7,85	177	Brang pelat – sampa	5,00
8	Ai puntuk – kakiang	6,48	93	Batu rasak - sp I periode	3,15	178	Alas – marente	3,98
9	Olat rawa - tj. Bele	15,45	94	Sepayung dalam - buin rare	2,24	178	Tengkal karya – gontar	4,95
10	SJN - pelita	3,57	95	SJN - parang	1,73	180	Keramat - P. Kaung	2,19
11	Malili – Lengas	4,95	96	SJN – ongko	7,29	181	Alas - lekong .b	3,72
12	Lengas – Sameri	2,00	97	Kwangko – mata	13,20	182	Marente – trupa	2,96
13	Malili – Sengkal	0,30	98	Mata – ongko	27,00	183	Jln. Satria	0,40
14	SJP – Pernek	2,75	99	Pidang – mata	28,00	184	Jln. Semangka	0,30
15	SJP – Lito	11,07	100	Parang - lab. Bontong	1,15	185	Jln. Persaudaraan	0,45
16	Brang rea – sempe	9,20	101	Jl. Cendrawasih	2,40	186	Jln. Niagagora	0,80
17	Pelita – mokong	2,86	102	Jl. Kebayan	0,98	187	Jln. Suhada	0,35
18	Leseng - batu bulan	2,86	103	Jl. Osapsio	1,34	188	Jln. Pramuka	0,30

No	Nama ruas	Panjang (km)	No	Nama ruas	Panjang (km)	No	Nama ruas	Panjang (km)
19	Sedan - kr. Jati	3,06	104	Jl. Gurami - jl. Tongkol	2,52	189	Jln. Prona	0,45
20	Batu tering - liang petang	1,93	105	Jl. Tenggiri	0,90	190	Jln. Kmp. Luar	0,20
21	Pernek - mokong	3,50	106	Jl. Batu pasak	0,18	191	Jln. Kmp. Baru	0,55
22	Sp. Sempe - ai beling	2,80	107	Jl. Puncak ngegas	0,30	192	Sjn - gelampar	2,19
23	Ai. Beling - kuang amo	3,00	108	Jl. Imam bonjol	0,20	193	Trupa - mate mega	9,70
24	Batu bulan - maman	1,79	109	Jl. Undru	0,21	194	Propok - batu soan	3,00
25	Lito - bage loka	4,95	110	Jl. Bahagia	0,40	195	Tengkal karya - P. Bungin	3,26
26	SJP - sebasang untir	0,75	111	SJN - sernu	0,80	196	Karang padak - mapin rea	6,02
27	SJP - brang rea	0,85	112	Jl. Marilonga	0,40	197	SJN - mapin rea	4,54
28	SJP - talwa	3,00	113	Jl. Dalam loka	0,11	198	Lekong. B - lekong. A	1,02
29	Penyaring - lab. Sawo	9,54	114	Jl. Ratulangi	0,22	199	SJN - lab. Mapin	1,00
30	Sebewe - lu,air	13,67	115	Jl. G. Setia	2,50	200	SJN - ai jati	2,00
31	Penyaring - baru	1,38	116	Kebayan - raberas	2,20	202	Batu dulang - tepal	27,10
32	Teladan - kelawis	26,00	117	Raberas - btn. Bukit permai	0,80	203	SJP - klungkung	1,02
33	Klawis - koppo	17,00	118	Btn. Bukit prmai - jn. Km. 4,6	3,30	204	Kadok - batu rotok	8,00
34	SJN - seseng	6,40	119	Sernu	2,00	205	Tepal - batu rotok	12,00
35	luk - sekrek	6,83	120	Jl. Bougenville	0,35	206	Pelita - batu rotok	16,70
36	Ropang - lebin	8,00	121	Jl. Bungur	0,20	207	Semongkat A -	3,00

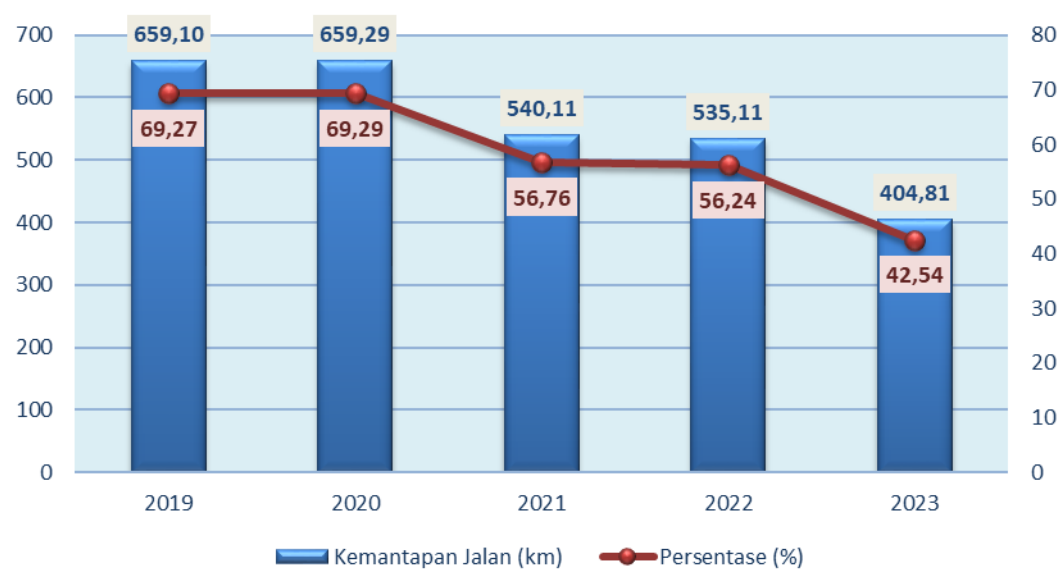
No	Nama ruas	Panjang (km)	No	Nama ruas	Panjang (km)	No	Nama ruas	Panjang (km)
							Semongkat B	
37	Ropang – lawin	5,00	122	Jl. Kemuning	0,20	208	Pernang - juru mapin	4,08
38	Sp. Lawin – labangkar	2,50	123	Jl. Wahidin	0,60	209	Pernang - lab. Burung	1,33
39	Lebangkar – ranan	2,50	124	Jl. A. Yani	0,32	210	Keramat - kalabeso	3,21
40	Ranan - lingkaran selatan	17,00	125	Jl. Gurami	0,70	210	Karang dima - pamulung	2,19
41	Singgah – sebedo	3,06	126	Jl. Udang	0,16	211	Karang dima - bangkong	4,28
42	SJN - lab. Bua	6,48	127	Jl. Mujair	0,20	212	SJN - olat rarang	1,10
43	Utan jorok - lab. Bua	6,12	128	Jl. Tongkol	0,50	213	Jl. Kali baru	0,70
44	Singgah – balebrang	1,94	129	Jl. Kepiting	0,30	214	Jl. Gria idola	1,60
45	Utan - lab. Padi	4,08	130	Jl. Urip sumoharjo	0,22	215	Jl. Karang padak	0,20
46	Jl. Pasar	3,06	131	Jl. Merdeka	0,19	216	Jl. Kauman	0,20
47	Jl. Jbt. Gantung	0,60	132	Jl. Tamrin	0,31	217	SJN. - btn. Pepabri	0,60
48	Jl. Paqih ismail	0,70	133	Jl. Dr. Cipto	0,50	218	SJN – kanapuri	5,00
49	Jl. Permata	0,50	134	Jl. Setia budi	0,40	219	Brang kua - poto siso	6,00
50	Jl. Nurul huda	0,90	135	Jl. Diponegoro	1,03	220	Lab. Aji – sebotok	27,00
51	Jl. Masjid	0,50	136	Jl. Yos sudarso	0,58	221	Poto siso – sebotok	7,00
52	Jl. Jbt. Gantung sel.	0,25	137	Jl. Multatuli	0,24	222	Lab. Aji - brang kua	25,00
53	Jl. Permai	0,20	138	Jl. Kamboja	0,20	223	SJN - sampar maras	2,40
54	Jl. Melati	1,00	139	Jl. Mawar	0,37	224	SJN - tj. Pengamas	2,50

No	Nama ruas	Panjang (km)	No	Nama ruas	Panjang (km)	No	Nama ruas	Panjang (km)
55	SJN - wonogiri	4,64	140	Jl. Melati	0,14	225	Batu nisung - uma buntar	7,00
56	Jl. Lingkar utan	0,40	141	Jl. Mangga	0,33	226	Lt. Sepukuir – ropang	17,90
57	SJN - lab. Teluk	1,45	142	Jl. Durian	0,40	227	Pungkit tede - lantung sepukur	17,50
58	Jerongko - lab. Bajo	0,75	143	Jl. Kodim selatan	0,29	228	Ltg. Ai mual - ltg. Pedesa	1,50
59	Sebedo - sebedo dalam	1,12	144	Jl. Uma gedung	1,00	229	Lape - lab. Kuris	7,30
60	SJN – boal	2,90	145	Karang goreng	0,80	230	Lab. Kuris - lab. Terata	5,69
61	SJN – lamenta	1,22	146	Jl. Komokdo	0,09	231	Sjn - hijrah	3,32
62	Empang – ongko	7,10	147	Jl. Pendidikan	0,10	232	Lape – serange	4,34
63	SJN - lab. Terujung	1,36	148	Jl. Uma sima	0,15	233	Lab. Terata - lab. Sagoro	16,30
64	SJN - nyarinying	1,50	149	Jl. Pekat i	0,20	234	Jl. Pendidikan	0,55
65	Jl. Tari bulan	0,15	150	Jl. Pekat ii	0,20	235	Jl. Mssjid	0,40
66	Jl. Kali bata	0,40	151	Brang bara	0,25	236	Jl. Samba	0,18
67	Jl. Gili dewa	0,18	152	Tambora	1,85	237	Lab. Kuris - tj. Bila	4,28
68	Jl. Pamanto	0,45	153	Pertanian	1,00	238	Hijrah - kuris	1,53
69	Jl. B. Bolang	0,45	154	Brang biji I	0,40	239	SJP - pemagong	2,20
70	Jl. Raja kepe	0,40	155	Brang bij II	0,20	240	Ledang - lebin	15,00
71	Jl. Bala cucuk	0,20	156	Panto daeng	1,00	241	Lenanguar - teladan	9,00
72	Jl. Basuki rahmat	1,00	157	Jl. Btn. B. Permai	0,90	242	Kabuyit - pungkit tede	7,24

No	Nama ruas	Panjang (km)	No	Nama ruas	Panjang (km)	No	Nama ruas	Panjang (km)
73	Jl. Masjid jotang	0,55	158	Jl. Karya	1,00	243	Langam - leweng b	9,80
74	Malalo - bantu lanteh	2,00	159	Tanjung menangis	8,00	244	Pungkit - tede dalam	1,30
75	Jotang – tero	9,00	160	Perumnas	0,90	245	Sekayu – berora	0,70
76	SJN - lab. Jontal	3,70	161	Kelapis	1,80	246	SJN - lopok dalam	1,68
77	SJN - tl. Santong	0,90	162	Kebayan – kelapis	1,00	247	Padasuka - suka maju/eman g	7,65
78	SJN – pamunga	2,86	163	Jl. Kerato hijrah	1,40	248	Koppo – jamu	15,00
79	SJN - lab. Ala	5,20	164	SJP – jorok	1,00	249	Jamu – krda	20,00
80	SJN – sepayung	1,84	165	Sumbawa – selang	7,14	250	Telonang – krida	0,70
81	SJN - batu putih	1,38	166	SJP - pelat	2,00	251	Sukamaju - suka jaya	1,30
82	SJN - sinar jaya	3,57	167	Boak - serading	3,62	252	SJK suka maju/eman g – krida	0,75
83	Jl. Kemuning	0,15	168	Pelat - brang pelat	2,50	253	Maronge - lab. Sangor	11,73
84	Jl. Mt. Haryono	0,75	169	SJP – perung	1,63	254	SJN - pemasar dlm	0,87
85	Jl. Dr. Wahidin	0,45	170	Kerato – nijang	1,05	255	SJN - moyo	5,10
Total								951,51

Pada gambar di bawah ini menampilkan secara visual perbandingan kondisi panjang jalan kabupaten selama lima tahun terakhir. Sebanyak sekitar 42,54% atau hampir separuh dari total panjang jalan yang berstatus jalan kabupaten di Sumbawa dalam kondisi baik di Tahun 2023. Sedangkan yang dalam kondisi rusak dan rusak berat sebanyak 57,46%. Masih cukup tinggi karena angka itu berarti separuh jalan kabupaten di Sumbawa dalam kondisi rusak pada Tahun 2023. Tahun 2023 relatif mengalami banyak perubahan kondisi jalan dibanding Tahun 2022 di Kabupaten Sumbawa terutama jalan dengan kondisi baik yang banyak berubah menjadi kondisi rusak.

Melihat porsi yang sedemikian besar tentu merupakan pekerjaan rumah yang sangat besar bagi pemerintah daerah untuk memperbaiki kondisi jalan di Kabupaten Sumbawa.



Gambar 2. 67 Kemantapan Jalan Kabupaten Tahun 2019-2023
Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Sumbawa

Pemerintah Kabupaten Sumbawa juga telah melakukan peningkatan jalan di wilayah-wilayah yang merupakan interkoneksi dari ruas lingkaran utara kota Sumbawa Besar. Kondisi ini menunjukkan perhatian pemerintah daerah yang selalu fokus dalam mewujudkan pemerataan pembangunan, pengentasan kemiskinan dan keserasian pengembangan wilayah yang masih terisolir melalui peningkatan kemantapan jalan, sehingga akselerasi pembangunan menjadi lebih merata.

Perumahan Rakyat

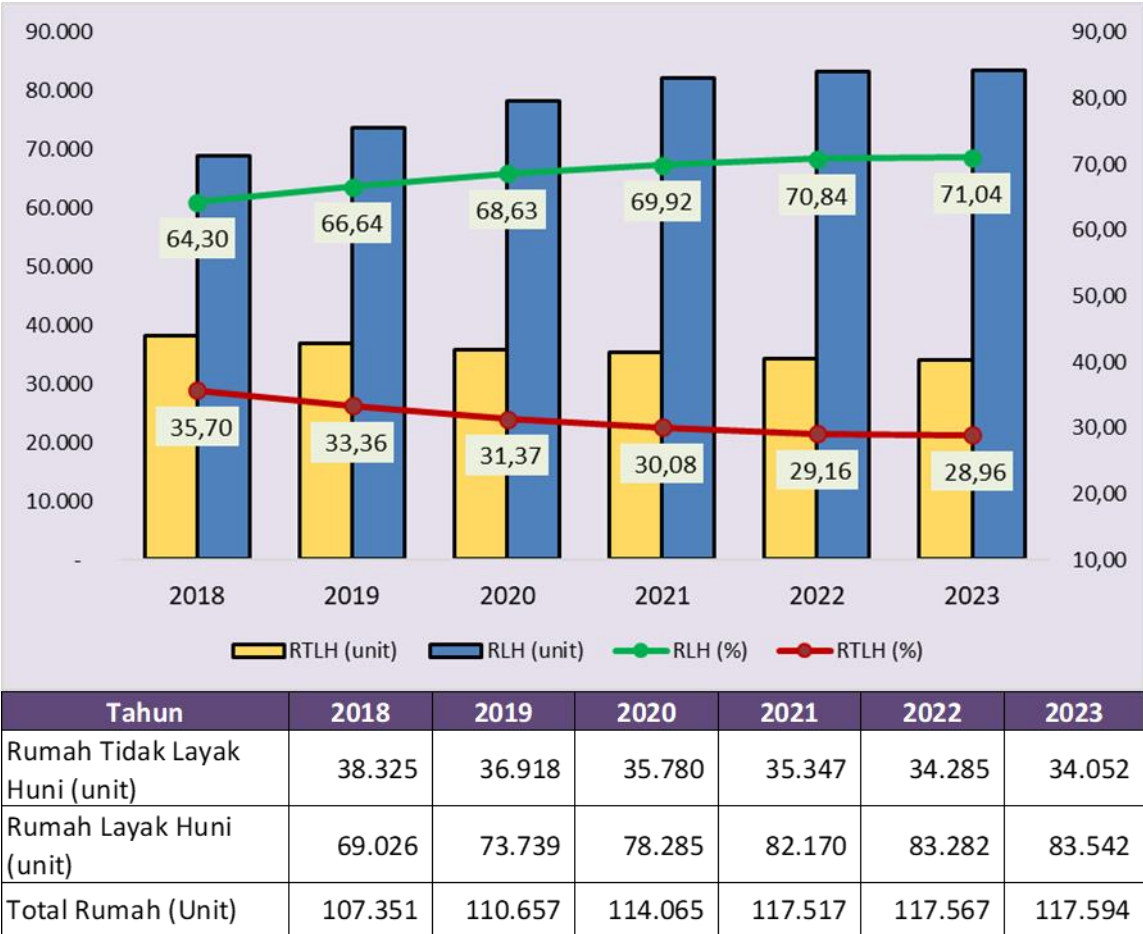
Urusan perumahan juga termasuk ke dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang artinya setiap warga negara berhak memperoleh layanan terkait urusan ini secara minimal dalam pelayanan yang sesuai standar demi kehidupan yang layak. Memiliki rumah layak huni adalah hak setiap warga negara. Rumah layak huni merupakan salah satu indikator pelayanan pada sub urusan perumahan yaitu meningkatnya jumlah rumah layak huni. Menurut Badan Pusat Statistik, sejak tahun 2019 rumah dikatakan layak huni apabila memenuhi 4 (empat) kriteria, yaitu:

- kecukupan luas tempat tinggal minimal 7,2 m2 per kapita (sufficient living space);
- memiliki akses terhadap air minum layak;

- memiliki akses terhadap sanitasi layak

ketahanan bangunan (durable housing), yaitu atap terluas berupa beton/ genteng/ seng/ kayu/ sirap; dinding terluas berupa tembok/ plesteran anyaman bambu/ kawat, kayu/ papan dan batang kayu; dan lantai terluas berupa marmer/ granit/ keramik/ parket/ vinil/ karpet/ ubin/ tegel/ teraso/ kayu/ papan/ semen/ bata merah.

Jumlah rumah di Kabupaten Sumbawa mengalami peningkatan seiring dengan pertambahan jumlah penduduk. Sampai dengan tahun 2023 jumlah rumah layak huni di Kabupaten Sumbawa mencapai 83.542 unit rumah atau 71,04% dari total rumah keseluruhan, sementara 28,96% sisanya masih dalam kategori rumah tidak layak huni dan tersebar di seluruh kecamatan. Jumlah rumah layak huni di Kabupaten Sumbawa meningkat dari tahun ke tahun begitu pula sebaliknya dengan penurunan jumlah rumah tidak layak huni, hal ini mengindikasikan keseriusan pemerintah Kabupaten Sumbawa dalam menyediakan hunian yang layak bagi masyarakatnya sebagai penerapan dari pelayanan berbasis SPM. Perkembangan rumah layak huni dari tahun ke tahun dapat dilihat pada gambar 2.68.



Gambar 2. 68 Indikator Rumah Layak Huni dan Tidak Layak Huni Tahun 2018-2023
Sumber Data : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Sumbawa

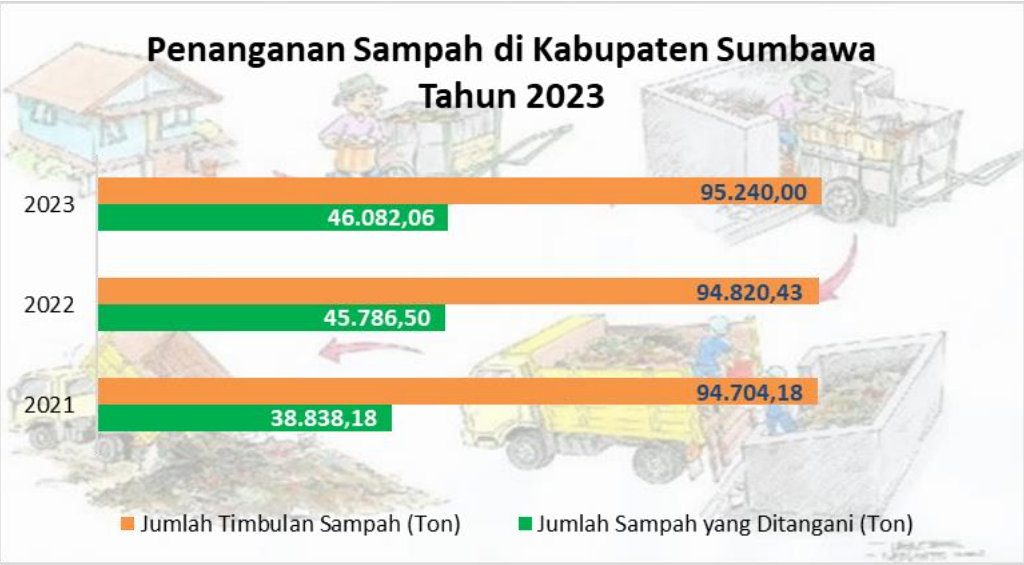
Rencana kawasan peruntukan permukiman di kembangkan di daerah yang datar sampai bergelombang dengan kelerengan lahan 0%-15%, bukan lahan irigasi teknis, bukan kawasan lindung, bukan

kawasan rawan bencana, aksesibilitas baik, dan tersedia air bersih yang baik dan rencana kawasan peruntukan permukiman di Kabupaten Sumbawa meliputi kawasan permukiman yang tersebar di seluruh kecamatan terdiri dari: (i) permukiman perkotaan di Kabupaten Sumbawa dengan Luas 3.476,86 Ha dengan kepadatan sedang sampai tinggi yang dilengkapi diantaranya dengan sistem transportasi umum; (ii) permukiman perdesaan di Kabupaten Sumbawa dengan luas 15.326,53 Ha dengan kepadatan rendah sampai menengah yang dilengkapi diantaranya dengan sarana dan prasarana produksi.

Persampahan

Pengelolaan sampah di Kabupaten Sumbawa secara kelembagaan dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumbawa. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, pengelolaan sampah dilaksanakan oleh Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 serta UPTD Persampahan yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup. Secara umum tugas pokok dan fungsi dibagi menjadi 2 yaitu kegiatan fisik meliputi penanganan (pelayanan persampahan) dan pengurangan sampah yang lebih menitikberatkan kepada pembinaan dan peningkatan kapasitas seluruh stakeholder pengelolaan persampahan.

Penanganan sampah adalah serangkaian langkah yang melibatkan pengumpulan, transportasi, pemrosesan, dan akhirnya pembuangan sampah dengan aman. Untuk kebutuhan penanganan sampah, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumbawa telah menyediakan armada pengangkut sampah berupa truk dump sebanyak 19 unit, truk arm rool sebanyak 3 unit, kendaraan roda tiga sebanyak 1 unit dan alat berat seperti bulldozer dan excavator masing-masing sebanyak 1 unit.



Gambar 2. 69 Penanganan Sampah Kab. Sumbawa Tahun 2023
Sumber data : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Sumbawa

Berdasarkan data dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumbawa, total sampah yang dihasilkan dari 24 kecamatan di Kabupaten Sumbawa pada tahun 2023 mencapai 95.240,00 ton namun hanya 48,39% dari total tersebut yaitu 46.082,06 ton sampah yang dapat terlayani. Total sampah ini meningkat 0,44% dibanding tahun sebelumnya begitu pula dengan sampah yang terlayani mengalami peningkatan sebesar yang tidak terlalu signifikan sebesar 0,64%.

Sampah-sampah ini terdiri dari atas sampah rumah tangga (berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja, dan sampah spesifik), sampah sejenis sampah rumah tangga (berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan fasilitas lainnya), dan sampah spesifik (sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun, sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun, sampah yang timbul akibat bencana, puing bongkaran bangunan, sampah yang secara teknologi belum dapat diolah dan/atau sampah yang timbul secara tidak periodik). Dari sejumlah sampah yang terlayani sebagian besar berakhir di TPA Raberas dan sisanya ditangani oleh TPA Lekong dan TPS 3R.

Terdapat 2 TPA Utama yang aktif beroperasi menangani masalah persampahan di Kabupaten Sumbawa yaitu TPA Raberas (Seketeng, Sumbawa) dan TPA Lekong (Alas Barat). TPA Raberas memiliki luas ± 6 Ha dengan kapasitas $\pm 120.000 \text{ m}^3$ menerima kiriman sampah dari Kecamatan di bagian tengah dan timur seperti kecamatan Sumbawa, Labuhan Badas, Unter Iwes, Moyo Utara, Lopok dan Plampang. Sedangkan TPA Lekong yang terletak di Kec. Alas Barat memiliki luas ± 6 Ha dengan kapasitas $\pm 105.840 \text{ m}^3$ menerima sampah dari kecamatan barat seperti Kecamatan Alas Barat, Alas dan Utan. Meningkatnya populasi penduduk Kabupaten Sumbawa menyebabkan meningkat pula konsumsi masyarakatnya yang mana berdampak pada peningkatan jumlah timbulan sampah.

Kondisi TPA Raberas yang saat ini sudah mencapai kapasitas maksimumnya tidak cukup untuk menangani masalah persampahan di Kabupaten Sumbawa sehingga sangat diperlukan alternatif TPA lain atau upaya lain dalam menanggulangi permasalahan sampah di Kabupaten Sumbawa. Hingga tahun 2023 direncanakan 2 TPA untuk segera beroperasi yaitu TPA Langam di Kecamatan Lopok dan TPA Utan di Kecamatan Utan.

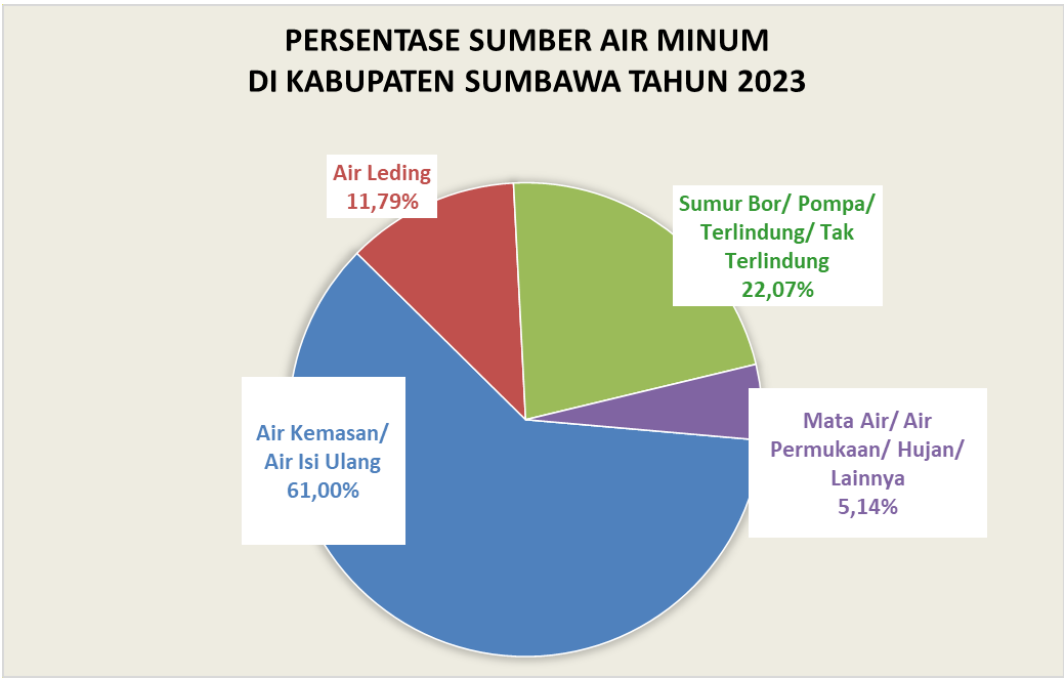
Selain penanganan sampah, pengurangan sampah adalah upaya untuk mengurangi jumlah sampah yang dihasilkan secara keseluruhan. Tujuannya adalah untuk menghindari pembuangan sampah ke tempat pembuangan sampah (TPA), yang merupakan langkah terakhir dalam hierarki pengelolaan sampah. Fungsi pengurangan sampah tidak terlepas dari peran aktif Bank Sampah yang dikelola secara mandiri oleh masyarakat setempat. Sebanyak 7,34 ton sampah diolah dan didaur ulang pada bank sampah sehingga memiliki nilai ekonomi yang lebih bermanfaat bagi masyarakat. Selain bank sampah, pengurangan

sampah juga dijalankan oleh pihak ketiga seperti pengepul sampah dimana 1.413,67 ton sampah berhasil dikurangi dan diolah menjadi benda lain yang bernilai ekonomi.

Akses air minum dan Pengolahan Air Limbah

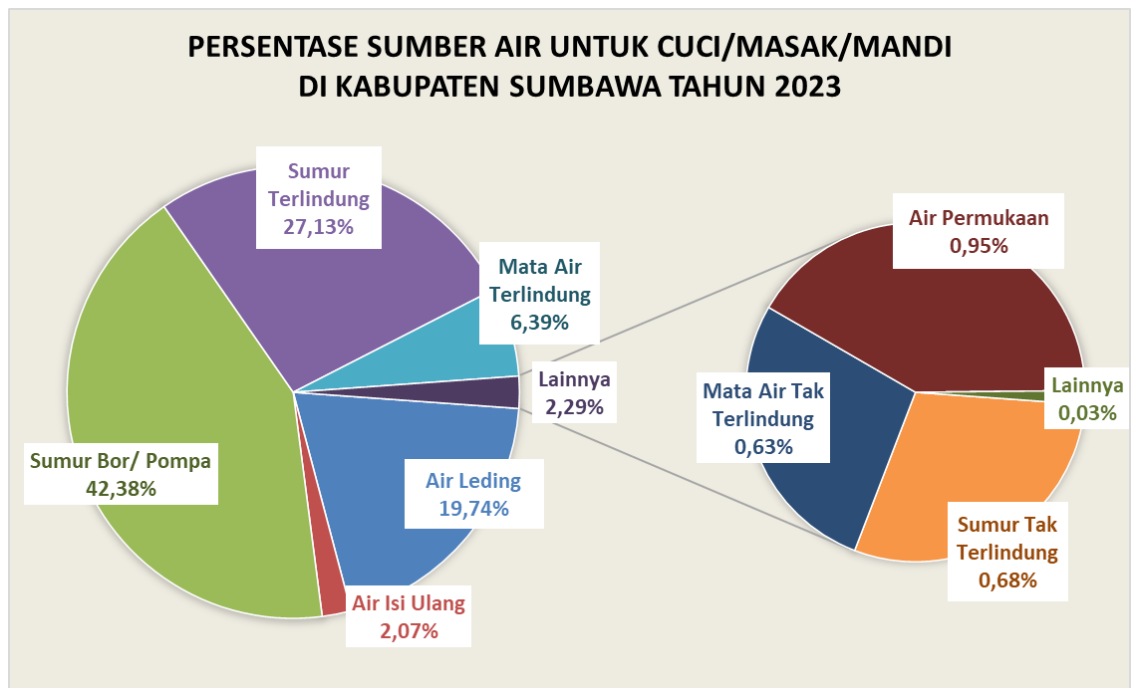
Akses air minum dan sistem pengolahan air limbah yang memadai merupakan salah satu faktor penunjang bagi kehidupan masyarakat yang lebih baik. Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk seluruh masyarakat merupakan salah satu Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPA/SDG's). Pada tahun 2023, sekitar 61,00% rumah tangga di Kabupaten Sumbawa baik kawasan perkotaan maupun perdesaan telah mengkonsumsi air minum dalam kemasan bermerk dan air isi ulang, 11,79% mengkonsumsi leding dan 22,07% mengkonsumsi air minum dari sumur bor/ pompa/ sumur terlindung maupun sumur tak terlindung dan sisanya bersumber dari mata air, air permukaan, air hujan dan lain-lain. Dari tahun ke tahun pemakaian air minum kemasan meningkat seiring menurunnya pemakaian air sumur sebagai sumber air minum utama.

Daerah perkotaan memiliki pola yang sangat berbeda dengan perdesaan. Di daerah perkotaan, lebih dari separuh rumah tangga menjadikan air kemasan/air isi ulang juga leding sebagai sumber air minum. Besarnya penggunaan air sumur/mata air di daerah perdesaan sangat dipengaruhi oleh kecenderungan air tanah di perdesaan lebih bagus juga karena akses fasilitas air bersih (air leding/hidran) yang masih belum menjangkau seluruh wilayah di Kabupaten Sumbawa. Air leding/PAM baru menyentuh daerah perkotaan dan sebagian kecil perdesaan.



Gambar 2. 70 Persentase Sumber Air Minum di Kabupaten Sumbawa Tahun 2023
Sumber Data : Survei Sosial Ekonomi Nasional, Maret 2023

Pada Tahun 2023, sebanyak 96,42% rumah tangga sudah terlayani kebutuhan air minum. Air minum kemasan/isi ulang merupakan air bersih tetapi bukan air layak karena tidak sustainable. Kebutuhan air untuk minum juga mandi/mencuci bisa berasal dari sumber yang berbeda. Pada Tahun 2022, rumah tangga di Sumbawa sebagian besar menggunakan air sumur bor/pompa untuk keperluan mandi/mencuci yaitu sebesar 58,07%. Disusul oleh air leding sebesar 22,25% dan sumur terlindung sebesar 15,21%, sebagaimana terlihat pada gambar di bawah ini.

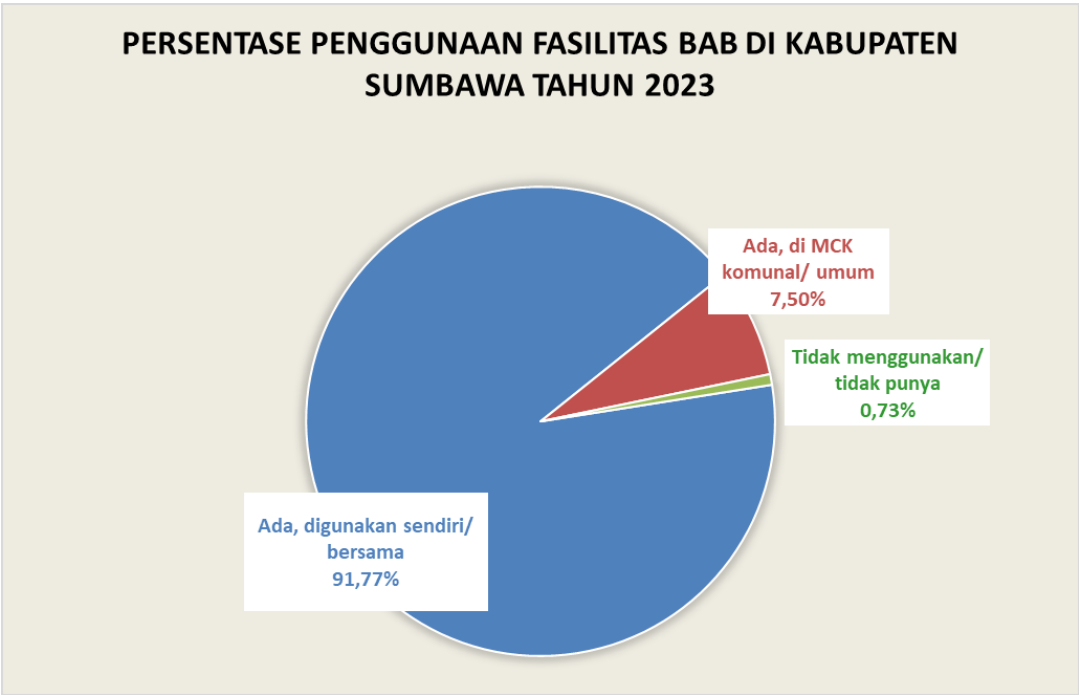


Gambar 2. 71 Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Air Cuci/ Masak/ Mandi
Sumber Data : Survei Sosial Ekonomi Nasional, Maret 2023

Tersedianya fasilitas untuk buang air besar merupakan salah satu indikator lingkungan yang layak dan sehat. Tidak tersedianya fasilitas untuk buang air besar menjadikan lingkungan tersebut rentan terhadap penyebaran penyakit seperti diare. Idealnya setiap rumah tangga memiliki fasilitas BAB sendiri dengan tangki pembuangan minimal berjarak 10 meter dari sumber air.

Hingga tahun 2023, sebanyak 91,77% rumah tangga telah memiliki fasilitas BAB. Masih terdapat 8,23% rumah yang belum memiliki fasilitas BAB. Kepemilikan fasilitas BAB lebih tinggi di daerah perkotaan daripada perdesaan, yaitu sekitar 94,11% fasilitas BAB di daerah perkotaan, dan 90,06% fasilitas BAB di daerah perdesaan. Fasilitas buang air besar juga harus didukung oleh tempat pembuangan akhir tinja yang memenuhi kriteria. Tempat pembuangan akhir tinja yang dianjurkan adalah tangki septik. Tangki septik ini juga harus memiliki jarak yang cukup dengan sumber air yang digunakan karena tinja yang dibuang mengandung bakteri yang menyebabkan banyak

penyakit. Sebanyak 97,97% rumah tangga telah menggunakan tangki septik di Tahun 2023.



Gambar 2. 72 Persentase Rumah Tangga Menurut Penggunaan Fasilitas BAB
Sumber Data: Survei Sosial Ekonomi Nasional, Maret 2023

2.3.4. Daya Saing Iklim Investasi

Penanaman Modal

Pengaruh penanaman modal atau investasi terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara atau daerah dapat dilihat melalui multiplier effect yang ditimbulkannya. Multiplier effect atau efek pengganda dari investasi dipengaruhi oleh besarnya minat masyarakat. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA) dapat dilakukan dalam bentuk penanaman modal langsung (direct investment) maupun penanaman modal portofolio surat berharga (portofolio investment).

Tahun 2018 yang merupakan tahun awal diterapkannya aplikasi OSS, sehingga banyak Perusahaan yang mendaftar melalui OSS, baik Perusahaan baru maupun perusahaan yang telah memiliki Izin Usaha dan harus diperbaharui Izinnya. Hal ini menyebabkan tingginya nilai Investasi pada Tahun 2018, demikian juga Tahun 2019. Tahun 2020 pendaftaran melalui OSS menurun karena hanya perusahaan baru yang mendaftar dan nilai investasinya kecil. Pandemi Covid-19 sangat mempengaruhi perekonomian di negara kita, terutama bidang investasi karena terjadi krisis.

Penanaman Modal di Kabupaten Sumbawa menunjukkan bahwa realisasi investasi di Kabupaten Sumbawa kembali meningkat setelah berlalunya era Covid-19. Dalam rentang lima tahun terakhir (2019 hingga 2023) tercatat total realisasi PMDN dan PMA pada tahun 2023

merupakan realisasi investasi tertinggi, yang mana juga melampaui target yang telah ditetapkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Barat yaitu Rp. 1.500.000.000.000 pada tahun 2023. Kinerja investasi yang relatif baik tidak terlepas prospek perekonomian domestik yang dipersepsikan masih cukup baik disertai iklim usaha yang kondusif. Data realisasi investasi di bawah ini bersumber dari rekapitulasi pelaporan LKPM melalui aplikasi OSS berdasarkan data realisasi modal tetap.

**Tabel 2.26 Realisasi Investasi di Kabupaten Sumbawa
Tahun 2019-2023**

Tahun	Target Investasi	Realisasi Investasi			%
		PMDN (Rp.)	PMA (Rp.)	Total (Rp.)	
2019	2.195.029.596.780	86.934.840.940	518.063.805.613	604.998.646.553	27,56
2020	1.012.873.712.924	253.737.620.218	17.224.967.707	270.962.587.925	26,75
2021	349.548.062.759	110.275.400.000	30.017.600.164	140.293.000.164	40,14
2022	308.471.968.443	250.080.102.993	17.437.488.217	267.517.591.210	86,72
2023	1.500.000.000.000	1.773.454.774.295	31.324.944.864	1.804.779.719.159	120,32

Sumber data: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Sumbawa, 2023

2.4. Aspek Pelayanan Umum

2.4.1. Pengantar analisis

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, menyebutkan bahwa RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD dan memperhatikan RPJMN, memuat arah kebijakan keuangan Daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Penyusunan dokumen perencanaan daerah saat ini disusun dengan tetap memperhatikan kaidah-kaidah yang ditentukan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Penyempurnaan tersebut antara lain dengan memberikan indikator pada tujuan dan sasaran sesuai saran dan arahan tim reviu dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Penyusunan dokumen perencanaan daerah juga telah menyerap aspirasi dari pemangku kepentingan, masyarakat secara umum, serta warga Kabupaten Sumbawa.

Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2021 tentang RPJMD Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026, sebagai periode akhir dari RPJPD 2005-2025 menyebutkan bahwa untuk mencapai tujuan pembangunan daerah perlu ditetapkan visi dan misi. Pencapaian visi ini diwujudkan melalui sejumlah misi yang dilaksanakan segenap jajaran pemerintahan melalui pelaksanaan tugas dan fungsinya secara tepat yang direfleksikan dengan pencapaian kinerja untuk mendukung agenda prioritas pembangunan daerah. Pemerintah Kabupaten Sumbawa sebagai sebuah entitas pemerintahan, bertanggung jawab melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan dengan mematuhi seluruh azas penyelenggaraan *good governance*. Tujuan dan sasaran strategis pembangunan daerah yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah lima tahunan tersebut, selanjutnya diturunkan dalam RKPD dengan indikator kinerja pada masing-masing sasaran merupakan sarana untuk mengukur capaian kinerja pemerintah kabupaten sumbawa. RPJMD Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026 telah mengimplementasikan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, termasuk dalam hal penyusunan dokumen perencanaan daerah dengan melibatkan pihak-pihak terkait baik dalam forum-forum diskusi publik dan semua pihak baik akademisi, para pemangku kepentingan, kalangan dunia usaha sampai masyarakat umum dapat menyampaikan usulan dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Sumbawa 2021-2026 maupun RKPD Kabupaten Sumbawa.

Seiring perkembangan kebijakan pengaplikasian sistem dan teknologi informasi, beberapa aspek dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan di Kabupaten Sumbawa telah berbasis elektronik, sebagai

amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE. Penyempurnaan dalam proses penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Sumbawa Tahun 2021 – 2026 tersebut juga dilakukan sebagai arahan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sehingga Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sudah tersusun secara bersesuaian dengan pendekatan metode *cascadding*. Berbagai kelemahan dan kekurangan dalam dokumen RPJMD periode sebelumnya telah menjadi salah satu pertimbangan dalam upaya perbaikan dan penyempurnaan RPJMD Kabupaten Sumbawa Tahun 2021– 2026. Jabaran nomenklatur visi, misi, tujuan dan sasaran dalam RPJMD Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026, sebagai berikut:

Visi: Terwujudnya Sumbawa Gemilang Yang Berkeadaban			
No	Misi	Tujuan	Sasaran
	Sumbawa Sehat dan Cerdas	Meningkatkan derajat kesehatan dan pendidikan masyarakat	Meningkatnya kualitas kesehatan dan Pendidikan
			Meningkatnya capaian SPM Layanan Dasar Bidang Kesehatan dan Bidang Pendidikan
	Sumbawa Sejahtera dan Mandiri	Meningkatkan Kesejahteraan dan Kemandirian Masyarakat	Meningkatnya Pendapatan Masyarakat
			Meningkatnya Kapasitas Koperasi dan UMKM
			Meningkatnya Laju Pertumbuhan PDRB Lapangan Usaha Prioritas
			Menurunnya angka Pengangguran
			Menurunnya Angka Kemiskinan
			Meningkatnya Pertumbuhan Komponen IPM: pengeluaran perkapita yg disesuaikan
	Sumbawa Bersih dan melayani	Meningkatkan Kinerja Birokrasi dan Pelayanan Publik yang bersih	Meningkatnya Kualitas Reformasi Birokrasi
	Sumbawa Aman dan Berbudaya	Meningkatkan keamanan dan masyarakat yang berbudaya	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan SPM Layanan Dasar Bidang Sosial
			Meningkatnya kualitas penanganan konflik sosial
			Meningkatnya tingkat kemandirian desa
			Meningkatnya upaya pelestarian budaya daerah
			Meningkatnya kualitas perempuan dan anak
			Meningkatnya kualitas Pemuda dan Olahraga

Visi: Terwujudnya Sumbawa Gemilang Yang Berkeadaban			
No	Misi	Tujuan	Sasaran
			Meningkatnya pemenuhan Hak Administratif Penduduk
	Sumbawa Tangguh dan Berkelanjutan	Meningkatkan kualitas infrastruktur untuk mendukung layanan dasar dan perekonomian	Meningkatnya capaian SPM Layanan Dasar Bidang Pekerjaan Umum
			Meningkatnya capaian SPM Layanan Dasar Bidang Pekerjaan Umum
			Meningkatnya capaian SPM Layanan Dasar Bidang Trantibumlinma
			Meningkatnya Kualitas Infrastruktur
			Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup

Untuk mencapai tujuan dan sasaran di atas, maka telah ditentukan sejumlah strategi dan arah kebijakan yang akan dilakukan dalam proses pembangunan daerah. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang upaya mencapai tujuan dan sasaran secara efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan tranformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi. Hal ini dalam rangka menjamin proses pembangunan yang terukur dan proporsional dan menyeluruh sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi setiap program pembangunan.

Penentuan strategi dan arah kebijakan RPJMD Kabupaten Sumbawa tahun 2021-2026 berangkat dari pertimbangan dan mempedomani kebijakan program dan prioritas nasional dan provinsi serta memperhatikan berbagai isu strategis, kebijakan dan prioritas nasional dan provinsi. Arah kebijakan, strategi dan program prioritas berdasarkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026, sebagai berikut:

	Misi	Strategi	Arah Kebijakan
	Sumbawa Sehat dan Cerdas	Pemenuhan standar kualitas layanan Fasyankes dan RSUD	Standarisasi pelayanan RSUD, puskesmas, dan jaringannya secara merata
		Penurunan prevalensi stunting	Konvergensi penanganan dan penurunan stunting
		Peningkatan Perilaku Masyarakat Hidup Bersih dan Sehat	Penerapan STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat) yang Berkesetaraan Gender dan Inklusi Sosial
		Peningkatan layanan KB dan kesehatan reproduksi	Penguatan revitalisasi program KB untuk

	Misi	Strategi	Arah Kebijakan
		secara komprehensif dan berkelanjutan	meningkatkan kualitas hidup keluarga
		Peningkatan pelayanan kesehatan bagi ibu, anak, balita dan lansia	Kualitas pelayanan bagi ibu hamil dan melahirkan bayi balita, anak sekolah, remaja dan lansia
		Peningkatan aksesibilitas, mutu dan daya saing pendidikan	Akses pendidikan yang merata dan terjangkau
		Peningkatan minat baca masyarakat	Penguatan sarana dan prasarana perpustakaan serta kapasitas kelembagaan secara terpadu
		Peningkatan literasi dan pendidikan inklusi	Penguatan Perpustakaan dan pendidikan inklusi
		Pemenuhan standar Mutu Layanan Kesehatan	Capaian Mutu Layanan Kesehatan 100 %
		Pemenuhan standar Mutu Layanan Pendidikan	Capaian Mutu Layanan Pendidikan 100 %
	Sumbawa Sejahtera dan Mandiri	Peningkatan nilai tambah produk lapangan usaha prioritas	Peningkatan nilai tambah produk lapangan usaha prioritas
		Peningkatan produktivitas pertanian tanaman pangan	Peningkatan produktivitas pertanian tanaman pangan
		Peningkatan produksi perikanan	Peningkatan produksi perikanan
		Peningkatan pertumbuhan populasi ternak	Peningkatan pertumbuhan populasi ternak
		Pengembangan destinasi wisata berbasis konservasi dan budaya yang berkelanjutan	Pengembangan destinasi ekowisata unggulan berbasis komunitas
		Peningkatan kelancaran distribusi barang dan jasa	Peningkatan kelancaran distribusi barang dan jasa
		Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi	Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi
		Peningkatan kuantitas UKM	Peningkatan kuantitas UKM
		Peningkatan kuantitas IKM	Peningkatan kuantitas IKM
		Penciptaan lapangan kerja	Perluasan lapangan kerja
		Peningkatan realisasi penanaman modal	Peningkatan realisasi penanaman modal
		Peningkatan kualitas pelayanan perijinan	Peningkatan kualitas pelayanan perijinan
		Pengembangan kegiatan ekonomi di permukiman transmigrasi	Pengembangan ekonomi di permukiman transmigrasi
		Peningkatan capaian indeks pola pangan harapan	Pengelolaan Cadangan Pangan Masyarakat dengan Memperhatikan Distribusi dan Kewaspadaan Pangan

	Misi	Strategi	Arah Kebijakan
		Peningkatan daya beli masyarakat	Penumbuhan Wirausaha dan Pelaku Ekonomi Kreatif
	Sumbawa Bersih dan melayani	Penerapan budaya kerja birokrasi yang melayani, bersih, dan akuntabel.	Implementasi Zona integritas, WBBM, WBBK
		Penataan organisasi agar tepat fungsi dan tepat ukuran	Melakukan penyederhaan birokrasi (<i>Rightsizing bureaucracy</i>)
		Penerapan Norma, Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang jelas, efektif, efisien terukur dan sesuai dengan prinsip <i>Good Governance</i>	Penguatan implementasi SOP dan Standar pelayanan publik
		Menjamin penerapan peraturan perundang-undangan yang tertib, tidak tumpang tindih dan kondusif	Harmonisasi perundang-undangan
		Peningkatan kualitas SDM aparatur yang berintegritas dan netral	Peningkatan Indeks profesionalitas ASN
		Peningkatan kualitas pengawasan penyelenggaraan pemerintahan yang bebas KKN	Peningkatan Maturitas APIP
		Peningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi	Penguatan SAKIP Perangkat Daerah
		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat	Penguatan PATEN
	Sumbawa Aman dan Berbudaya	Pemenuhan standar Mutu Layanan Sosial	Capaian Mutu Layanan Sosial 100 %
		Peningkatan kreatifitas dan prestasi olahraga pemuda	Peningkatan peran stakeholder pembangunan kepemudaan dan keolahragaan
		Perlindungan dan revitalisasi nilai, ekspresi dan praktik budaya lokal untuk memperkuat pembangunan Daerah	Peningkatan aktifitas berbasis komunitas dalam pelestarian nilai, ekspresi dan praktik kebudayaan
		Peningkatan kualitas dan cakupan pelayanan bagi Perempuan dan anak korban kekerasan	Peningkatan Pelayanan dan perlindungan bagi Perempuan dan anak korban kekerasan melalui pendekatan PATBM (Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat)
		Peningkatkan peran stakeholder dalam menciptakan & menjaga rasa aman masyarakat	Peningkatan peran stakeholder terkait dalam menciptakan rasa aman pada masyarakat

	Misi	Strategi	Arah Kebijakan
		Penurunan Jumlah Desa Tertinggal	Penurunan jumlah desa tertinggal
		Peningkatan kepemilikan dokumen kependudukan dan catatan sipil	Peningkatan kepemilikan dokumen kependudukan dan catatan sipil
	Sumbawa Tangguh dan Berkelanjutan	Pemenuhan standar Mutu Layanan Pekerjaan Umum	Capaian Mutu Layanan Pekerjaan Umum 100 %
		Pemenuhan standar Mutu Layanan Perumahan Rakyat	Capaian Mutu Layanan Perumahan rakyat 100 %
		Pemenuhan standar Mutu Layanan Bidang Trantibumlinmas	Capaian Mutu Layanan Trantibumlinmas 100 %
		Peningkatan kualitas dan layanan Infrastruktur	Meningkatkan kualitas infrasturktur untuk mendukung layanan dasar dan ekonomi
		Peningkatkan kualitas penjaminan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dalam pembangunan	Meningkatkan kualitas tutupan lahan
			Optimalisasi kinerja pengelolaan dan pengurangan sampah
		Pemenuhan standar Mutu Layanan Pekerjaan Umum	Capaian Mutu Layanan Pekerjaan Umum 100 %

Seluruh strategi dan arah kebijakan di atas selanjutnya diimplementasikan dengan pelaksanaan program-program pembangunan daerah. Program pembangunan daerah merupakan program strategis daerah yang dilaksanakan oleh perangkat daerah sesuai kewenangannya, sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD. Dengan demikian, program pembangunan daerah memiliki posisi strategis dalam pencapaian target sasaran pembangunan, untuk mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah. Program pembangunan daerah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019. Dalam rangka mencapai misi pembangunan Kabupaten Sumbawa tahun 2021-2026, teridentifikasi 158 (seratus lima puluh delapan) Program, yang menjabarkan setiap Misi yaitu:

- a. Misi Sumbawa Sehat dan Cerdas dijabarkan dalam 12 program;
- b. Misi Sumbawa Sejahtera dan Mandiri dijabarkan dalam 54 Program;
- c. Misi Sumbawa Bersih dan Melayani dijabarkan dalam 25 Program;
- d. Misi Sumbawa Aman dan Berbudaya dijabarkan dalam 30 Program; dan

- e. Misi Sumbawa Tangguh dan Berkelanjutan dijabarkan dalam 37 Program

Pengukuran terhadap tingkat ketercapaian atas pelaksanaan seluruh program pembangunan daerah merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Pengukuran terhadap suatu kinerja ditujukan untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, sehingga menjadi suatu keharusan untuk menyusun menyampaikan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah terutama untuk mengetahui tingkat pencapaian suatu indikator kinerja pemerintah daerah.

Formulasi Pengukuran Kinerja

Pemerintah Kabupaten Sumbawa melakukan evaluasi secara berkala atas perencanaan kinerja yang ditetapkan. Salah satu *output*nya adalah Nilai Kinerja Organisasi (NKO) yang diperoleh melalui penghitungan dengan menggunakan data target dan realisasi IKU yang tersedia. Dengan membandingkan antara data target dan realisasi, akan diperoleh indeks capaian IKU. Penghitungan indeks capaian IKU perlu memperhitungkan jenis polarisasi IKU yang berlaku yaitu *maximize* dan *minimize*.

Formula penghitungan indeks capain IKU untuk setiap jenis polarisasi dan nilai kinerja adalah sebagaimana penjelasan berikut:

- 1) Perhitungan untuk Indikator Kinerja yang memiliki polarisasi *Maximize*

$$Indeks\ Capaian = \frac{Realisasi}{Target} \times 100\%$$

Indikator Kinerja yang memiliki polarisasi *maximize*, merupakan indikator kinerja yang menunjukkan ekspektasi arah pencapaian indikator kinerja lebih tinggi dari nilai target yang ditetapkan.

- 2) Perhitungan untuk Indikator Kinerja yang memiliki polarisasi *Minimize*

$$Indeks\ Capaian = \left[1 + \left(1 - \frac{Realisasi}{Target} \right) \right] \times 100\%$$

Indikator Kinerja yang memiliki polarisasi *minimize*, merupakan indikator kinerja yang menunjukkan ekspektasi arah pencapaian indikator kinerja lebih kecil dari nilai target yang ditetapkan.

3) Nilai Kinerja

Perhitungan Nilai Kinerja untuk mendapatkan NKO dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

a. Perhitungan Capaian Indikator Kinerja

Perhitungan Capaian Indikator Kinerja dilakukan dengan membandingkan antara realisasi dengan target berdasarkan formula penghitungan Indikator Kinerja untuk setiap jenis polarisasi sebagaimana telah dijelaskan di atas.

b. Perhitungan Nilai Kinerja Agregat

Perhitungan nilai kinerja agregat dilaksanakan dengan mengkonsolidasikan seluruh Capaian Indikator Kinerja sebagai nilai *mean* Capaian Indikator Kinerja keseluruhan.

Kategori nilai realisasi dan capaian kinerja diinterpretasikan berdasarkan pengelompokan dalam skala ordinal, sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sebagaimana disajikan dalam tabel di bawah ini:

Interval Nilai Realisasi Kinerja		Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Keterangan
	91 - ≤100	Sangat Tinggi	Pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja
	76 - ≤90		
	66 - ≤75	Sedang	Pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal
	51 - ≤65	Rendah	Pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan
	≤50	Sangat Rendah	

Informasi atau data tentang realisasi atau tingkat capaian suatu indikator harus berasal dari sumber yang dapat diakui dan dipercaya keabsahannya, baik dari sisi tata cara atau metode perhitungan dan dari sisi pihak yang melakukan pengumpulan, pengolahan, penyajian sampai dengan publikasinya. Data atau informasi tentang capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Sumbawa Tahun 2023 ini tidak hanya bersumber dari hasil pengukuran mandiri atau internal pemerintah daerah saja, namun juga bersumber dari Lembaga instansi eksternal yang berdasarkan suatu regulasi atau peraturan perundang-undangan tertentu memiliki kewenangan untuk mengumpulkan, mengolah sampai dengan menyajikan dan/atau mempublikasikan suatu data atau informasi tertentu kepada publik, antara lain:

- a. Data isian Akuntabilitas Kinerja dari seluruh perangkat daerah dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Sumbawa Tahun 2023;
- b. Sumbawa dalam Angka (BPS);
- c. Nusa Tenggara Barat dalam Angka (BPS);
- d. Indikator Kesejahteraan Rakyat Provinsi NTB (BPS);
- e. Data Susenas dan Data Sensus Pertanian (BPS);
- f. PDRB Provinsi NTB (BPS);
- g. PDRB Kabupaten Sumbawa (BPS);
- h. Statistik Ekonomi Regional NTB (Bank Indonesia);
- i. Indikator Pertanian Provinsi NTB (BPS);
- j. Statistik Daerah Provinsi NTB (BPS);
- k. Statistik Perhotelan Provinsi Nusa Tenggara Barat (BPS);
- l. Statistik Perumahan Provinsi Nusa Tenggara Barat (BPS);
- m. Survei Sosial Ekonomi Nasional Provinsi NTB (BPS);
- n. Profil Daerah (Bappeda Kabupaten Sumbawa);
- o. Profil dan Laporan Tahunan Perangkat Daerah atau Dokumen Terbitan Perangkat Daerah;
- p. LKjIP Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Sumbawa;
- q. Dokumen arsip dan data SKPD/lembaga vertikal daerah;
- r. Dokumen LKPJ Kabupaten Sumbawa;
- s. Data isian LPPD Kabupaten Sumbawa; dan
- t. Berita/Informasi release berbagai media, baik cetak maupun elektronik.

Perencanaan Kinerja yang telah disusun oleh Pemerintah Kabupaten Sumbawa pada tahun 2023 yang kemudian ditetapkan dalam Dokumen Perjanjian Kinerja merupakan perjanjian yang akan dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Sumbawa pada tahun

bersangkutan. Oleh karena itu, perjanjian kinerja menjadi kontrak kinerja yang harus diwujudkan oleh Pemerintah Daerah yang pada dasarnya menjadi tolok ukur keberhasilan kinerja Pemerintah Daerah. Sebagai tolok ukur keberhasilan kinerja, Pemerintah Kabupaten Sumbawa telah menetapkan indikator kinerja sebagaimana tertuang dalam dokumen perencanaan daerah.

2.4.2. Kondisi Umum Aspek Pelayanan Umum berdasarkan Bidang Urusan Penyelenggaraan Kewenangan Pemerintahan Daerah

Kondisi umum pada aspek Pelayanan Umum ditentukan berdasarkan capaian kinerja pada tiap indikator pada urusan wajib dan pilihan. Indikator dimaksud menjadi IKU dan IKD yang pengukurannya dilakukan dengan membandingkan antara target (rencana) dengan realisasi indikator kinerja pada masing-masing sasaran strategis termasuk capaian kinerja outcome dari setiap program prioritas daerah Tahun 2023. Setelah diketahui nilai realisasi dari suatu indikator kinerja, maka akan diketahui nilai capaian dari masing-masing indikator kinerja dengan membandingkan nilai realisasi dengan nilai target dan dijadikan dalam bentuk persentase (%). Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh angka Nilai Kinerja sebagai postur kinerja Pemerintah Kabupaten Sumbawa yang merupakan capaian kinerja Tahun 2023, baik terhadap IKU maupun IKD, sebagai berikut:

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)
Pemerintah Kabupaten Sumbawa Tahun 2023

No	Tujuan	Indikator Kinerja		Satuan	Target	Realisasi	Capaian	
1	Meningkatkan Kesehatan dan Kecerdasan Masyarakat	1	Pertumbuhan Indeks Komposit IPM Kesehatan dan Pendidikan	%	0.574	1.142	198.95	Sangat Tinggi
		2	Persentase Penerapan SPM Layanan Dasar Bidang Kesehatan dan Bidang Pendidikan	%	100	95.78	95.78	Sangat Tinggi
2	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Lokal Yang Berkualitas	3	Pertumbuhan Ekonomi	%	2.46	3.61	146.75	Sangat Tinggi
		4	Penurunan Angka Kemiskinan	%	1.86	0.3	16.13	Sangat Rendah

No	Tujuan	Indikator Kinerja		Satuan	Target	Realisasi	Capaian	
		5	Penurunan Indeks Gini	%	0.333	0.441	132.43	Sangat Tinggi
3	Meningkatkan Birokrasi Yang Bersih dan Pelayanan Publik	6	Peningkatan Kategori Indeks Reformasi Birokrasi	Kategori	CC	B	125.01	Sangat Tinggi
4	Meningkatkan Keamanan dan Masyarakat Yang Berbudaya	7	Persentase Penerapan SPM Layanan Dasar Bidang Sosial	%	100	100	100.00	Sangat Tinggi
5	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Untuk Mendukung Layanan Dasar dan Perekonomian	8	Persentase Penerapan SPM Layanan Dasar Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat	%	100	99.62	99.62	Sangat Tinggi
		9	Persentase Penerapan SPM Layanan Dasar Bidang Trantibumlinmas	%	100	100	100.00	Sangat Tinggi
		10	Indeks Infrastruktur	%	85	86.07	101.26	Sangat Tinggi
			Rata-Rata Capaian Kinerja	%	111.59			Sangat Tinggi
			Capaian Kinerja Tertinggi	%	198.95			Sangat Tinggi
			Capaian Kinerja Terendah	%	16.13			Sangat Rendah

Terhadap Indikator Kinerja Daerah (IKD), pengukuran capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Sumbawa Tahun 2023 pada dasarnya dilakukan dengan membandingkan antara target (rencana) dengan realisasi indikator kinerja pada masing-masing sasaran strategis. Untuk setiap indikator sasaran strategis daerah yang menjadi Indikator Kinerja Daerah (IKD), akan disajikan sebagai berikut.

Capaian Indikator Kinerja Daerah (IKD)
Pemerintah Kabupaten Sumbawa Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria Capaian Kinerja
1	Meningkatnya kualitas kesehatan dan Akses Pendidikan	1	Indeks Kesehatan	Nilai	0.747	0.81	108.43	Sangat Tinggi
		2	Indeks Pendidikan	Nilai	0.658	0.678	103.04	Sangat Tinggi

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria Capaian Kinerja
2	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraa n SPM Layanan Dasar Bidang Kesehatan dan Bidang Pendidikan	3	Capaian Mutu SPM Layanan Dasar Bidang Kesehatan	%	20.00	19.97	99.85	Sangat Tinggi
		4	Capaian Mutu SPM Layanan Dasar Bidang Pendidikan	%	20.00	17.37	86.85	Tinggi
3	Meningkatnya Kapasitas Koperasi dan UMKM	5	Laju Omzet Koperasi dan Usaha Mikro	%	13.23	15.36	116.10	Sangat Tinggi
4	Meningkatnya Laju Pertumbuhan PDRB Lapangan Usaha Prioritas	6	Laju Pertumbuh an PDRB Lapangan Usaha Prioritas (pertanian, perikanan dan kehutanan; Perdagangan n; Penyediaan Akomodasi Dan Makan Minum; Industri Pengolahan);	%	2.295	2.85	124.18	Sangat Tinggi
5	Meningkatnya Pendapatan Masyarakat	7	Laju Pendapatan Per Kapita	%	4.586	7.24	157.87	Sangat Tinggi
6	Menurunnya angka Pengangguran	8	Tingkat Penganggur an Terbuka	Angka	3.41	2.79	122.22	Tinggi
7	Meningkatnya Pertumbuhan Nilai komponen IPM: pengeluaran per kapita yang disesuaikan	9	Jumlah Pengeluara n Perkapita (yang disesuaikan)	Rp.	9,413, 000	9,981,000	106.03	Sangat Tinggi
8	Meningkatnya Kualitas Reformasi Birokrasi	10	Nilai Reformasi Birokrasi	Nilai	52.5	62.36	118.78	Sangat Tinggi
9	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraa n SPM Layanan Dasar Bidang Sosial	11	Capaian Mutu SPM Layanan Dasar Bidang Sosial	%	20	20	100.00	Sangat Tinggi
10	Meningkatnya kualitas Pemuda dan Olahraga	12	Jumlah Pemuda dan Atlet Daerah yang berprestasi	Orang	450	411	91.33	Sangat Tinggi

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria Capaian Kinerja
11	Meningkatnya upaya pelestarian budaya daerah	13	Capaian kinerja pemajuan objek kebudayaa n daerah	%	73	100	136.99	Sangat Tinggi
12	Meningkatnya kualitas perempuan dan anak	14	Indeks Pembangunan Gender	Nilai	94.19	93.48	99.25	Sangat Tinggi
		15	Nilai Hasil Pengukurann Indikator KLA	Nilai	661	503	76.10	Tinggi
13	Meningkatnya Kinerja Penanganan Konflik Sosial	16	Capaian Kinerja Penangana n Konflik Sosial	%	100.00	100.00	100.00	Sangat Tinggi
14	Meningkatnya tingkat kemandirian desa	17	Indeks Desa Membangu n (IDM)	Nilai	120	119.51	99.59	Sangat Tinggi
15	Meningkatnya pemenuhan Hak Administratif Penduduk	18	Cakupan kepemilika n dokumen kependudu kan dan akta pencatatan sipil	%	100.00	81.33	81.33	Sangat Tinggi
16	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraa n SPM Layanan Dasar Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat	19	Capaian Mutu SPM Layanan Dasar Bidang Pekerjaan Umum	%	20.00	19.97	99.85	Sangat Tinggi
		20	Capaian Mutu SPM Layanan Dasar Bidang Perumahan Rakyat	%	20.00	20.00	100.00	Sangat Tinggi
17	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraa n SPM Layanan Dasar Bidang Trantibumlinmas	21	Capaian Mutu SPM Layanan Dasar Bidang Trantibumlinmas	%	20.00	20.00	100.00	Sangat Tinggi
18	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur	22	Tingkat ketersediaa n infrastruktu r dalam kondisi baik	%	87.00	86.07	98.93	Sangat Tinggi

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria Capaian Kinerja
19	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	2	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Nilai	68.90	72.41	105.09	Sangat Tinggi
		3	Capaian Rata-Rata	%	101.02			Sangat Tinggi
			Capaian Tertinggi	%	124.18			Sangat Tinggi
			Capaian Terendah	%	76.10			Tinggi

Perbandingan capaian Indikator Kinerja Daerah (IKD) Tahun 2023 dengan capaian IKD Pemerintah Kabupaten Sumbawa tahun 2022, disesuaikan dengan dokumen PK yang disusun dengan memperhatikan indikator dan target sasaran strategis daerah Tahun 2023, sebagai berikut:

Pembandingan antara Capaian Kinerja tahun 2023 dengan tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Capaian Tahun n-1 (2022)	Capaian Tahun n (2023)	Naik (+)/ Turun (-)
1	Meningkatnya kualitas kesehatan dan Akses Pendidikan	1	Indeks Kesehatan	%	99.73	108.43	8.70
		2	Indeks Pendidikan	%	102.14	103.04	0.90
2	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan SPM Layanan Dasar Bidang Kesehatan dan Bidang Pendidikan	3	Capaian Mutu SPM Layanan Dasar Bidang Kesehatan	%	90.42	99.85	9.43
		4	Capaian Mutu SPM Layanan Dasar Bidang Pendidikan	%	98.33	86.85	-11.48
3	Meningkatnya Kapasitas Koperasi dan UMKM	5	Laju Omzet Koperasi dan UMKM	%	113.73	116.10	2.37
4	Meningkatnya Laju Pertumbuhan PDRB Lapangan Usaha Prioritas	6	Laju Pertumbuhan PDRB Lapangan Usaha Prioritas (pertanian, perikanan dan kehutanan; Perdagangan; Penyediaan Akomodasi Dan Makan Minum; Industri Pengolahan)	%	179.14	124.18	-54.96
5	Meningkatnya Pendapatan Masyarakat	7	Laju Peningkatan Pendapatan Per Kapita	%	107.87	157.87	50.00
6	Menurunnya angka Pengangguran	8	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	171.09	122.22	-89.27
7	Meningkatnya Pertumbuhan Nilai komponen IPM: pengeluaran per kapita yang disesuaikan	9	Jumlah Pengeluaran Perkapita (yang disesuaikan)	%	102.94	106.03	3.09
8	Meningkatnya Kualitas Reformasi Birokrasi	10	Nilai Reformasi Birokrasi	%	196.67	118.78	-77.89

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Capaian Tahun n-1 (2022)	Capaian Tahun n (2023)	Naik (+)/ Turun (-)
9	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan SPM Layanan Dasar Bidang Sosial	11	Capaian Mutu SPM Layanan Dasar Bidang Sosial	%	100.00	100.00	0.00
10	Meningkatnya kualitas Pemuda dan Olahraga	12	Jumlah Pemuda dan Atlet Daerah yang berprestasi	%	151.51	91.33	-60.18
11	Meningkatnya upaya pelestarian budaya daerah	13	Capaian kinerja pemajuan objek kebudayaan daerah	%	119.37	136.99	17.62
12	Meningkatnya kualitas perempuan dan anak	14	Indeks Pembangunan Gender	%	99.69	99.25	-0.44
		15	Nilai Hasil Pengukuran Indikator KLA	%	75.70	76.10	0.40
13	Meningkatnya Kinerja Penanganan Konflik Sosial	16	Capaian Kinerja Penanganan Konflik Sosial	%	100.00	100.00	0.00
14	Meningkatnya tingkat kemandirian desa	17	Indeks Desa Membangun (IDM)	%	100	99.59	-0.41
15	Meningkatnya pemenuhan Hak Administratif Penduduk	18	Cakupan kepemilikan dokumen kependudukan dan akta pencatatan sipil	%	74.82	81.33	6.51
16	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan SPM Layanan Dasar Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat	19	Capaian Mutu SPM Layanan Dasar Bidang Pekerjaan Umum	%	67.03	99.85	32.82
		20	Capaian Mutu SPM Layanan Dasar Bidang Perumahan Rakyat	%	100.00	100.00	0.00
17	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan SPM Layanan Dasar Bidang Trantibumlinmas	21	Capaian Mutu SPM Layanan Dasar Bidang Trantibumlinmas	%	84.85	100.00	15.15
18	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur	22	Tingkat ketersediaan infrastruktur dalam kondisi baik	%	102.82	98.93	-3.89
19	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	23	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	%	105.57	105.09	-0.48

Pemenuhan target dari masing-masing indikator sasaran strategis yang ditentukan pada Tahun 2023, dari sisi internal diupayakan melalui pelaksanaan program-program yang relevan sebagaimana telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026 yang dijabarkan kembali dalam setiap Renstra Perangkat Daerah. Sementara itu, capaian kinerja dari setiap indikator sasaran strategis daerah Tahun 2023 juga dipengaruhi oleh pengaruh eksternal, antara lain dinamisnya kebijakan pemerintah pusat maupun

provinsi serta intensitas peran serta atau partisipasi masyarakat dalam pembangunan di daerah. Dibawah ini disajikan capaian kinerja beserta keterangan atau penjelasan terhadap tingkat capaian kinerja tiap indikator sasaran strategis daerah pada Tahun 2023, sebagai berikut:

1. Indeks Kesehatan (108.43%)

Analisis Penyebab Tingkat Capaian:

- antara lain dipengaruhi oleh peningkatan cakupan kesehatan semesta dengan penekanan pada penguatan pelayanan kesehatan dasar (Primary Health Care) dengan mendorong peningkatan upaya promotif dan preventif didukung yang ditandai dengan peningkatan kesehatan ibu, anak, dan KB dan kesehatan reproduksi, percepatan perbaikan gizi, peningkatan pengendalian penyakit, pembudayaan perilaku hidup sehat melalui gerakan masyarakat hidup sehat, serta penguatan sistem kesehatan dan pengawasan obat dan makanan;
- terdapatnya sistem pelaporan pelayanan kesehatan ibu dan bayi yang bersifat real time;
- dukungan regulasi dan ketersediaan NSPK pelayanan Kesehatan;
- penerapan regulasi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan dan Masa Sesudah Melahirkan, Pelayanan Kontrasepsi dan Pelayanan Kesehatan Seksual;
- adanya dukungan APBN kepada Daerah melalui Dana Dekon, untuk kegiatan terkait untuk percepatan penurunan angka kematian bayi;
- penguatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat dan integrasi program;
- perbaikan masalah kependudukan dan kemiskinan, peningkatan ketahanan pangan hingga rumah tangga, serta perbaikan kualitas pendidikan yang akan sangat berdampak pada upaya penanggulangan stunting sehingga kinerja penurunan stunting menjadi cukup progresif; dan
- adanya peningkatan indeks SPM bidang Kesehatan.

Alternatif Solusi/Strategi:

- Program kesehatan masyarakat berfokus pada penurunan angka kematian ibu, angka kematian bayi, penurunan prevalensi stunting dan wasting pada balita;
- Orientasi/ sosialisasi peningkatan kapasitas tenaga kesehatan, seperti peningkatan kapasitas dokter dan bidan dalam pelayanan kesehatan ibu dan bayi, Manajemen bayi berat lahir rendah (BBLR) dan pelatihan penanganan kegawat daruratan maternal dan neonatal;
- Pendampingan RSUD dan Organisasi Profesi dalam peningkatan kualitas pelayanan maternal dan neonatal;
- Koordinasi LP/LS dalam upaya penurunan AKI dan AKB;
- Jaminan Persalinan (Jampersal);
- Tersedianya menu kegiatan terkait penurunan AKI AKB dalam DAK Non Fisik;
- Pemanfaatan sistem informasi dan pelaporan;
- Penguatan tenaga Kesehatan dengan Pemberian SK dan Insentif GTT, PTT dan Nakes sebagai bagian dari implementasi 10 program unggulan yaitu tahun 2022 (Pemberian 800 orang tenaga kesehatan, 610 PTT dan 2.985 GTT), tahun 2023 (Pemberian 850 orang tenaga kesehatan dan 3.620 GTT/PTT untuk jenjang PAUD, SD, dan SMP).

2. Indeks Pendidikan (103.04%)***Analisis Penyebab Tingkat Capaian:***

- Angka harapan lama sekolah menunjukkan peningkatan jika dibandingkan dengan capaian Tahun sebelumnya menunjukkan bahwa penduduk di Kabupaten Sumbawa semakin banyak yang bisa bersekolah lebih lama atau dapat melanjutkan ke jenjang Pendidikan yang lebih tinggi.
- Angka rata-rata lama sekolah selalu meningkat setiap tahunnya. Hal ini menandakan jenjang pendidikan yang ditempuh juga semakin tinggi.

Alternatif Solusi/Strategi:

- Kebijakan perluasan akses pendidikan memberikan harapan besar bagi anak-anak Kabupaten Sumbawa untuk memperoleh kesempatan pendidikan
- Kebijakan pemerintah dalam bantuan operasional sekolah (BOS) memberikan kesempatan sekolah-sekolah untuk membebaskan biaya pendidikan, sedangkan Program Keluarga Harapan (PKH), Program Indonesia Pintar (PIP), serta beasiswa Bidikmisi memberikan bantuan biaya untuk memastikan bahwa setiap anak dari keluarga prasejahtera dapat menikmati pendidikan.

3. Capaian Mutu SPM Layanan Dasar Bidang Kesehatan (99.85%)

Analisis Penyebab Tingkat Capaian:

- Sangat dipengaruhi oleh tingkat pemenuhan mutu yang sesuai standar pada 10 jenis SPM Layanan Dasar Bidang Kesehatan yang belum mencapai 100%, yaitu Pelayanan kesehatan ibu hamil; Pelayanan kesehatan ibu bersalin; Pelayanan kesehatan bayi baru lahir; Pelayanan kesehatan balita; Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar; Pelayanan kesehatan pada usia produktif; Pelayanan kesehatan pada usia lanjut; Pelayanan kesehatan penderita hipertensi; Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat; Pelayanan kesehatan orang terduga tuberculosis. Baru pada 2 jenis layanan yang mutunya sudah mencapai 100% yaitu Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus; dan Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*).
- Standar mutu yang dimaksud adalah jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang memenuhi standar; standar jumlah dan kualitas personel/sumber daya manusia kesehatan; dan ketersediaan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar, sebagaimana di atur dalam Peraturan Menteri

Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada SPM Bidang Kesehatan.

Alternatif Solusi/Strategi:

- Terhadap hal di atas, upaya yang dilakukan antara lain: berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait dalam proses penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran, agar SPM Layanan dasar Bidang Kesehatan tetap mendapatkan prioritas; melakukan re-evaluasi terhadap peran dan tanggungjawab masing-masing pelaksana SPM Bidang Kesehatan; mengoptimalkan kegiatan sosialisasi dan peningkatan kapasitas pengampu tiap jenis layanan SPM bidang Kesehatan di tiap puskesmas; mengoptimalkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi, baik yang dilakukan secara berkala maupun khusus; mengoptimalkan tugas dan fungsi dari seluruh tim dan unsur kerja yang terkait dengan penerapan SPM Layanan Dasar Bidang Kesehatan di Kabupaten Sumbawa; dan melakukan advokasi dan koordinasi lintas sektor terkait untuk melakukan pemerataan kualitas layanan diantaranya melalui re-distribusi tenaga Kesehatan yang ada di daerah.
- mengoptimalisasikan penerapan SPM Bidang Kesehatan di Kabupaten Sumbawa adalah: melakukan review dokumen perencanaan untuk peningkatan kualitas indikator kinerja dan pengintegrasian SPM dalam kebijakan dan arah kebijakan perencanaan maupun penganggaran; meningkatkan Koordinasi penyusunan laporan pencapaian SPM dan sosialisasi penerapan SPM pada perangkat daerah pengampu SPM; membentuk dan menetapkan Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Kabupaten Sumbawa; serta menyusun Rencana Aksi Daerah tentang Penerapan SPM.
- Mengoptimalkan upaya Kesehatan yang bersifat peningkatan/ promotif dan pencegahan/ preventif untuk mengurangi potensi peningkatan pasien.

4. Capaian Mutu SPM Layanan Dasar Bidang Pendidikan (86.85%)

Analisis Penyebab Tingkat Capaian:

- Sangat dipengaruhi oleh tingkat pemenuhan mutu yang sesuai standar dalam 4 jenis SPM Layanan Dasar Bidang Pendidikan, yaitu pendidikan dasar; pendidikan menengah pertama; pendidikan anak usia dini; dan Pendidikan Kesetaraan.
- Standar mutu yang dimaksud adalah Mutu pelayanan setiap jenis pelayanan dasar pada SPM bidang pendidikan berupa standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa; standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan; dan ketersediaan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar. Perhitungan mengenai standar mutu serta capaian pemenuhan standar mutu tersebut, di atur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan, yang merupakan penggantian dari Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013.

Alternatif Solusi/Strategi:

- mengoptimalisasikan penerapan SPM Bidang Pendidikan di Kabupaten Sumbawa dengan melakukan review dokumen perencanaan untuk peningkatan kualitas indikator kinerja dan pengintegrasian SPM dalam kebijakan dan arah kebijakan perencanaan maupun penganggaran; meningkatkan Koordinasi penyusunan laporan pencapaian SPM dan sosialisasi penerapan SPM pada perangkat daerah pengampu SPM; membentuk dan menetapkan Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan Kabupaten Sumbawa; serta menyusun Rencana Aksi Daerah tentang Penerapan SPM.
- Mengoptimalkan upaya Kesehatan yang bersifat peningkatan/ promotif dan pencegahan/ preventif untuk mengurangi potensi peningkatan jumlah pasien.

5. Laju Omzet Koperasi dan Usaha Mikro (116.10%)

Analisis Penyebab Tingkat Capaian:

- Dipengaruhi oleh cukup tingginya intensitas monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap koperasi dan UMKM; Pendampingan dan monitoring terhadap koperasi dan UMKM; Pembinaan secara intensif terhadap beberapa koperasi.
- Dipengaruhi juga oleh keberhasilan koperasi dalam menyelesaikan permasalahan yang berdampak pada peningkatan omzet koperasi; dan
- Adanya *prime mover* dinamika UMKM melalui program unggulan daerah (Penggratisan Label BPOM, Label Halal, Jaminan Pemasasan Bagi UMKM, Bantuan Kemandirian Bagi Komunitas Milenial dan Pelaku Ekonomi Kreatif “Start-up dan E-Commerce”) sebagai bagian 10 program unggulan daerah dengan pencapaian yaitu Pembentukan Kelembagaan halal Center, Apilikasi transaksi digital 300 UMK, pelatihan 112 tenaga kerja serta dilalokasikan bantuan dan pelatihan UMKM, penggratisan label BPOM dan Halal.

Alternatif Solusi/Strategi:

- Penguatan pengelolaan dan perlindungan bagi usaha mikro;
- Mengoptimalkan oordinasi teknis penerbitan perizinan bagi usaha mikro;
- Penguatan rantai pasok bagi usaha mikro;
- Pemberian layanan pendampingan dan konsultasi bantuan manajemen;
- Mengoptimalkan upaya fasilitasi dan pembinaan koperasi aktif maupun tidak aktif melalui berbagai pelatihan/bimbingan teknis; dan
- Melakukan pemberian bantuan teknis untuk pengurus/pengelola koperasi dalam menyusun laporan keuangan koperasi.

6. Laju Pertumbuhan PDRB Lapangan Usaha Prioritas: pertanian, perikanan dan kehutanan; Perdagangan;

Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Industri Pengolahan (124.18%)

Analisis Penyebab Tingkat Capaian:

- Dipengaruhi oleh tingginya kinerja program unggulan daerah (Menjamin Ketersediaan Benih Berkualitas, Pupuk, Kestabilan Harga, Bantuan Peralatan Bagi Nelayan dan Pengembangan Teknologi Pertanian, Perikanan dan Peternakan) yaitu pengembangan bank pakan, Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan Usaha Tani, Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan Produksi, Pembangunan Sumur Bor pertanian, Pembangunan Jaringan irigasi, Pembangunan cekdam, kantong air, embung kecil, dan pengadaan Alsintan, renovasi puskesmas dan peyediaan sarana pendukung, pembangunan lumbung pangan.
- Membaiknya situasi pandemi pasca COVID-19 di Indonesia dan global sehingga dapat meningkatkan produksi pertanian, perikanan dan kehutanan, Perdagangan; Penyediaan Akomodasi Dan Makan Minum; Industri Pengolahan; Jasa Pendidikan
- Koordinasi dan pemantauan kondisi sektor riil;
- Adanya langkah-langkah yang antisipatif dan akomodatif, dimana APBD terus menjadi instrumen untuk membantu perekonomian khususnya melalui belanja-belanja prioritas, insentif yang produktif, dan pembiayaan yang berkelanjutan.
- Adanya keberlanjutan agenda reformasi struktural pemerintah pusat pada daerah untuk mempercepat transformasi ekonomi untuk akselerasi kinerja ekonomi nasional dan daerah.
- Kontribusi event internasional MXGP, yang berdasarkan rilis BPS terkait dampak produksi domestic mencapai 3.432 juta (pertanian, perikanan dan kehutanan), 2.716 juta (perdagangan), 4.377 juta (Penyediaan Akomodasi Dan Makan Minum), 6.812 juta (industry pengolahan), 5 juta (Jasa Pendidikan).

Alternatif Solusi/Strategi:

- Peningkatan investasi dengan menggenjot aliran investasi untuk menarik investasi luar dengan memberikan insentif dan menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif.
- Diversifikasi ekonomi untuk mengurangi ketergantungan pada satu sektor dan pengembangan sektor-sektor baru yang memiliki potensi pertumbuhan.
- Menjaga angka inflasi dengan penguatan koordinasi TPID.
- Mendorong Penanaman Modal Asing/Dalam Negeri melalui penerapan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Online Single Submission (OSS).
- Meningkatkan efektivitas belanja pemerintah daerah dengan monitoring realisasi belanja secara sistematis.

7. Laju Pendapatan Per Kapita (157.87%)

Analisis Penyebab Tingkat Capaian:

- Dipengaruhi oleh kualitas pertumbuhan ekonomi yang terus ditingkatkan untuk mencapai pertumbuhan yang inklusif, yakni pertumbuhan yang cepat yang dibarengi dengan penciptaan lapangan kerja yang lebih besar. Oleh karena itu, upaya mendorong investasi menjadi krusial karena akan menciptakan lapangan kerja yang besar. Prinsip utama dalam meningkatkan pendapatan masyarakat serta menekan biaya pengeluaran antara lain:
- Stabilisasi harga (termasuk menurunkan inflasi pangan) dan bantuan sosial (reformasi program perlindungan sosial).
- Akselerasi pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan dan perluasan lapangan kerja.
- Optimalisasi sinergi APBN dan APBD sebagai instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas SDM serta meredam gejolak ekonomi yang timbul akibat munculnya risiko global dan domestik (shock absorber) khususnya bagi kelompok miskin dan rentan.
- Koordinasi dan sinergi antar program bantuan sosial yang relevan.

- Peningkatan program Pendidikan yang dikhususkan bagi anak-anak keluarga kurang mampu.
- Penguatan bantuan pendidikan untuk keluarga kurang mampu melalui peningkatan nilai manfaat dan cakupannya (jumlah penerima).
- Peningkatan PDRB lapangan usaha pertanian sebagai basis sektor dengan share terbesar dalam struktur distribusi ekonomi daerah.
- Laju pertumbuhan penduduk yang realtif baik dan PDRB yang meningkat konsisten, dimana Pendapatan Per Kapita diaproksimasi dengan PDRB ADHK perkapita, sehingga peningkatannya sangat dipengaruhi oleh besaran PDRB dan jumlah penduduk Tengah.

Alternatif Solusi/Strategi:

- Sinergi instansi pusat dan daerah, melalui forum TPID (Tim Pengendali Inflasi Daerah).
- Peningkatan daya beli masyarakat dengan mengoordinasikan bantuan sosial sebagai instrumen Jaring Pengaman Sosial (JPS) dalam kebijakan stimulus daya beli yang untuk menyasar masyarakat miskin dan rentan.
- Peningkatan kualitas Pendidikan dan pelatihan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja.
- peningkatan infrastruktur dasar (jalan, jembatan, dan energi) untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan produktivitas.
- Perbaikan tata kelola pemerintah untuk menciptakan lingkungan usaha yang stabil, penyederhanaan prosedur birokrasi dan transparansi.
- Pemberdayaan ekonomi lokal dan pengembangan Usaha Kecil Menengah (UKM).
- Peningkatan investasi dengan menggenjot aliran investasi untuk menarik investasi luar dengan memberikan insentif dan menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif.

- Terus mendorong diversifikasi ekonomi untuk mengurangi ketergantungan pada satu sektor dan pengembangan sektor-sektor baru yang memiliki potensi pertumbuhan.

8. Tingkat Pengangguran Terbuka (122.22%)

Analisis Penyebab Tingkat Capaian:

- Dipengaruhi oleh meningkatnya kualitas pertumbuhan ekonomi untuk mencapai pertumbuhan yang inklusif, yakni pertumbuhan yang cepat yang dibarengi dengan penciptaan lapangan kerja yang lebih besar. Oleh karena itu, upaya mendorong investasi karena akan menciptakan lapangan kerja yang besar.
- Peningkatan produksi yang meningkatkan permintaan terhadap tenaga kerja.
- Pemantauan posisi pasar tenaga kerja untuk melihat arah pergerakan upah dan dampaknya terhadap inflasi.
- Pertumbuhan angkatan kerja yang lebih besar dari tambahan penduduk usia kerja untuk peningkatan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK).
- *Unemployment gap* Nasional yang bergerak dari area positif mendekati nol yang berdampak pada daerah menunjukkan bahwa pasar tenaga kerja mulai ketat.
- Pengetatan pasar tenaga kerja yang memberikan tekanan terhadap kenaikan upah.
- Kinerja pelaksanaan program 10 unggulan daerah Dimana terkait ketenagakerjaan adalah “Menyiapkan 10.000 Tenaga Kerja, Pelatihan serta Sertifikasi Gratis Bagi Tukang Batu, Kayu, Las, Besi dan Listrik”, dengan implementasi tahun 2021 (pelatihan 240 Tenaga kerja dari 9 jenis Pelatihan), tahun 2022, (pelatihan 112 Tenaga kerja dari 7 jenis Pelatihan), tahun 2023 (pelatihan 340 tenaga kerja).

Alternatif Solusi/Strategi:

- Pada tahun 2023 telah dilaksanakan Job Fair : (a) Job Fair 1 yang melibatkan 20 perusahaan dan 100 lowongan kerja; (b)

Job Faair Kedua terdiri dari 17 perusahaan dengan lebih dari 700 lowongan kerja.

- Penguatan kapasitas tenaga kerja melalui kebijakan pelatihan (skilling, reskilling, dan upskilling) melalui pengembangan kompetensi kerja yang ditujukan untuk pencari kerja, pekerja yang terkena PHK, dan atau pekerja yang membutuhkan peningkatan kompetensi melalui pelatihan.

9. Jumlah Pengeluaran Perkapita (yang disesuaikan) (106.03%)

Analisis Penyebab Tingkat Capaian:

- Dipengaruhi oleh upaya pemulihan ekonomi yang massif dan terus berlanjut pasca pandemi COVID-19.
- Adanya peningkatan pendapatan yang diterima semakin besar.
- Stabilitas harga riil antar wilayah sehingga nilai tukar yang membaik.
- Membaiknya angka inflasi daerah Dimana Kabupaten Sumbawa masuk sebagai Kabupaten/Kota mendapat Penghargaan Insentif Fiskal dari Kementerian Keuangan atas prestasi menekan angka inflasi
- PDRB Perkapita yang terus meningkat.
- Akselerasi realisasi belanja daerah dalam menumbuhkan ekonomi dan daya beli terutama masyarakat kurang mampu.

Alternatif Solusi/Strategi:

- Bauran kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi 2023 melalui (a) Kebijakan untuk menjaga daya beli Masyarakat dengan operasi pasar maupun rantai barang (Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi yang Efektif).
- Sinergi instansi pusat dan daerah, melalui forum TPID (Tim Pengendali Inflasi Daerah).
- Peninjauan ke pasar-pasar tradisional untuk melakukan monitoring dan evaluasi terkait dinamika harga berbagai komoditas strategis.

- Peningkatan daya beli masyarakat dengan mengoordinasikan bantuan social sebagai instrumen Jaring Pengaman Sosial (JPS) dalam kebijakan stimulus daya beli yang menyasar masyarakat miskin dan rentan.

10. Nilai Reformasi Birokrasi (118.78%)

Analisis Penyebab Tingkat Capaian:

- Hasil evaluasi tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Sumbawa telah berupaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik melalui perbaikan berkelanjutan yang ditandai dengan meningkatnya nilai pada area pemenuhan, hasil antara, dan komponen hasil. Namun mengalami penurunan pada area reform.
- Hasil antara 8 area perubahan pada Pemerintah Kabupaten Sumbawa telah dilakukan pengukuran oleh instansi leading sector. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, beberapa nilai hasil antara Kabupaten Sumbawa tahun 2022 mengalami peningkatan, yaitu IP-ASN, SPBE, Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa dan Kualitas Pelayanan Publik. Namun begitu, ada beberapa nilai hasil antara yang mengalami penurunan yaitu Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik. Penilaian “hasil antara” yaitu Sistem Merit telah menunjukkan hasil "baik", sehingga secara keseluruhan mengalami Kenaikan.

Alternatif Solusi/Strategi:

- Membangun secara massif Agen perubahan di seluruh unit kerja, serta melakukan monitoring dan evaluasi perannya untuk dapat memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan budaya kerja dan perubahan mindset;
- Melakukan pemetaan terhadap dampak dari Regulasi atau kebijakan yang disusun oleh Pemerintah Kabupaten Sumbawa bagi masyarakat atau pemangku kepentingan
- Melakukan evaluasi kelembagaan sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 20 Tahun 2018

- Mengupayakan peningkatan tata kelola SPBE lebih optimal, agar penerapan dari tata kelola SPBE dapat sepenuhnya terintegrasi dan terimplementasi sampai unit kerja terkecil, baik untuk mendukung proses manajemen internal maupun memberikan kemudahan pelayanan kepada stakeholder
- Mengoptimalkan pelaksanaan sistem merit dengan melaksanakan assessment kepada pegawai, penyusunan HCDP, dan melakukan pemetaan talenta pegawai terutama terhadap assessment yang baru dilakukan pada sebagian pegawai dan penggunaan aplikasi Simpeg yang belum maksimal, sebagaimana diindikasikan dengan masih rendahnya nilai Profesionalitas ASN yang masih dalam kategori sangat rendah
- Membangun Perencanaan kinerja dengan baik, khususnya di seluruh PD, agar penjenjangan kinerja yang disusun dapat mendukung pencapaian kinerja organisasi
- Meningkatkan implementasi kebijakan pengawasan internal, melalui monitoring dan evaluasi secara berkala untuk diketahui tingkat kepatuhan atas kebijakan tersebut
- Mengoptimalkan Pembangunan Zona Integritas pada seluruh perangkat daerah serta mengupayakan pencapaian predikat WBK/WBBM
- Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terkait dengan dampak yang dirasakan oleh masyarakat dan stakeholder selaku pengguna layanan atas Pengembangan inovasi pelayanan publik

11. Capaian Mutu SPM Layanan Dasar Bidang Sosial (100%)

Analisis Penyebab Tingkat Capaian:

- Dipengaruhi oleh telah terpenuhinya standar mutu pada tiap jenis layanan dasar SPM Bidang Sosial, yaitu: Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Telantar di luar panti; Rehabilitasi Sosial dasar Anak Telantar di luar panti; Rehabilitasi Sosial dasar Lanjut Usia Telantar di luar panti;

Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di luar panti; dan Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi Korban Bencana di daerah, sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada SPM Bidang Sosial di Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota.

- Pemenuhan yang mempengaruhi capaian di atas melibatkan pihak swasta (dunia usaha) termasuk NGO untuk turut membantu pemenuhan berbagai jenis peralatan dan perlengkapan bagi pemerlu layanan kesejahteraan social di daerah.

Alternatif Solusi/Strategi:

- mengoptimalkan penerapan SPM Bidang Sosial di Kabupaten Sumbawa dengan melakukan review dokumen perencanaan untuk peningkatan kualitas indikator kinerja dan pengintegrasian SPM dalam kebijakan dan arah kebijakan perencanaan maupun penganggaran; meningkatkan Koordinasi penyusunan laporan pencapaian SPM dan sosialisasi penerapan SPM pada perangkat daerah pengampu SPM; membentuk dan menetapkan Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan Kabupaten Sumbawa; serta menyusun Rencana Aksi Daerah tentang Penerapan SPM.
- Tetap mengoptimalkan pelibatan pihak swasta dalam pemenuhan standar mutu SPM Bidang Sosial.

12. Jumlah Pemuda dan Atlet Daerah yang berprestasi (91.33%)

Analisis Penyebab Tingkat Capaian:

- Capaian di atas dapat lebih optimal, namun event olahraga yang diselenggarakan secara berjenjang masih relatif kurang;
- sarana dan prasara pendukung olah raga yang sesuai standar dan pelatih bersertifikat pada setiap cabang olahraga prestasi masih minim;

- pemberian penghargaan pada atlit berprestasi belum optimal
- belum optimal keikutsertaan pemuda berprestasi daerah dalam kegiatan yang terprogram dan belum optimalnya pembinaan pemuda berprestasi pasca ditetapkan sebagai pemuda berprestasi.

Alternatif Solusi/Strategi:

- Melenggarakan event olahraga pada setiap cabang olahraga secara berjenjang
- Meningkatkan sarana dan prasara pendukung olah raga yang sesuai standar
- Meningkatkan sumber daya manusia pelatih pada setiap cabang olahraga
- Memberikan penghargaan kepada atlt yang berprestasi pada setiap cabang olah raga
- mengoptimal keikutsertaan pemuda berprestasi daerah dalam kegiatan yang terprogram
- melakukan pembinaan pemuda berprestasi pasca ditetapkan sebagai pemuda berprestasi.

13. Capaian kinerja pemajuan objek kebudayaan daerah (136.99%)

Analisis Penyebab Tingkat Capaian:

- Objek pemajuan kebudayaan (OPK) yang ditetapkan berjumlah 11 objek kebudayaan sehingga seluruh objek kebudayaan di daerah sudah dikembangkan.

Alternatif Solusi/Strategi:

- Melakukan peningkatan kapasitas Sumberdaya manusia dalam melakukan pengelolaan pemajuan objek kebudayaan di daerah
- Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat untuk mendukung anggaran pemajuan kebudayaan.

14. Indeks Pembangunan Gender (99.25%)

Analisis Penyebab Tingkat Capaian:

- Diantaranya dipengaruhi oleh masih terdapatnya kesenjangan gender dalam berbagai aspek pembangunan, antara lain pendidikan, kesehatan, ekonomi;
- Masih terjadi kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan dan kelompok rentan; dan
- Masih terjadi kasus perkawinan usia anak.

Alternatif Solusi/Strategi:

- Melibatkan peran perempuan dalam pelaksanaan pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan
- Meningkatkan komitmen dan peran seluruh stikholder dalam pencegahan tindak kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan dan kelompok rentan
- Penguatan Program Minimal Belajar 12 Tahun untuk Anak Perempuan dapat mendukung anak perempuan untuk menyelesaikan sekolah sampai ke jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA).

15. Nilai Hasil Pengukuran Indikator KLA (76.10%)

Analisis Penyebab Tingkat Capaian:

- Dipengaruhi antara lain karena belum seluruh Kecamatan dan Desa ditetapkan sebagai Kecamatan dan Desa layak anak;
- Implementasi pemenuhan hak anak berdasarkan klaster belum maksimal. Hal ini ditunjukkan pencapaian tiap-tiap klaster belum terpenuhi secara keseluruhan dan masih dibawah target rencana pencapaian yang telah ditetapkan
- Kelembagaan KLA belum berjalan optimal karena banyak hal, seperti koordinasi kurang maksimal antar anggota gugus tugas atau PD yang terlibat
- Belum terdapat Sumber Daya Manusia (SDM) terlatih Konvensi Hak Anak (KHA).

Alternatif Solusi/Strategi:

- mengatpokasi kecamatan dan desa untuk meningkatkan komitmen dalam mewujudkan kecamatan dan desa layak anak
- Melakukan pemetaan terhadap pemenuhan hak anak yang belum terpenuhi berdasarkan klaster dan melakukan advokasi kepada instansi dan stakeholder terakit untuk penuhannya dan disertai data dukung yang valid.
- eningkatkan peran Bappeda sebagai ketua Gugus Tugas KLA untuk mengoptimalkan koordinasi antar OPD yang tergabung di dalam Gugus Tugas KLA
- Melaksanakan pelatihan Konvensi Hak Anak (KHA).

16. Capaian Kinerja Penanganan Konflik Sosial (100%)***Analisis Penyebab Tingkat Capaian:***

- Dipengaruhi oleh optimalnya koordinasi secara intensif dengan pihak terkait (Formkompinda); optimalnya upaya fasilitasi terhadap pihak-pihak yang sedang mengalami gesekan/bermasalah melalui agenda pertemuan/rapat untuk menghindari terjadinya konflik agar tidak semakin melebar; dan semakin intensnya upaya mediasi antara pihak yang sedang bermasalah/mengalami gesekan untuk menghindari terjadinya konflik.

Alternatif Solusi/Strategi:

- Meningkatkan koordinasi yang dilakukan secara intensif dengan pihak-pihak terkait;
- Meningkatkan fasilitasi terhadap pihak-pihak yang sedang mengalami gesekan/ bermasalah melalui agenda pertemuan/rapat untuk menghindari terjadinya konflik agar tidak semakin melebar dan bisa segera tertangan;
- Mengintensifkan mediasi antar pihak yang sedang bermasalah/ gesekan untuk menghindari terjadinya konflik;

- Meningkatkan kepekaan antara masyarakat dan pemerintah terhadap adanya kejadian yang bisa mengakibatkan terjadinya potensi konflik diwilayah;
- Meningkatkan koordinasi dan pembuatan komitmen/ kesepakatan dalam hal penanganan potensi konflik.

17. Indeks Desa Membangun (99.59%)

Analisis Penyebab Tingkat Capaian:

- Perencanaan dan penganggaran dalam mendukung peningkatan nilai IDM masih belum optimal sehingga capaian nilai IDM tidak signifikan
- Kebijakan n-marking dan afirmasi yang tidak langsung mengarah pada capaian peningkatan nilai IDM
- Kurangnya pembinaan dan pengawasan oleh APIP dalam penerapan Permendes PDTT Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian, prioritas penggunaan dana desa, Permendes PDTT Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk operasional atas fokus penggunaan dana desa, PMK nomor 145 tahun 2023 tentang pengelolaan dana desa.

Alternatif Solusi/Strategi:

- Perencanaan dan penganggaran pada perangkat daerah memperhatikan pencapaian indikator pencapaian IDM sesuai target dalam RPJMD
- Melakukan peningkatan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan dana desa untuk meningkatkan capaian nilai IDM.

18. Cakupan kepemilikan dokumen kependudukan & akta pencatatan sipil (81.33%)

Analisis Penyebab Tingkat Capaian:

- Dipengaruhi oleh masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya
- Kurangnya sumberdaya manusia yang berkompeten dalam bidang pelayanan administrasi kependudukan

- Kurangnya sarana dan prasarana dalam menunjang pelayanan
- Belum dilaksanakan kegiatan pemutakhiran data kependudukan

Alternatif Solusi/Strategi:

- Melakukan sosialisasi tentang pentingnya adminduk dirangkaikan dengan pelayanan terintegrasi dokumen kependudukan dan akta pencatatan sipil langsung di kecamatan dan desa (Dukcapil Jango Desa)
- Memberikan bimbingan teknis dalam rangka peningkatan kompetensi baik bagi pejabat struktural maupun operator SIAK kabupaten dan kecamatan
- Pengadaan/penambahan sarana dan prasarana pelayanan baik yang digunakan di kantor maupun di lapangan
- Melakukan pelayanan langsung kepada masyarakat pada setiap Desa dikecamatan melalui kegiatan Jago Desa
- Melakukan kegiatan pemutakhiran data kependudukan dengan adanya dukungan anggaran yang sesuai.

19. Capaian Mutu SPM Layanan Dasar Bidang Pekerjaan Umum (99.85%)

Analisis Penyebab Tingkat Capaian:

- Capaian di atas dipengaruhi oleh belum terpenuhinya secara tuntas sebagian standar mutu pada SPM Bidang Pekerjaan Umum yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Sumbawa, yang yaitu: pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari; dan penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik, sebagaimana di atur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2019 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- Standar Mutu pelayanan dasar pada SPM bidang Pekerjaan Umum terdiri atas: pemenuhan kebutuhan Air Minum Curah lintas kabupaten/kota berupa ukuran kuantitas dan kualitas air minum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan; dan pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari berupa ukuran kuantitas dan kualitas air minum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; pengolahan Air Limbah Domestik meliputi kuantitas dan kualitas pelayanan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang berlaku.

Alternatif Solusi/Strategi:

- Mengupayakan pemenuhan mutu sesuai standar yang ditentukan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2019 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- Mengoptimalkan pelaksanaan SPM Bidang Perumahan Rakyat di Kabupaten Sumbawa dengan tetap memenuhi mutu pelayanan setiap jenis pelayanan dasar pada SPM bidang perumahan rakyat. Mutu pelayanan setiap jenis pelayanan dasar pada SPM bidang Perumahan Rakyat terdiri atas: penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana di daerah meliputi standar jumlah dan kualitas pelayanan dasar; dan fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah meliputi standar jumlah dan kualitas pelayanan dasar.

20. Capaian Mutu SPM Layanan Dasar Bidang Perumahan Rakyat (100%)

Analisis Penyebab Tingkat Capaian:

- Dipengaruhi oleh telah terpenuhinya standar mutu pada tiap jenis layanan dasar SPM Bidang Perumahan Rakyat yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Sumbawa, yaitu: penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota; dan fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah, sebagaimana di atur dalam

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2019 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

- Jumlah kelompok sasaran atau kelompok penerima manfaat dalam layanan ini pada Tahun 2023 tidak mengalami peningkatan yang signifikan, yang biasanya diakibatkan oleh adanya kejadian bencana. Hal itu menjadikan pemerintah daerah dapat berfokus untuk memenuhi atau memberikan layanan pada SPM Bidang Perumahan Rakyat secara optimal.

Alternatif Solusi/Strategi:

- Mengupayakan mutu sesuai standar yang ditentukan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2019 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dapat secara konsisten dipenuhi;
- Mengoptimalkan pelaksanaan SPM Bidang Perumahan Rakyat di Kabupaten Sumbawa dengan tetap memenuhi mutu pelayanan setiap jenis pelayanan dasar pada SPM bidang perumahan rakyat. Mutu pelayanan setiap jenis pelayanan dasar pada SPM bidang Perumahan Rakyat terdiri atas: penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana di daerah meliputi standar jumlah dan kualitas pelayanan dasar; dan fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah meliputi standar jumlah dan kualitas pelayanan dasar.

21. Capaian Mutu SPM Layanan Dasar Bidang

Trantibumlinmas (100%)

Analisis Penyebab Tingkat Capaian:

- Telah terpenuhinya standar mutu pada tiap jenis layanan SPM Bidang Trantibumlinmas yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Sumbawa yang mencakup 3 (tiga) Sub-bidang yang

masing-masing diselenggarakan oleh perangkat daerah yang berbeda, yaitu Satpol-PP, BPBD, dan Dinas Damkarpel;

- Standar Mutu pelayanan setiap jenis pelayanan dasar pada SPM Sub Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang diselenggarakan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP), terdiri atas: standar operasional prosedur Satpol PP; standar sarana prasarana Satpol PP; standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota perlindungan masyarakat; dan standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada. Perhitungan mengenai standar mutu serta capaian pemenuhan standar mutu tersebut, berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis SPM Ketenteraman dan Ketertiban Umum Daerah Kabupaten/Kota.
- Jenis pelayanan dasar pada Sub Bidang Kebencanaan yang dilaksanakan oleh BPBD, terdiri atas: pelayanan informasi rawan bencana; pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana; dan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana. Selanjutnya Pemerintah Kabupaten Sumbawa, berkewajiban untuk memenuhi mutu pelayanan setiap jenis pelayanan dasar pada SPM Bidang Trantibumlinmas Sub Bidang Kebencanaan. Standar mutu pelayanan setiap jenis pelayanan dasar pada SPM Sub Bidang Kebencanaan, terdiri atas: standar prosedur operasional penanggulangan bencana; standar sarana prasarana penanggulangan bencana; standar peningkatan kapasitas personil/sumber daya manusia; dan standar pelayanan Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana dan yang menjadi korban bencana. Perhitungan mengenai standar mutu serta capaian pemenuhan standar mutu tersebut, berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang SPM Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota.
- Jenis pelayanan dasar pada SPM Sub Bidang Kebakaran dan Penyelamatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemadam

Kebakaran dan Penyelamatan adalah pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran. Standar mutu teknis pelayanan pada SPM Sub Bidang Kebakaran, terdiri atas: tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi; prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi; sarana prasarana pemadam kebakaran, penyelamatan dan evakuasi; kapasitas aparat pemadam kebakaran dan penyelamatan/sumber daya manusia; pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran; dan pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran. Perhitungan mengenai standar mutu serta capaian pemenuhan standar mutu tersebut, berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang SPM Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota.

Alternatif Solusi/Strategi:

- Mengupayakan pemberian layanan dan pemenuhan mutu layanan tetap sesuai standar yang telah ditentukan.

22. Tingkat ketersediaan infrastruktur dalam kondisi baik (98.93%)

Analisis Penyebab Tingkat Capaian:

- Dipengaruhi oleh kebutuhan anggaran untuk pembangunan infrastruktur jalan yang relatif besar
- Terjadi kerusakan infrastruktur akibat bencana alam sehingga infrastruktur dalam kondisi baik yang dibangun pada tahun sebelumnya menjadi rusak
- Secara kuantitas sinyal internet dan telpon sudah merata namun kualitasnya masih rendah
- Kualitas pengelolaan sanitasi yang rendah, kelembagaan yang belum efektif dan efisien terbatasnya alternatif pendanaan pembangunan, dan rendahnya peran masyarakat dan swasta.

Alternatif Solusi/Strategi:

- Menjaga konsistensi perencanaan berdasarkan prioritas
- Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat untuk mendukung anggaran infrastruktur akibat bencana alam
- melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan pihak swasta dalam mendukung kualitas internal dan telpon
- Mengembangkan kelembagaan dalam pengelolaan sanitase sehingga proses pengelolaan sanitase lebih efektif dan efisien

23. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (105.09%)***Analisis Penyebab Tingkat Capaian:***

- Dipengaruhi oleh pesatnya pertumbuhan industri skala kecil dan besar
- Ijin pembangunan limbah industri belum efektif mempertimbangkan daya tampung beban pencemar
- Penambahan data RTH serta RHL

Alternatif Solusi/ Strategi:

- Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan perangkat daerah lain yang terkait untuk melakukan upaya pencegahan pencemar
- Melakukan identifikasi sumber pencemar, pengurangan beban pencemar, pembinaan dan pengawasan terhadap masyarakat, dan upaya lain dalam rangka pencegahan pencemaran
- Perlu adanya peran berbagai pihak untuk meningkatkan nilai capaian IKLH mengingat penyelesaian permasalahan lingkungan melibatkan multi sektor, dan bukan hanya menjadi tanggung jawab dari Dinas Lingkungan hidup saja.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa secara parsial terdapat beberapa capaian kinerja pada indikator sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Sumbawa, baik yang mengalami peningkatan maupun penurunan tidak hanya dipengaruhi oleh kondisi internal, tetapi juga dipengaruhi factor-faktor eksternal. Factor internal yang dimaksud antara lain kebijakan dan kemampuan fiskal daerah,

kuantitas dan kualitas sumber daya manusia aparatur daerah, serta tingkat dukungan sarana dan prasarana penunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, yang secara langsung melekat dalam DPA perangkat daerah, maupun merupakan NSPK perangkat daerah terkait. Sementara itu, yang terkait dengan factor eksternal antara lain kebijakan pemerintah provinsi dan pusat, tingkat kepercayaan dan keberdayaan masyarakat dan tingkat partisipasi pihak swasta dalam pembangunan di daerah. Faktor-faktor di atas selanjutnya turut mempengaruhi secara simultan seluruh capaian kinerja daerah Tahun 2023.

2.4.3. Fokus Urusan Layanan Wajib dan Fokus Urusan Layanan Pilihan

Fokus pembangunan daerah pada Tahun 2023, tergambar pada kebijakan penganggaran yang ditetapkan dalam Kebijakan Umum APBD. Hal tersebut diarahkan pada prinsip-prinsip keadilan yang dapat dinikmati seluruh masyarakat khususnya dalam hal pelayanan publik yang disusun berdasarkan aspirasi masyarakat dengan mempertimbangkan kondisi dan kemampuan daerah. Kebijakan penganggaran belanja daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik sebagai prioritas setiap urusan pemerintah daerah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu sebagai berikut:

a) Urusan Wajib Layanan Dasar

1) Pendidikan:

- Pengelolaan penyelenggaraan pendidikan dasar;
- Pengelolaan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- Penguatan kurikulum pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal;
- Peningkatan kapasitas dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan.
- Pengelolaan izin pendirian pendidikan (pendidikan usia dini, pendidikan dasar dan non formal) yang diselenggarakan oleh masyarakat.
- Pembinaan bahasa dan sastra daerah.

2) Kesehatan

- Percepatan penurunan prevalensi stunting
- Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan tingkat pertama
- Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan rujukan.
- Pengelolaan ijin praktik dan ijin kerja tenaga kesehatan.

- Pengembangan SDM kesehatan untuk Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP).
 - Pengelolaan ijin apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal;
 - Pengelolaan ijin produksi makanan dan minuman pada industri rumah tangga;
 - Pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan.
- 3) Pekerjaan Umum dan penataan ruang
- Peningkatan kualitas infrastruktur wilayah
 - Peningkatan konektivitas infrastruktur jalan dalam rangka mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar
 - Penyusunan regulasi peyelenggaraan penataan ruang wilayah
 - Peningkatan kapasitas pengembangan jasa konstruksi
- 4) Perumahan Rakyat dan kawasan permukiman
- Peningkatan kualitas infrastruktur Kawasan Permukiman untuk mendukung upaya pencapaian SPM pekerjaan umum dan SPM perumahan rakyat
 - Peningkatan kualitas penataan bangunan dan lingkungan, ruang bermain anak dan kawasan bersejarah (*city heritage*)
- 5) Ketentraman, ketertiban Umum dan Perlindungan masyarakat
- Peningkatan kapasitas aparat penegak ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat
 - Peningkatan Mitigasi bencana dalam rangka pemenuhan SPM ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat
 - Peningkatan keamanan dan kondusifitas daerah
- 6) Sosial
- Peningkatan cakupan layanan sosial bagi PMKS (penyandang masalah kesejahteraan sosial)

b) Urusan Wajib Bukan layanan Dasar

1. Tenaga Kerja:
 - Peningkatan kompetensi calon tenaga kerja
 - Peningkatan cakupan BPJS Ketenagakerjaan
 - Pengkajian upah minimum regional
 - Fasilitasi penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PHI)
2. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
 - Mendorong pemenuhan indikator kabupaten layak anak
 - Fasilitasi penyelesaian KDRT
 - Pengarusutamaan gender
3. Pangan
 - Memastikan ketersediaan pangan yang memadai
4. Pertanahan
 - Penyelesaian sertifikasi lahan pemda dan fasilitasi penyediaan lahan untuk kebutuhan pembangunan
5. Lingkungan hidup

- Peningkatan cakupan layanan persampahan.
 - Penyediaan data dan informasi lingkungan hidup untuk mendukung penegakan hukum bidang lingkungan hidup serta pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup.
 - Peningkatan sumberdaya manusia dan sarana prasarana perlindungan, pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan.
6. Administrasi kependudukan dan Pencatatan Sipil
 - Peningkatan kualitas layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
 7. Pemberdayaan masyarakat dan desa
 - Peningkatan status kemajuan dan tingkat kemandirian desa
 - Fasilitasi penguatan inovasi desa
 8. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana
 - Peningkatan kualitas dan kesejahteraan keluarga
 9. Perhubungan
 - Peningkatan konektivitas dan kualitas infrastruktur sarana dan prasarana perhubungan
 - peningkatan penyelenggaraan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan
 10. Komunikasi dan informatika
 - Peningkatan upaya pembinaan, pengembangan dan pengelolaan *e-Government* dilingkup Pemerintah Daerah.
 - Peningkatan kualitas sarana dan prasarana telekomunikasi dan informatika
 11. Koperasi usaha kecil dan menengah
 - Pengembangan kewirausahaan baru (*startup*)
 - Penguatan UMKM dan Koperasi
 - Peningkatan kapasitas SDM perkoperasian
 - Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam (KSP)/Usaha Simpan Pinjam (USP)
 - Pemberdayaan Perlindungan Koperasi
 12. Penanaman modal
 - Penyediaan fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal
 - Peningkatan kualitas Pelayanan perizinan terpadu
 - Penyediaan peta dan informasi potensi serta peluang usaha
 - Penyediaan layanan konsultasi dan pengaduan masyarakat dan pemantauan terhadap layanan terpadu perijinan
 13. Kepemudaan dan olah raga
 - Pemberdayaan dan pengembangan potensi pemuda dan organisasi kepemudaan.
 - Pemberdayaan dan pengembangan olahraga prestasi dan organisasi keolahragaan.
 14. Statistik

- Penguatan kebijakan Satu Data dalam pengembangan statistik daerah
- 15. Persandian
 - Peningkatan kualitas layanan persandian daerah
 - Peningkatan keamanan persandian untuk keamanan informasi pemerintah daerah
- 16. Kebudayaan
 - Pengelolaan obyek kebudayaan dan pemajuan kebudayaan daerah
 - Pelestarian tradisi, kesenian, sejarah lokal daerah dan nilai kearifan lokal Samawa serta fasilitasi lembaga adat.
 - Pembinaan Pengelolaan cagar budaya dan museum daerah
- 17. Perpustakaan
 - Penyelenggaraan Pelayanan Pengelolaan perpustakaan daerah
 - Pembudayaan gemar membaca tingkat daerah
 - Pelestarian naskah kuno milik daerah
 - Pengembangan koleksi budaya etnis nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah
- 18. Kearsipan
 - Pengelolaan arsip dinamis dan statis Pemerintah Daerah
 - Pengelolaan simpul jaringan dalam SIKN melalui JIKN
 - Melakukan autentikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan daerah
 - Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan daerah

c) Urusan pilihan

1. Kelautan dan perikanan
 - Mendorong peningkatan produktivitas pelaku usaha
 - Mendorong peningkatan kapasitas nelayan dan pembudidaya ikan
2. Pertanian
 - Mendorong produktivitas pelaku usaha (pertanian dan peternakan)
 - Mendorong peningkatan kapasitas petani dan peternak
 - Penarapan mekanisasi dan teknologi pertanian dan peternakan
 - Peningkatan pelayanan kesehatan hewan
3. Pariwisata
 - pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana destinasi pariwisata unggulan daerah untuk meningkatkan daya tarik wisata.
 - Membangun kerjasama lintas sektor dan sinergi dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi.
 - Peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM pariwisata berbasis masyarakat (*community based tourism*).

- Mendorong tumbuhnya industri dan ekonomi kreatif.
- 4. Perdagangan
 - Peningkatan sarana prasarana perdagangan
 - Standarisasi dan perlindungan konsumen
- 5. Perindustrian
 - Pengembangan industri kecil menengah dan pembentukan Kawasan Industri (KI)
 - Pengendalian Ijin Usaha Industri
- 6. Transmigrasi
 - Fasilitasi pembinaan dan pengembangan wilayah transmigrasi

Mengacu pada kebijakan belanja daerah di atas, maka belanja daerah yang merupakan perwujudan dari kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang berbentuk kuantitatif. Dari besaran dan kebijakan yang berkesinambungan dari program-program yang dilaksanakan dapat dibaca ke arah mana pembangunan di Kabupaten Sumbawa. Hakekat anggaran daerah pada dasarnya merupakan salah satu instrumen utama kebijakan publik dalam upaya peningkatan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat, maka setiap pelaksanaan anggaran sesuai dengan kebijakan pemerintahan, diharapkan dapat mencerminkan kebutuhan riil penyelenggaraan pemerintahan sesuai potensi daerah.

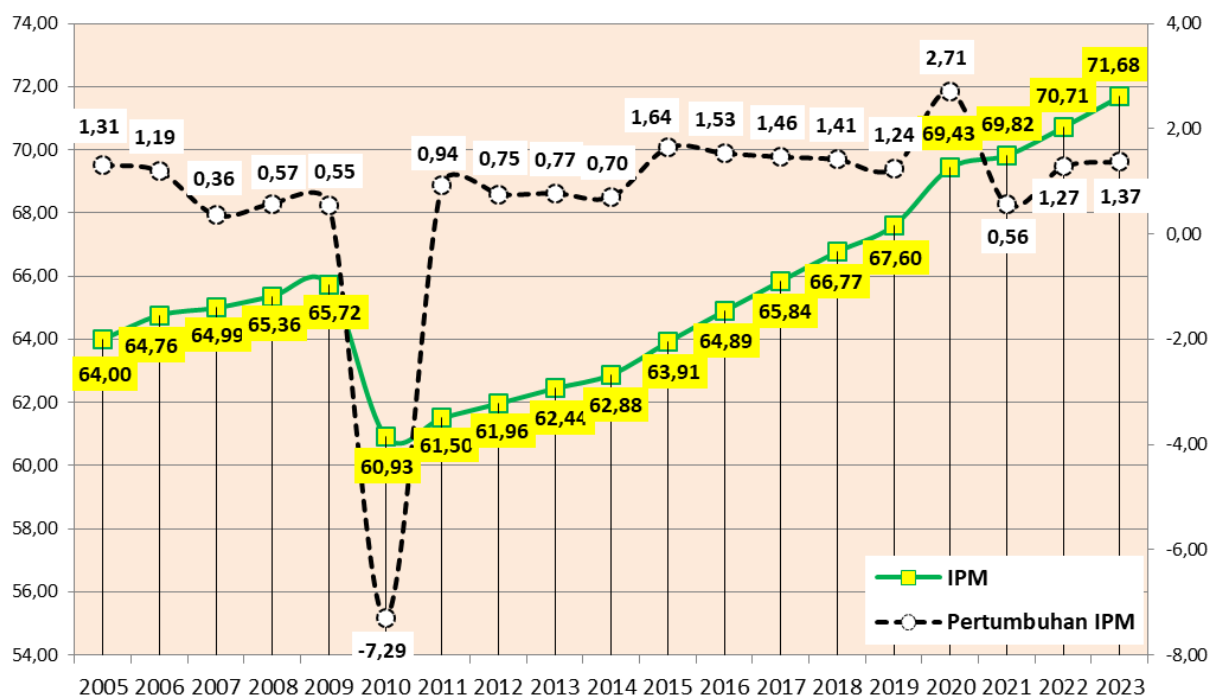
2.5. Evaluasi Hasil RPJPD Tahun 2005-2025

Pembangunan Daerah dalam setiap pelaksanaannya selalu dilakukan evaluasi terhadap target yang telah direncanakan diawal periode, sehingga hasil evaluasi tersebut nantinya dapat menjadi masukan untuk proses perencanaan berikutnya, sekaligus mengetahui permasalahan-permasalahan yang ada.

Berdasarkan hasil evaluasi, sebagian indikasi keberhasilan utama berjalan telah sesuai dengan target yang direncanakan, akan tetapi masih terdapat beberapa indikasi yang memerlukan upaya dan terobosan inovasi dan kerja yang lebih berkualitas dalam pencapaian target.

Indeks Pembangunan Manusia

Perkembangan IPM Kabupaten Sumbawa selama periode 19 tahun (Th. 2005-2023) mengalami peningkatan sejumlah 7,68 poin atau tumbuh sebesar 0,69% pertahun, yakni dari 64,00% pada Tahun 2005 menjadi 71,68% pada tahun 2023 dengan kategori Tinggi.

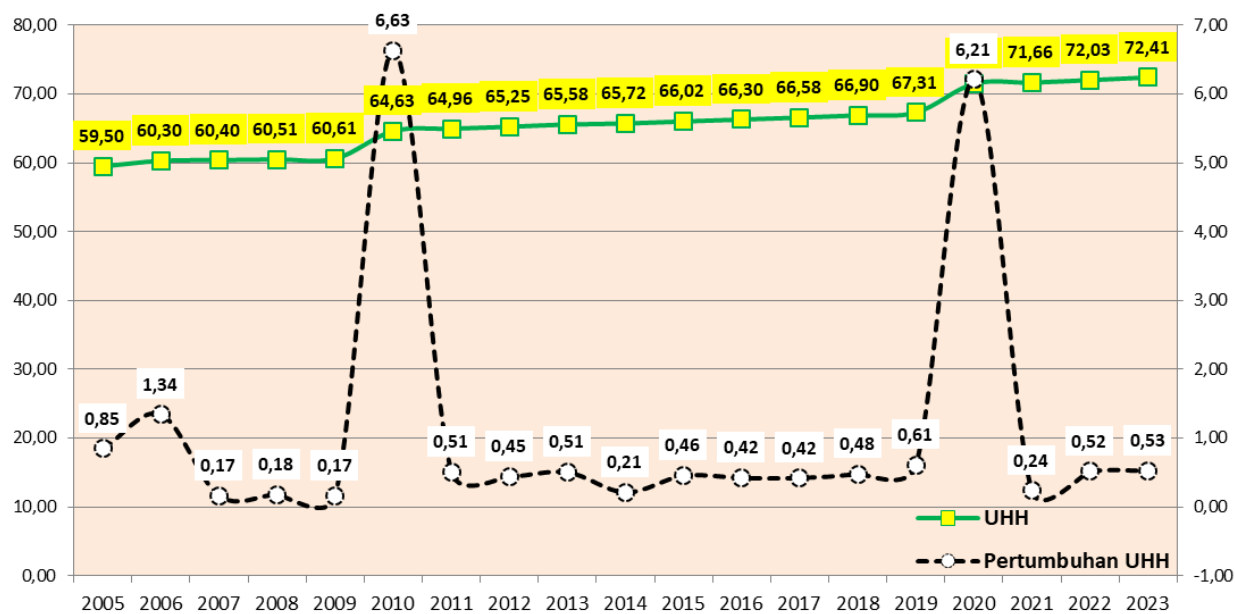


Gambar 2. 73 Perkembangan IPM Kab. Sumbawa Tahun 2005-2023

Peningkatan ini selaras dengan peningkatan dimensi dalam komponen IPM, seperti:

- **Usia Harapan Hidup (UHH)**

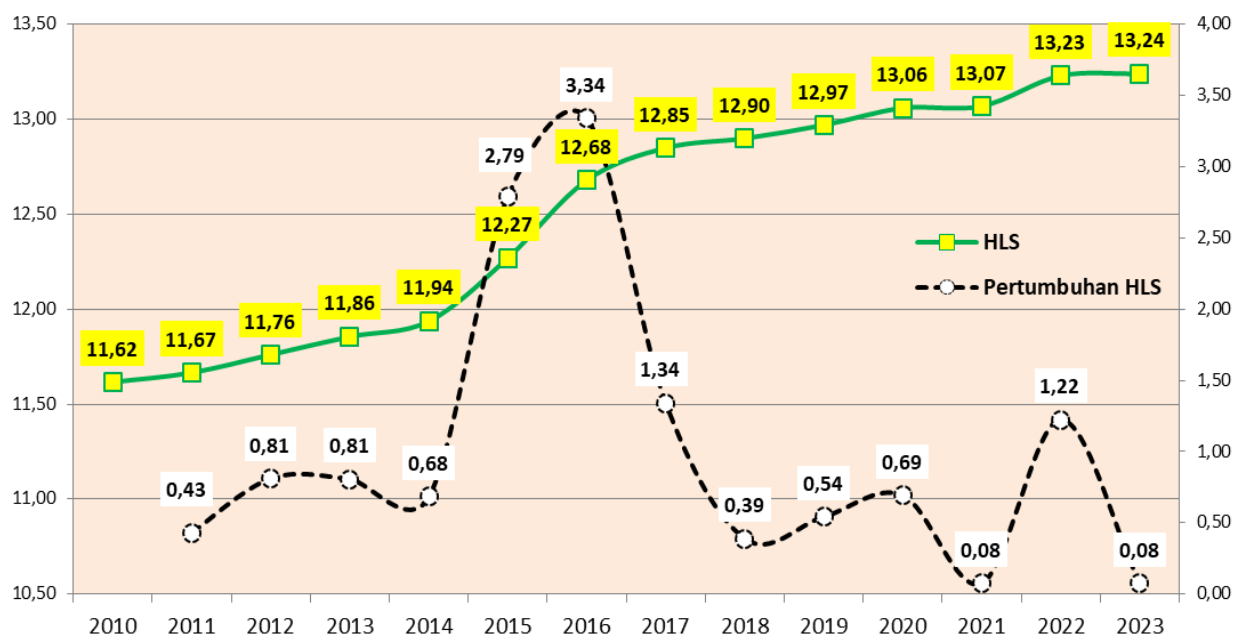
Usia Harapan Hidup (UHH) adalah rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang selama hidup. Upaya Pemerintah dalam meningkatkan kualitas hidup penduduk menunjukkan keberhasilan berupa peningkatan dalam periode tahun 2005-2023, yakni dari 59.50 tahun menjadi 72,41 tahun. artinya penduduk Sumbawa yang lahir di tahun 2023 memiliki harapan untuk hidup hingga umur 72 tahun 41 bulan dengan peningkatan UHH dalam 19 tahun terakhir sebesar 12,91 poin atau tumbuh rata-rata sebesar 1,10% pertahun, sebagaimana tergambar sebagai berikut.



Gambar 2. 74 Perkembangan UHH Kab. Sumbawa Tahun 2005-2023

- **Harapan Lama Sekolah (HLS)**

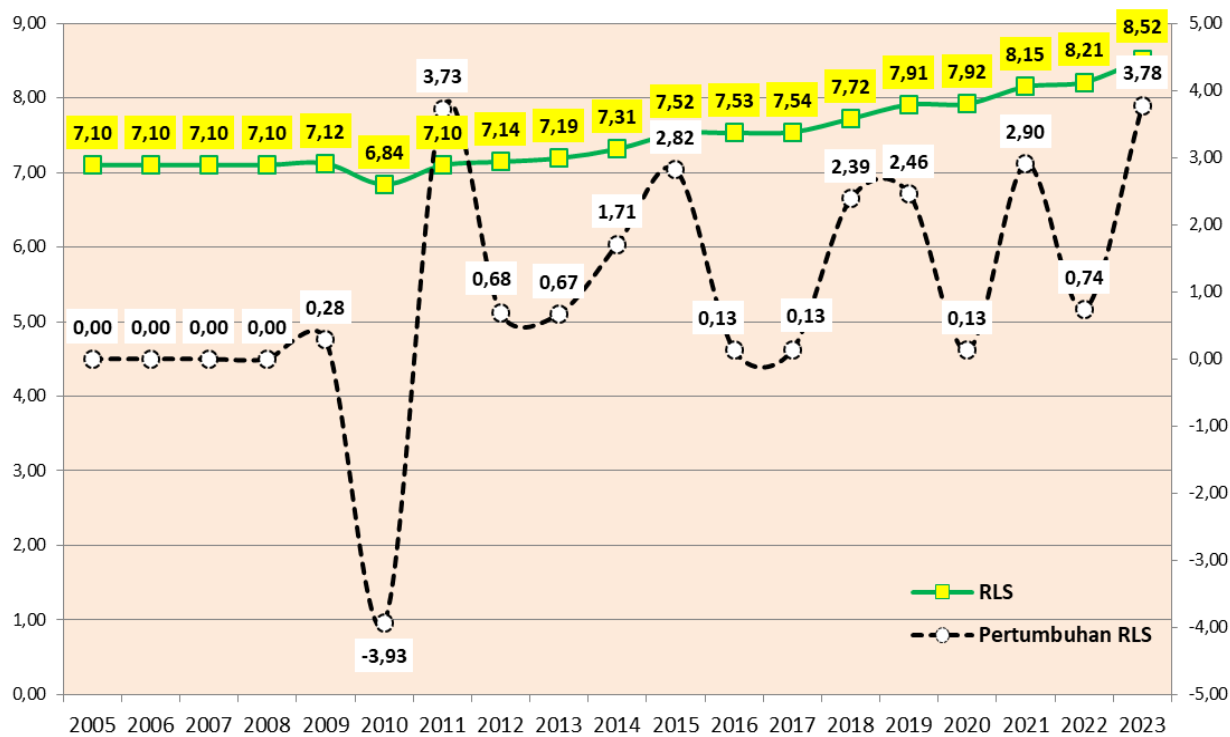
Harapan Lama Sekolah (HLS) merupakan harapan lamanya sekolah (dalam Tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak usia 7 tahun keatas dimasa yang akan datang. Harapan Lama Sekolah digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang di suatu wilayah. HLS ini merupakan indikator baru dalam dimensi pendidikan yang disesuaikan perhitungannya dari tahun 2010. HLS Kabupaten Sumbawa mengalami peningkatan sebesar 1,62 poin atau tumbuh sebesar 1,02% pertahun, yakni dari 11,62 Tahun di tahun 2010 menjadi 13,24 tahun di tahun 2023, artinya anak usia 7 tahun ke atas pada tahun 2023 di Kabupaten Sumbawa diharapkan mampu mengenyam pendidikan sampai pendidikan tinggi Semester 3.



Gambar 2. 75 Perkembangan HLS Kab. Sumbawa Tahun 2005-2023

- **Rata-rata Lama Sekolah (RLS)**

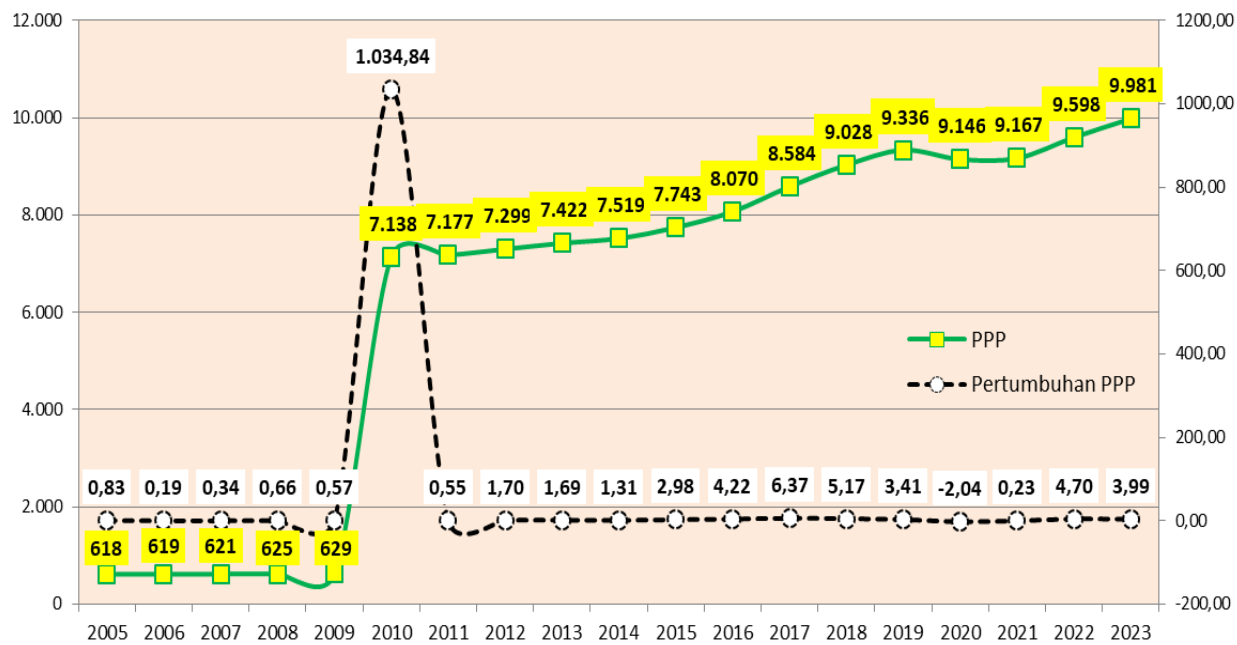
Rata-rata Lama Sekolah (RLS) menggambarkan tingkat rata-rata jumlah tahun yang digunakan penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Rata-rata Lama Sekolah merupakan cerminan jenjang pendidikan penduduk suatu wilayah. Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Sumbawa meningkat sebesar 1,42 poin atau rata-rata tumbuh sebesar 0,98% pertahun, yakni dari 7,10 tahun pada tahun 2005 menjadi 8,52 tahun pada tahun 2023 atau setara dengan kelas 8 pendidikan menengah, taraf ini belum mencapai wajib belajar 9 tahun. Meningkatkan RLS memerlukan perlakuan khusus sebab obyeknya adalah penduduk berusia 25 tahun ke atas. sehingga yang dapat dilakukan adalah menjaga agar penduduk yang akan mencapai usia 25 tahun agar tetap memperoleh pendidikan hingga tamat perguruan tinggi.



Gambar 2. 76 Perkembangan RLS Kab. Sumbawa Tahun 2005-2023

- **Purchasing Power Parity (PPP)**

Pengeluaran Per Kapita yang disesuaikan ditentukan dari nilai pengeluaran perkapita dan paritas daya beli (*Purchasing Power Parity*-PPP). Daya beli merupakan kemampuan masyarakat dalam membelanjakan uangnya dalam bentuk barang maupun jasa. Dalam rentang 19 tahun (2005-2022) PPP mengalami peningkatan Rp. 9.363.000,-, atau rata-rata tumbuh sebesar 56,41% pertahun yakni dari Rp. 618.000,- pada tahun 2005 menjadi Rp. 9.981.000 per tahun (artinya setiap penduduk Kabupaten Sumbawa mengeluarkan sekitar 831 ribu rupiah per orang per bulan) di tahun 2023. Peningkatan yang signifikan ini sebagai dampak dari adanya perubahan metode baru perhitungan IPM yang semula dari 27 komoditas menjadi 96 komoditas, sebagaimana perkembangan PPP tergambar sebagai berikut.

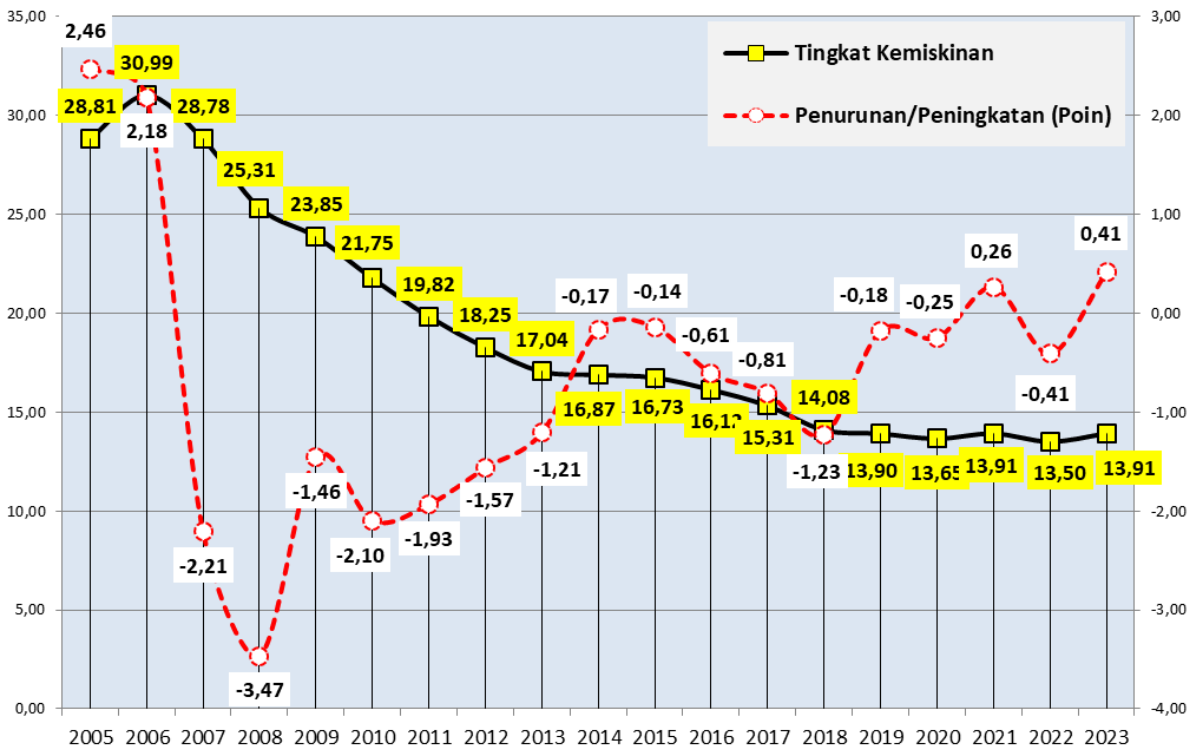


Gambar 2. 77 Perkembangan PPP Kab. Sumbawa Tahun 2005-2023

Angka Kemiskinan

Kemiskinan adalah ketidakmampuan individu dalam memenuhi kebutuhan dasar minimum untuk hidup layak. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan di bawah garis kemiskinan (GK). Adapun garis kemiskinan terdiri dari dua komponen yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) yang merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan 2.100 kilo kalori per kapita per hari dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKMN) berupa kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan.

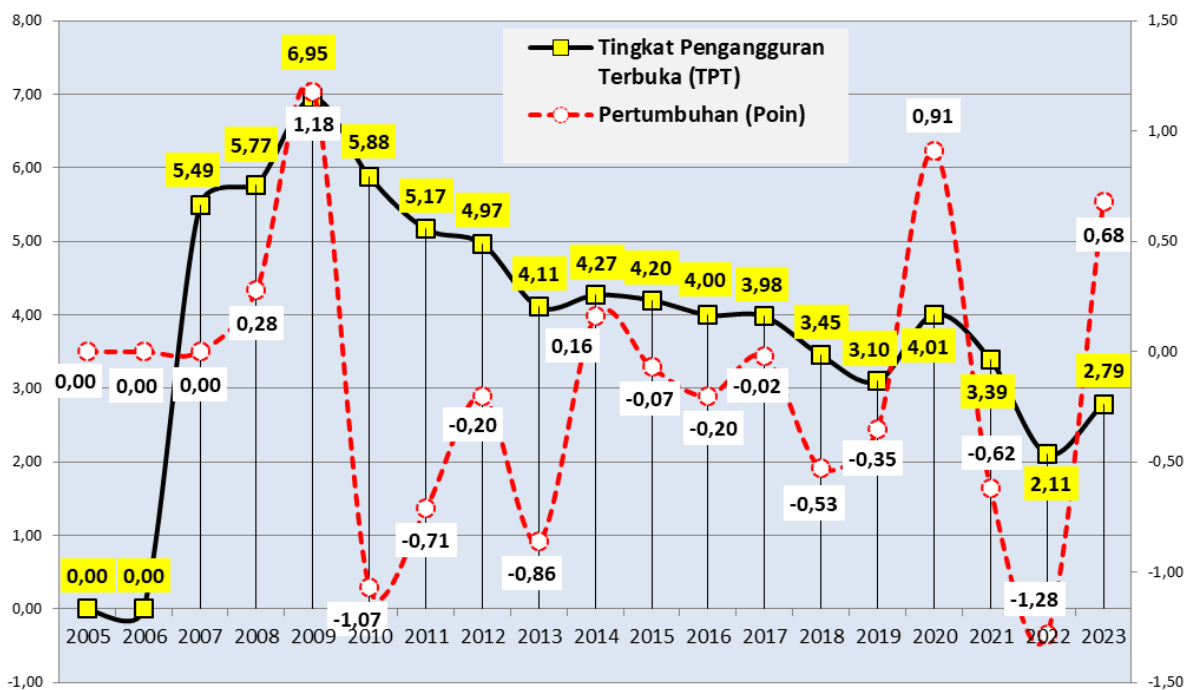
Tingkat kemiskinan di Kabupaten Sumbawa dalam kurun waktu 19 tahun terakhir (2005-2023) terjadi penurunan sebesar 14,90 poin atau menurun rata-rata sebesar 0,65 poin pertahun, yakni dari 28,81% menjadi 13,91%, sebagaimana tergambar sebagai berikut.



Gambar 2. 78 Perkembangan Kemiskinan Kab. Sumbawa Tahun 2005-2023

Angka Pengangguran

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja dan kurang termanfaatkannya pasokan tenaga kerja. Untuk data TPT dari tahun 2005-2006 tidak terdapat publikasi untuk tingkat Kabupaten, karena ditahun tersebut hanya menghitung sampai tingkat Provinsi. Terkait TPT di Kabupaten Sumbawa dari tahun 2007-2023 mengalami penurunan sebesar 2,70 poin yakni dari 5,49% menjadi 2,79% di tahun 2023.



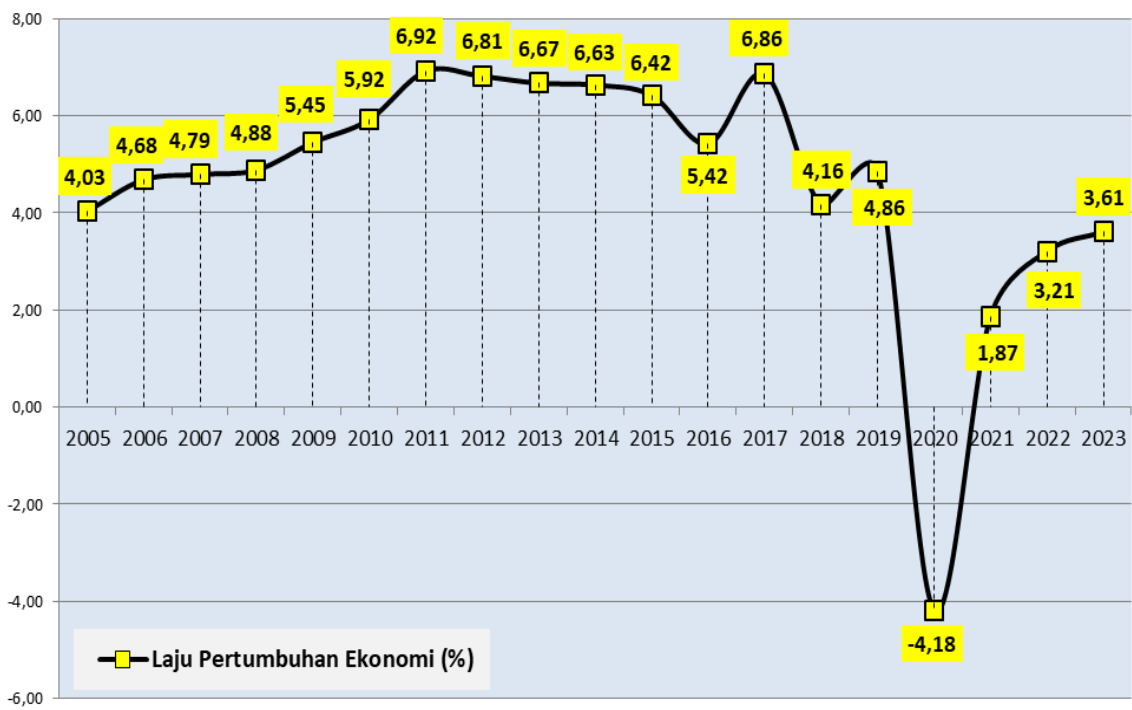
Gambar 2. 79 Perkembangan TPT Kab. Sumbawa Tahun 2005-2023

Pertumbuhan Ekonomi

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan diwilayah domestik suatu negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau non residen. PDRB dilakukan melalui 3 (tiga) pendekatan yaitu pendekatan produksi, pengeluaran dan pendapatan yang disajikan atas dasar berlaku dan harga konstan.

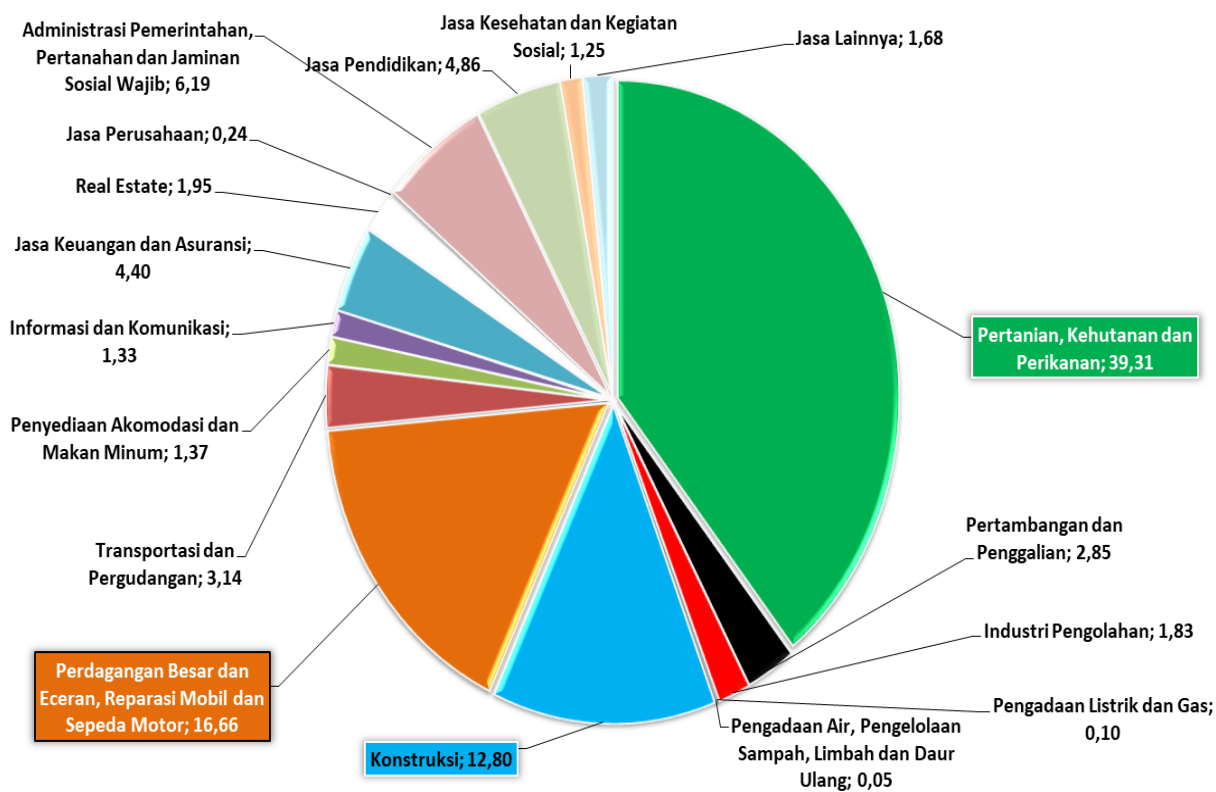
Selama sepuluh tahun terakhir, banyak perubahan yang terjadi pada tatanan global dan lokal yang sangat berpengaruh terhadap perekonomian nasional, seperti krisis finansial global yang terjadi pada tahun 2008, penerapan perdagangan bebas antara China-ASEAN (CAFTA), perubahan sistem pencatatan perdagangan internasional dan meluasnya jasa layanan pasar modal yang merupakan contoh perubahan yang perlu diadopsi dalam mekanisme pencatatan statistik nasional. Salah satu bentuk adaptasi pencatatan statistik nasional adalah melakukan perubahan tahun dasar PDB Indonesia dari tahun 2000 ke 2010, karena manfaat dari perubahan tahun dasar tersebut antara lain menginformasikan perekonomian regional yang terkini seperti pergeseran struktur dan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan

kualitas data PDRB dan menjadikan data PDRB dapat dibandingkan secara internasional. Perubahan tahun dasar telah dilakukan sebanyak 5 kali yaitu di tahun 1960, 1973, 1983, 1993, 2000, dan tahun 2010 dengan berubahnya 9 sektor menjadi 17 kategori. Adapun perkembangan PDRB ADH Berlaku dari tahun 2005-2023 mengalami peningkatan sebesar 15.431,47 milyar rupiah, yakni dari 2.078,96 milyar rupiah di tahun 2005 menjadi 17.510,43 milyar rupiah di tahun 2023. Demikian pula dengan PDRB ADH Konstan yang meningkat sebesar 9.502,77 milyar rupiah, yakni dari 1.426,29 milyar rupiah di tahun 2005 menjadi 10.929,06 milyar rupiah, sebagaimana laju pertumbuhan ekonomi sebagai berikut.



Gambar 2. 80 Perkembangan Laju Ekonomi Kab. Sumbawa Tahun 2005-2023

Struktur perekonomian Kabupaten Sumbawa sampai dengan saat ini sebagai kategori penyumbang PDRB terbesar adalah kategori pertanian, Kehutanan dan Perikanan dengan *sharenya* sebesar 39,31%, diikuti oleh kategori Perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor dengan kontribusi sebesar 16,66%, kemudian kategori Konstruksi yang ikut andil sebesar 12,80%, sedangkan 14 kategori lapangan usaha lainnya tidak lebih dari 7% untuk tiap kategorinya, sebagaimana tergambar sebagai berikut.



Gambar 2. 81 Kontribusi Kategori Lapangan Usaha Terhadap PDRB di Kab. Sumbawa ADH Berlaku Tahun 2023 (%)

Selain tiga kategori tersebut, kategori administrasi pemerintahan, pertanahan dan jaminan sosial wajib, kategori jasa pendidikan dan kategori jasa keuangan dan asuransi juga memiliki kontribusi yang cukup besar terhadap PDRB, sementara peranan kategori lainnya kontribusinya dibawah 4 %.

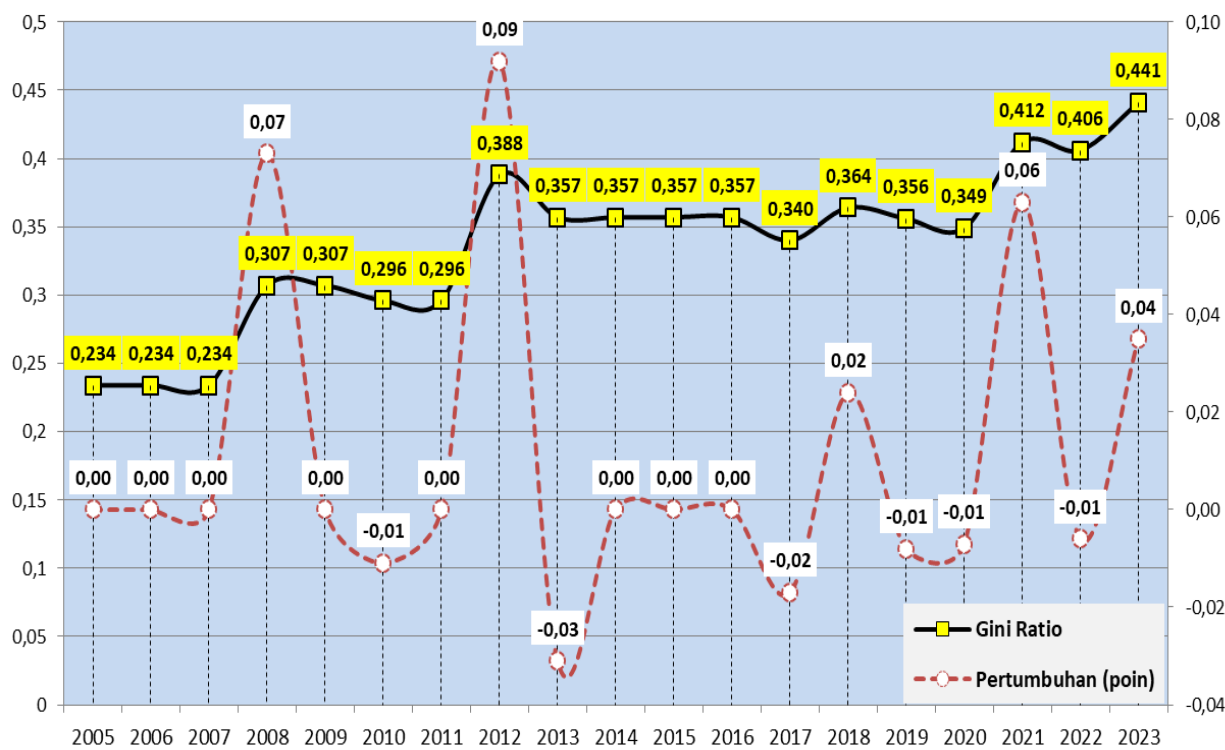
Ketimbangan Pendapatan (Gini Ratio)

Koefisien Gini (Gini Ratio) adalah salah satu ukuran yang paling sering digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Koefisien Gini didasarkan pada Kurva Lorenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu variabel tertentu (misalnya pendapatan) dengan distribusi uniform (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk.

Secara umum, nilai Gini Ratio Kabupaten Sumbawa selama periode 2017-2021 mengalami fluktuasi. Angka Gini Ratio Kabupaten Sumbawa ini dapat diinterpretasikan berdasarkan karakteristik Koefisien Gini bahwa Gini Ratio bernilai antara 0 sampai 1, dimana

koefisien Gini = 0, berarti pembagian pendapatan merata sempurna, tetapi jika Koefisien Gini = 1, berarti pembagian pendapatan timpang sempurna.

Menurut kriteria H.T. Oshima: (1) Ketimpangan “rendah” bila angka Gini kurang dari 0,3; (2) Ketimpangan “sedang” bila indeks Gini antara 0,3-0,4;(3) Ketimpangan “tinggi” bila indeks Gini di atas 0,4. Berdasarkan hal tersebut, maka Gini Ratio Kabupaten Sumbawa termasuk dalam kategori “sedang”, yang berarti masih terjadi ketimpangan distribusi pendapatan di masyarakat dan perlu terus mendapat perhatian, sebagaimana tergambar sebagai berikut.



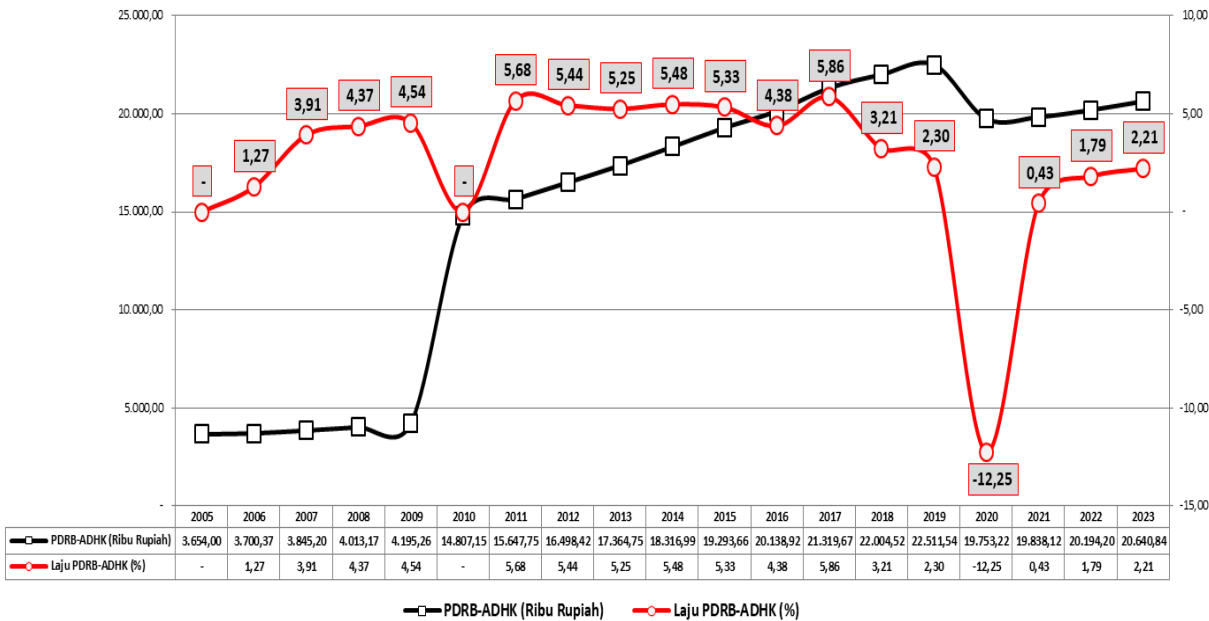
Gambar 2. 82 Perkembangan Gini Ratio di Kabupaten Sumbawa Tahun 2005-2023

Komparasi angka Gini Ratio Kabupaten Sumbawa dari tahun 2005-2023 mengalami fluktuasi yakni dari tahun 2005-2007 sebesar 0,234, meningkat di tahun 2008 sebesar 0,307 dan kembali menurun di tahun 2010 menjadi 0,296. Adapun peningkatan gini rasio ini terjadi pada tahun 2021 sebesar 0,412, akibat adanya pandemi Covid 19 yang membatasi masyarakat dalam beraktivitas, dan pasca pandemic tersebut mengalami perbaikan melalui pemulihan ekonomi dengan gini rasio sebesar 0,406 di tahun 2022 atau menurun sebesar 0,01 poin dari tahun sebelumnya. Penurunan ini antara lain disebabkan oleh adanya

kebijakan berupa pembangunan fasilitas perekonomian di perdesaan, perbaikan sarana penunjang kegiatan ekonomi serta bantuan modal bagi UMKM. Akan tetapi di Tahun 2023 kembali Gini rasio mengalami peningkatan sebesar 0,441, sebagaimana gambar di atas.

PDRB Perkapita

PDRB per kapita merupakan suatu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah/wilayah. PDRB Per Kapita merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. PDRB per kapita Kabupaten Sumbawa atas dasar harga konstan sejak tahun 2005 hingga 2023 berfluktuasi. Hal ini terlihat dari tahun 2005 senilai 3,65 juta rupiah meningkat menjadi Rp.4,19 juta rupiah di tahun 2009, akan tetapi di tahun 2010 terjadi penggantian tahun dasar dari tahun dasar 2000 ke tahun dasar 2010, sehingga terjadi penyesuaian data. Pada tahun 2018 PDRB per kapita tercatat sebesar 22,00 juta rupiah dan terus meningkat sampai tahun 2019 sebesar 22,51 juta rupiah dan mengalami penurunan di tahun 2020 sebagai dampak adanya pandemi Covid-19 sebesar 19,75 juta rupiah dengan laju yang terkontraksi - 12,25% dan membaik di tahun 2021 sebesar 19,84 juta rupiah dengan laju sebesar 0,43% dan di tahun 2022-2023 kembali masing-masing meningkat menjadi 20,19 juta rupiah dengan laju mencapai 1,79% dan 20,64 juta rupiah dengan laju sebesar 2,21%, sebagaimana tergambar sebagai berikut.



Gambar 2. 83 Laju Pertumbuhan PDRB Per Kapita ADH Konstan di Kabupaten Sumbawa Tahun 2005-2023

Berdasarkan uraian-uraian dan kesimpulan di atas, beberapa hal yang perlu menjadi perhatian dalam penyusunan RPJPD berikutnya adalah.

1. Kualitas sumber daya manusia terus ditingkatkan untuk mendorong pencapaian rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah. Selain itu, pendidikan kesetaraan untuk kelompok usia dewasa, memfokuskan intervensi pendidikan keaksaraan pada kelompok usia dan wilayah yang paling bermasalah serta meningkatkan pendidikan vokasi baik pada jenjang pendidikan tinggi maupun pendidikan menengah yang disesuaikan dengan kebutuhan lapangan kerja.
2. Meningkatkan manajemen PAUD guna memastikan anak usia dini mendapatkan pertumbuhan dan perkembangan yang maksimal, seperti perkembangan fisik yang baik (koordinasi motorik halus dan kasar), perkembangan kecerdasan kognitif (daya pikir, daya cipta), perkembangan sosio emosional (sikap dan emosi) dan perkembangan komunikasi dan Bahasa.
3. Prioritas pembangunan kesehatan melalui perbaikan kualitas pelayanan kesehatan diantaranya peningkatan kompetensi peningkatan kompetensi tenaga kesehatan, peningkatan puskesmas mampu *Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar* (PONED) dan

Rumah Sakit mampu *Pelayanan Obstetri Emergensi Komprehensif* (PONEK). Selain itu dilakukan peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan neonatal, peningkatan cakupan imunisasi dasar lengkap dan pengembangan beberapa imunisasi baru yang dapat menurunkan kematian bayi serta penguatan penerapan perilaku hidup bersih dan sehat terutama kebiasaan mencuci tangan dengan benar atau cuci tangan pakai sabun (CTPS).

4. Pembangunan infrastruktur ke depan termasuk penyediaan infrastruktur dasar yang diarahkan dalam rangka memaksimalkan pemanfaatan ketersediaan infrastruktur mulai dari aspek produksi, aspek distribusi, aspek pariwisata termasuk interkoneksi antara desa dengan kota. Hal ini ditujukan untuk mendukung peningkatan daya saing ekonomi yang ditandai dengan menurunnya biaya logistik.
5. Memperkuat pelaksanaan kebijakan reformasi birokrasi, mempercepat pelaksanaan penerapan Standar Pelayanan Publik serta memperkuat tata kelola pemerintah daerah.
6. Mewujudkan kedaulatan pangan, akselerasi peningkatan produksi berbagai komoditas pangan pokok serta tata kelola kelembagaan berbasis kearifan lokal. Selain itu perlu adanya kebijakan lahan pertanian berkelanjutan dengan pola pendekatan estate farming. Hal ini ditujukan untuk meningkatkan daya saing produk domestik di pasar global. Selain itu peningkatan daya saing sektor industri difokuskan mulai dari perluasan dan pendalaman struktur industri, keterkaitan industri hulu-hilir, peningkatan inovasi dan alih teknologi industri sampai dengan menyongsong penerapan industri 4.0.

2.6. Tren Demografi dan Kebutuhan Sarana dan Prasarana

2.6.1. Tren Demografi

Penduduk merupakan modal dasar pembangunan baik sebagai subyek maupun obyek pembangunan. Oleh karena itu, terkait

perkembangan kependudukan sangat penting diketahui untuk menyusun berbagai kebijakan dan strategi pembangunan.

Proyeksi penduduk memberikan gambaran mengenai ukuran dan struktur umur penduduk di masa depan yang didasarkan pada asumsi tertentu. Perkiraan besaran komposisi, sebaran populasi di masa depan dapat dijadikan acuan pengambilan kebijakan pemerintah, seperti menjamin pendidikan bagi anak, menyediakan kesempatan kerja bagi kaum muda dan menyiapkan jaminan sosial bagi penduduk lanjut usia.

Berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2020 (SP2020) yang terbagi dalam dua tahapan, yaitu pendataan penduduk dengan menggunakan kuesioner sederhana (*Short Form*) dan pendataan menggunakan kuesioner yang lebih rinci (*Long Form*) melalui kegiatan sensus sampel pada tahun 2022 (LF SP2020) guna memutakhirkan proyeksi penduduk yang telah diterbitkan sebelumnya dengan menggunakan beberapa asumsi seperti asumsi kelahiran dengan menggunakan indikator *Total Fertility Rate* (TFR), asumsi kematian dengan menggunakan indikator *Infant Mortality Rate* (IMR) dan Umur Harapan Hidup (UHH) saat lahir, serta migrasi dengan menggunakan indikator *Age-Specific Net Migration Rate* (ASNMR), TFR, IMR dan penduduk dasar yang disusun berdasarkan umur dan jenis kelamin yang bersumber dari penduduk hasil SP2020. Publikasi proyeksi penduduk Kabupaten/Kota berdasarkan hasil sensus 2020 ini menyajikan proyeksi penduduk dari tahun 2020 hingga tahun 2035 dan di tahun 2040-2045 merupakan data olahan untuk menyesuaikan dengan periode RPJMN 2025-2045.

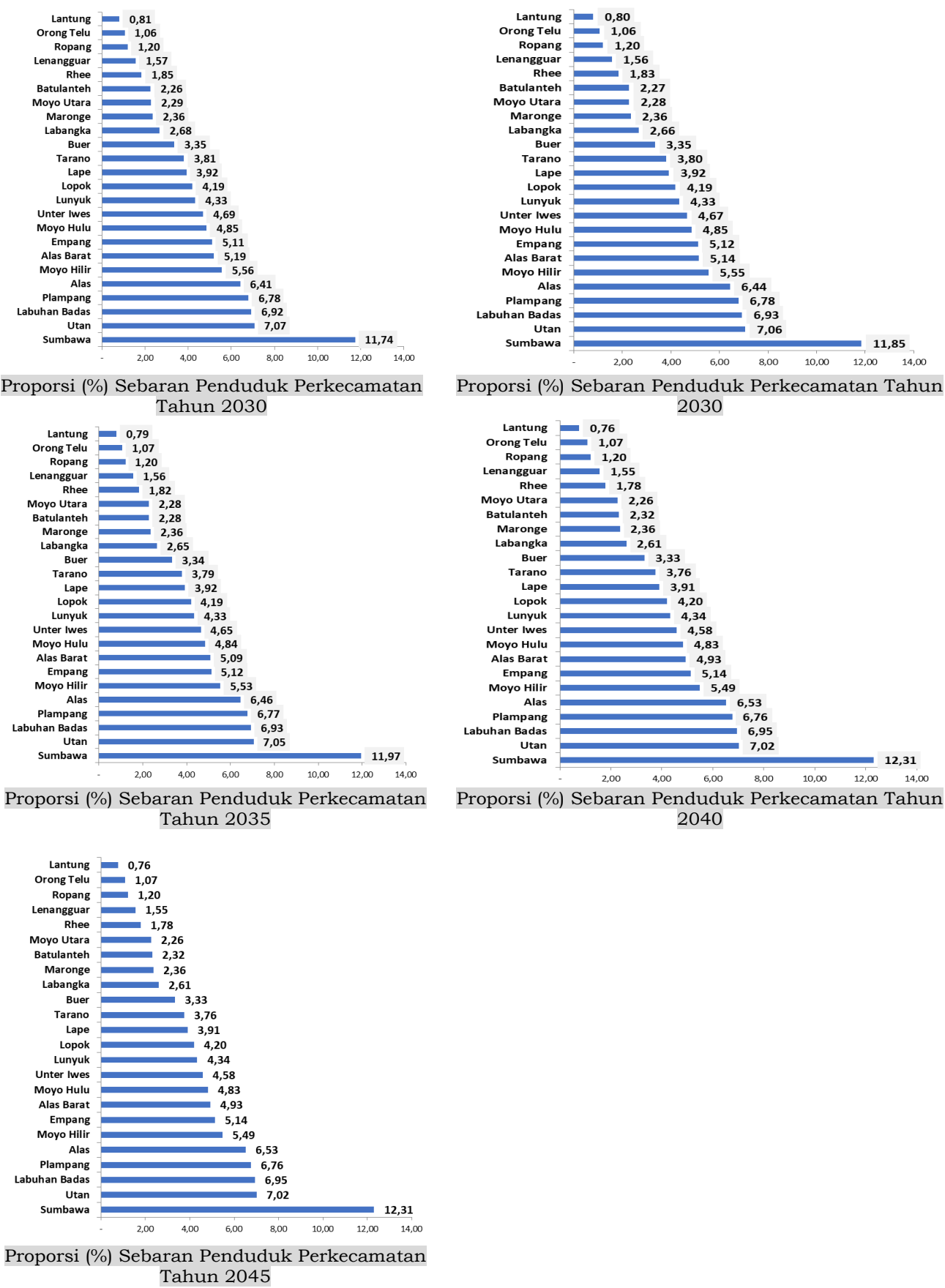
Jumlah Penduduk

Proyeksi jumlah penduduk Kabupaten Sumbawa menunjukkan peningkatan sebagaimana berikut.

Tabel 2. 19 Proyeksi Penduduk Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2045

No	Kecamatan	Tahun 2020 (jiwa)	Proyeksi Jumlah Penduduk (Jiwa)				
			2025	2030	2035	2040	2045
1	Lunyuk	22.043	23.526	25.017	26.382	27.623	28.675
2	Orong Telu	5.459	5.766	6.144	6.493	6.841	7.102
3	Alas	33.168	34.864	37.187	39.335	41.564	43.147
4	Alas Barat	25.052	28.240	29.703	30.982	31.393	32.589
5	Buer	16.909	18.218	19.336	20.352	21.189	21.995
6	Utan	35.678	38.439	40.798	42.942	44.709	46.411
7	Rhee	9.060	10.032	10.589	11.085	11.354	11.786
8	Batulanteh	11.784	12.289	13.128	13.908	14.767	15.329
9	Sumbawa	62.542	63.836	68.494	72.875	78.373	81.355
10	Labuhan Badas	35.307	37.628	40.025	42.220	44.244	45.929
11	Unter Iwes	23.287	25.495	26.973	28.299	29.182	30.293
12	Moyo Hilir	27.866	30.253	32.061	33.694	34.920	36.250
13	Moyo Utara	11.470	12.431	13.178	13.854	14.373	14.921
14	Moyo Hulu	24.554	26.371	28.007	29.497	30.769	31.940
15	Ropang	6.120	6.541	6.953	7.331	7.669	7.961
16	Lenangguar	7.885	8.517	9.035	9.505	9.881	10.257
17	Lantung	3.866	4.410	4.627	4.815	4.844	5.029
18	Lape	19.861	21.321	22.646	23.853	24.888	25.835
19	Lopok	21.350	22.770	24.217	25.541	26.754	27.772
20	Plampang	34.336	36.884	39.171	41.254	43.028	44.666
21	Labangka	13.238	14.566	15.395	16.136	16.589	17.221
22	Maronge	11.966	12.809	13.613	14.347	14.995	15.566
23	Empang	26.131	27.772	29.557	31.195	32.746	33.993
24	Tarano	19.096	20.698	21.942	23.067	23.930	24.841
	Jumlah	508.028	543.676	577.796	608.962	636.625	660.863

Berdasarkan sebaran penduduk di 24 Kecamatan dari tahun 2025-2045 terlihat bahwa sebaran terbesar terdapat di Kecamatan Sumbawa, diikuti Kecamatan Utan, Kecamatan Labuhan Badas, Kecamatan Plampang dan Kecamatan Alas dari proporsi 6%-12%, sementara proporsi Kecamatan lainnya dari 0,76%-5%, sebagaimana tergambar sebagai berikut.



Gambar 2. 84 Proporsi (%) Sebaran Penduduk Perkecamatan Tahun 2025-2045

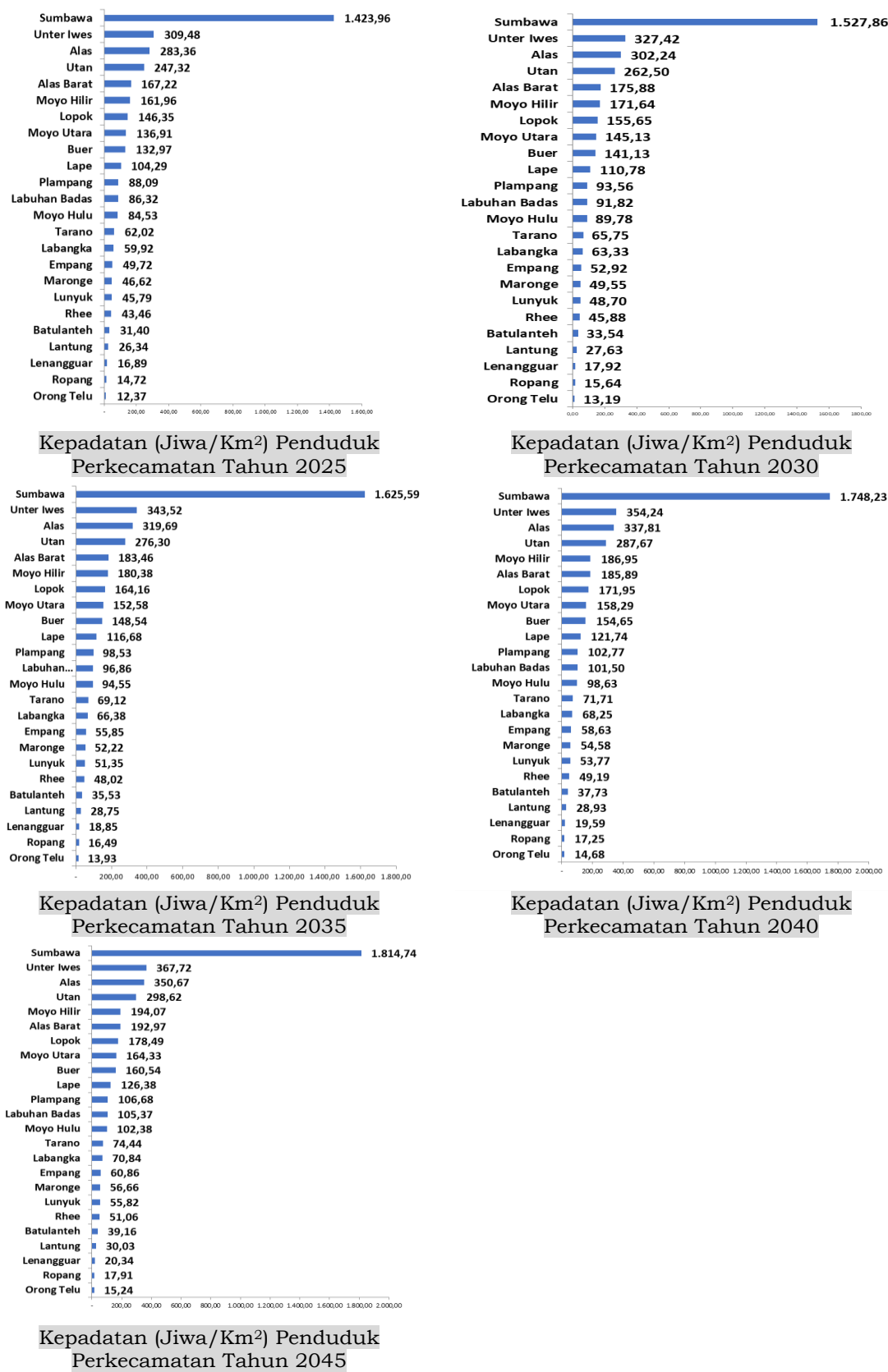
Kepadatan Penduduk

Kepadatan penduduk merupakan perbandingan antara jumlah penduduk terhadap luas daerah suatu wilayah. Tingkat kepadatan penduduk merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mencerminkan tingkat perkembangan suatu daerah, sebagaimana hasil proyeksi kepadatan penduduk di Kabupaten Sumbawa sebagai berikut.

Tabel 2. 20 Kepadatan Penduduk Kabupaten Sumbawa

No	Kecamatan	Luas Km2	Tahun 2020	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km2)				
				2025	2030	2035	2040	2045
1	Lunyuk	513,74	42,91	45,79	48,70	51,35	53,77	55,82
2	Orong Telu	465,97	11,72	12,37	13,19	13,93	14,68	15,24
3	Alas	123,04	269,57	283,36	302,24	319,69	337,81	350,67
4	Alas Barat	168,88	148,34	167,22	175,88	183,46	185,89	192,97
5	Buer	137,01	123,41	132,97	141,13	148,54	154,65	160,54
6	Utan	155,42	229,56	247,32	262,50	276,30	287,67	298,62
7	Rhee	230,82	39,25	43,46	45,88	48,02	49,19	51,06
8	Batulanteh	391,40	30,11	31,40	33,54	35,53	37,73	39,16
9	Sumbawa	44,83	1.395,09	1.423,96	1.527,86	1.625,59	1.748,23	1.814,74
10	Labuhan Badas	435,89	81,00	86,32	91,82	96,86	101,50	105,37
11	Unter Iwes	82,38	282,68	309,48	327,42	343,52	354,24	367,72
12	Moyo Hilir	186,79	149,18	161,96	171,64	180,38	186,95	194,07
13	Moyo Utara	90,80	126,32	136,91	145,13	152,58	158,29	164,33
14	Moyo Hulu	311,96	78,71	84,53	89,78	94,55	98,63	102,38
15	Ropang	444,48	13,77	14,72	15,64	16,49	17,25	17,91
16	Lenangguar	504,32	15,63	16,89	17,92	18,85	19,59	20,34
17	Lantung	167,45	23,09	26,34	27,63	28,75	28,93	30,03
18	Lape	204,43	97,15	104,29	110,78	116,68	121,74	126,38
19	Lopok	155,59	137,22	146,35	155,65	164,16	171,95	178,49
20	Plampang	418,69	82,01	88,09	93,56	98,53	102,77	106,68
21	Labangka	243,08	54,46	59,92	63,33	66,38	68,25	70,84
22	Maronge	274,75	43,55	46,62	49,55	52,22	54,58	56,66
23	Empang	558,55	46,78	49,72	52,92	55,85	58,63	60,86
24	Tarano	333,71	57,22	62,02	65,75	69,12	71,71	74,44
	Jumlah	6.643,98	76,46	81,83	86,97	91,66	95,82	99,47

Berdasarkan tingkat kepadatan, Kecamatan Sumbawa merupakan Kecamatan terpadat, yaitu rata-rata dihuni oleh 1.395 jiwa per km² pada tahun 2020 menjadi 1.814,74 jiwa/km² pada tahun 2045, diikuti oleh Kecamatan Unter Iwes sebesar 367,72 jiwa per km², Kecamatan Alas sebesar 350,67 jiwa per km², sementara kecamatan dengan kepadatan terendah berada di Kecamatan Orong Telu sebesar 15,24 jiwa per km², sebagaimana tergambar sebagai berikut.

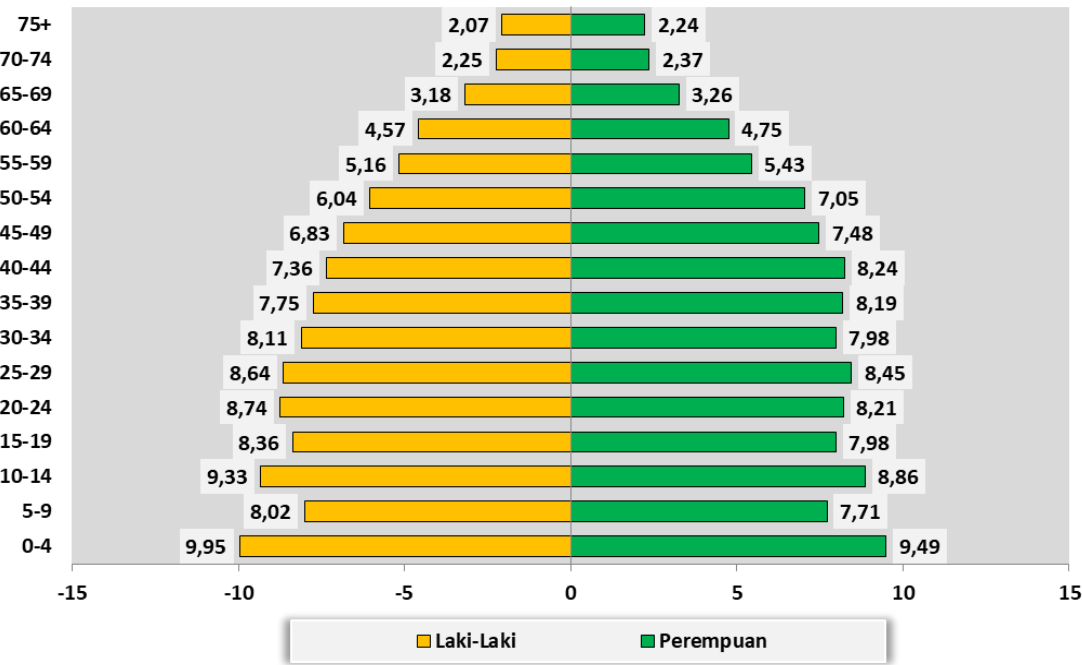


Gambar 2. 85 Kepadatan (jiwa/km persegi penduduk per kecamatan tahun 2025-2045

Komposisi Penduduk

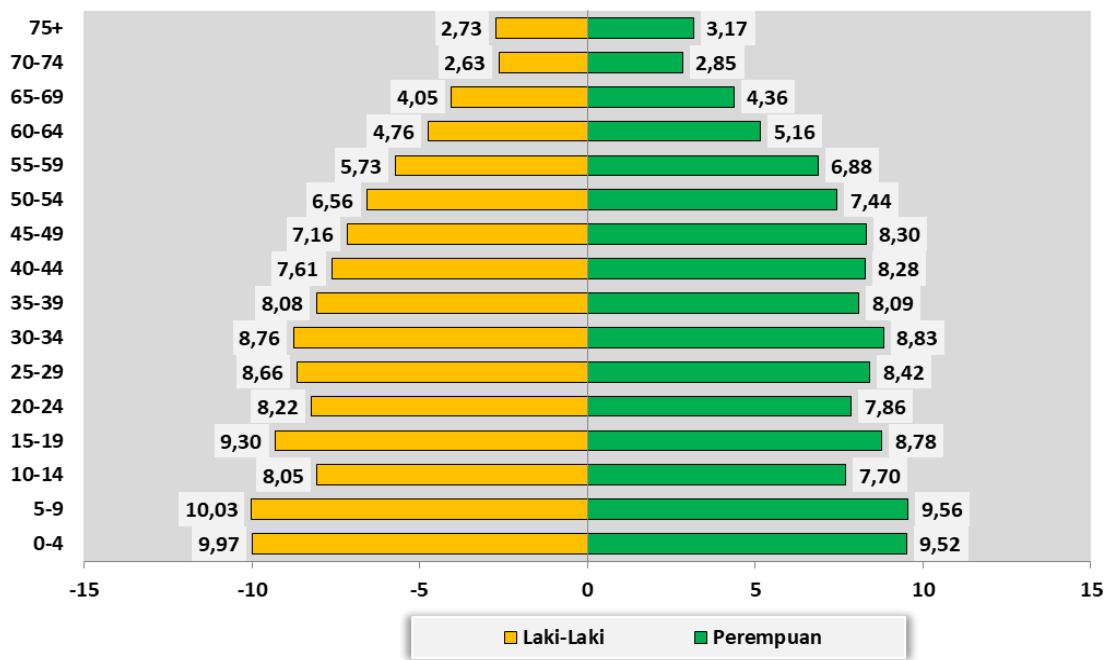
Komposisi umur penduduk di kabupaten Sumbawa pada tahun 2025 menunjukkan bahwa penduduk pada umur 0-4 tahun

merupakan umur dengan proporsi yang terbesar dengan jenis kelamin laki-laki sebesar 9,95% dan jenis kelamin perempuan sebesar 9,49%, diikuti oleh kelompok umur 10-14 tahun. Sementara proporsi terkecil adalah pada umur 75 Tahun dengan jenis kelamin laki-laki sebesar 2,07% dan jenis kelamin perempuan sebesar 2,24%, sebagaimana tergambar sebagai berikut.



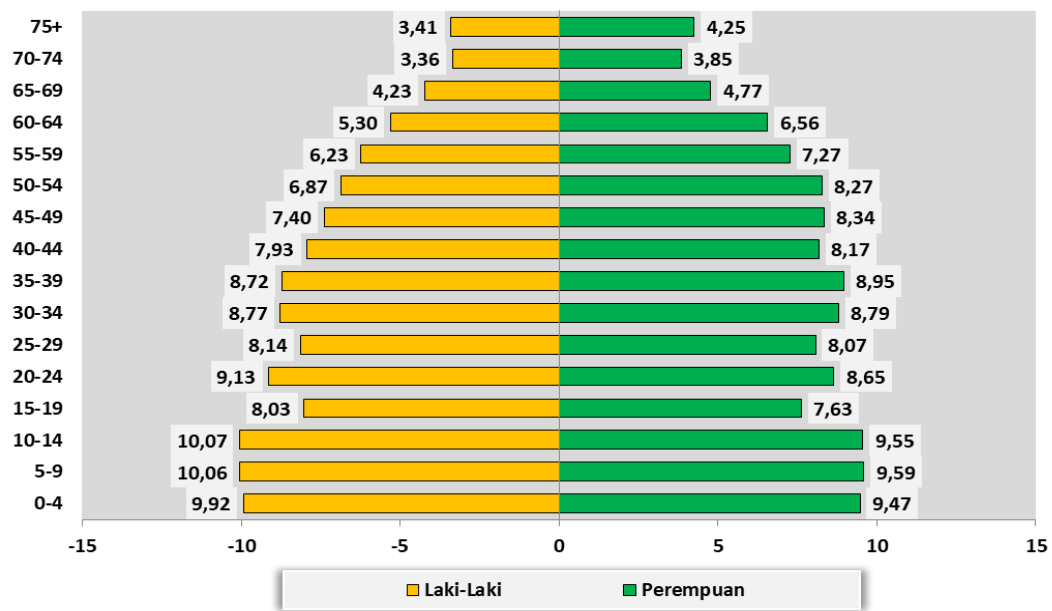
Gambar 2. 86 Piramida Penduduk di Kabupaten Sumbawa tahun 2025

Pada tahun 2030, komposisi umur penduduk di kabupaten Sumbawa menunjukkan pergeseran, dimana penduduk pada umur 5-9 tahun merupakan umur dengan proporsi yang terbesar dengan jenis kelamin laki-laki sebesar 10,03% dan jenis kelamin perempuan sebesar 9,56%, diikuti oleh kelompok umur 0-4 tahun dan umur 15-19 tahun. Sedangkan untuk proporsi umur terkecil terjadi pergeseran, yakni pada umur 70-74 Tahun dengan jenis kelamin laki-laki sebesar 2,63% dan jenis kelamin perempuan sebesar 2,85%, sebagaimana tergambar sebagai berikut.



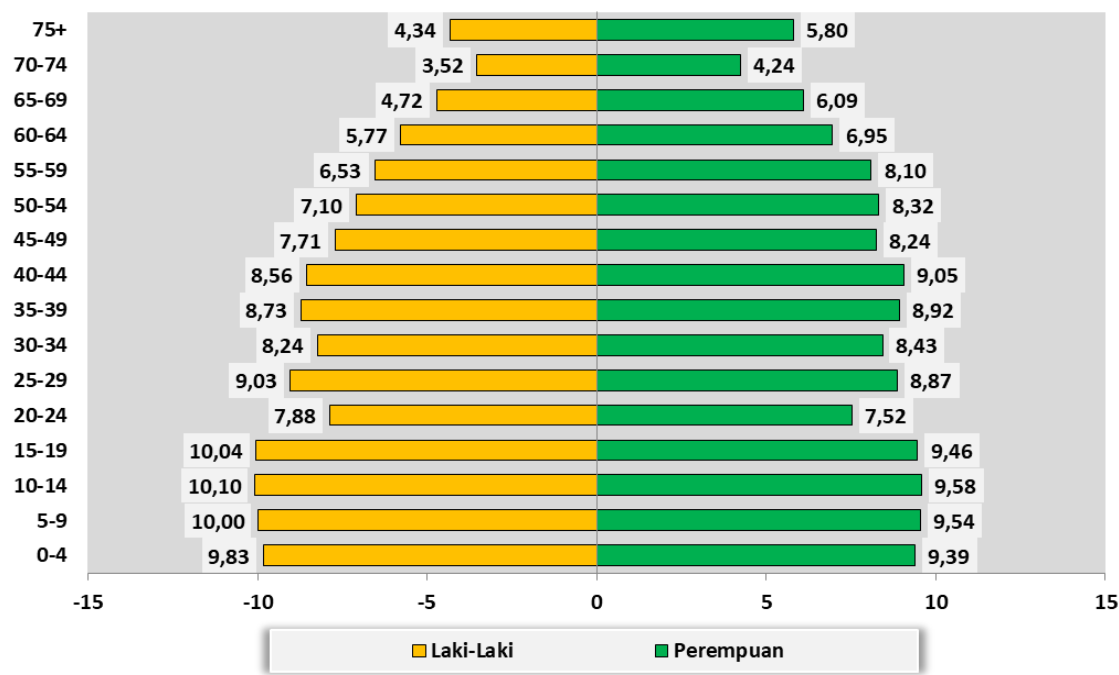
Gambar 2. 87 Piramida Penduduk di Kabupaten Sumbawa tahun 2030

Pada tahun 2035, komposisi umur penduduk di kabupaten Sumbawa proporsinya masih didominasi oleh penduduk pada umur 5-9 tahun dengan jenis kelamin laki-laki sebesar 10,06% lebih rendah dari umur 10-14 tahun sebesar 10,07%, akan tetapi pada jenis kelamin perempuan lebih besar pada umur 5-9 tahun sebesar 9,59%, sementara pada umur 10-14 tahun sebesar 9,55%. Sedangkan untuk proporsi umur terkecil masih berada pada komposisi umur 70-74 Tahun dengan jenis kelamin laki-laki sebesar 3,36% dan jenis kelamin perempuan sebesar 3,85%, sebagaimana tergambar sebagai berikut.



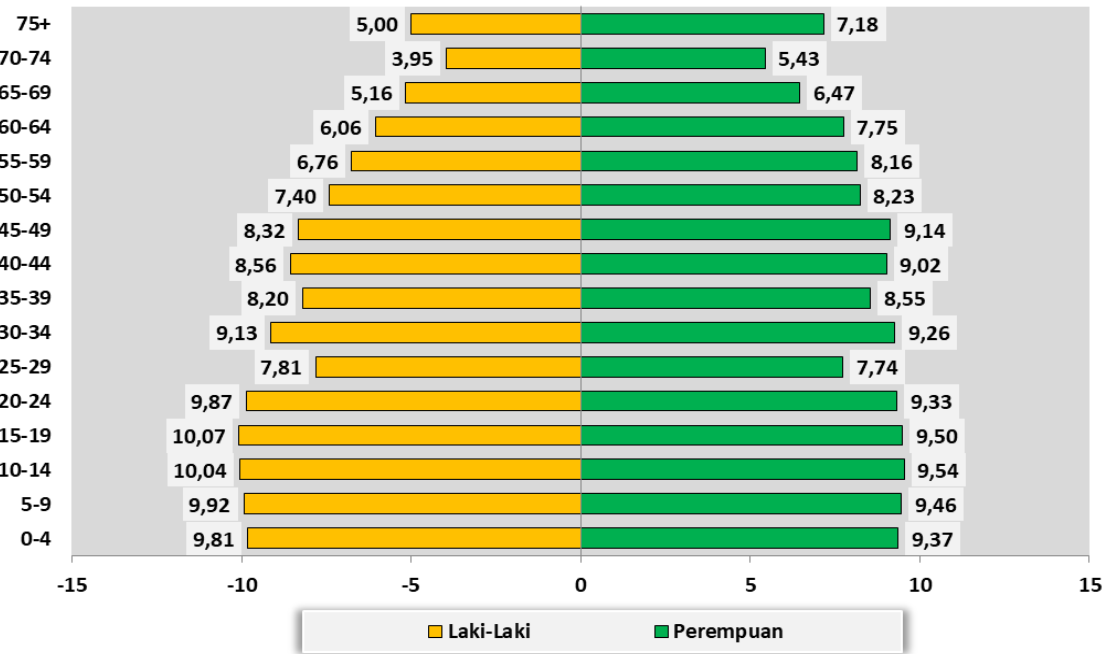
Gambar 2. 88 Piramida Penduduk di Kabupaten Sumbawa tahun 2035

Pada tahun 2040, komposisi umur penduduk di kabupaten Sumbawa proporsinya bergeser dan didominasi oleh penduduk pada umur 10-14 dengan proporsi laki-laki sebesar 10,10% dan perempuan sebesar 9,58%, diikuti oleh umur 5-9 tahun dan umur 0-4 tahun. Sedangkan untuk proporsi umur terkecil masih berada pada komposisi umur 70-74 Tahun dengan jenis kelamin laki-laki sebesar 3,52% dan jenis kelamin perempuan sebesar 4,24%, sebagaimana tergambar sebagai berikut.



Gambar 2. 89 Piramida Penduduk di Kabupaten Sumbawa tahun 2040

Pada tahun 2045, komposisi umur penduduk di kabupaten Sumbawa proporsinya masih didominasi oleh penduduk pada umur 10-14 dengan proporsi laki-laki sebesar 10,04% dan perempuan sebesar 9,54%, diikuti oleh umur 5-9 tahun dan umur 0-4 tahun. Sedangkan untuk proporsi umur terkecil masih berada pada komposisi umur 70-74 Tahun dengan jenis kelamin laki-laki sebesar 3,95% dan jenis kelamin perempuan sebesar 5,43%, sebagaimana tergambar sebagai berikut.



Gambar 2. 90 Piramida Penduduk di Kabupaten Sumbawa tahun 2045

Rasio Ketergantungan

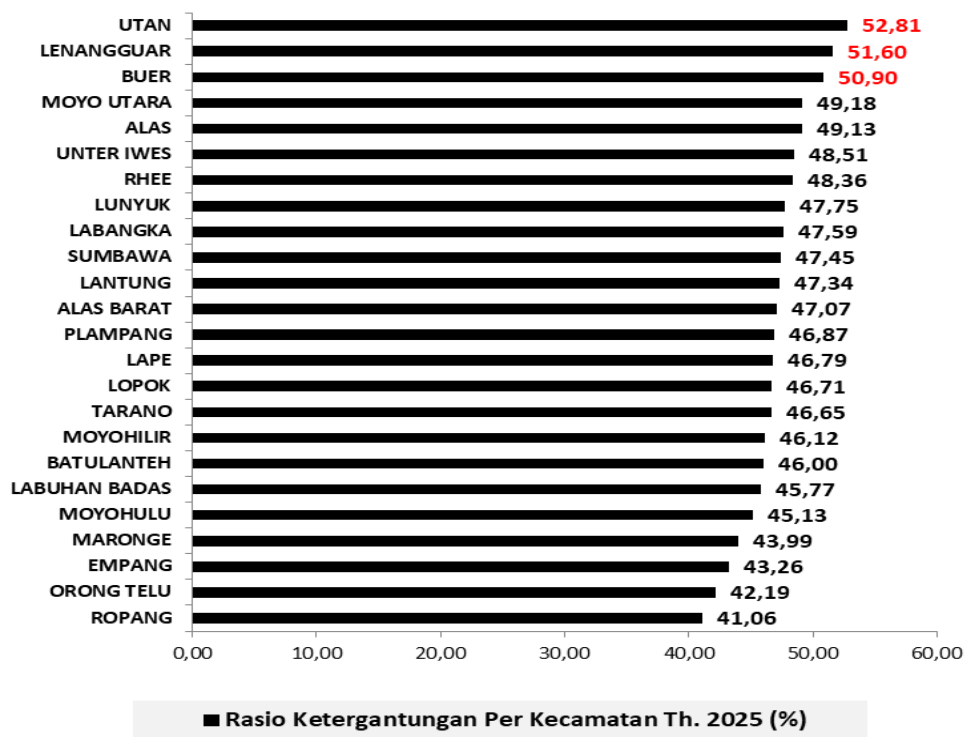
Rasio Ketergantungan merupakan perbandingan antara banyaknya penduduk berusia non produktif terhadap penduduk berusia produktif. Berdasarkan proyeksi penduduk di Kabupaten Sumbawa, menunjukkan bahwa proporsi penduduk di tahun 2025 didominasi oleh penduduk usia produktif (usia 15-64 Tahun) sebesar 369.119 jiwa atau 67,89% sementara yang non produktif (usia 0-14 tahun dan 65+ Tahun) sebesar 174.557 jiwa atau 32,11%, dengan rasio ketergantungan sebesar 47,29%. Demikian pula di tahun 2030 dengan rasio ketergantungan sebesar 48,91%. Akan tetapi di tahun 2035, 2040 dan 2045 rasio ketergantungannya kembali meningkat

masing-masing menjadi 52,48%, 53,32% dan 54,09%. Pada periode 2025-2030 penduduk didominasi oleh usia produktif, artinya setiap 100 penduduk usia produktif di tahun 2025 dan 2030 menanggung masing-masing sekitar 47 dan 49 penduduk usia non produktif, sementara pada periode 2030-2045 didominasi oleh usia non produktif, hal ini menandakan terjadinya penuaan struktur umur penduduk. Adapun Rasio Ketergantungan di masing-masing Kecamatan tersaji sebagai berikut.

Tabel 2. 21 Rasio Ketergantungan di Kab. Sumbawa Tahun 2025-2045

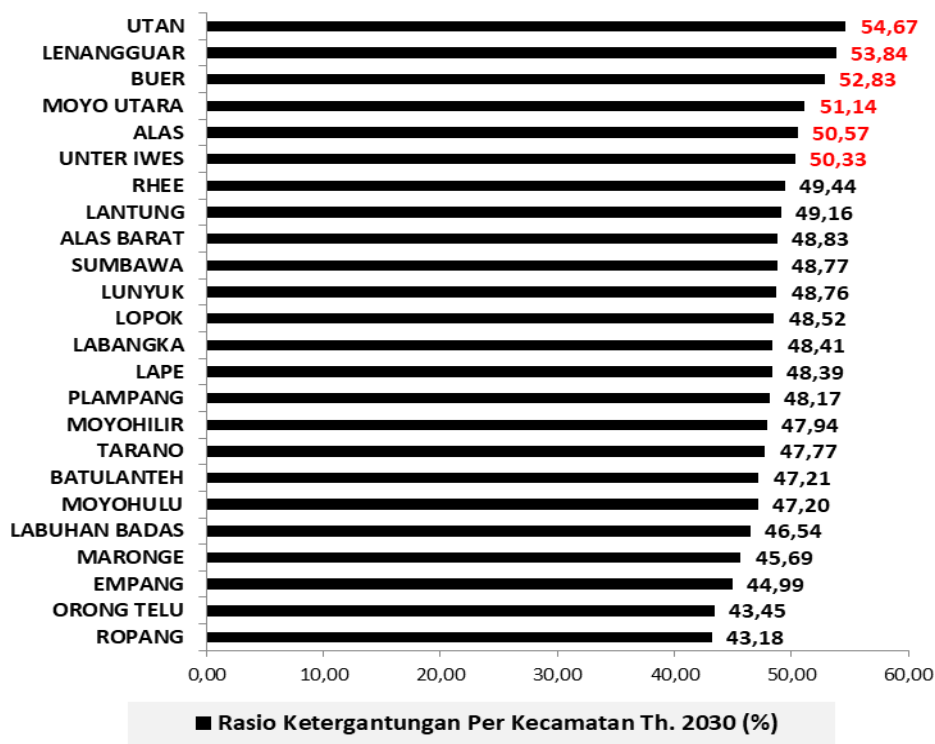
No	Kecamatan	Tahun 2020	Proyeksi Rasio Ketergantungan (Dependency Ratio)				
			2025	2030	2035	2040	2045
1	LUNYUK	45,87	47,75	48,76	52,48	52,77	53,12
2	ORONG TELU	40,44	42,19	43,45	46,90	47,91	48,55
3	ALAS	47,33	49,13	50,57	54,18	54,91	55,49
4	ALAS BARAT	45,42	47,07	48,83	52,64	53,74	54,73
5	BUER	48,78	50,90	52,83	56,90	58,10	59,18
6	UTAN	50,73	52,81	54,67	58,49	59,45	60,14
7	RHEE	46,25	48,36	49,44	52,98	53,43	53,76
8	BATULANTEH	43,94	46,00	47,21	51,47	52,44	53,57
9	SUMBAWA	45,80	47,45	48,77	52,29	52,95	53,66
10	LABUHAN BADAS	44,11	45,77	46,54	49,90	50,08	50,26
11	UNTER IWES	46,48	48,51	50,33	53,83	54,82	55,84
12	MOYOHILIR	44,46	46,12	47,94	51,60	52,90	53,94
13	MOYO UTARA	47,09	49,18	51,14	55,07	56,53	57,79
14	MOYOHULU	43,52	45,13	47,20	50,83	52,34	53,56
15	ROPANG	39,25	41,06	43,18	47,00	48,48	50,21
16	LENANGGUAR	50,02	51,60	53,84	57,58	58,81	60,12
17	LANTUNG	45,94	47,34	49,16	52,81	53,92	55,26
18	LAPE	45,28	46,79	48,39	52,47	53,46	54,56
19	LOPOK	44,93	46,71	48,52	52,51	53,80	54,99
20	PLAMPANG	45,18	46,87	48,17	51,70	52,27	52,72
21	LABANGKA	46,07	47,59	48,41	51,78	51,66	51,54
22	MARONGE	42,42	43,99	45,69	49,46	50,55	51,51
23	EMPANG	41,72	43,26	44,99	48,60	49,74	50,69
24	TARANO	45,05	46,65	47,77	51,35	51,74	52,07
Rasio Ketergantungan Kabupaten Sumbawa		45,25	47,01	48,57	52,28	53,20	54,05

Penyumbang menurunnya rasio ketergantungan per Kecamatan di tahun 2025 ditandai dengan meningkatnya umur usia produktif di 21 Kecamatan, sementara 3 Kecamatan lainnya seperti Utan, Lenangguar dan Buer didominasi oleh penduduk usia non produktif, sebagaimana tergambar sebagai berikut.



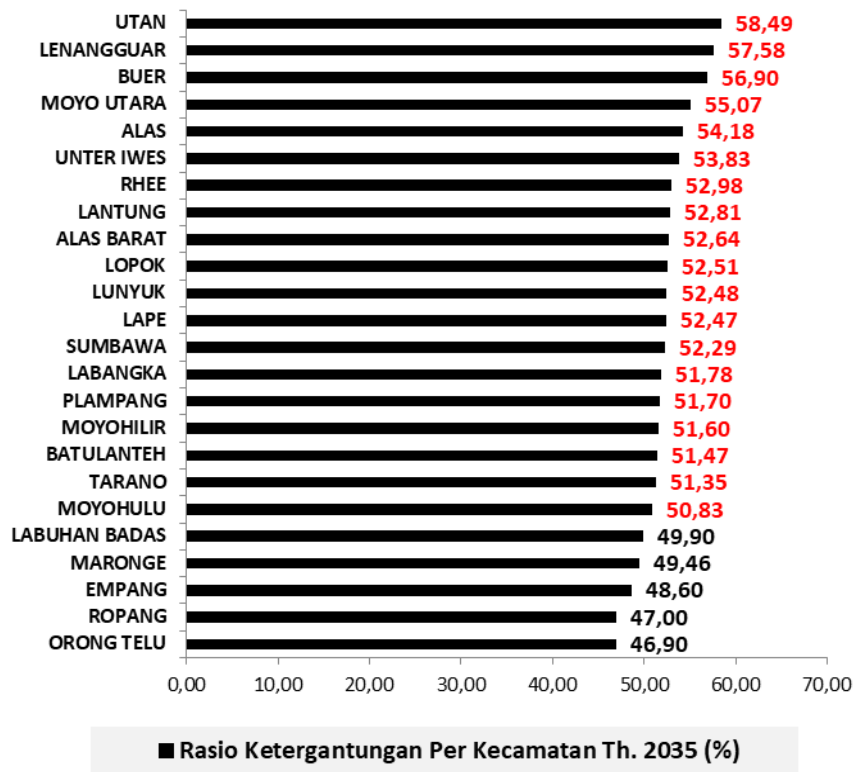
Gambar 2. 91 Rasio Ketergantungan per kecamatan di tahun 2025

Pada Tahun 2030, terjadi penurunan penduduk usia produktif dari 21 Kecamatan pada tahun 2025 menjadi 18 Kecamatan pada tahun 2030, hal ini terjakarena bertambahnya penduduk usia non produktif di 6 Kecamatan seperti Kecamatan Utan, Lenangguar, Buer, Moyo Utara, Alas dan Unter Iwes, sebagaimana tergambar sebagai berikut.



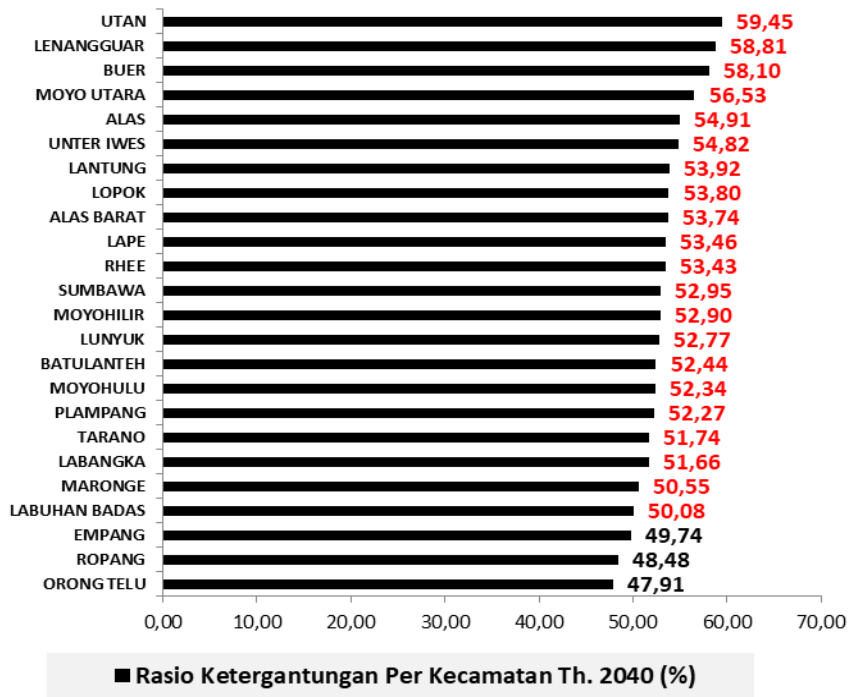
Gambar 2. 92 Rasio Ketergantungan per kecamatan di tahun 2030

Pada tahun 2035, dominasi penduduk usia produktif di Kecamatan kembali menurun yakni hanya terdapat di 5 Kecamatan (Labuhan Badas, Maronge, Empang, Ropang dan Orong Telu), sementara 19 Kecamatan lainnya dengan dominasi penduduk usia non produktif, sebagaimana tergambar sebagai berikut.



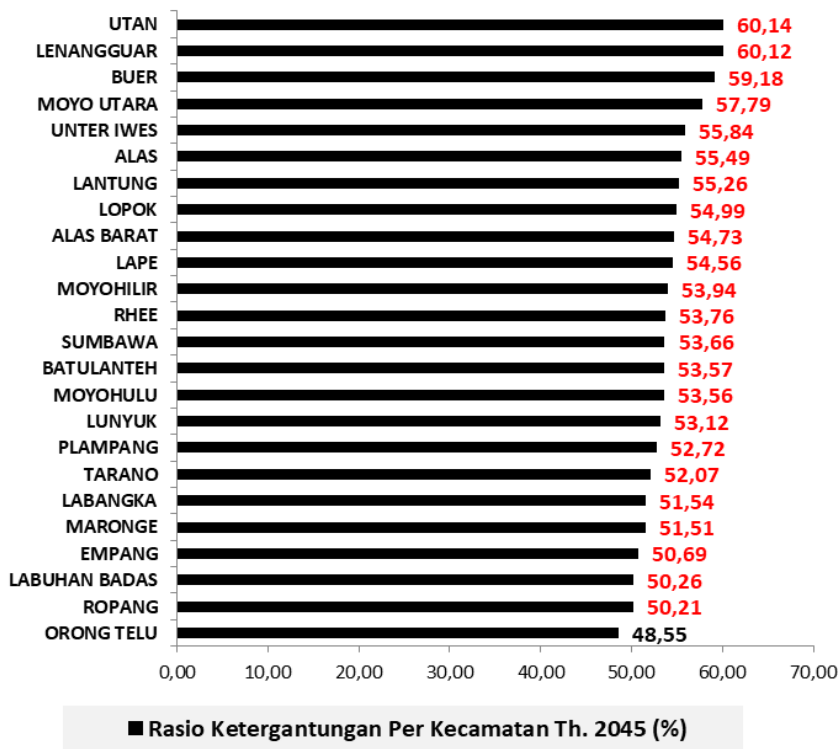
Gambar 2. 93 Rasio Ketergantungan per kecamatan di tahun 2035

Pada tahun 2040, kembali terjadi pengurangan jumlah kecamatan dengan jumlah penduduk usia produktif lebih besar yakni di Kecamatan Empang, Ropang dan Orong Telu, sementara 21 kecamatan lainnya dengan peningkatan rasio ketergantungannya diatas 50%, artinya usia penduduk non produktifnya lebih besar, sebagaimana tergambar sebagai berikut.



Gambar 2. 94 Rasio Ketergantungan per kecamatan di tahun 2040

Pada Tahun 2045 hanya Kecamatan Orong Telu dengan jumlah penduduk usia produktif lebih besar, sementara Kecamatan Lainnya lebih besar jumlah penduduk usia non produktifnya, sebagaimana tergambar sebagai berikut.



Gambar 2. 95 Rasio Ketergantungan per kecamatan di tahun 2045

2.6.2. **Kebutuhan Sarana dan Prasarana**
Kebutuhan Air Bersih

Kebutuhan air bersih seiring dengan pertumbuhan penduduk di Kabupaten Sumbawa periode 2025-2045, dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 2. 22 Proyeksi Kebutuhan Air Bersih di Kabupaten Sumbawa

No	Kecamatan	Tahun 2025		Tahun 2030		Tahun 2035		Tahun 2040		Tahun 2045	
		Jumlah Penduduk	Jumlah Pemenuhan Air Bersih (M3/Hari)	Jumlah Penduduk	Jumlah Pemenuhan Air Bersih (M3/Hari)	Jumlah Penduduk	Jumlah Pemenuhan Air Bersih (M3/Hari)	Jumlah Penduduk	Jumlah Pemenuhan Air Bersih (M3/Hari)	Jumlah Penduduk	Jumlah Pemenuhan Air Bersih (M3/Hari)
1	LUNYUK	23.526	1.882	25.017	2.001	26.382	2.111	27.623	2.210	28.675	2.294
2	ORONG TELU	5.766	461	6.144	492	6.493	519	6.841	547	7.102	568
3	ALAS	34.864	2.789	37.187	2.975	39.335	3.147	41.564	3.325	43.147	3.452
4	ALAS BARAT	28.240	2.259	29.703	2.376	30.982	2.479	31.393	2.511	32.589	2.607
5	BUER	18.218	1.457	19.336	1.547	20.352	1.628	21.189	1.695	21.995	1.760
6	UTAN	38.439	3.075	40.798	3.264	42.942	3.435	44.709	3.577	46.411	3.713

No	Kecamatan	Tahun 2025		Tahun 2030		Tahun 2035		Tahun 2040		Tahun 2045	
		Jumlah Penduduk	Jumlah Pemenuhan Air Bersih (M3/Hari)	Jumlah Penduduk	Jumlah Pemenuhan Air Bersih (M3/Hari)	Jumlah Penduduk	Jumlah Pemenuhan Air Bersih (M3/Hari)	Jumlah Penduduk	Jumlah Pemenuhan Air Bersih (M3/Hari)	Jumlah Penduduk	Jumlah Pemenuhan Air Bersih (M3/Hari)
7	RHEE	10.032	803	10.589	847	11.085	887	11.354	908	11.786	943
8	BATULANTEH	12.289	983	13.128	1.050	13.908	1.113	14.767	1.181	15.329	1.226
9	SUMBAWA	63.836	5.107	68.494	5.480	72.875	5.830	78.373	6.270	81.355	6.508
10	LABUHAN BADAS	37.628	3.010	40.025	3.202	42.220	3.378	44.244	3.540	45.929	3.674
11	UNTER IWES	25.495	2.040	26.973	2.158	28.299	2.264	29.182	2.335	30.293	2.423
12	MOYOHILIR	30.253	2.420	32.061	2.565	33.694	2.696	34.920	2.794	36.250	2.900
13	MOYO UTARA	12.431	994	13.178	1.054	13.854	1.108	14.373	1.150	14.921	1.194
14	MOYOHULU	26.371	2.110	28.007	2.241	29.497	2.360	30.769	2.462	31.940	2.555
15	ROPANG	6.541	523	6.953	556	7.331	586	7.669	614	7.961	637
16	LENANGGUAR	8.517	681	9.035	723	9.505	760	9.881	790	10.257	821
17	LANTUNG	4.410	353	4.627	370	4.815	385	4.844	388	5.029	402
18	LAPE	21.321	1.706	22.646	1.812	23.853	1.908	24.888	1.991	25.835	2.067
19	LOPOK	22.770	1.822	24.217	1.937	25.541	2.043	26.754	2.140	27.772	2.222

No	Kecamatan	Tahun 2025		Tahun 2030		Tahun 2035		Tahun 2040		Tahun 2045	
		Jumlah Penduduk	Jumlah Pemenuhan Air Bersih (M3/Hari)	Jumlah Penduduk	Jumlah Pemenuhan Air Bersih (M3/Hari)	Jumlah Penduduk	Jumlah Pemenuhan Air Bersih (M3/Hari)	Jumlah Penduduk	Jumlah Pemenuhan Air Bersih (M3/Hari)	Jumlah Penduduk	Jumlah Pemenuhan Air Bersih (M3/Hari)
20	PLAMPANG	36.884	2.951	39.171	3.134	41.254	3.300	43.028	3.442	44.666	3.573
21	LABANGKA	14.566	1.165	15.395	1.232	16.136	1.291	16.589	1.327	17.221	1.378
22	MARONGE	12.809	1.025	13.613	1.089	14.347	1.148	14.995	1.200	15.566	1.245
23	EMPANG	27.772	2.222	29.557	2.365	31.195	2.496	32.746	2.620	33.993	2.719
24	TARANO	20.698	1.656	21.942	1.755	23.067	1.845	23.930	1.914	24.841	1.987
	Kab. Sumbawa	543.676	43.494	577.796	46.224	608.962	48.717	636.625	50.930	660.863	52.869

Pada tahun 2025 seiring dengan pertumbuhan penduduk sejumlah 543.676 jiwa, maka dibutuhkan ketersediaan pemenuhan air bersih sebesar 43.494 m³/hari, demikian juga pada tahun 2030 dengan jumlah penduduk sebesar 577.796 dibutuhkan ketersediaan air bersih sebesar 46.224 m³/hari. Pada tahun 2035 diperkirakan pemenuhan air bersih sejumlah 48.717 m³/hari untuk melayani penduduk sejumlah 608.962 jiwa. Demikian pula ditahun 2040 dengan jumlah penduduk yang bertambah sebesar 636.625 jiwa dengan kebutuhan pemenuhan air bersih sejumlah 50.930 m³/hari, dan di tahun 2045 yang merupakan tahun terakhir perencanaan diperlukan pemenuhan air bersih 52.869 m³/hari untuk melayani 660.863 jiwa penduduk di Kabupaten Sumbawa.

Timbulan Sampah

Timbulan sampah bertujuan untuk mengidentifikasi model pengelolaan sampah di Kabupaten Sumbawa, sebagaimana analisis dilihat sebagai berikut.

Tabel 2. 23 Timbulan Sampah di Kabupaten Sumbawa

No	Kecamatan	Tahun 2025			Tahun 2030			Tahun 2035			Tahun 2040			Tahun 2045		
		Jumlah Penduduk	Volume (m3/hari)	Berat (Ton/hari)	Jumlah Penduduk	Volume (m3/hari)	Berat (Ton/hari)	Jumlah Penduduk	Volume (m3/hari)	Berat (Ton/hari)	Jumlah Penduduk	Volume (m3/hari)	Berat (Ton/hari)	Jumlah Penduduk	Volume (m3/hari)	Berat (Ton/hari)
1	LUNYUK	23.526	47,05	11,76	25.017	50,03	12,51	26.382	52,76	13,19	27.623	55,25	13,81	28.675	57,35	14,34
2	ORONG TELU	5.766	11,53	2,88	6.144	12,29	3,07	6.493	12,99	3,25	6.841	13,68	3,42	7.102	14,20	3,55
3	ALAS	34.864	69,73	17,43	37.187	74,37	18,59	39.335	78,67	19,67	41.564	83,13	20,78	43.147	86,29	21,57
4	ALAS BARAT	28.240	56,48	14,12	29.703	59,41	14,85	30.982	61,96	15,49	31.393	62,79	15,70	32.589	65,18	16,29
5	BUER	18.218	36,44	9,11	19.336	38,67	9,67	20.352	40,70	10,18	21.189	42,38	10,59	21.995	43,99	11,00
6	UTAN	38.439	76,88	19,22	40.798	81,60	20,40	42.942	85,88	21,47	44.709	89,42	22,35	46.411	92,82	23,21
7	RHEE	10.032	20,06	5,02	10.589	21,18	5,29	11.085	22,17	5,54	11.354	22,71	5,68	11.786	23,57	5,89
8	BATULANTEH	12.289	24,58	6,14	13.128	26,26	6,56	13.908	27,82	6,95	14.767	29,53	7,38	15.329	30,66	7,66
9	SUMBAWA	63.836	127,67	31,92	68.494	136,99	34,25	72.875	145,75	36,44	78.373	156,75	39,19	81.355	162,71	40,68
10	LABUHAN BADAS	37.628	75,26	18,81	40.025	80,05	20,01	42.220	84,44	21,11	44.244	88,49	22,12	45.929	91,86	22,96
11	UNTER IWES	25.495	50,99	12,75	26.973	53,95	13,49	28.299	56,60	14,15	29.182	58,36	14,59	30.293	60,59	15,15
12	MOYOHILIR	30.253	60,51	15,13	32.061	64,12	16,03	33.694	67,39	16,85	34.920	69,84	17,46	36.250	72,50	18,13
13	MOYO UTARA	12.431	24,86	6,22	13.178	26,36	6,59	13.854	27,71	6,93	14.373	28,75	7,19	14.921	29,84	7,46
14	MOYOHULU	26.371	52,74	13,19	28.007	56,01	14,00	29.497	58,99	14,75	30.769	61,54	15,38	31.940	63,88	15,97
15	ROPANG	6.541	13,08	3,27	6.953	13,91	3,48	7.331	14,66	3,67	7.669	15,34	3,83	7.961	15,92	3,98
16	LENANGGUAR	8.517	17,03	4,26	9.035	18,07	4,52	9.505	19,01	4,75	9.881	19,76	4,94	10.257	20,51	5,13
17	LANTUNG	4.410	8,82	2,21	4.627	9,25	2,31	4.815	9,63	2,41	4.844	9,69	2,42	5.029	10,06	2,51
18	LAPE	21.321	42,64	10,66	22.646	45,29	11,32	23.853	47,71	11,93	24.888	49,78	12,44	25.835	51,67	12,92
19	LOPOK	22.770	45,54	11,39	24.217	48,43	12,11	25.541	51,08	12,77	26.754	53,51	13,38	27.772	55,54	13,89

No	Kecamatan	Tahun 2025			Tahun 2030			Tahun 2035			Tahun 2040			Tahun 2045		
		Jumlah Penduduk	Volume (m3/hari)	Berat (Ton/hari)	Jumlah Penduduk	Volume (m3/hari)	Berat (Ton/hari)	Jumlah Penduduk	Volume (m3/hari)	Berat (Ton/hari)	Jumlah Penduduk	Volume (m3/hari)	Berat (Ton/hari)	Jumlah Penduduk	Volume (m3/hari)	Berat (Ton/hari)
20	PLAMPANG	36.884	73,77	18,44	39.171	78,34	19,59	41.254	82,51	20,63	43.028	86,06	21,51	44.666	89,33	22,33
	LABANGKA	14.566	29,13	7,28	15.395	30,79	7,70	16.136	32,27	8,07	16.589	33,18	8,29	17.221	34,44	8,61
22	MARONGE	12.809	25,62	6,40	13.613	27,23	6,81	14.347	28,69	7,17	14.995	29,99	7,50	15.566	31,13	7,78
23	EMPANG	27.772	55,54	13,89	29.557	59,11	14,78	31.195	62,39	15,60	32.746	65,49	16,37	33.993	67,99	17,00
24	TARANO	20.698	41,40	10,35	21.942	43,88	10,97	23.067	46,13	11,53	23.930	47,86	11,97	24.841	49,68	12,42
	Kab. Sumbawa	543.676	1.087,35	271,84	577.796	1.155,59	288,90	608.962	1.217,92	304,48	636.625	1.273,25	318,31	660.863	1.321,73	330,43

Berdasarkan proyeksi penduduk pada tahun 2025 sebesar 543.676 jiwa akan menghasilkan volume sampah sebesar 1.087,35 m³/hari dengan berat 271,84 ton/hari. Seiring dengan peningkatan jumlah penduduk di tahun 2030 sebesar 577.796 jiwa maka akan menghasilkan timbulan sampah dengan volume 1.155,59 m³/hari dan beratnya sebesar 288,90 ton per hari. Kondisi ini akan terus meningkat sejalan dengan meningkatnya pertumbuhan penduduk tersebut, seperti di tahun 2035 dengan jumlah penduduk sebesar 608.962 jiwa akan menghasilkan timbulan sampah sebesar 1.217,92 m³/hari dengan berat 304,48 ton/hari. Di Tahun 2040 dengan jumlah penduduk 636.625 jiwa akan menghasilkan volume timbulan sampah sebesar 1.273.25 m³/hari dengan berat 318,31 ton/hari. Demikian pula di tahun 2045 dengan jumlah penduduk sebesar 660.863 jiwa akan menghasilkan volume timbulan sampah sebesar 1.321,73 m³/hari dengan berat 330,43 ton/hari.

Adapun timbulan sampah dan volume sampah tertinggi berada di Kecamatan Sumbawa, diikuti oleh Kecamatan Utan, Labuhan Badas, Plampang dan Moyo Hilir, sementara Kecamatan dengan timbulan sampah terendah yakni di Kecamatan Lantung. Hal ini seiring dengan pertumbuhan penduduk di masing-masing kecamatan tersebut.

2.7. Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah

Rencana Struktur Ruang

Rencana struktur ruang Kabupaten Sumbawa disusun sebagai perwujudan kebijakan dan strategi penataan ruang. Rencana struktur ruang Kabupaten Sumbawa terikat pada keharusan untuk mengikuti struktur ruang wilayah yang berada pada hirarki di atasnya. Rencana struktur ruang juga harus sesuai dengan kebutuhan pusat-pusat pelayanan yang diperlukan untuk mendukung fungsi kawasan-kawasan yang ada di dalam kota untuk mendukung fungsi wilayah secara keseluruhan.

1. Rencana Pusat Kegiatan

Sistem pusat kegiatan di Kabupaten Sumbawa dikembangkan secara hirarki dan dalam bentuk pusat kegiatan. Konsep yang digunakan ialah membentuk hirarki pelayanan dengan cakupan dan dominasi fungsi tertentu dalam wilayah kabupaten dan simpul pelayanan sosial ekonomi masyarakat di wilayah kabupaten. Pengembangan sistem perkotaan/permukiman di wilayah Kabupaten Sumbawa mempertimbangkan pemerataan pembangunan di setiap wilayah dengan mengembangkan peran dan fungsi masing-masing pusat kegiatan, mengembangkan sistem jaringan prasarana skala kabupaten yang mendukung struktur yang direncanakan dan meningkatkan aksesibilitas antar pusat-pusat kegiatan yang berhirarki satu sama lain untuk mengurangi ketergantungan kepada wilayah lain, mengintegrasikan fungsi perkotaan dan perdesaan yang ada di wilayah kabupaten, dan mengantisipasi perkembangan kegiatan di masa mendatang.

Rencana Penetapan pusat kegiatan meliputi :

- a. PKW yaitu Sumbawa Besar sebagai Ibukota Kabupaten;
- b. PKL meliputi Alas, Lenangguar, Empang, Labangka, dan Lunyuk;
- c. PKLp meliputi Utan, Langam, dan Semamung;
- d. PPK meliputi Labuhan Mapin, Pernang, Semongkat, Lape, Maronge, Plampang, dan Labuhan Aji; dan
- e. PPL meliputi Gontar, Juru Mapin, Batu Rotok, Labuhan Kuris, Teluk Santong, Labuhan Jambu, Labuhan Aji Pulau Moyo, Bajo Medang, Sebeok, Rhee Luar, Ropang, Lantung Ai Mual, Leseng, Labuhan Padi.

2. Rencana Sistem Jaringan Prasarana Utama

Rencana pengembangan sistem jaringan prasarana utama meliputi:

- a. Sistem transportasi darat, sistem ini terdiri dari, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan yang meliputi jaringan jalan, jaringan prasarana lalu lintas dan layanan lalu lintas dan jaringan transportasi penyeberangan.

- b. Sistem transportasi laut terdiri dari, tatanan kepelabuhanan dan alur pelayaran.
- c. Sistem transportasi udara yang terdiri dari tatanan kebandarudaraan dan ruang udara untuk penerbangan.

3. Sistem Jaringan Prsarana lainnya

Sistem ini terdiri dari 4 sistem yaitu :

a. sistem jaringan energi dan kelistrikan;

Yang masuk di dalam sistem jaringan nenergi dan kelistrikan adalah :

- gardu induk di Labuhan Badas;
- gardu pembagi di Alas, Sumbawa Besar, Empang, dan Labangka, Boak;
- Jaringan transmisi tegangan tinggi di SUTT Badas - Labuhan, SUTT Maronge - Labuhan, SUTT Brang Beh - Labuhan dan SUTT Labuhan - Tano; dan
- jaringan distribusi tersebar diseluruh wilayah Kabupaten Sumbawa.

b. sistem jaringan sumber daya air;

Rencana pengembangan sistem jaringan sumber daya air terdiri atas :

- wilayah sungai (WS) meliputi WS Sumbawa yang merupakan WS strategis Nasional dengan Daerah Aliran sungai (DAS)
- cekungan air tanah meliputi CAT Sumbawa Besar yang merupakan CAT dalam Kabupaten/Kota dan CAT Empang dengan yang merupakan CAT lintas Kabupaten/Kota
- jaringan irigasi meliputi
 - a. Daerah Irigasi kewenangan pemerintah pusat yang meliputi DI Bendungan Batu Bulan dan DI Mamak;
 - b. Daerah Irigasi Kewenangan Propinsi yang meliputi DI Buer Komplek, DI Beringin Sila, DI Embung Gapit, DI Maronge/Tiu Kulit, DI Semangi, DI Pelara, DI Pongal/ Kakeang dan DI Pungkit;
 - c. Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten yang meliputi DI Aji, DI Aik Putik, DI Brang Kolong, DI Embung

Mengkoang, DI Embung Muer, DI Embung Selante, DI Embung Jompong, DI Embung Kaswangi, DI Embung lamenta, DI Embung Olat Rawa, DI Embung penyaring, DI Embung Sepayung Dalam , DI Embung Serading, DI Juru Mapin, DI Kuang Rako, DI Lekong, DI Merenteh, DI Moyo, DI Paria, DI Pemasar, DI Pringgani, DI Pungka, DI sejari, DI Tarusan, DI Tiwu Bulu, dan DI Usar;

- d. Rehabilitasi, pemeliharaan dan peningkatan jaringan irigasi yang ada;
 - e. Pendayagunaan potensi jaringan sumber daya air untuk mendukung ketersediaan air baku untuk jaringan irigasi berupa danau/waduk yaitu waduk mamak, waduk tiu kulit, waduk batu bulan, waduk gapit, dan rencana pembangunan waduk baru (Waduk Beringin Sila dan waduk labangka).
- jaringan air baku untuk air bersih. sebagian besar dari air tanah dalam dan sungai/bendung melalui sistem perpipaan maupun non perpipaan, meliputi:
 - a. Sumber air bersih yang ada, di Perkotaan Sumbawa Besar dari air permukaan Semongkat, Kecamatan Empang dari mata air Ai Buas (Jotang), Kecamatan Alas dari air permukaan Merenteh, Kecamatan Alas Barat dari Mata Air Rimas (Mapin) dan direncanakan sumber air bersih Di Kecamatan Ropang dari air Permukaan Ai Nunang;
 - b. Unit instalasi pengolahan air minum yang ada di Kecamatan Alas, Kecamatan Utan, Perkotaan Sumbawa, Kecamatan Labangka, Kecamatan Batu Lanteh dan direncanakan unit instalasi pengolahan air di Kecamatan Ropang dan Lantung.

c. sistem jaringan telekomunikasi meliputi :

- pengembangan prasarana telekomunikasi meliputi telepon residen, telepon umum dengan penggunaan serat optik dan jaringan mikro digital di Kecamatan Sumbawa Besar;
- pengembangan teresterial serta Stasiun Transmisi Otomatis di setiap kecamatan;
- penyediaan tower BTS (*Base Transceiver Station*) bersama untuk menjangkau ke pelosok perdesaan sebagai prasarana pendukung; dan
- rincian rencana pengembangan telekomunikasi.

d. sistem prasarana pengelolaan lingkungan.

- sistem jaringan persampahan;
 - a. Tempat Penampungan Sementara (TPS) berlokasi di setiap wilayah kecamatan dan beberapa sub kegiatan kawasan perkotaan;
 - b. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dengan sistem sanitary landfill berlokasi di wilayah Kecamatan Sumbawa, Kecamatan Empang, Kecamatan Labangka, Kecamatan Lenangguar, Kecamatan Alas, Kecamatan Lape dan Kecamatan Plampang; dan
 - c. Upaya pemanfaatan sampah dilakukan dengan Prinsip 3R yaitu *ReDuce*, *ReUse* dan *ReCycle*.
- sistem jaringan air minum dilakukan dalam rangka peningkatan cakupan pelayanan, peningkatan kualitas air, dan efisiensi pemanfaatan air minum dengan memperhatikan konservasi sumber-sumber air dan keanekaragaman sumber air baku, meliputi:
 - a. sistem jaringan prasarana air minum perkotaan Sumbawa Besar dengan sumber air baku Puncak Ngengas;
 - b. sistem jaringan prasarana air minum perdesaan dengan sumber air baku sungai dan air tanah; dan
 - c. rencana pengembangan sistem jaringan air minum diarahkan pada kawasan Sumbawa Besar.
- sistem jaringan air limbah meliputi sistem on-site dan sistem off-site terdiri atas:
 - a. sistem on-site, meliputi: tangki septik dan sumur resapan (secara individual dan komunal) serta mandi, cuci, kakus (MCK) umum;
 - b. sistem jaringan air limbah on site sistem dikembangkan di luar kota Sumbawa Besar; dan
 - c. sistem jaringan air limbah off site sistem dikembangkan di Sumbawa Besar.

Rencana Pola Ruang

Rencana pola ruang didasar pada arahan perencanaan meliputi :

- 1. Rencana pengembangan kawasan lindung dengan luas paling sedikit 228.722,03 Ha meliputi**

a. kawasan hutan lindung meliputi

Kawasan hutan lindung persebarannya terletak pada Kecamatan Empang, Plampang, Tarano, Ropang, Lenangguar, Maronge, Labangka, Orong Telu, Batu Lanteh, Alas, Buer, Utan, Rhee, Moyo Hulu, Lape, Lopok dan Labuhan Badas.

b. kawasan yang memberikan perlindungan bagi kawasan bawahannya meliputi

Kawasan resapan air yang terletak pada Kecamatan Utan, Rhee, Batu Lanteh, Ropang, Lenangguar, Lunyuk, Orong Telu, Lape, Lopok, Moyo Hulu, Maronge, Labuhan Badas, Moyo Hilir, Tarano, Empang, Labangka, Plampang, Unter Iwes, Buer, Alas dan Alas Barat.

c. kawasan perlindungan setempat meliputi

- kawasan sempadan sungai dilakukan pengelolaan sungai bersama dari Hulu sampai Hilir sungai untuk memanfaatkan potensi sungai maupun melindungi sungai dari kegiatan yang dapat mengganggu atau merusak bantaran, tanggul sungai, kualitas air sungai, dasar sungai, mengamankan aliran sungai dan mencegah terjadinya bahaya banjir terutama pada Daerah aliran sungai-sungai besar yaitu DAS Ampang, DAS Bako, DAS Beh, DAS Moyo Hulu dan DAS Pulau Moyo;
- kawasan sekitar danau atau waduk diarahkan ke seluruh kawasan sekitar danau dan waduk yang tersebar di Kabupaten Sumbawa meliputi bendungan Batu Bulan di Kecamatan Moyo Hulu, bendungan Mamak di Kecamatan Lopok, bendungan Tiu Kulit di Kecamatan Plampang, bendungan Gapit di Kecamatan Empang, dan bendungan Plara di Kecamatan Lunyuk;
- kawasan mata air di wilayah Kabupaten Sumbawa tersebar di kecamatan, dan dimanfaatkan oleh masyarakat untuk keperluan pemenuhan air minum dan irigasi;
- kawasan sempadan pantai ditetapkan di Kabupaten Sumbawa berlokasi disemua wilayah kecamatan kecuali kecamatan Batu

Lanteh, Orong Telu, Lenangguar, Moyo Hulu, Unter Iwes, dan Lantung;

- Kawasan ekosistem mangrove ditetapkan di wilayah Pulau Rakit, Pulau Ngali, Pulau Liang, Pulau Medang, pesisir Teluk Saleh, Pulau Panjang, pesisir utara Sumbawa dan pesisir selatan Sumbawa; dan
- Kawasan Ruang Terbuka Hijau seluas 30 % (tiga puluh per seratus) dari luas perkotaan Kabupaten Sumbawa.

d. kawasan suaka alam, pelestarian alam, taman buru, perlindungan esensial ekosistem dan cagar budaya meliputi

- Cagar Alam meliputi Cagar Alam (CA) Pulau Panjang dsk dengan luas 1.641,25 Ha;
- Taman Wisata Alam (TWA) meliputi TWA Laut Pulau Moyo dengan luas 6.000 Ha, TWA Semongkat dengan luas 100,50 Ha;
- Kawasan Taman Buru (TB) Pulau Moyo dengan luas 22.537,90 Ha;
- Kawasan Suaka Margasatwa (SM) Lunyuk seluas 3.000 Ha;
- Kawasan perlindungan esensial ekosistem meliputi Pulau Rakit, Pulau Ngali, Pulau Medang dan wilayah pesisir pantai selatan yang memiliki keanekaragaman hayati yang dilindungi seluas 24.714,26 Ha; dan
- Kawasan cagar budaya seluas 4.874,5 Ha

e. kawasan lindung geologi meliputi

- kawasan cagar alam geologi yang berupa keunikan bentang alam yaitu kawasan Puncak Ngengas Selalu Legini;
- kawasan rawan bencana geologi yaitu:
 - a. kawasan rawan bencana banjir meliputi Kecamatan Sumbawa, Kecamatan Moyo Hilir, Kecamatan Moyo Utara Kecamatan Lunyuk, Kecamatan Rhee, Kecamatan Alas, Kecamatan Buer, Kecamatan Labuhan Badas, Kecamatan Unter Iwes, Kecamatan Plampang, Kecamatan Ropang, Kecamatan Lape, Kecamatan Lopok, dan Kecamatan Empang;

- b. kawasan rawan bencana longsor meliputi Kecamatan Batu Lanteh, Kecamatan Orong Telu, Kecamatan Ropang, Kecamatan Lenangguar, Kecamatan Lantung, Kecamatan Alas, Kecamatan Lunyuk, Kecamatan Labangka, dan Kecamatan Empang;
- c. kawasan rawan bencana tsunami yang berlokasi di hampir sepanjang pantai selatan Sumbawa dan pantai utara Sumbawa;
- d. kawasan rawan bencana gempa bumi yang berlokasi di hampir diseluruh wilayah Kabupaten mengingat lokasi berada pada daerah patahan dan berbatasan dengan Samudra Hindia

2. Rencana pengembangan kawasan budidaya dengan luas paling banyak 435.675,97 Ha

Rencana Pengembangan Kawasan Budidaya terdiri atas

a. kawasan peruntukan hutan produksi terdiri atas

- kawasan hutan produksi terbatas meliputi kawasan Pelaning (RTK 5), Riwo (RTK 43), Rentung Sabokas (RTK 46), Selalu Legini (RTK 59), Klongkang P. Ngengas (RTK 60), Batulanteh (RTK 61), Dodo Jaranpusang (RTK 64), Ampang Kampaja (RTK 70), dan Santong Labubaron (RTK 81), dengan luasan 135.491,45 Ha.
- kawasan hutan produksi tetap meliputi meliputi kawasan Ngali (RTK 12), Serading (RTK 36), Pusuk Pao (RTK 38), Buinsoway (RTK 57), Selalu Legini (RTK 59), Klongkang P. Ngengas (RTK 60), Batulanteh (RTK 61), Kerawak Utuk (RTK 62), Dodo Jaranpusang (RTK 64), Ampang Kampaja (RTK 70), Olat Lake/Olat Cabe (RTK 78), Gili Ngara/Olat Puna (RTK 79), P. Rai Rakit Kwangko (RTK 80), dan Samoko Lito (RTK 89), dengan luasan 53.691,88 Ha.
- kawasan hutan produksi konversi meliputi kawasan Pelaning (RTK 5), Rentung Sabokas (RTK 46), Batulanteh (RTK 61), Dodo Jaranpusang (RTK 64), Ampang Kampaja (RTK 70), dan Santong Labubaron (RTK 81), dengan luasan 8.433 Ha.

b. kawasan peruntukan pertanian

- kawasan pertanian tanaman pangan diarahkan untuk :
 - pengembangan tanaman pangan seperti padi dan palawija;
 - pengembangan tanaman pangan dilengkapi dengan sistem irigasi teknis, beririgasi setengah teknis, beririgasi sederhana, dan tadah hujan; dan
 - perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan.
- kawasan pertanian hortikultura diarahkan untuk :
 - pengembangan tanaman sayur-sayuran, buah-buahan serta biofarmaka dan tanaman hias;
 - pengembangan tanaman dengan sistem pergiliran, tumpang sari dan sebagainya;
 - pemanfaatan pertanian lahan kering yang tersebar diseluruh wilayah kecamatan; dan
 - pengembangan kawasan agropolitan khususnya pada pusat sentra produksi pertanian.
- kawasan perkebunan diarahkan untuk :
 - pengembangan komoditi unggulan kopi, kelapa, pinang, kapuk, jambu mete, kemiri, wijen dan jarak, kelapa, dan kakao;
 - tanaman unggulan kelapa, jambu mete di Kecamatan Sumbawa, Kecamatan Utan, Kecamatan Rhee dan Kecamatan Alas Barat;
 - tanaman unggulan kopi di Kecamatan Alas, Kecamatan Buer, Kecamatan Utan, Kecamatan Rhee, Kecamatan Batu Lanteh, dan Kecamatan Ropang;
 - tanaman pinang di Kecamatan Utan, Kecamatan Rhee, Kecamatan Batu Lanteh, Kecamatan Lape, Kecamatan Lopok, Kecamatan Ropang dan Kecamatan Lunyuk;
 - peningkatan kawasan kebun campur melalui pola pemanfaatan dengan penerapan sistem keragaman produk, sistem pergiliran di wilayah bagian timur Sumbawa dan bagian selatan Sumbawa;
 - pengembangan perkebunan dilakukan dengan mengembangkan industri pengolahan hasil komoditi, yang

berlokasi di Kecamatan Labangka, Kecamatan Batu Lanteh, Kecamatan Ropang, Kecamatan Lunyuk dan Kecamatan Labuhan Badas; dan

- pengembangan fasilitas sentra produksi dan pemasaran pada pusat kegiatan ekonomi, yang berlokasi di Kecamatan Labuhan Badas, Kecamatan Labangka, Kecamatan Lenangguar dan Kecamatan Lunyuk.
- kawasan peternakan diarahkan untuk :
 - pengembangan sentra produksi peternakan atau kawasan ternak unggulan di Kecamatan Empang, Kecamatan Moyo Utara, Kecamatan Lopok, Kecamatan Utan dan Kecamatan Plampang;
 - pola pemeliharaan secara intensif dan semi intensif di wilayah sekitar kota dan kawasan barat dan kawasan timur Kabupaten Sumbawa; dan
 - pola pemeliharaan secara ekstensif dan pola kawasan dengan sistem lar di wilayah Kabupaten Sumbawa.

c. kawasan peruntukan perikanan, wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil meliputi :

- kawasan peruntukan perikanan tangkap meliputi :
 - kawasan peruntukan perikanan tangkap diarahkan untuk :
 - ✓ pengembangan perikanan tangkap Sumbawa Bagian Timur meliputi Kecamatan Tarano, Kecamatan Plampang, Kecamatan Maronge dan Kecamatan Lape dengan luasan kurang lebih 137.570 Ha;
 - ✓ pengembangan perikanan tangkap Sumbawa Bagian Tengah meliputi Kecamatan Labuhan Badas, Kecamatan Sumbawa, Kecamatan Rhee, Kecamatan Moyo Utara dan Kecamatan Moyo Hilir dengan luasan kurang lebih 49.715 Ha ;
 - ✓ pengembangan perikanan tangkap Sumbawa Bagian Barat meliputi Kecamatan Alas Barat, Kecamatan Alas, Kecamatan Buer, dan Kecamatan Utan dengan luasan kurang lebih 77.375 Ha; dan

- ✓ pengembangan perikanan tangkap Sumbawa Bagian Selatan meliputi Kecamatan Labangka dan Kecamatan Lunyuk dengan luasan kurang lebih 96.800 Ha.
- kawasan peruntukan perikanan budidaya diarahkan untuk :
 - ✓ Kawasan Minapolitan Sumbawa Bagian Timur meliputi minapolitan Rumput Laut di Labuhan Aji Kecamatan Tarano dengan luasan kurang lebih 2.950 Ha, Labuhan Sangoro Kecamatan Maronge dengan luasan kurang lebih 1.343 Ha, Labuhan Kuris Kecamatan Lape dengan luasan kurang lebih 2.700 Ha. Minapolitan Budidaya Udang di Labuhan Bontong Kecamatan Tarano dengan luasan kurang lebih 500 Ha, Sepayung dan Teluk Santong Kecamatan Plampang dengan luasan kurang lebih 1.140 Ha, Labuhan Sangoro Kecamatan Maronge dengan luasan kurang lebih 1.175 Ha, Labuhan Kuris Kecamatan Lape dengan luasan kurang lebih 550 Ha;
 - ✓ Kawasan Minapolitan Sumbawa Bagian Tengah meliputi Minapolitan Rumput Laut di perairan Tanjung Bele Kecamatan Moyo Hilir dengan luasan kurang lebih 2.375 Ha dan Pulau Medang Kecamatan Labuhan Badas dengan luasan kurang lebih 1.550 Ha. Pengembangan minapolitan Udang terletak di kawasan tambak Penyaring Kecamatan Moyo Utara dengan luasan kurang lebih 625 Ha;
 - ✓ Kawasan Minapolitan Sumbawa Bagian Barat meliputi minapolitan Rumput Laut di perairan Labuhan Mapin Kecamatan Alas Barat dengan luasan kurang lebih 1.325 Ha dan minapolitan udang di Stowe Brang Kecamatan Utan dengan luasan kurang lebih 250 Ha;
 - ✓ Kawasan Pengembangan Budidaya Ikan Air Tawar di Pamulung Kecamatan Labuhan Badas dengan luasan kurang lebih 15,8 Ha dan di Desa Merenteh Kecamatan Alas dengan luasan kurang lebih 22,8 Ha;
 - ✓ Kawasan Pengembangan Budidaya di perairan umum di Bendungan Batu Bulan Kecamatan Moyo Hulu dengan luasan kurang lebih 183 Ha, di Bendungan Mamak Kecamatan Lopok dengan luasan kurang lebih 60 Ha, di

Bendungan Tiu Kulit Kecamatan Maronge dengan luasan kurang lebih 26 Ha dan di Bendungan Gapit Kecamatan Empang dengan luasan kurang lebih 30 Ha;

- ✓ Kawasan Pengembangan Budidaya Kerapu, kakap dan lainnya di sekitar Pulau Rakit Kecamatan Tarano dengan luasan kurang lebih 250 Ha, di sekitar pulau Tengar, Ketapang, Dompoo dan perairan Labuhan Sangoro dengan luasan lebih kurang 140 Ha, di sekitar perairan pulau Meriam, Pulau Lipan dan perairan Teluk Santong Kecamatan Plampang dengan luasan kurang lebih 200 Ha, di sekitar pulau Dagar Besar, pulau Ngali dan pulau Liang Kecamatan Lape dengan luasan kurang lebih 250 Ha, di sekitar perairan Prajak Kecamatan Moyo Hilir dengan luasan kurang lebih 50 Ha, di sekitar perairan Kecamatan Alas Barat dengan luasan kurang lebih 100 Ha, di sekitar perairan Kecamatan Alas dan Buer dengan luasan kurang lebih 150 Ha, kawasan sekitar Kecamatan Utan dan Kecamatan Rhee dengan luasan kurang lebih 50 Ha; dan
- ✓ Kawasan pengembangan Budidaya Mutiara di sekitar Pulau Rakit Kecamatan tarano dengan luasan kurang lebih 500 Ha, di sekitar perairan pulau Meriam, Pulau Lipan dan perairan Teluk Santong Kecamatan Plampang dengan luasan kurang lebih 700 Ha, di sekitar pulau Dagar Besar, pulau Ngali dan Pulau Liang Kecamatan Lape dengan luasan kurang lebih 500 Ha, di sekitar perairan Prajak Kecamatan Moyo Hilir dengan luasan kurang lebih 500 Ha, di sekitar perairan Limung Kecamatan Moyo Utara dengan luasan kurang lebih 300 Ha, di sekitar perairan Brang Kua Kecamatan Labuhan Badas dengan luasan kurang lebih 500 Ha, di sekitar perairan Kecamatan Alas Barat dengan luasan kurang lebih 1.000 Ha, di sekitar perairan Kecamatan Alas dan Buer dengan luasan kurang lebih 200 Ha, kawasan sekitar Kecamatan Utan dan Kecamatan Rhee dengan luasan kurang lebih 1.200 Ha, kawasan sekitar Kecamatan Labangka dengan luasan kurang lebih 300 Ha.

- kawasan pengolahan ikan diarahkan untuk :
 - ✓ Pengembangan Kawasan Wisata Kuliner Pantai Goa terdapat di Kecamatan Labuhan Badas dengan luasan kurang lebih 2 Ha;
 - ✓ Pengembangan kawasan pengolahan terasi udang di Desa Labuhan Bontong Kecamatan Tarano dengan luasan kurang lebih 2 Ha;
 - ✓ Pengembangan kawasan pengolahan masin di Desa Jotang Kecamatan Empang dengan luasan kurang lebih 2 Ha;
 - ✓ Pengembangan kawasan pengolahan kerupuk ikan di desa Empang atas Kecamatan Empang dengan luasan kurang lebih 1 Ha;
 - ✓ Pengembangan kawasan pengolahan rumput laut di Desa Ngeru Kecamatan Moyo Hilir dengan luasan kurang lebih 1 Ha;
 - ✓ pengembangan kawasan kerajinan kulit kerang mutiara di Desa Pulau Kaung Kecamatan Buer dengan luasan kurang lebih 1 Ha; dan
 - ✓ pengembangan pengolahan ikan pada kawasan Pusat Pelelangan Ikan (PPI) di Teluk Santong, Tanjung Pengamas, Labuhan Mapin, Pulau Bungin, Pulau Kaung, Labuhan Jambu, Labuhan Buak, Prajak, Labuhan Terata, Labuhan Sengoro, Pidang, dan Lunyuk dengan luasan kurang lebih 11,50 Ha.
- kawasan pengembangan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di luar kawasan lindung diarahkan untuk :
 - ✓ Pulau-pulau berpenghuni diprioritaskan untuk pengembangan budidaya laut dan pariwisata; dan
 - ✓ Pulau-pulau tidak berpenghuni diprioritaskan untuk pengembangan kawasan budidaya laut, pariwisata dan kawasan konservasi.

d. kawasan peruntukan pertambangan meliputi meliputi mineral logam, mineral bukan logam dan batuan.

Kawasan ini tersebar di kecamatan :

- Sumbawa Bagian Selatan yaitu Kecamatan Lunyuk, Kecamatan Ropang, Kecamatan Lantung, Kecamatan Orong Telu, Kecamatan Lenangguar, Kecamatan Batu Lanteh dan Kecamatan Moyo Hulu;
- Sumbawa Bagian Utara yaitu Kecamatan Sumbawa, Kecamatan Unter Iwes, Kecamatan Moyo Hilir dan Kecamatan Moyo Utara;
- Sumbawa Bagian Timur yaitu Kecamatan Lopok, Kecamatan Lape, Kecamatan Maronge, Kecamatan Plampang, Kecamatan Empang, Kecamatan Labangka, dan Kecamatan Tarano.

e. **kawasan peruntukan industri di wilayah kabupaten sumbawa**

dikembangkan berdasarkan pada potensi yang ada, kawasan agropolitan dengan industri yang berbasis pertanian dan perkebunan. Yang diarahkan pada :

- pengembangan kawasan sentra industri kecil tersebar di seluruh kawasan perdesaan dan perkotaan Kabupaten Sumbawa;
- pengembangan agroindustri terutama diarahkan pada Sumbawa Besar, Moyo Utara, Unteriwis, Labuhan Badas, Alas-Utan, Lopok, Empang, Labangka dan Tarano;
- pengembangan industri pengolahan hasil kelautan dan perikanan diarahkan pada Kecamatan Empang, Tarano, Moyo Hilir, Moyo Utara, Lunyuk, Labuhan Badas dan Buer;
- pengembangan industri pengolahan dan pergudangan diarahkan di Kecamatan Labuhan Badas, Unter Iwes, Lape, Lopok, Labangka, dan Alas;
- kegiatan industri penghasil limbah wajib dilengkapi dengan instalasi pengolahan limbah; dan
- penetapan skenario ekonomi wilayah yang menunjukkan kemudahan dalam berinvestasi dan penjelasan tentang kepastian hukum yang menunjang investasi.

f. **kawasan peruntukan pariwisata di wilayah kabupaten sumbawa diarahkan pada :**

- kawasan wisata alam di Kabupaten Sumbawa yang menjadi prioritas pengembangan yaitu wisata Pantai Sili-Maci, Pulau Moyo dan pulau-pulau kecil lainnya, Pantai Goa, Pantai Tanjung Menangis, Semongkat, Gili Keramat, Gili Bedil, Kawasan Pantai Empan, Pantai Labuan Padi, Pantai Lunyuk dan Pantai Jemplung di Kecamatan Empang; dan
- kawasan wisata budaya yang menjadi prioritas pengembangan dengan penataan desa-desa wisata seperti Desa Poto, Desa Pemulung, Desa Tepal, Pulau Bungin, sarkofagus di Desa Batu Tering dan daerah konservasi budaya yaitu Istana Dalam Loka, Bala Kuning, Wisma Praja, dan Makam Raja-Raja.

Sementara untuk Rencana pengembangan kawasan peruntukan pariwisata skala prioritas meliputi :

- penyediaan sarana dan prasarana sebagai penunjang pembangunan kawasan wisata;
- menyelenggarakan kegiatan promosi obyek wisata;
- pengembangan pusat-pusat informasi pariwisata;
- penyediaan fasilitas penunjang seperti listrik, air bersih dan telekomunikasi pada obyek atau kawasan wisata utama;
- penambahan dan perbaikan sarana dan prasarana transportasi guna mendukung kunjungan arus perjalanan dan perpindahan wisatawan dari satu tempat ke tempat yang lain;
- perbaikan manajemen pengelolaan obyek wisata;
- pengembangan atraksi wisata dari budaya lokal masyarakat; dan
- penataan ruang kawasan pariwisata untuk mendukung fungsi wilayah dan menghindari konflik pemanfaatan ruang wilayah sekitarnya.

Sedangkan untuk rencana pengembangan destinasi kawasan peruntukan pariwisata unggulan yang ada di kabupaten Sumbawa meliputi :

- Istana Dalam Loka (wisata budaya);
- Batu Bulan (wisata alam dan budaya);

- Semongkat (wisata alam dan budaya);
- Labuhan Mapin (wisata alam dan budaya);
- Pulau Moyo (wisata alam dan budaya); dan
- Empang Tarano (wisata alam dan budaya).

g. kawasan peruntukan permukiman di kabupaten sumbawa

dikembangkan di daerah yang datar sampai bergelombang dengan kelerengan lahan 0% - 15%, bukan lahan irigasi teknis, bukan kawasan lindung, bukan kawasan rawan bencana, aksesibilitas baik dan tersedia air bersih yang cukup, terdiri atas :

- permukiman perkotaan dengan kepadatan sedang sampai tinggi yang dilengkapi diantaranya dengan sistem transportasi umum; dan
- permukiman perdesaan dengan kepadatan rendah sampai menengah yang dilengkapi diantaranya dengan sarana dan prasarana produksi.

h. kawasan peruntukan lain di kabupaten Sumbawa adalah

kawasan perdagangan dan jasa, dan kawasan pertahanan keamanan dengan skala pelayanan diarahkan pada :

- pengembangan perdagangan dan jasa eceran skala lingkungan tersebar di pusat-pusat permukiman penduduk;
- pengembangan perdagangan dan Jasa eceran skala kecamatan tersebar di pusat-pusat pelayanan lingkungan dan atau pusat pelayanan kawasan;
- pengembangan perdagangan dan jasa eceran skala kota tersebar di jalan utama pusat kegiatan lokal dan pusat kegiatan wilayah;
- pengembangan perdagangan dan jasa grosir dan pusat niaga diarahkan di Sumbawa Besar;
- pengembangan perdagangan dan jasa khusus agropolitan diarahkan di Alas, Empang, Lenangguar dan Labangka;
- pengembangan kawasan perdagangan dan jasa dimaksud pada huruf (b), (c), (d), dan (e) dilengkapi dengan lahan parkir

kendaraan bermotor roda empat dan dua sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku; dan

- penetapan skenario ekonomi wilayah yang menunjukkan kemudahan dalam berinvestasi dan penjelasan tentang kepastian hukum yang menunjang investasi.

Rencana Kawasan Strategis

Dalam menetapkan kawasan strategis di kabupaten sumbawa ditetapkan sesuai kebutuhan dan kegunaannya, meliputi :

a. Kawasan Strategis Provinsi yang berada di wilayah Kabupaten Sumbawa meliputi :

- Kawasan Agropolitan Alas Utan dari sektor unggulan pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan pariwisata;
- Kawasan Lingkar Tambang Batu Hijau dan Dodo Rinti dari sektor unggulan pertambangan, pertanian dan pariwisata;
- Kawasan Minapolitan Teluk Saleh dan sekitarnya dari sektor unggulan perikanan, pariwisata, pertanian, peternakan, dan industri; dan
- Kawasan Ekosistem Puncak Ngengas Selalu Legini.

b. Kawasan Strategis Kabupaten kabupaten sumbawa meliputi :

- Kawasan strategis dengan sudut kepentingan ekonomi yang meliputi:
 1. Kawasan Kota Samawa Rea dari sektor unggulan perdagangan, jasa- jasa dan industri;
 2. Kawasan Kota Terpadu Mandiri Labangka dari sektor unggulan pertanian, peternakan, dan industri;
 3. Kawasan Agropolitan Emparano dari sektor unggulan pertanian peternakan, kelautan dan perikanan dan pariwisata;
 4. Kawasan Agropolitan Sumbawa Selatan dari sektor unggulan perdagangan dan jasa, industri, pertanian, perkebunan,

peternakan, kelautan dan perikanan, pertambangan dan pariwisata; dan

5. Kawasan Sili-Maci-Panobu dari sektor unggulan pariwisata.

- Kawasan strategis dengan sudut kepentingan lingkungan hidup yang meliputi Brangpelat Batu Lanteh; dan
- Kawasan strategis dengan sudut kepentingan sosial budaya adalah kawasan yang meliputi kawasan sekitar Istana Dalam Loka/Wisma Praja, Bala Kuning merupakan kawasan konservasi budaya di Sumbawa Besar.

BAB III.

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Identifikasi permasalahan pembangunan daerah dilakukan untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang memengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah, khususnya yang berhubungan dengan kemampuan manajemen pemerintahan dalam memberdayakan kewenangan yang dimilikinya. Identifikasi permasalahan pembangunan juga dilakukan terhadap seluruh bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara terpisah atau sekaligus terhadap beberapa urusan. Hal ini dilakukan untuk dapat memetakan permasalahan yang terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab penyelenggaraan pemerintah daerah. Hasil evaluasi terhadap permasalahan pembangunan pada RPJPD sebelumnya menunjukkan adanya perbedaan mendasar yakni permasalahan pembangunan tidak ditelaah dalam tiga kolom yang terdiri dari masalah pokok, masalah, dan akar masalah sehingga tidak terlihat sumber paling mendasar dari masalah – masalah yang ada. Pada dokumen revisi RPJPD ini perumusan permasalahan sudah disesuaikan dengan format Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Selanjutnya, dilakukan identifikasi isu strategis untuk mengidentifikasi kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun peluang daerah Kabupaten Sumbawa di masa yang akan datang.

3.1. Permasalahan

Permasalahan pembangunan merupakan penyebab terjadinya kesenjangan antara pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta apa yang akan dicapai di masa yang akan datang. Ketidaksesuaian pembangunan dengan kondisi riil yang dibuat saat perencanaan timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, serta ancaman yang tidak diantisipasi. Berdasarkan hasil analisis gambaran umum dan kondisi daerah yang telah dijabarkan pada Bab II dokumen ini, maka dapat diidentifikasi permasalahan pembangunan yang ada di Kabupaten Sumbawa antara lain:

1. Permasalahan Bidang Pendidikan

Permasalahan pokok bidang pendidikan yaitu: Penyelenggaraan layanan pendidikan yang berkualitas belum merata, dimana permasalahan ini sebagai akibat dari cakupan layanan dan pemenuhan mutu layanan pendidikan belum memenuhi standar, yang disebabkan Tingkat berpartisipasi masyarakat dalam tiap jenjang layanan pendidikan belum optimal dan Pemenuhan mutu layanan pendidikan belum sesuai standar.

Tabel 3. 1 Masalah Pokok, Masalah dan Akar Masalah

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Penyelenggaraan layanan pendidikan yang berkualitas belum merata	Cakupan layanan dan pemenuhan mutu layanan pendidikan belum memenuhi standar	Tingkat berpartisipasi masyarakat dalam tiap jenjang layanan pendidikan belum optimal dan Pemenuhan mutu layanan pendidikan belum sesuai standar

2. Permasalahan Bidang Kesehatan

Permasalahan pokok bidang kesehatan yaitu : Derajat kesehatan dan kualitas hidup keluarha dan masyarakat masih rendah, permasalahan diatas diakibatkan oleh cakupan layanan dan pemenuhan mutu layanan kesehatan belum memenuhi standar

Tabel 3. 2 Masalah Pokok, Masalah dan Akar Masalah

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Derajat kesehatan dan kualitas hidup keluarga dan masyarakat masih rendah	Cakupan layanan dan pemenuhan mutu layanan kesehatan belum memenuhi standar	Cakupan pelayanan kesehatan dasar belum optimal dan Pemenuhan mutu layanan kesehatan belum sesuai standar

3. Permasalahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Permasalahan pokok bidang pekerjaan umum dan penataan ruang antara lain

- Aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah infrastruktur masih belum merata, hal ini disebabkan Masih rendahnya pembangunan infrastruktur yang mendukung layanan dasar dan perekonomian

terutama di wilayah- wilayah tertentu dengan tingkat Kesulitan Geografis.

- Konektivitas wilayah belum optimal, hal ini disebabkan masih lemahnya upaya pengendalian pemanfaatan ruang, hal ini diakibatkan masih adanya pemanfaatan ruang yang belum sesuai dengan arahan RTRW.

Tabel 3. 3 Masalah Pokok, Masalah dan Akar Masalah

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah infrastruktur masih belum merata	Pembangunan infrastruktur dan Pengembangan kewilayahan belum merata dan terintegrasi	Masih rendahnya pembangunan infrastruktur yang mendukung layanan dasar dan perekonomian terutama di wilayah- wilayah tertentu dengan tingkat Kesulitan Geografis
Konektivitas wilayah belum optimal	Masih lemahnya upaya pengendalian pemanfaatan ruang	Masih adanya pemanfaatan ruang yang belum sesuai dengan arahan RTRW

4. Permasalahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Permasalahan pokok bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman yaitu: (1) Masih adanya Masyarakat yang menempati rumah tidak layak huni (2) Tingginya pertumbuhan dan perkembangan wilayah permukiman mengakibatkan munculnya kawasan permukiman kumuh. Adapun akar masalah dari masalah pokok tersebut yaitu:

- Ketidakseimbangan antara kebutuhan rumah dengan penyediaan rumah
- Belum adanya penataan dan pengembangan kawasan permukiman terintegrasi
- Pelayanan PSU belum optimal

Tabel 3. 4 Masalah Pokok, Masalah dan Akar Masalah

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum terpenuhinya kebutuhan penyediaan akses	Masih adanya Masyarakat yang menempati rumah tidak layak huni	Ketidakseimbangan antara kebutuhan rumah dengan penyediaan rumah

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
perumahan Layak Huni		
Penataan Kawasan Permukiman Kumuh yang belum optimal	Tingginya pertumbuhan dan perkembangan wilayah permukiman mengakibatkan munculnya kawasan permukiman kumuh	Belum adanya penataan dan pengembangan kawasan permukiman terintegrasi
		Pelayanan PSU belum optimal

5. Permasalahan Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Permasalahan pokok bidang ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat terbagi menjadi 3 permasalahan pokok

- Perubahan iklim yang menyebabkan terjadinya bencana
- Masih tingginya pelanggaran perda dan perkara

Kedua masalah pokok diatas disebabkan oleh :

- Kesiapsiagaan daerah terhadap bencana daerah belum optima;
- Tingkat waktu tanggap (*response time rate*) penanggulangan kebakaran rata-rata masih diatas 36.menit
- Keterbatasan sarana prasarana (SDM , prasarana pendukung)
- Sistem pengawasan pelakasnaaan perda belum optimal

Tabel 3. 5 Masalah Pokok, Masalah dan Akar Masalah Bidang Trantibumlinmas

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Perubahan iklim yang menyebabkan terjadinya bencana	Masih rendahnya kemampuan Mitigasi dan adaptasi terhadap bencana	Kesiapsiagaan daerah terhadap bencana daerah belum optimal
	Tingkat waktu tanggap (<i>response time</i>) penanggulangan	Keterbatasan Sarana dan prasarana kebakaran (SDM, Prasarana)

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	kebakaran belum optimal	
Masih tingginya pelanggaran Perda dan perkara	Sistem pengawasan pelaksanaan Perda belum optimal	Keterbatasan sarana perantara Linmas (SDM, Prasarana)

6. Permasalahan Bidang Sosial

Permasalahan pokok bidang sosial adalah masih rendahnya penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial, disebabkan Penyelenggaraan sistem penjaminan Sosial, Rehabilitasi Sosial, Perlindungan Sosial serta pendayagunaan potensi kesejahteraan sosial belum terintegrasi dan adaptif.

Tabel 3. 6 Masalah Pokok, Masalah dan Akar Masalah Bidang Sosial

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Rendahnya penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	Masih terdapat kelompok sasaran dalam penanganan kemiskinan yang belum tertangani sesuai kebutuhan	Penyelenggaraan sistem penjaminan Sosial, Rehabilitasi Sosial, Perlindungan Sosial serta pendayagunaan potensi kesejahteraan sosial belum terintegrasi dan adaptif

7. Permasalahan Bidang Ketenagakerjaan

Permasalahan pokok bidang ketenagakerjaan adalah Tata kelola ketenagakerjaan di daerah belum optimal

Tabel 3. 7 Masalah Pokok, Masalah dan Akar Masalah Bidang Ketenagakerjaan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Tata kelola ketenagakerjaan di daerah belum optimal	Upaya peningkatan kompetensi tenaga kerja belum sesuai dengan kebutuhan pasar kerja	Pencari kerja bersertifikat kompetensi sesuai kebutuhan pasar masih terbatas

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	Masih terdapat permasalahan dalam hubungan industrial yang dihadapi oleh tenaga kerja, baik luar maupun dalam negeri	Upaya perlindungan terhadap tenaga kerja belum optimal

8. Permasalahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Permasalahan pokok bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak adalah derajat kesehatan dan kualitas hidup keluarga dan masyarakat masih rendah hal ini mengakibatkan tingkat pemenuhan indikator KLA dan pengarusutamaan gender dalam pembangunan masih rendah

Tabel 3. 8 Masalah Pokok, Masalah dan Akar Masalah Bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Derajat kesehatan dan kualitas hidup keluarga dan masyarakat masih rendah	Upaya peningkatan kualitas keluarga belum optimal	Tingkat pemenuhan indikator KLA dan pengarusutamaan gender dalam pembangunan masih rendah

9. Permasalahan Bidang Pangan

Permasalahan pokok di bidang pangan adalah upaya pemantapan ketahanan pangan dan peningkatan kesejahteraan petani belum optimal hal ini disebabkan Tata kelola pangan melalui penyediaan, distribusi dan penjaminan keamanan pangan belum terintegrasi dalam *roadmap* kemandirian pangan daerah.

Tabel 3. 9 Masalah Pokok, Masalah dan Akar Masalah Bidang pangan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Upaya Pemantapan ketahanan pangan dan peningkatan	Distribusi pangan yang aman dan	Tata kelola pangan melalui penyediaan, distribusi dan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
kesejahteraan petani belum optimal	terjangkau belum merata	penjaminan keamanan pangan belum terintegrasi dalam <i>roadmap</i> kemandirian pangan daerah

10. Permasalahan Bidang Pertanian

Permasalahan pokok bidang pertanian yaitu: (1) Belum optimalnya pengelolaan pertanian. Adapun beberapa masalah dari masalah pokok tersebut antara lain:

- Terdapat kendala dalam pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan
- Belum semua kegiatan memiliki dokumen perencanaan pengadaan tanah yang memadai

Tabel 3. 10 Masalah Pokok, Masalah dan Akar Masalah Bidang pertanian

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya pengelolaan pertanian	Terdapat kendala dalam pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan	Belum adanya database pertanian yang lengkap dan akurat
	Belum semua kegiatan memiliki dokumen perencanaan	Proses legalitas dan administrasi rumit

11. Permasalahan Bidang Lingkungan Hidup

Permasalahan pokok pada bidang lingkungan hidup adalah terjadinya penurunan kualitas lingkungan hidup, hal ini disebabkan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup belum terkendali secara optimal

Tabel 3. 11 Masalah Pokok, Masalah dan Akar Masalah Bidang Lingkungan hidup

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Terjadi penurunan kualitas Lingkungan hidup	Pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup belum terkendali secara optimal	Teknologi dan Infrastruktur pengendali pencemaran dan kerusakan lingkungan masih minim
		Pengelolaan persampahan belum optimal

12. Permasalahan Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Permasalahan pokok pada bidang Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil adalah belum optimalnya pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil

Tabel 3. 12 Masalah Pokok, Masalah dan Akar Masalah Bidang Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya pelayanan administrasi kependudukan dan Pencatatan Sipil	Masih sulitnya akses masyarakat diwilayah terpencil	Jumlah kematian yang tidak dilaporkan untuk diterbitkan akte kematiannya
		Belum optimalnya penggunaan adminduk online

13. Permasalahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Permasalahan pokok pada bidang pemberdayaan masyarakat dan desa adalah belum optimalnya kemandirian desa

Tabel 3. 13 Masalah Pokok, Masalah dan Akar Masalah Bidang pemberdayaan masyarakat dan desa

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya kemandirian desa	Tata kelola pemerintahan desa belum optimal	Rendahnya komitmen pemerintah desa dalam

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		peningkatan sumber daya dan potensi desa

14. Permasalahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Permasalahan pokok bidang pengendalian penduduk dan keluaraha berencana adalah Derajat kesehatan dan kualitas hidup keluarga dan masyarakat masih rendah, hal ini ditunjukkan salah satunya masih tingginya angka unmeet need akibat dari masih banyaknya pernikahan dibawah umur.

Tabel 3. 14 Masalah Pokok, Masalah dan Akar Masalah Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Derajat kesehatan dan kualitas hidup keluarga dan masyarakat masih rendah	Masih tingginya angka Unmeet need	pernikahan di bawah umur

15. Permasalahan Bidang Perhubungan

Permasalahan pokok bidang perhubungan adalah aksesibilitas dan infrastruktur konektivitas wilayah masih belum merata hal ini disebabkan oleh konektivitas wilayah yang belum optimal, baik dari sisi perhubungan udara, dimana saat ini Kabupaten Sumbawa hanya dilayani satu kali penerbangan dalam sehari, sedangkan perhubungan laut kabupaten sumbawa tidak memiliki pelabuhan laut.

Tabel 3. 15 Masalah Pokok, Masalah dan Akar Masalah Bidang Perhubungan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Aksesibilitas dan infrastruktur konektivitas wilayah masih belum merata	Pembanguanan infrastruktur dan pengembanagn kewilayahan belum merata dan terintgrasi	Mesih rendahnya pembangunan infrastruktur perhubungan belum memadai

16. Permasalahan Bidang Komunikasi dan Informatika

Permasalahan pokok bidang komunikasi dan informatika adalah aksesibilitas dan infrastruktur konektivitas wilayah masih belum merata hal ini disebabkan salah satunya oleh adanya kendala geografis dalam penyediaan infrastrutur TIK

Tabel 3. 16 Masalah Pokok, Masalah dan Akar Masalah Bidang Komunikasi dan Informatika

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Aksesibilitas dan infrastruktur konektivitas wilayah masih belum merata	Pembanguanan infrastruktur dan pengembangan kewilayahan belum merata dan terintgrasi	Adanya kendala geografis dalam penyediaan infrastruktur TIK

17. Permasalahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Permasalahan pokok koperasi, usaha kecil dan menengah adalah Tata kelola investasi, penanaman modal dan perdagangan hasil produk unggulan daerah belum optimal yang ditunjukan melalui Peminatan pelaku usaha sektor perdagangan untuk mengembangkan dan meningkat nilai tambah produk unggulan daerah masih rendah yang mengakibatkan Produktivitas UMKM , koperasi, BUMD masih rendah.

Tabel 3. 17 Masalah Pokok, Masalah dan Akar Masalah Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Tata kelola investasi, penanaman modal dan perdagangan hasil produk unggulan daerah belum optimal	Produktivitas UMKM , koperasi, BUMD masih rendah	Peminatan pelaku usaha sektor perdagangan untuk mengembangkan dan meningkat nilai tambah produk unggulan daerah masih rendah

18. Permasalahan Bidang Penanaman Modal

Permasalahan pokok bidang penanaman modal adalah Tata kelola investasi, penanaman modal dan perdagangan hasil produk unggulan daerah belum optimal , ditandai dengan Pertumbuhan nilai investasi dan perdagangan produk unggulan daerah masih rendah disebabkan oleh Minat investor masih rendah karena dukungan infrastruktur penunjang

masih terbatas dan Implementasi OSS-RBA dalam penyelenggaraan perizinan berusaha belum menjangkau seluruh pelaku usaha.

Tabel 3. 18 Masalah Pokok, Masalah dan Akar Masalah Bidang Penanaman modal

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Tata kelola investasi, penanaman modal dan perdagangan hasil produk unggulan daerah belum optimal	Pertumbuhan nilai investasi dan perdagangan produk unggulan daerah masih rendah	Minat investor masih rendah karena dukungan infrastruktur penunjang masih terbatas dan Implementasi OSS-RBA dalam penyelenggaraan perizinan berusaha belum menjangkau seluruh pelaku usaha

19. Permasalahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga

Permasalahan pokok di bidang kepemudaan dan olah raga antara lain

- Masih rendahnya prestasi olah raga tingkat nasional, hal ini disebabkan kurangnya pembinaan atlet berprestasi akibat dari Ketersediaan prasarana olah raga belum optimal.
- Belum optimalnya peran pemuda dalam pembangunan disebabkan Pembinaan dan pengembangan potensi pemuda optimal akibat dari Upaya peningkatan kepemimpinan, kewirausahaan serta kepeloporan pemuda belum optimal.

Tabel 3. 19 Masalah Pokok, Masalah dan Akar Masalah Bidang Kepemudaan dan olah raga

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Masih rendahnya prestasi olah raga tingkat nasional	Kurangnya pembinaan atlet berprestasi	Ketersediaan prasarana olah raga belum optimal
Belum optimalnya peran pemuda dalam pembangunan	Pembinaan dan pengembangan potensi pemuda optimal	Upaya peningkatan kepemimpinan, kewirausahaan serta kepeloporan pemuda belum optimal

20. Permasalahan Bidang Perpustakaan

Permasalahan pokok di bidang perpustakaan adalah Penyelenggaraan layanan pendidikan yang berkualitas belum merata, ditandai dengan masih rendahnya angka literasi dan numerasi, hal ini disebabkan rendahnya minat baca masyarakat.

Tabel 3. 20 Masalah Pokok, Masalah dan Akar Masalah Bidang Perpustakaan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Penyelenggaraan layanan pendidikan yang berkualitas belum merata	Masih rendahnya angka Literasi dan Numerasi	Rendahnya minat baca masyarakat

21. Permasalahan Bidang Statistik

Permasalahan pokok bidang statistik adalah Belum optimalnya penyediaan data statistik hal ini ditandai dengan Belum optimalnya pengelolaan integrasi data statistik dalam rangka satu data hal ini disebabkan Kurang siapnya data yang akan disampaikan (sharing data).

Tabel 3. 21 Masalah Pokok, Masalah dan Akar Masalah Bidang Statistik

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya penyediaan data statistik	Belum optimalnya pengelolaan integrasi data statistik dalam rangka satu data	Kurang siapnya data yang akan disampaikan (sharing data)

22. Permasalahan Bidang Kearsipan

Permasalahan pokok bidang kearsipan adalah Belum tertatanya pengelolaan Arsip dimasyarakat dan Perangkat Daerah disebabkan Rendahnya kesadaran terhadap pentingnya pengelolaan Arsip, ditandai dengan Belum optimalnya sosialisasi terkait pentingnya pengelolaan Arsip

Tabel 3. 22 Masalah Pokok, Masalah dan Akar Masalah Bidang Statistik

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah

Belum tertatanya pengelolaan Arsip dimasyarakat dan Perangkat Daerah	Rendahnya kesadaran terhadap pentingnya pengelolaan Arsip	Belum optimalnya sosialisasi terkait pentingnya pengelolaan Arsip

23. Permasalahan Bidang Kelautan dan Perikanan

Permasalahan pokok dari bidang kelautan dan perikanan adalah Perekonomian masyarakat pesisir masih rendah ditandai dengan Produksi atas pengelolaan sektor perikanan masih rendah dibandingkan dengan potensi sektor perikanan di daerah disebabkan Ketersediaan sarpras pengelolaan perikanan yang berkualitas dan memenuhi standar belum merata

Tabel 3. 23 Masalah Pokok, Masalah dan Akar Masalah Bidang Kelautan dan Perikanan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Perekonomian masyarakat pesisir masih rendah	Produksi atas pengelolaan sektor perikanan masih rendah dibandingkan dengan potensi sektor perikanan di daerah	Ketersediaan sarpras pengelolaan perikanan yang berkualitas dan memenuhi standar belum merata

24. Permasalahan Bidang Pariwisata

Permasalahan pokok sektor industri dan pariwisata terhadap PDRB masih rendah, ditandai oleh Penumbuhkembangan pelaku usaha industri masih lambat dan, Kunjungan wisatawan terhadap destinasi pariwisata di daerah masih rendah disebabkan Ekosistem industri di daerah belum terbangun dan Upaya promosi potensi pariwisata daerah masih belum optimal

Tabel 3. 24 Masalah Pokok, Masalah dan Akar Masalah Bidang Pariwisata

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Kontribusi sektor industri dan pariwisata	Penumbuhkembangan pelaku usaha industri masih lambat	Ekosistem industri di daerah belum terbangun

terhadap PDRB masih rendah	Kunjungan wisatawan terhadap destinasi pariwisata di daerah masih rendah	Upaya promosi potensi pariwisata daerah masih belum optimal

25. Permasalahan Bidang Pertanian

Permasalahan pokok dari bidang pertanian adalah Upaya pemantapan ketahanan pangan dan peningkatan kesejahteraan petani belum optimal disebabkan oleh Nilai jual produksi hasil pertanian belum sepenuhnya sesuai dengan Harga pembelian Pemerintah (HTP) dan Tingginya ancaman penyakit pada hewan ternak ditandai dengan Komoditas yang ditanam rentan terhadap fluktuasi harga, Kelembagaan petenai belum optimal dan Rendahnya pemahaman masyarakat tentang penyakit ternak

Tabel 3. 25 Masalah Pokok, Masalah dan Akar Masalah Bidang Pertanian

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Upaya pemantapan ketahanan pangan dan peningkatan kesejahteraan petani belum optimal	Nilai jual produksi hasil pertanian belum sepenuhnya sesuai dengan Harga pembelian Pemerintah (HTP)	Komoditas yang ditanam rentan terhadap fluktuasi harga
		Kelembagaan petenai belum optimal
	Tingginya ancaman penyakit pada hewan ternak	Rendahnya pemahaman masyarakat tentang penyakit ternak

26. Permasalahan Bidang Kesbangpoldagri

Permasalahan pokok bidang kesbangpoldagri adalah Belum optimalnya penanganan konflik sosial disebabkan Masih kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kerukunan antar umat beragama ditandai dengan Belum optimalnya pengawasan pemerintah terhadap kegiatan keagamaan masyarakat.

Tabel 3. 26 Masalah Pokok, Masalah dan Akar Masalah Bidang Kesbangpoldagri

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya	Masih kurangnya kesadaran masyarakat	Belum optimalnya pengawasan pemerintah

penanganan konflik sosial	terhadap kerukunan antar umat beragama	terhadap kegiatan keagamaan masyarakat

27. Permasalahan Bidang Persandian

Permasalahan pokok bidang persandian adalah Reformasi kelembagaan dan birokrasi disebabkan oleh salah satunya adalah Kinerja penyelenggaraan pemerintah belum optimal ditandai oleh Impelementasi SPBE di daerah belum optimal

Tabel 3. 27 Masalah Pokok, Masalah dan Akar Masalah Bidang Persandian

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Reformasi kelembagaan dan birokrasi	Kinerja penyelenggaraan pemerintah belum optimal	Impelementasi SPBE di daerah belum optimal

28. Permasalahan Bidang Perindustrian

Permasalahan pokok bidang perindustrian adalah Kontribusi sektor industri dan pariwisata terhadap PDRB masih rendah disebabkan oleh Penumbuhkembangan pelaku usaha industri masih lambat ditandai dengan ekosistem industri daerah belum terbangun.

Tabel 3. 28 Masalah Pokok, Masalah dan Akar Masalah Bidang Perindustrian

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Kontribusi sektor industri dan pariwisata terhadap PDRB masih rendah	Penumbuhkembangan pelaku usaha industri masih lambat	Ekosistem industri di daerah belum terbangun

29. Permasalahan Bidang Perdagangan

Pemasalahan pokok bidang perdagangan adalah Perlindungan Konsumen masih belum optimal disebabkan oleh Pengawasan metrologi legal masih terbatas ditandai dengan kesadaran pelaku usaha dalam melakukan peneraan masih rendah

Tabel 3. 29 Masalah Pokok, Masalah dan Akar Masalah Bidang Perdagangan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Perlindungan Konsumen masih belum optimal	Pengawasan metrologi legal masih terbatas	kesadaran pelaku usaha dalam melakukan peneraan masih rendah

3.2. Isu Strategis

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah di masa yang akan datang. Isu strategis dapat juga dimaknai sebagai potensi daerah yang belum terkelola, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan. Penetapan isu strategis pembangunan jangka panjang di Kabupaten Sumbawa dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai faktor internal dan eksternal. Penetapan isu strategis jangka panjang Kabupaten Sumbawa diidentifikasi dari berbagai sumber diantaranya:

1. Permasalahan Pembangunan Kabupaten Sumbawa
2. Isu strategis dari dinamika internasional, nasional, dan regional yang mempengaruhi pembangunan Kabupaten Sumbawa
3. Isu strategis kebijakan pembangunan daerah lainnya yang mempengaruhi pembangunan Kabupaten Sumbawa
4. Isu strategis dari kebijakan pembangunan daerah yang terdiri atas:
 - a. Kebijakan pembangunan di Kabupaten Sumbawa yang antara lain bersumber dari RPJPD dan RTRW Kabupaten Sumbawa
 - b. Isu strategis yang diangkat dari hasil fakta dan analisis terhadap gambaran umum dan kondisi daerah Kabupaten Sumbawa untuk kondisi geografi dan demografi, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, serta daya saing daerah
 - c. Hasil evaluasi kinerja pembangunan yang belum dipenuhi oleh RPJPD sebelumnya

Berdasarkan hasil analisis terhadap hal – hal sebelumnya serta mempertimbangkan kriteria yang telah ditetapkan, maka isu strategis pembangunan jangka panjang Kabupaten Sumbawa sebagai berikut:

1. Pemerataan layanan pendidikan yang berkualitas

- 2. Pemerataan layanan kesehatan yang berkualitas
- 3. Kesetaraan Gender
- 4. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
- 5. Pemajuan Kebudayaan Daerah
- 6. Peningkatan kualitas tenaga kerja yang berdaya saing
- 7. Reformasi birokrasi dan pelayanan publik
- 8. Peningkatan daya saing sektor ekonomi unggulan
- 9. Peningkatan kualitas lingkungan hidup
- 10. Ketahanan pangan berkelanjutan
- 11. Perubahan iklim dan mitigasi bencana
- 12. Kemiskinan
- 13. Ekonomi masyarakat yang berdaya saing dan berkelanjutan
- 14. Konektivitas wilayah dan infrastruktur
- 15. Inovasi Daerah

Tabel 3. 30 Keterkaitan Permasalahan Daerah dengan Isu Strategi Kabupaten Sumbawa

No	Permasalahan Daerah	No	Isu Strategis Daerah
1.	Cakupan layanan dan pemenuhan mutu layanan pendidikan belum memenuhi standar	1.	Pemerataan layanan pendidikan yang berkualitas
2.	Masih rendahnya angka literasi dan numerasi		
3.	Cakupan layanan dan pemenuhan mutu layanan kesehatan belum memenuhi standar	2.	Pemerataan layanan kesehatan yang berkualitas
4.	Masih adanya tingkat kekerasan terhadap perempuan dan anak	3.	Kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
5.	Masih tingginya angka Unmeet Need	4.	Keluarga Sejahtera
6.	Ketimpangan antara jumlah tenaga kerja yang kompeten dengan	5.	Peningkatan kualitas tenaga kerja yang berdaya saing

No	Permasalahan Daerah	No	Isu Strategis Daerah
	ketersediaan lapangan kerja masih besar		
7.	Kurangnya pembinaan atlet berprestasi	6.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
8.	Pembinaan dan pengembangan potensi pemuda belum optimal		
9.	Ekosistem pemajuan kebudayaan daerah belum optimal	7.	Pemajuan Kebudayaan daerah
10.	Belum optimalnya pertumbuhan industri pengolahan berbasis SDA unggulan	8.	Ketahanan Pangan Berkelanjutan
11.	Volume usaha (omzet) koperasi, usaha kecil menengah, dan BUMD masih terbatas	9.	Pertumbuhan Ekonomi yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan
12.	Tingkat kunjungan wisatawan ke Daerah masih rendah		
13.	Masih terbatasnya talenta ekonomi kreatif yang terampil dan inovatif		
14.	Minat investor melakukan investasi di daerah masih terbatas		
15.	Pelaku usaha ekspor barang dan jasa daerah masih terbatas		
16.	Pembangunan infrastruktur dan pengembangan kewilayahan belum merata dan terintegrasi	10.	Konektivitas wilayah dan infrastruktur
17.	Masih lemahnya pengendalian pemanfaatan ruang		
18.	Pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup belum terkendali secara optimal	11.	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup
19.	Masih rendahnya kemampuan mitigasi dan adaptasi terhadap bencana	12.	Perubahan iklim dan Mitigasi bencana
20.	Tingkat waktu tanggap (<i>response time</i>) penanggulangan kebakaran belum selesai		
21.	Kinerja penyelenggaraan pemerintahan belum optimal	13.	Reformasi Birokrasi dan pelayanan publik

No	Permasalahan Daerah	No	Isu Strategis Daerah
22.	Pengembangan ekosistem kelitbangan dan inovasi belum sepenuhnya terimplementasi mendukung program pembangunan di daerah	14.	Inovasi Daerah
23.	Masih adanya angka kemiskinan	15.	Percepatan Penurunan Angka Kemiskinan

BAB IV.
VISI DAN MISI DAERAH

4.1. Visi

Visi merupakan rumusan umum yang mengarahkan kondisi daerah yang ingin dicapai pada akhir periode perencanaan pembangunan jangka panjang. Visi bukan hanya mimpi atau serangkaian harapan, namun suatu komitmen dan upaya merancang serta mengelola perubahan untuk mencapai tujuan pembangunan 20 tahun ke depan. Visi Kabupaten Sumbawa dirumuskan, dibahas, dan disepakati bersama oleh seluruh pemangku kepentingan pembangunan daerah karena visi merupakan dasar bagi para pemangku kepentingan dalam operasionalisasi perencanaan pembangunan daerah. Perumusan visi dilakukan untuk menindaklanjuti hasil analisis isu – isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah untuk menemukan perwujudan visi. Hasil perumusan visi Kabupaten Sumbawa 2025-2045 adalah:

Tabel 4. 1 Perumusan Visi Berdasarkan Isu Strategis

No.	Isu Strategis Daerah	Pokok-Pokok Visi	Penjelasan	Pernyataan Visi
1.	Peningkatan Daya Saing Daerah dan Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan	Maju	Menjadikan Kabupaten Sumbawa yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat dengan peningkatan produktivitas ekonomi sektor non tambang dan berbasis pada potensi unggulan lokal serta memiliki destinasi wisata yang meningkat dan bertaraf internasional	Menuju Sumbawa Maju, Adil, Sejahtera dan Berkelanjutan
2.	Inklusifitas Pembangunan di Daerah	Adil	Menjadikan Kabupaten Sumbawa yang berpegang pada kebenaran,keadilan dalam menentukan segala	

No.	Isu Strategis Daerah	Pokok-Pokok Visi	Penjelasan	Pernyataan Visi
			bentuk kepentingan Masyarakat sesuai proporsinya	
3.	Pembangunan Ekonomi yang Berkelanjutan	Sejahtera	Menjadikan Kabupaten Sumbawa yang memiliki tingkat pengangguran, kemiskinan dan ketimpangan ekonomi yang rendah dan berketahanan pangan tinggi serta berpegang teguh pada kultur budaya dan kondusifitas wilayah	
4.	Peningkatan Kualitas Manusia yang Unggul dan Berbudaya	Berkelanjutan	Menjadikan Kabupaten Sumbawa yang mampu memanfaatkan struktur ruang dengan tepat dan berkeadilan serta mengelola lingkungan hidup secara seimbang dengan tepat sasaran	

Sasaran Visi

Sasaran Visi	INDIKATOR	KONDISI EKSISTING	BASELINE 2025	TARGET 2045
1	3	4	5	6
Pendapatan perkapita meningkat	PDRB Per Kapita (ADHB) (Rp Juta)	20.640	25,19	76,94
	Kontribusi PDB Industri Pengolahan (%)	1,87	1,96	2,83
Kemiskinan menuju 0 dan ketimpangan berkurang	Tingkat Kemiskinan (%)	13,91	13,66	11,36
	Rasio Gini (Indeks)	0,441	0,322	0,300
	Kontribusi PDRB Kab/kota Terhadap Provinsi (%)	10,50	10,50	11,60

Sasaran Visi	INDIKATOR	KONDISI EKSISTING	BASELINE 2025	TARGET 2045
1	3	4	5	6
Peningkatan kualitas Kepemimpinan daerah dalam mencapai visi daerah	IRB	62,36	66,36	100,00
Meningkatnya daya saing SDM daerah	Indeks Daya Saing Daerah	47,92	49,92	69,92
	Indeks Pembangunan Manusia	71,68	73,18	88,18
Pembangunan berkelanjutan dan ramah lingkungan	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	2,72	2,72	9,91

SINKRONISASI DAN SINERGITAS VISI, MISI NASIONAL, PROVINSI DAN DAERAH

Visi Nasional	Visi Provinsi NTB	Visi Kabupaten	Sasaran Utama RPJPN	Sasaran Utama RPJPD Prov	Sasaran Utama RPJPD	Misi RPJPN	Misi RPJPD Prov	Misi RPJPD Kab
Negara Nusantara Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan	NTB Maju, Kuat, Aman Berkelanjutan dan Sejahtera	Menuju Sumbawa Maju, Sejahtera, Adil dan Berkelanjutan	Pendapatan perkapita setara Negara maju	Peningkatan Pendapatan Perkapita	Pendapatan perkapita meningkat	Transformasi ekonomi	(M2) Transformasi Ekonomi	Transformasi Pembangunan Ekonomi Daerah yang maju dan berkelanjutan
						IpTek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi	Terwujudnya peningkatan penguasaan IpTek, Peningkatan inovasi dan produktivitas ekonomi	Terwujudnya peningkatan penguasaan IpTek, Peningkatan inovasi dan produktivitas ekonomi
						Penerapan Ekonomi hijau	Terwujudnya Penerapan Ekonomi Hijau	Terwujudnya Penerapan Ekonomi Hijau
						Transformasi Digital	Terwujudnya Transformasi Digital	Terwujudnya Transformasi Digital
						Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	Terwujudnya Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	Terwujudnya Integrasi Ekonomi

Visi Nasional	Visi Provinsi NTB	Visi Kabupaten	Sasaran Utama RPJPN	Sasaran Utama RPJPD Prov	Sasaran Utama RPJPD	Misi RPJPN	Misi RPJPD Prov	Misi RPJPD Kab
								Domestik dan Global
						Perkotaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	Terwujudnya Perkotaan dan Pedesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	Terwujudnya Perkotaan dan Pedesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi
			Intensitas emisi GRK menuju net zero emission	Intensitas emisi gas rumah kaca	Pembangunan berkelanjutan dan ramah lingkungan	Mewujudkan Sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan	(M7) Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan	Terwujudnya Sarana Prasarana Pembangunan yang berkualitas dan ramah lingkungan
						Mewujudkan Pembangunan kewilayahan yang merata dan kerkeadilan	(M6) Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan	Terwujudnya Pembangunan Infrastruktur Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan

Visi Nasional	Visi Provinsi NTB	Visi Kabupaten	Sasaran Utama RPJPN	Sasaran Utama RPJPD Prov	Sasaran Utama RPJPD	Misi RPJPN	Misi RPJPD Prov	Misi RPJPD Kab
			Kemiskinan menuju 0 dan ketimpangan berkurang	Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan	Kemiskinan menuju 0 dan ketimpangan berkurang	Ketahanan sosial budaya dan ekologi	(M5) Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	Terwujudnya ketahanan sosial budaya, ekologi dan adaptasi masyarakat terhadap perubahan iklim
						Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju	Terwujudnya Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju	Terwujudnya Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju
						Keluarga Berkualitas, kesetaraan gender, dan Masyarakat Inklusif	Terwujudnya Keluarga Berkualitas, kesetaraan gender, dan Masyarakat Inklusif	Terwujudnya Keluarga Berkualitas, Kesetaraan gender, dan Masyarakat Inklusif
						Lingkungan Hidup Berkualitas	Terwujudnya Lingkungan Hidup Berkualitas	Terwujudnya Lingkungan Hidup Berkualitas

Visi Nasional	Visi Provinsi NTB	Visi Kabupaten	Sasaran Utama RPJPN	Sasaran Utama RPJPD Prov	Sasaran Utama RPJPD	Misi RPJPN	Misi RPJPD Prov	Misi RPJPD Kab
						Ketahanan energi,Air, dan Kemandirian Pangan	Terwujudnya Ketahanan energi,Air, dan Kemandirian Pangan	Terwujudnya Ketahanan energi,Air, dan Kemandirian Pangan
						Ketahanan terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	Terwujudnya Resiliensi Ketahanan terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	Terwujudnya Resiliensi Ketahanan terhadap Bencana dan Perubahan Iklim
			Meningkatnya daya saing SDM	Daya saing sumber daya manusia meningkat	Meningkatnya daya saing SDM daerah	Transformasi sosial	(M1) Transformasi sosial	Transformasi Pembangunan Sosial Berkelanjutan
						Kesehatan untuk semua	Terwujudnya Kesehatan untuk Semua	Terwujudnya Kesehatan untuk Semua
						Pendidikan Berkualitas yang Merata	Terwujudnya Pendidikan Berkualitas yang Merata	Terwujudnya Pendidikan Berkualitas yang Merata

Visi Nasional	Visi Provinsi NTB	Visi Kabupaten	Sasaran Utama RPJPN	Sasaran Utama RPJPD Prov	Sasaran Utama RPJPD	Misi RPJPN	Misi RPJPD Prov	Misi RPJPD Kab
						Perlindungan Sosial yang Adaptif	Terwujudnya Perlindungan Sosial yang Adaptif	Terwujudnya Perlindungan Sosial yang Adaptif
			Kepemimpinan dan pengaruh internasional meningkat	Peningkatan efektivitas kepemimpinan pemerintahan daerah dalam mencapai visi daerah	Peningkatan kualitas Kepemimpinan daerah dalam mencapai visi daerah	Transformasi Tata kelola	(M3) Transformasi Tata kelola	Transformasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah
						Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif	Terwujudnya Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif	Terwujudnya Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif
						Stabilitas dan Ketangguhan Diplomasi	(M4) Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Substansial, dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah	Supremasi hukum, stabilitas daerah yang demokratis dan akuntabel

Visi Nasional	Visi Provinsi NTB	Visi Kabupaten	Sasaran Utama RPJPN	Sasaran Utama RPJPD Prov	Sasaran Utama RPJPD	Misi RPJPN	Misi RPJPD Prov	Misi RPJPD Kab
						Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional Tangguh, dan Demokrasi Substansial	Terwujudnya Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional Tangguh dan Demokrasi Substansial	Terwujudnya Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional Tangguh dan Demokrasi Substansial
						Stabilitas ekonomi makro	Terwujudnya Stabilitas ekonomi makro	Terwujudnya Stabilitas ekonomi makro
						Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan	Terwujudnya Peningkatan Perdagangan Luar Negeri, Kerjasama Daerah dan Investasi	Terwujudnya Peningkatan Perdagangan dalam Negeri, Kerjasama Daerah dan Investasi
						Mewujudkan Kestinambungan Pembangunan	(M8) Kestinambungan Pembangunan	Mewujudkan Kestinambungan Pembangunan

4.2. Misi

Misi merupakan rumusan umum tentang upaya atau pilihan jalan (*the chosen track*) yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi pembangunan daerah, yaitu menyediakan layanan bagi masyarakat dan aktivitas pembangunan bagi seluruh stakeholder. Misi merupakan hal yang penting untuk dirumuskan untuk membantu menggambarkan visi secara lebih jelas yang ingin dicapai dan upaya yang akan dilakukan untuk mencapai visi. Misi dalam RPJPD harus mampu menaungi berbagai tema pembangunan dalam 4 tahap selama 20 tahun ke depan.

Tabel 4. 2 Visi dan Misi Jangka Panjang Kabupaten Sumbawa 2025-2045

Visi	Misi RPJPD Kab. Sumbawa		Misi RPJPN	
Menuju Sumbawa Maju, Adil, Sejahtera dan Berkelanjutan	1.	Transformasi Pembangunan Sosial Berkelanjutan	1.	Transformasi Sosial
	2.	Transformasi Pembangunan Ekonomi Daerah yang Maju dan Berkelanjutan	2.	Transformasi Ekonomi
	3.	Ketahanan Sosial Budaya, Ekologi dan Adaptasi Masyarakat terhadap Perubahan Iklim	3.	Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi
	4.	Transformasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah	4.	Transformasi Tata Kelola
	5.	Stabilitas Daerah yang Demokratis dan Akuntabel	5.	Stabilitas dan Ketangguhan Diplomasi
	6.	Sarana Prasarana Pembangunan yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan	6.	Mewujudkan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan
	7.	Pembangunan Infrastruktur Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan	7.	Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan

Visi	Misi RPJPD Kab. Sumbawa		Misi RPJPN	
	8.	Kesinambungan Pembangunan	8.	Mewujudkan Kesinambungan Pembangunan

Perumusan misi merupakan suatu upaya menyusun sistematika berupa pola perjalanan pemerintahan daerah dalam rangka mengembangkan program-program prioritas untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan pelayanan masyarakat lebih efektif efisien dan terukur. Dalam menyusun misi pembangunan jangka panjang daerah, harus mengacu pada permasalahan pokok. Proses perumusan misi pembangunan daerah Kabupaten Sumbawa melalui proses seperti di bawah ini.

Berdasarkan hasil fasilitasi dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2045 dihasilkan rekomendasi bahwa baik visi maupun misi harus selaras dengan visi dan misi RPJPN dan RPJPD Provinsi NTB sesuai dengan Instruksi Kementerian Dalam Negeri nomor 1 tahun 2024 tentang pedoman penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 halaman 19, dimana dalam merumuskan misi sebagai upaya yang akan dilaksanakan daerah untuk mewujudkan visi daerah hingga tahun 2045, perumusan misi memedomani misi nasional sesuai hasil penyelarasan dengan RPJPN Tahun 2025-2045 yang merupakan agenda pembangunan tahun 2025-2045. Berikut adalah perubahan yang terjadi dalam RPJPD Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2045 berkenaan dengan peraturan tersebut di atas.

Tabel 4. 3 Perumusan Misi RPJPD Kabupaten Sumbawa 2025-2045 Berdasarkan Permasalahan Daerah

No.	Misi Setelah Konsultasi Publik	No.	Misi setelah Fasilitasi dengan Bappeda Provinsi NTB
1	Peningkatan Daya Saing Daerah dan Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan	1	Transformasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah
		2	Stabilitas Daerah yang Demokratis dan Akuntabel
2	Ekonomi yang Maju dan Berkelanjutan	3	Transformasi Pembangunan Ekonomi Daerah yang Maju dan Berkelanjutan

No.	Misi Setelah Konsultasi Publik	No.	Misi setelah Fasilitasi dengan Bappeda Provinsi NTB
3	Pembangunan yang Merata dan Inklusif	4	Sarana Prasarana Pembangunan yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan
		5	Pembangunan Insfrastruktur Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan
		6	Kesinambungan Pembangunan
4	Masyarakat Unggul dan Berbudaya	7	Transformasi Pembangunan Sosial Berkelanjutan
		8	Ketahanan Sosial Budaya, Ekologi dan Adaptasi Masyarakat terhadap Perubahan Iklim

Tabel 4. 4 Perumusan Misi RPJPD Kabupaten Sumbawa 2025-2045 Berdasarkan Permasalahan Daerah

Permasalahan Daerah	Misi
• Cakupan layanan dan pemenuhan mutu layanan pendidikan belum memenuhi standar • Masih rendahnya angka Literasi dan Numerasi • Cakupan layanan dan pemenuhan mutu layanan kesehatan belum memenuhi standar • Akurasi yang masih sangat rendah, sasaran setiap program yang berbeda-beda, pemutakhiran data sektoral yang tidak terintegrasi, kepemilikan data dan akses dokumen kependudukan masyarakat miskin/rentan miskin yang masih terbatas, penyaluran yang lambat dan tidak tepat sasaran, masih adanya tumpang tindih target penerima, lemahnya komunikasi dan koordinasi kedaruratan yang masih lemah, kelompok demografi lanjut usia dan difabel yang belum mendapat perhatian, serta kurang optimalnya sosialisasi dan edukasi kepada calon penerima bantuan	MISI #1 Transformasi Pembangunan Sosial Berkelanjutan
• Pengembangan ekosistem kelitbangan dan inovasi belum sepenuhnya terimplementasi mendukung program pembangunan di daerah • Belum optimalnya pertumbuhan industri pengolahan berbasis SDA unggulan • Volume usaha (omzet) koperasi, usaha kecil menengah, dan BUMD masih terbatas • Tingkat kunjungan wisatawan ke Daerah masih rendah	MISI #2 Transformasi Pembangunan Ekonomi Daerah yang Maju dan Berkelanjutan

Permasalahan Daerah	Misi
- Masih terbatasnya talenta ekonomi kreatif yang terampil dan inovatif - Minat investor melakukan investasi di daerah masih terbatas - Pelaku usaha ekspor barang dan jasa daerah masih terbatas	
- Masih adanya tingkat kekerasan terhadap perempuan dan Anak - Masih tingginya angka Unmeet need - Ekosistem pemajuan kebudayaan daerah belum optimal - Pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup belum terkendali secara optimal - Masih rendahnya kemampuan Mitigasi dan adaptasi terhadap bencana - Tingkat waktu tanggap (response time) penanggulangan kebakaran belum optimal	MISI #3 Ketahanan Sosial Budaya, Ekologi dan Adaptasi Masyarakat terhadap Perubahan Iklim
Kinerja penyelenggaraan pemerintahan belum optimal	MISI #4 Transformasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah
Masih adanya praktik penyalahgunaan kekuasaan	MISI #5 Stabilitas Daerah yang Demokratis dan Akuntabel
Pembangunan sarana dan prasarana masih belum memperhitungkan dampak pembangunan dilihat dari sis lingkungan hidup	MISI #6 Sarana Prasarana Pembangunan yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan
- Pembangunan infrastruktur dan Pengembangan kewilayahan belum merata dan terintegrasi - Masih lemahnya pengendalian pemanfaatan ruang	MISI #7 Pembangunan Insfrastruktur Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan
Masih belum konsistennya antara perencanaan mulai dari pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten	MISI #8 Kestinambungan Pembangunan

Perwujudan Visi Pembangunan jangka panjang melalui 8 (Delapan) misi pembangunan jangka panjang kabupaten Sumbawa tahun 2025-2045 adalah :

Misi I : Transformasi Pembangunan Sosial Berkelanjutan

Dalam mengembangkan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan beradab. Misi 1 diarahkan untuk kualitas manusia Sumbawa yang meningkat dengan pendidikan yang semakin tinggi dan merata; kebudayaan yang kuat; derajat kesehatan, usia harapan hidup, dan kualitas hidup yang semakin baik; produktivitas yang tinggi.

Pendidikan

Taraf pendidikan rakyat Indonesia ditingkatkan untuk menciptakan SDM unggul dan berbudaya. Rata-rata lama sekolah meningkat menjadi 13 tahun pada tahun 2045. Peningkatan pendidikan vokasi dan penyesuaian pengembangan ilmu di perguruan tinggi diarahkan untuk menjawab perubahan struktur ekonomi dengan ditopang oleh kemitraan tiga pihak (pemerintah, perguruan tinggi, dan industri) yang kuat. Tenaga kerja terampil dengan keahlian khusus dan penguasaan bahasa asing menjadi kebutuhan dalam pasar kerja yang kompetitif.

Kesehatan

Derajat kesehatan dan gizi masyarakat Kabupaten Sumbawa semakin baik dengan rata-rata usia harapan hidup **mencapai 75,5** tahun. Penyakit HIV/AIDS, Tuberculosis, dan penyakit tidak menular lainnya menurun. Malaria tereliminasi di seluruh kabupaten/kota dan balita stunting menurun menjadi **5 persen**.

Misi II Transformasi Pembangunan Ekonomi yang Maju dan Berkelanjutan

Kabupaten Sumbawa diharapkan menjadi Kabupaten Yang maju dengan Pertumbuhan Ekonomi yang meningkat dengan digerakkan oleh investasi dan perdagangan; industri, pariwisata, maritim, dan jasa; serta didukung oleh infrastruktur yang andal dan ketahanan pangan, energi, dan air yang kuat. Komitmen terhadap lingkungan hidup terus dijaga bagi keberlanjutan pembangunan.

Iklim Investasi

Iklim investasi Kabupaten Sumbawa diharapkan ditingkatkan menjadi salah satu yang terbaik di Propinsi Nusa Tenggara Barat. Nilai industri dan investasi ditinjau dalam dua bidang industri yang berbeda, yaitu Bidang IKAHH dan Bidang ILMEA. Bidang IKAHH mencakup Industri Makanan dan Minuman, Industri Kayu, Rotan Rumpun, dan Sejenisnya, serta Industri Pulp, Kertas, dan

Bahan Kimia. Nilai industri dan investasi tertinggi terdapat pada Industri Makanan dan Minuman. Sementara itu, Bidang ILMEA mencakup Industri Elektronika dan Aneka, Industri Tekstil, serta Industri Logam, Mesin, dan Alat perkeayasaan. Investasi terbesar dalam Bidang ILMEA terjadi di Industri Logam, Mesin, dan Alat Perkeayasaan.

Industri dan Ekonomi Kreatif

Industri sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi. Modernisasi industri difokuskan pada industri pengolahan sumber daya alam (SDA) berbasis kawasan dan sentra industri dengan integrasi rantai pasok dan rantai nilai dari hulu ke hilir, yang didukung oleh inovasi, sumber daya manusia (SDM) berkualitas, dan kemitraan antara industri besar, sedang, dan kecil. Industri didorong menjadi bagian rantai nilai global (GVC) dengan prioritas pada industri makanan dan minuman, tekstil dan pakaian jadi, otomotif, elektronik, serta kimia dan farmasi.

Peranan sektor industri meningkat menjadi 1,60% terhadap PDB pada tahun 2045. Revolusi industri hingga 4.0 didorong pemanfaatannya sesuai dengan karakteristik masing-masing industri untuk peningkatan efisiensinya. Penguatan struktur ekonomi kreatif dan digital di Indonesia hingga tahun 2045 difokuskan pada: (a) peningkatan daya saing SDM dan usaha kreatif/digital; (b) penguatan ekosistem; dan (c) pengembangan transformasi digital yang terintegrasi untuk mendorong produktivitas dan efisiensi ekonomi.

Pembangunan Daerah Pesisir

Wilayah pesisir dengan sumber daya alamnya memiliki arti penting bagi pembangunan ekonomi, karena kawasan pesisir merupakan kawasan sumber hayati dan non hayati yang sangat produktif meliputi biota laut tropis yang kehidupannya sangat tergantung pada ekosistem pesisir seperti terumbu karang, padang lamun, mangrove dan estuari.

Berkaitan dengan itu perlu dipertahankan kelestarian dan mobilitas perikanan serta pariwisata bahari dengan memelihara dan menjaga kualitas daya dukung lingkungan pesisir.

Proses perencanaan, pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian sumberdaya pesisir secara berkelanjutan yang mengintegrasikan kegiatan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat, perencanaan antar sektor, antara pemerintah dengan pemerintah daerah, antara ekosistem darat dan laut, antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Wilayah

Pesisir Kabupaten Sumbawa seluas 4.912,46 Km² atau sekitar 42,50% dari Luas Kabupaten Sumbawa.

Ketahanan Pangan dan Kesejahteraan Petani

Ketahanan pangan ditingkatkan untuk mewujudkan sistem ketahanan pangan mandiri dan berkelanjutan, menjaga swasembada karbohidrat dan protein, meningkatkan nilai tambah komoditas pertanian, serta meningkatkan kesejahteraan petani.

Misi III Ketahanan Sosial Budaya, Ekologi dan Adaptasi Masyarakat terhadap Perubahan Iklim

Ketahanan sosial budaya melibatkan pemeliharaan dan pengembangan nilai-nilai, kearifan lokal, dan identitas budaya yang menjadi pondasi masyarakat. Dalam konteks perubahan iklim, ini berarti memastikan bahwa pengetahuan tradisional dan budaya lokal dihargai dan diintegrasikan dalam upaya mitigasi dan adaptasi. Menghormati dan memanfaatkan pengetahuan yang telah ada dalam masyarakat tentang cara beradaptasi dengan perubahan iklim dapat memperkuat ketahanan sosial budaya. Selain itu, ketahanan ekologi memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem yang rentan terhadap perubahan iklim. Melindungi keanekaragaman hayati, menjaga kualitas air dan udara, serta memelihara ekosistem alami menjadi aspek penting dalam membangun ketahanan ekologi. Dengan menjaga ekosistem yang sehat, masyarakat dapat lebih mudah beradaptasi terhadap dampak perubahan iklim, seperti banjir, kekeringan, dan bencana alam lainnya.

Misi IV Transformasi Tata Kelola Pemerintah Daerah

Kepemerintahan yang baik (good governance) merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang solid dan bertanggung jawab, dengan menjaga kesinergisan interaksi yang bersifat konstruktif antara tiga domain utama yaitu pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat yang memiliki karakteristik efisien, efektif, partisipatif berlandaskan hukum, adil demokratis, keterbukaan, responsif, berorientasi konsensus, kesetaraan, akuntabel dan memiliki visi strategik.

Dalam meningkatkan daya saing daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana Inovasi disegala bidang merupakan jawaban akan hal tersebut, baik dalam bidang tata kelola,

pelayanan publik, ataupun bentuk lain di masyarakat, Budaya Inovasi di Kabupaten Sumbawa dibangun dengan semangat kolaborasi dengan semua pihak sekalipun masih dalam langkah awal.

Misi V Stabilitas Daerah yang Demokratis dan Akuntabel

Supremasi hukum, stabilitas daerah yang demokratis, dan akuntabilitas adalah prinsip-prinsip yang mendasar dalam menjaga tatanan sosial yang adil dan berkeadilan. Supremasi hukum adalah prinsip yang menegaskan bahwa hukum adalah penguasa tertinggi dalam suatu negara dan bahwa semua orang, termasuk pejabat pemerintah, harus tunduk dan terikat oleh hukum. Dengan adanya supremasi hukum, setiap individu memiliki hak yang sama di depan hukum dan tidak ada yang dikecualikan dari pertanggungjawaban hukum. Stabilitas daerah yang demokratis merujuk pada sistem pemerintahan yang didasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi, di mana kekuasaan politik berasal dari rakyat dan dilaksanakan melalui proses-proses yang transparan dan partisipatif. Dalam lingkup daerah, stabilitas yang demokratis berarti memberdayakan masyarakat setempat untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka, serta menjamin perlindungan terhadap hak-hak dasar dan kebebasan individu. Sementara itu akuntabilitas memastikan bahwa para pemimpin bertanggung jawab kepada masyarakat atas tindakan mereka dan bahwa ada mekanisme yang efektif untuk menegakkan integritas dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam konteks menjaga supremasi hukum, stabilitas daerah yang demokratis, dan akuntabilitas, penting bagi pemerintah untuk memastikan adanya independensi lembaga-lembaga penegak hukum, memperkuat sistem pengawasan dan kontrol, serta meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi dan partisipasi dalam proses politik. Hanya dengan menghormati prinsip-prinsip ini, suatu masyarakat dapat mencapai kedamaian, keadilan, dan kesejahteraan bersama yang berkelanjutan.

Misi VI Sarana Prasarana Pembangunan yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan

Sarana prasarana pembangunan yang berkualitas mencakup berbagai elemen, mulai dari jaringan transportasi dan energi hingga sistem air dan sanitasi. Infrastruktur yang berkualitas memberikan akses yang lebih baik bagi

masyarakat terhadap layanan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan, serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Namun, untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan, penting untuk memperhatikan aspek ramah lingkungan dalam pembangunan infrastruktur. Ini berarti mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, seperti polusi udara dan air, deforestasi, serta penggunaan sumber daya alam yang berlebihan. Pembangunan infrastruktur yang ramah lingkungan juga harus mempertimbangkan pemanfaatan energi terbarukan, penggunaan material daur ulang, dan desain yang berkelanjutan. Terwujudnya sarana prasarana pembangunan yang berkualitas dan ramah lingkungan memerlukan komitmen bersama dari pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil. Pemerintah memiliki peran kunci dalam merancang kebijakan yang mendukung pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan menegakkan regulasi yang melindungi lingkungan. Sementara itu, sektor swasta dapat berperan dalam mengembangkan teknologi dan inovasi yang ramah lingkungan, serta berinvestasi dalam proyek-proyek infrastruktur yang berkelanjutan. Masyarakat sipil juga memiliki peran dalam mengawasi dan memastikan bahwa pembangunan infrastruktur dilakukan dengan memperhatikan kepentingan publik dan keberlanjutan lingkungan.

Ketahanan Energi dan Air

Ketahanan energi ditingkatkan dengan Energi Baru dan Terbarukan (EBT). Pemenuhan kebutuhan energi memperhatikan dampak terhadap lingkungan hidup

Misi VII Pembangunan Infrastruktur Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan

Pemerataan pembangunan semakin luas dengan pendapatan yang semakin merata bagi seluruh lapisan masyarakat, kesenjangan antarwilayah yang semakin kecil, infrastruktur yang terintegrasi dan merata, serta kemiskinan akut berhasil diatasi.

Pembangunan wilayah merupakan pembangunan yang bersifat holistik (menyeluruh). Ada tiga aspek utama terkait pembangunan wilayah yaitu aspek ekonomi, sosial dan lingkungan. Ketiga aspek tersebut merupakan satu kesatuan utuh yang tidak bisa dipisahkan. Pertumbuhan ekonomi merupakan

pendorong tumbuh kembangnya perekonomian wilayah secara menyeluruh tetapi bukan merupakan satu-satunya keberhasilan pembangunan. Pertumbuhan ekonomi tanpa diikuti oleh pembangunan kesejahteraan sosial akan menyebabkan pertumbuhan ekonomi yang semu, artinya ada kesenjangan di tengah masyarakat.

Kesenjangan Pendapatan dan Kemiskinan terus diupayakan berkurang

Kebijakan redistribusi dan inklusif ditingkatkan agar menjangkau semua kelompok masyarakat. Program Afirmasi terus didorong terutama ke daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi. Rasio Gini diperkirakan turun ke tingkat ideal sebesar 0,30 pada tahun 2045 dan selanjutnya berada pada rentang yang berkelanjutan. Kabupaten Sumbawa terbebas dari kemiskinan akut pada tahun 2040.

Pembangunan dan Pemerataan infrastruktur

Konektivitas darat diwujudkan dengan penyelesaian ruas utama jalan di seluruh Kabupaten Sumbawa terutama daerah terpencil. Sistem transportasi antar kabupaten melalui transportasi laut dan udara diarahkan untuk mendukung mobilitas penduduk dan distribusi barang antarwilayah. Akses perekonomian di Kabupaten Sumbawa diawali dengan pengembangan ibu kota kecamatan dan daerah-daerah yang memiliki potensi unggulan daerah. Kondisi Jalan mantap kabupaten Sumbawa diharapkan terwujud di seluruh wilayah Kabupaten Sumbawa, tidak ada lagi daerah blankspot, perhubungan antar wilayah lebih ditingkatkan melalui jalur udara dan laut dengan mempertimbangkan kewenangan Pemerintah Kabupaten.

Misi VIII Kestinambungan Pembangunan

Di tengah arus zaman yang terus berubah dan berkembang, mewujudkan kesinambungan pembangunan menjadi tantangan utama bagi masyarakat global. Narasi ini membawa kita pada perjalanan memahami bagaimana harmoni antara pertumbuhan ekonomi, kelestarian lingkungan, dan keadilan sosial dapat dicapai. Pembangunan yang berkelanjutan bukanlah sekadar tentang pertumbuhan ekonomi yang cepat, tetapi juga tentang memastikan bahwa sumber daya alam kita dijaga dengan bijaksana untuk generasi mendatang. Ini berarti mengadopsi praktik-praktik ekonomi yang memperhitungkan dampaknya terhadap lingkungan, seperti menggunakan energi terbarukan, mengurangi limbah, dan melindungi keanekaragaman

hayati. Untuk mewujudkan kesinambungan pembangunan, diperlukan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil. Mewujudkan kesinambungan pembangunan memang bukanlah tugas yang mudah, tetapi merupakan investasi jangka panjang yang penting untuk masa depan bumi dan generasi mendatang. Dengan komitmen bersama dan tindakan konkret dari semua pihak, kita dapat menciptakan dunia yang lebih adil, lestari, dan makmur bagi semua.

BAB V.
ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK

5.1. Arah Kebijakan

Dalam menentukan tahapan arah kebijakan Pemerintah Kabupaten Sumbawa berpedoman terhadap arah kebijakan pemerintah pusat dimana pada:

- 1. Periode pertama (2025-2029) ditekankan pada Penguatan Pondasi Transformasi, yang dimaksud adalah memberikan pijakan terhadap perubahan sehingga melahirkan suatu pondasi pembangunan yang kuat untuk Pembangunan yang Berkelanjutan.
- 2. Periode kedua (2030-2034) ditekankan pada Meningkatkan Kualitas Transformasi Pembangunan Daerah, yang kuat berupa pembangunan yang didukung dengan saran prasarana yang dilaksanakan secara bertahap untuk upaya menjaga kesinambungan pembangunan agar seluruh tahapan pembangunan dapat terlaksana dengan baik.
- 3. Periode ketiga (2035-2039) ditekankan pada Memantapkan Kualitas Transformasi Pembangunan Daerah, yang diarahkan peningkatan kesejahteraan rakyat dengan mengurangi kesenjangan antar wilayah serta dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat.
- 4. Terakhir, periode keempat (2040-2045) ditekankan pada Perwujudan Sumbawa yang Maju, Sejahtera, Adil dan Berkelanjutan di tahun 2045. Pada periode ini diharapkan terpenuhinya kebutuhan pelayanan dasar, memperoleh kualitas hidup dengan baik yang membentuk karakter manusia unggul dan berdaya saing.



Gambar 5. 1 Tahapan Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Sumbawa

Tabel 5. 1 Tahapan Arah Kebijakan dalam 4 Periode 5 Tahunan Kabupaten Sumbawa

No.	TEMA MISI	Tahapan Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Sumbawa 2025-2045			
		Periode I (2025-2029)	Periode II (2030-2034)	Periode III (2035-2039)	Periode IV (2040-2045)
		Penguatan fondasi Transformasi	Meningkatkan kualitas Transformasi Pembangunan Daerah	Memantapkan Kualitas Transformasi Pembangunan Daerah	Mewujudkan Sumbawa Maju, Sejahtera, Adil dan Berkelanjutan
1.	Transformasi Pembangunan Sosial Berkelanjutan	Memperkuat Pemenuhan layanan dasar kesehatan, pendidikan dan perlindungan sosial	Meningkatkan pembangunan Sumber Daya Manusia berkualitas dan inklusif	Memantapkan kualitas daya saing manusia yang berkelanjutan	Terwujudnya manusia Sumbawa yang unggul dan berdaya Saing
2.	Transformasi Pembangunan Ekonomi Daerah yang Maju dan Berkelanjutan	Memperkuat ekosistem industrialisasi dan meningkatkan kompleksitas produk industri	Meningkatkan kompleksitas produk industri	Memantapkan daya saing industri menuju ekspansi	Terwujudnya Sumbawa sebagai kabupaten industrialisasi berkelanjutan
3.	Ketahanan sosial budaya, ekologi dan adaptasi masyarakat terhadap perubahan iklim	Memperkuat ketahanan sosial budaya dan ekologi sebagai landasan dan modal dasar pembangunan	Meningkatkan ketahanan sosial budaya dan ekologi sebagai pendorong pembangunan ekonomi yang setara dan inklusi	Memantapkan ketangguhan masyarakat beserta alam dan lingkungan dalam menghadapi berbagai perubahan iklim	Terwujudnya Kabupaten Sumbawa yang adaptif terhadap perubahan iklim

No.	TEMA MISI	Tahapan Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Sumbawa 2025-2045			
		Periode I (2025-2029)	Periode II (2030-2034)	Periode III (2035-2039)	Periode IV (2040-2045)
		Penguatan fondasi Transformasi	Meningkatkan kualitas Transformasi Pembangunan Daerah	Memantapkan Kualitas Transformasi Pembangunan Daerah	Mewujudkan Sumbawa Maju, Sejahtera, Adil dan Berkelanjutan
4.	Transformasi Tata Kelola Pemerintahana Daerah	Memperkuat kualitas Aparatur Sipil Negara, regulasi yang efektif, digitalisasi pelayanan publik, peningkatan integritas partai politik dan pemberdayaan masyarakat sipil	Meningkatkan kelembagaan kolaborasi SDM ASN yang berkualitas, regulasi berbasis teknologi informasi, partai politik berintegritas dan masyarakat sipil yang partisipatif	Memantapkan kelembagaan adaptif SDM ASN yang kompetitif, partai politik modern, regulasi adaptif dan masyarakat sipil yang mandiri	Terwujudnya Sumbawa yang berintegritas
5.	Stabilitas Daerah yang Demokratis dan Akuntabel	Memperkuat stabilitas daerah yang demokratis dan akuntabel sebagai landasan transformasi pembangunan	Meningkatkan stabilitas daerah yang demokratis dan akuntabel untuk mewujudkan landasan kokoh bagi transformasi pembangunan	Memantapkan Sumbawa yang berkeadilan, bebas korupsi, menjunjung tinggi HAM berdemokrasi yang aman dan nyaman	Terwujudnya Sumbawa yang berdaulat, aman dan nyaman

No.	TEMA MISI	Tahapan Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Sumbawa 2025-2045			
		Periode I (2025-2029)	Periode II (2030-2034)	Periode III (2035-2039)	Periode IV (2040-2045)
		Penguatan fondasi Transformasi	Meningkatkan kualitas Transformasi Pembangunan Daerah	Memantapkan Kualitas Transformasi Pembangunan Daerah	Mewujudkan Sumbawa Maju, Sejahtera, Adil dan Berkelanjutan
6.	Sarana Prasarana Pembangunan yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan	Memperkuat pembangunan sarana prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan	Meningkatkan pembangunan sarana prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan	Memantapkan pembangunan sarana prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan	Terwujudnya Sumbawa tangguh dan ramah lingkungan
7.	Pembangunan Infrastruktur Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan	Memperkuat pemerataan dan kualitas konektivitas infrastruktur wilayah	Meningkatkan pemerataan dan kualitas konektivitas infrastruktur wilayah	Memantapkan konektivitas infrastruktur wilayah di kawasan-kawasan pusat pertumbuhan yang menunjang pertumbuhan ekonomi dan layanan dasar	Terwujudnya Sumbawa yang mantap konektivitas dan aksesibilitas wilayahnya
8.	Kesinambungan Pembangunan	Memperkuat sinkronisasi dan sinergitas perencanaan pembangunan antar pemerintah pusat provinsi dan daerah	Meningkatkan sinkronisasi dan sinergitas perencanaan pembangunan antar pemerintah pusat, provinsi dan daerah	Memantapkan sinkronisasi dan sinergitas perencanaan pembangunan antar pemerintah pusat provinsi dan daerah	Terwujudnya sinkronisasi dan sinergitas perencanaan pembangunan antar pemerintah pusat provinsi dan daerah

5.1.1 Arah Kebijakan Misi 1

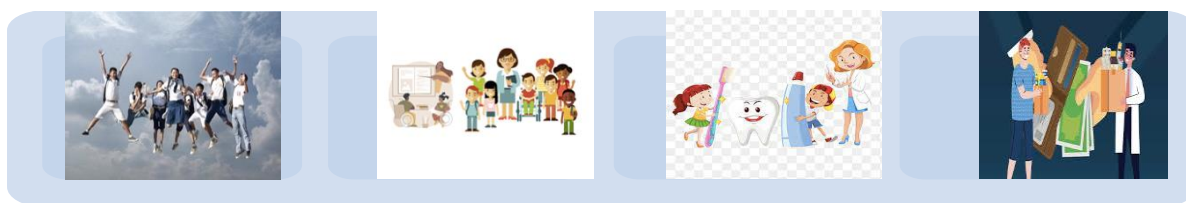
Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045, perencanaan pembangunan di Provinsi NTB masuk dalam pembangunan kewilayahan untuk Pulau Bali dan Nusa Tenggara. Wilayah Bali-Nusa Tenggara diharapkan dapat berkontribusi sebesar 4,1% pada PDB Nasional pada tahun 2045, dari kondisi eksisting saat ini sebesar 2,7% pada tahun 2022. Pembangunan Wilayah Bali-Nusa Tenggara diarahkan menjadi “Superhub Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nusantara Bertaraf Internasional”. Arah kebijakan nasional ini memerlukan pengembangan sumber daya manusia (SDM) lokal yang berdaya saing sebagai modal dasar pembangunan. Arah kebijakan transformasi sosial untuk Nusa Tenggara Barat fokus pada arah pembangunan pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial adaptif sebagai berikut:

1. Perluasan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat;
2. Penguatan pemenuhan kebutuhan tenaga medis dan kesehatan yang didukung dengan pemberian bantuan/insentif dan afirmasi pendayagunaan tenaga medis dan kesehatan dari masyarakat lokal terutama di daerah afirmasi 3TP;
3. Pencegahan dan pengendalian penyakit, serta masalah kesehatan akibat perubahan iklim;
4. Pencegahan dan percepatan penurunan stunting dan eliminasi malaria, khususnya di daerah Sumbawa;
5. Pemenuhan sarana prasarana mendukung pola hidup sehat termasuk ruang terbuka hijau, sarana untuk aktivitas fisik, dan konektivitas transportasi, serta sarana prasarana penanganan limbah medis;
6. Peningkatan akses pelayanan kesehatan primer, lanjutan maupun layanan kesehatan pendukung yang berkualitas dengan mempertimbangkan keadaan geografis di Sumbawa melalui sistem rujukan kepulauan (termasuk RS Perairan) dan penguatan telemedicine serta sistem sister hospital dengan RS di wilayah lain;
7. Wajib PAUD 1 tahun dan sekolah 12 tahun untuk meningkatkan rata-rata lama sekolah dan kualitasnya;
8. Pemerataan kualitas antarsatuan pendidikan dan antardaerah untuk memastikan lulusan dengan kualitas yang setara dan tingkat kebermanfaatan tinggi;
9. Percepatan peningkatan partisipasi pendidikan tinggi, serta pengadaan prodi perguruan tinggi (STEAM yang sesuai dengan komoditas unggulan wilayah);
10. Penguatan pengelolaan tenaga pendidik dengan meningkatkan kualitas dan kompetensi pendidik yang modern dan adaptif, serta peningkatan proporsi dosen kualifikasi Strata-3 dan pelibatan profesional mengajar;
11. Peningkatan akses dan kualitas pendidikan vokasi sesuai dengan potensi ekonomi seperti pertanian, pariwisata, dan ekonomi kreatif, serta keterkaitan dengan DUDI;

12. Penyediaan afirmasi akses pendidikan, terutama untuk daerah kepulauan yang masih belum terjangkau termasuk pengembangan sistem pembelajaran jarak jauh melalui pemanfaatan TIK yang menjangkau daerah terpencil, penyediaan asrama siswa dan guru, dan penguatan sekolah terbuka;
13. Pengentasan kemiskinan pada daerah afirmasi 3TP khususnya di Wilayah Sumbawa melalui perlindungan sosial adaptif; dan
14. Perlindungan sosial yang adaptif bagi seluruh masyarakat terutama kelompok marginal antara lain melalui penyediaan insentif jaminan ketenagakerjaan bagi usia pekerja, perlindungan dan keamanan ekonomi untuk penduduk lansia, serta bantuan sosial terhadap penyandang disabilitas

Transformasi Pembangunan Sosial Berkelanjutan akan difokuskan pada pembangunan manusia dengan memperhatikan kualitas hidup masyarakat yang bermartabat sesuai siklus kehidupan dari bayi, anak, remaja, dewasa, dan lansia, memperhatikan implementasi kesetaraan gender, kelompok rentan dan disabilitas, serta inklusi sosial. Kekuatan sumber daya manusia menjadi penggerak untuk melaksanakan ketiga transformasi utama dalam RPJPD Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2045 yaitu transformasi pembangunan sosial, Transformasi Pembangunan Ekonomi Daerah yang Maju dan Berkelanjutan, dan Transformasi Tata Kelola Pemerintahana Daerah kelola.

Transformasi pembangunan sosial adalah upaya sistematis untuk peningkatan kualitas SDM dalam mengelola transformasi ekonomi dan transformasi tata kelola di Kabupaten Sumbawa. Hak dasar warga negara untuk memperoleh layanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial yang adaptif menjadi bagian dari upaya pembangunan transformasi sosial. Pendidikan adalah kunci penguatan utama dalam transformasi sosial di Kabupaten Sumbawa. Pendidikan yang merata dan berkualitas menjadi arah kebijakan di daerah diawali dengan aksesibilitas pendidikan bagi masyarakat. Kesehatan untuk semua adalah kunci penguatan utama dalam akses layanan kesehatan yang berkualitas. Kebijakan kesehatan ini diupayakan melalui penyediaan fassilitas kesehatan yang memadai bagi seluruh masyarakat. Selanjutnya, perlindungan sosial yang adaptif diawali dengan tahapan identifikasi data terpilah untuk masyarakat yang memiliki kebutuhan khusus. Perlindungan sosial yang adaptif bertujuan untuk jaminan kesehatan dan bantuan sosial bagi kelompok rentan harus diperkuat untuk mengurangi kesenjangan.



Gambar 5.1. Tahapan Misi 1 Mewujudkan Transformasi Pembangunan Sosial Berkelanjutan

1. Tahap Pertama Misi ke-1 Memperkuat Pemenuhan layanan dasar kesehatan, pendidikan dan perlindungan sosial

Tahap pertama diarahkan untuk penuntasan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial pada seluruh kelompok masyarakat, dengan mengimplementasikan prinsip GEDSI (kesetaraan gender, disabilitas, dan inklusi sosial), serta peningkatan kualitas SDM untuk membentuk manusia Sumbawa yang unggul dan berdaya saing. Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan, Pendidikan dan Perlindungan Sosial Adaptif meliputi upaya :

(1) Kesehatan untuk semua

Pembangunan sektor kesehatan bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat pada berbagai kelompok umur, kelompok rentan, kesetaraan gender, penyandang disabilitas, tanpa membedakan suku dan jenis kelamin. Adapun tahap pertama untuk kesehatan untuk semua fokus pada:

- a. Penguatan pelayanan kesehatan, ibu, anak, dan lanjut usia, kesehatan mental, kesehatan kerja, kesehatan tradisional, pengendalian penyakit tidak menular dan eliminasi penyakit menular terutama tuberkulosis, serta penuntasan penyakit tropis terabaikan seperti kusta.
- b. Penguatan sistem kesehatan primer (primary health care) yang komprehensif sampai dengan tingkat desa dan kelurahan termasuk kelembagaan kader kesehatan yang mendukung komitmen politik, kepemimpinan, pendanaan dan tata kelola, kolaborasi intersektoral, pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat termasuk swasta.
- c. Pemenuhan kualitas tenaga kesehatan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat termasuk pengurangan waktu tunggu untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.

(2) Pendidikan berkualitas yang merata

Pendidikan menjadi pilar utama dalam pembangunan manusia yang dapat meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat di Kabupaten

Sumbawa. Pendidikan ini dimulai dari usia anak, remaja, dan dewasa, sepanjang hayat. Dalam pendidikan ini hal yang perlu mendapat perhatian adalah kualitas pengajaran dan pembelajaran, optimalisasi era digital untuk pendidikan, akses yang merata untuk pendidikan dan partisipasi pendidikan tinggi dan lulusan STEAM (*Science, Technology, Engineering, Art, and Mathematics*). Pendidikan untuk penyandang disabilitas dan kelompok rentan serta perempuan menjadi bagian dari sistem pendidikan di Kabupaten Sumbawa. Peningkatan kapasitas tenaga pendidik dilengkapi dengan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai menjadi motor penggerak akselerasi pendidikan yang berkualitas di Kabupaten Sumbawa. Adapun tahap pertama untuk pendidikan berkualitas yang merata fokus pada:

- a. Penguatan pembelajaran berbasis digital dan mitigasi pengaruhnya melalui peningkatan kapasitas pendidik, peserta didik, dan orang tua, penerapan pedagogik modern dengan memanfaatkan teknologi digital untuk motivasi pembelajaran (*pedagogical – technological contents knowledge*) serta peningkatan ketersediaan sumber pembelajaran digital, infrastruktur TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) dan pasokan energi listrik.
- b. Pemerataan akses pendidikan dengan percepatan wajib belajar 13 Tahun (1 tahun prasekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah) serta efektivitas pengalokasian dan pemanfaatan anggaran wajib pendidikan melalui penguatan layanan PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini), peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan, penguatan kebijakan diversifikasi layanan pendidikan, dan peningkatan efektivitas pemberian subsidi pendidikan.
- c. Penguatan sistem penjaminan mutu dan tata kelola pendidikan melalui pengutana manajemen dan kepemimpinan di lembaga pendidikan, peningkatan kapasitas pemerintahan daerah, serta pemanfaatan sistem informasi data pendidikan.

(3) Perlindungan sosial adaptif

Perlindungan sosial adaptif bertujuan untuk membangun ketahanan masyarakat, terutama kelompok rentan dalam upaya mengurangi kemiskinan dan kesenjangan. Perlindungan sosial adaptif ini merupakan suatu skema membangun ketahanan masyarakat sebagai irisan dari dampak perubahan iklim dan kebencanaan, terutama yang berdampak negatif pada kelompok rentan seperti perempuan, anak, lanjut usia, dan penyandang disabilitas. Adapun tahap pertama untuk perlindungan sosial adaptif fokus pada:

- a. Penuntasan kemiskinan dengan satu sistem registrasi sosial ekonomi (Regsosek) dan perlindungan sosial adaptif terintegrasi untuk memperkuat sistem perencanaan dan penganggaran berbasis bukti, serta penentuan target perlindungan sosial dalam mewujudkan integrasi program perlindungan sosial dan pembangunan SDM secara menyeluruh melalui satu data tunggal yang terverifikasi dan tervalidasi secara berkala.

- b. Penguatan sistem jaminan sosial nasional (SJSN) yang efektif dan mencapai cakupan universal.
- c. Peningkatan partisipasi perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya sebagai angkatan kerja antara lain melalui penerapan care ekonomi penguatan norma keluarga, pelayanan ketenagakerjaan yang merata dan inklusif, pemanfaatan teknologi digital dan peningkatan keterampilan.
- d. Penyelarasan peraturan perundang-undangan perlindungan sosial dan penguatan tata kelola data utamanya pembuatan kerangka regulasi sistem registrasi sosial.

2. Tahap Kedua Misi ke-1 Meningkatkan pembangunan Sumber Daya Manusia berkualitas dan inklusif

Tahap kedua diarahkan untuk penguatan pembangunan manusia yang inklusif pada semua kelompok masyarakat, penyandang disabilitas, kelompok rentan dan kelompok marjinal, dan percepatan pembangunan SDM yang berkualitas. Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Inklusif meliputi upaya :

(1) Kesehatan untuk semua

Arah kebijakan pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan upaya kesehatan dan memperkuat sistem kesehatan. Kebijakan untuk mewujudkan sistem kesehatan yang tangguh dan responsif. Membangun sistem kesehatan daerah menjadi kunci pembangunan daerah. Adapun tahap kedua kesehatan untuk semua fokus pada:

- a. Peningkatan upaya kesehatan masyarakat, perluasan upaya promotif dan preventif, terutama deteksi dini, vaksinasi terutama imunisasi rutin lengkap, penemuan kasus dan pengobatan secara masif, peningkatan literasi kesehatan, dan pembudayaan perilaku hidup sehat, penyehatan lingkungan didukung oleh tata kota, lingkungan, serta sarana dan prasarana termasuk konektivitas transportasi, ruang terbuka, fasilitas aktivitas fisik dan olahraga, akses air minum, dan sanitasi aman, serta permukiman sehat.
- b. Perluasan cakupan jaminan kesehatan yang berkelanjutan dengan fokus pada penerapan belanja strategis untuk mendukung pencapaian target pembangunan kesehatan.
- c. Peningkatan kualitas Tenaga kesehatan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat termasuk pengurangan waktu tunggu untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.

(2) Pendidikan berkualitas yang merata

Pendidikan diharapkan dapat menjadi akselerator untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Kebijakan di sektor pendidikan diharapkan mampu mendorong keberlanjutan pendidikan anak ke jenjang yang lebih tinggi. Peluang kesempatan kerja menjadi lebih banyak di tingkat ini, sejalan dengan upaya

mengurangi tingkat pengangguran dan mendorong peningkatan pendapatan masyarakat. Sistem sertifikasi dan kompetensi dari lulusan sekolah vokasi diharapkan dapat bekerja optimal dan mengurangi tingkat pengangguran. Adapun tahap kedua untuk pendidikan berkualitas yang merata fokus pada:

- a. Peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran melalui penguatan kurikulum adaptif dan sistem asesmen komprehensif; peningkatan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan, serta profesionalisme pengelola lembaga pendidikan; penguatan pembelajaran bagi murid dan guru berkebutuhan khusus; peningkatan integrasi soft skills, social skills, dan life skills dalam pembelajaran; peningkatan kecakapan literasi kelas awal; penguatan pendidikan karakter; serta pencegahan perundungan, kekerasan seksual, dan intoleransi.
- b. Peningkatan kualitas dan distribusi guru dan dosen dalam rangka penyediaan layanan pendidikan yang inklusif melalui reformasi pendidikan keguruan dengan penguatan LPTK (Lembaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan) dan revitalisasi PPG; peningkatan kompetensi dan profesionalisme guru dan dosen secara berkelanjutan; peningkatan kualifikasi pendidikan guru dan dosen; peningkatan jumlah dosen, instruktur, dan tenaga kependidikan dalam bidang STEAM; penguatan kebijakan afirmatif guru dan dosen di daerah khusus; penguatan guru dan dosen difabel dalam penyelenggaraan pendidikan; dan perbaikan pengelolaan sumber daya dosen.
- c. Penguatan pendidikan agama dan pendidikan keagamaan, seperti pesantren, madrasah diniyah takmiliyah, sekolah teologi, seminari, pasraman, dan pabbajja samanera melalui penguatan kebijakan kurikulum inklusif dan moderat; penjaminan hak yang sama untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi dan mendapatkan kesempatan kerja; dan pemenuhan hak anak untuk mendapatkan pendidikan agama.

(3) Perlindungan sosial adaptif

Dukungan untuk implementasi perlindungan sosial adaptif yang inklusif dilandasi oleh kebutuhan penguatan kelembagaan dan kemitraan multi-pihak, pengembangan sistem pembiayaan tepat sasaran pada kelompok penerima manfaat, pengembangan kebutuhan ketersediaan dan pemanfaatan data dan informasi yang berkualitas dalam penerapan perlindungan sosial adaptif. Prinsip keadilan dan inklusif serta GEDSI dapat membantu efektifitas implementasi perlindungan sosial adaptif yang berkontribusi pada percepatan penurunan kemiskinan dan mengurangi ketimpangan. Adapun tahap kedua untuk perlindungan sosial adaptif fokus pada:

- a. Pengembangan bantuan sosial yang lebih adaptif terhadap bencana dan perubahan iklim.
- b. Peningkatan lingkungan yang inklusif terhadap anak, lansia, penyandang disabilitas, perempuan, dan penduduk rentan lainnya.

- c. Penyempurnaan metodologi penghitungan angka kemiskinan sehingga dapat memastikan pengukuran yang dapat memperlihatkan kondisi kesejahteraan penduduk di lapangan secara absolut yang hasilnya dapat dibandingkan antar waktu dan wilayah.

Tahap Ketiga Misi ke-1 :Memantapkan kualitas daya saing manusia yang berkelanjutan

Tahap ketiga diarahkan untuk Memantapkan kualitas daya saing Sumber Daya Manusia (SDM) dan menjamin keberlanjutan peningkatan kesejahteraan masyarakat Sumbawa. Memantapkan meliputi upaya pemantapan kualitas daya saing manusia yang berkelanjutan

(1) Kesehatan untuk semua

Arah kebijakan kesehatan untuk semua fokus pada memantapkan kualitas daya saing SDM yang diarahkan untuk memperkuat sektor kesehatan dengan tujuan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan serta menjawab tantangan regional yang spesifik. Adapun tahap ketiga untuk kesehatan untuk semua fokus pada:

- a. Pengembangan pelayanan dan peningkatan kualitas sarana prasarana kesehatan mencakup promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif dan paliatif dengan inovasi pelayanan kesehatan sesuai kondisi wilayah termasuk gugus pulau dan pegunungan.
- b. Pengendalian produksi, konsumsi, dan peredaran produk yang memberikan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat, antara lain melalui penerapan cukai dan inovasi pajak serta pemanfaatannya untuk pembangunan kesehatan.
- c. Penguatan Tenaga kesehatan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat termasuk pengurangan waktu tunggu untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.

(2) Pendidikan berkualitas yang merata

Dalam rangka memantapkan kualitas tenaga kerja yang memiliki berbagai keahlian dan Masyarakat di Kabupaten Sumbawa untuk membentuk watak kepribadian anak sejak dini. Pembentukan karakter dan kepribadian yang baik ini bertujuan untuk menciptakan manusia yang bertanggung jawab, memiliki moral yang baik dan berkontribusi memberikan manfaat untuk masyarakat dan lingkungan. Pendidikan karakter dan kepribadian penting menjadi bagian dari satuan pendidikan dari jenjang pendidikan dasar, menengah dan tinggi. Adapun tahap ketiga untuk menetapkan pendidikan berkualitas yang merata fokus pada:

- a. Revitalisasi pendidikan nonformal (pendidikan masyarakat) serta penguatan pendidikan sepanjang hayat, pendidikan berbasis komunitas, dan life skill melalui pengembangan ekosistem dengan memberi ruang bagi peningkatan akses, kualitas pembelajaran, dan kompetensi lulusan.

- b. Peningkatan kualitas dan efisiensi pembiayaan pendidikan dalam upaya meningkatkan kualitas pembelajaran melalui penyelarasan pemanfaatan anggaran pendidikan pada tingkat pusat dan daerah; pemanfaatan sumber pendanaan inovatif; dan penerapan strategi pendanaan pendidikan yang berkeadilan.

(3) Perlindungan sosial adaptif

Skema perlindungan sosial adaptif ini berupa bantuan sosial, jaminan sosial, dan lapangan kerja yang layak. Secara komprehensif, perlindungan sosial adaptif yang berkeadilan bermanfaat bagi kelompok rentan penerima manfaat dengan memberikan akses pelayanan dasar, akses pasar kerja/kewirausahaan, administrasi kependudukan, infrastruktur dasar, akses informasi, dan berbagai layanan terkait lainnya. Implementasi jangka panjang untuk perlindungan sosial adaptif yang inklusif dan berkeadilan ini didasarkan pada prinsip penggunaan data yang sama untuk berbagipakai data dengan multi-pihak sebagai penguatan koordinasi program dan kegiatan yang berdampak positif pada kelompok rentan. Adapun tahap ketiga untuk perlindungan sosial adaptif fokus pada:

- a. Integrasi penentuan target, manfaat, dan pelaksanaan bantuan sosial, jaminan sosial, serta pemberdayaan masyarakat.
- b. Peningkatan keterampilan bekerja dan berwirausaha sepanjang hayat.
- c. Perlindungan sosial yang berkesinambungan utamanya pengembangan sosial impact bonds, social impact investment, dan optimalisasi dana jaminan sosial.

Tahap keempat Misi ke-1: Terwujudnya manusia Sumbawa yang unggul dan berdaya Saing

Tahap keempat diarahkan untuk perwujudan manusia Sumbawa Unggul dan berdaya saing terhadap perubahan dinamika global,. Perwujudan Sumber Daya Manusia yang Unggul dan berdaya saing meliputi upaya

(1) Kesehatan untuk semua

Perwujudan SDM yang kompetitif, unggul dan berdaya saing ditandai dengan masyarakat yang sehat secara fisik, mental dan spiritual. Kebijakan ini bertujuan untuk membentuk SDM yang tidak hanya kompeten dibidang kesehatan tetapi juga memiliki moral dan etika yang kuat. Adapun tahap keempat kesehatan untuk semua fokus pada:

- a. Pemantapan kebijakan keluarga berencana secara komprehensif untuk mencapai penduduk tumbuh seimbang melalui pengendalian dan pencegahan kehamilan berisiko yang didukung dengan peningkatan pemahaman dan perubahan perilaku masyarakat, jaminan akses, dan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak serta kesehatan reproduksi dari sisi tenaga kesehatan, serta sarana dan prasarana yang merata di seluruh tingkatan wilayah.

- b. Pemantapan Tenaga kesehatan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat termasuk pengurangan waktu tunggu untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.

(2) Pendidikan berkualitas yang merata

Pengembangan pendidikan yang berhasil adalah terwujudnya manusia unggul memiliki kesehatan yang baik, dari sisi fisik dan mental. Pembentukan karakter ini terjalin dengan pendidikan karakter yang diintegrasikan pada kurikulum pembelajaran di satuan pendidikan. Untuk itu, pendidikan nilai-nilai agama, spiritual, dan nilai budaya dapat membantu pembentukan karakter dan kepribadian yang baik, meningkatkan kecerdasan emosi dan kecerdasan sosial. Manusia Sumbawa unggul diharapkan dapat berprestasi secara akademik dan memiliki karakter yang kuat, moralitas yang tinggi, dan kepribadian yang baik. Adapun tahap keempat untuk pendidikan berkualitas yang merata fokus pada:

- a. Peningkatan partisipasi pendidikan tinggi dan lulusan STEAM (Science, Technology, Engineering, Art, and Mathematics berkualitas termasuk pemanfaatan dana abadi pendidikan.
- b. Penguatan peran pendidikan tinggi untuk mobilitas sosial dengan memperkuat sistem pembelajaran berbasis outcome dan pendekatan multidisiplin
- c. Restrukturisasi kewenangan pengelolaan guru sebagai salah satu alternatif kebijakan untuk memastikan kemudahan mobilitas guru antardaerah melalui: analisis kebutuhan, rekrutmen, pengangkatan dan penempatan guru ASN (Aparatur Sipil Negara) pada satuan pendidikan milik Pemerintah/ Pemerintah Daerah secara terpusat.
- d. Percepatan perwujudan diferensiasi misi perguruan tinggi melalui pemberian mandat, terutama kepada PTN.
- e. Peningkatan produktivitas, daya saing, dan kemampuan kerja melalui penguatan keahlian dan kompetensi baru, pendidikan kewirausahaan, ekosistem kemitraan dunia usaha dan dunia industri (DUDI) dan kerja sama penelitian dan pengembangan strategis; penguatan keselarasan bidang keahlian/program studi sesuai kebutuhan DUDI, keterampilan abad 21, serta penguasaan dan pengembangan sains dan teknologi termasuk untuk menghasilkan innovation-based start up; penguatan sistem pembelajaran berstandar industri; peningkatan kapasitas pendidik/ instruktur/ pelatih; peningkatan program sertifikasi kompetensi bagi peserta didik, dan peningkatan kualitas pembinaan talenta olahraga.

(3) Perlindungan sosial adaptif

Manfaat perlindungan sosial adaptif adalah untuk mengurangi kemiskinan dan ketimpangan secara berkesinambungan dengan membantu kelompok masyarakat miskin dan rentan. Hal ini juga bermanfaat untuk membangun ketahanan bencana dan iklim jangka panjang melalui strategi penyaluran program yang tepat sasaran pada kelompok penerima manfaat,

efisiensi anggaran dan menjamin efektifitas program perlindungan sosial yang adaptif, berkeadilan, dan inklusif. Adapun tahap keempat untuk perlindungan sosial adaptif fokus pada:

- a. Peningkatan usia pensiun bertahap sampai dengan usia 65 tahun dengan memastikan kesiapan sosial dan ekonomi melalui perluasan cakupan jaminan pensiun dan hari tua, pendidikan sepanjang hayat, peningkatan kualitas kesehatan, dan pengembangan lingkungan yang ramah lanjut usia.

i. Arah kebijakan Misi 2 : Transformasi Pembangunan Ekonomi Daerah yang Maju dan berkelanjutan

Pembangunan ekonomi di Sumbawa menuntut untuk dilakukannya transformasi ekonomi menuju perekonomian daerah yang maju dengan ditandai oleh meningkatnya pendapatan per kapita penduduk hingga keluar dari ancaman *Middle Income Trap* (MIT). Transformasi ini dilakukan dengan berbagai kebijakan pemerintah dan beberapa perubahan besar yaitu perubahan struktur penduduk, kemajuan teknologi, perubahan iklim termasuk pengembangan sektor ekonomi terutama dalam peningkatan produktivitas sektor Non tambang, penerapan transformasi hijau dan biru, penerapan teknologi informasi, investasi yang besar dalam riset dan inovasi serta didukung pembangunan infrastruktur. Transformasi ekonomi pada dasarnya tidak bisa terjadi dengan cepat dan mudah, sehingga diperlukan kolaborasi dari berbagai pihak tidak hanya pemerintah, tetapi juga dari swasta, masyarakat dan lembaga pendukung lainnya untuk menjamin pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan inklusif. Transformasi ekonomi secara bertahap akan mengubah struktur ekonomi dari yang berbasis pada komoditas bernilai tambah rendah, menjadi berbasis pada industri yang bernilai tambah tinggi didukung oleh teknologi dan inovasi sehingga lebih produktif, efisien, dan berdaya saing tinggi. Arah kebijakan transformasi Ekonomi Sumbawa fokus pada Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi, Penerapan Ekonomi Hijau, Transformasi Digital, Integrasi Ekonomi Domestik dan Global dan Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi sebagai berikut:

1. Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan baru yaitu kawasan pariwisata unggulan dan pengembangan ekonomi kreatif sepanjang koridor Wilayah Sumbawa, sentra-sentra produksi komoditas unggulan di kawasan perdesaan, sentra-sentra pengolahan dan sentra pemasaran di kawasan perkotaan, terutama dengan memanfaatkan kedekatan dengan Australia dan Selandia Baru;
2. Pengembangan sektor primer pada sentra-sentra produksi komoditas unggulan di kawasan perdesaan;
3. Pengembangan sektor sekunder pada sentra-sentra pengolahan dan sentra pemasaran di kawasan perkotaan
4. Peningkatan diversifikasi ekonomi dan integrasi pembangunan panjang kepariwisataan Wilayah Bali-Nusa Tenggara dengan menekankan di antaranya ekonomi Bali yang hijau, tangguh, dan sejahtera; Lombok

- sebagai daerah pariwisata yang berkelanjutan, tangguh, dan inklusif; serta Labuan Bajo sebagai destinasi berbasis ekowisata premium yang berdaya saing, inklusif, dan berkelanjutan;
5. Pengembangan kawasan pariwisata premium sepanjang koridor Wilayah Sumbawa seperti Labuan Sumbawa, serta pengembangan ekonomi kreatif tenun, kopi, madu, vanili, susu kuda, mete;
 6. Pengembangan kawasan pariwisata massal (mass tourism), seperti Sumbawa, untuk meningkatkan jumlah dan minat wisatawan lokal, serta sebagai kawasan penyangga bagi kawasan pariwisata premium yang berfokus pada pemecahan konsentrasi dan perpanjangan lama tinggal wisatawan;
 7. Pengembangan ekosistem pariwisata yang berkelanjutan dengan mempertimbangkan aspek kebencanaan dan perubahan iklim, kemudahan investasi, serta pertumbuhan industri pariwisata dan industri kreatif lainnya;
 8. Pengembangan ekonomi kreatif penopang sektor pariwisata khususnya tenun, kopi, madu, Kelapa, susu kuda, mete, pada sentra-sentra ekonomi lokal;
 9. Penerapan pertanian berkelanjutan yang terintegrasi dengan sektor peternakan serta sektor potensial lainnya, seperti pariwisata dan pengembangan sistem pertanian regeneratif dengan pembentukan korporasi petani;
 10. Pengembangan industri pengolahan komoditas unggulan berbasis masyarakat yang dikembangkan secara klaster melalui peningkatan produktivitas dan nilai tambah (added value) tinggi yang berorientasi ekspor;
 11. Peningkatan up-skilling dan re-skilling SDM terutama pariwisata dan ekonomi kreatif;
 12. Penguatan BLK dan BRIDA dalam mempersiapkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing;
 13. Penerapan transportasi ramah lingkungan Electric Vehicle (EV)
 14. Mendorong pemanfaatan energi baru dan terbarukan, terutama energi surya (Pulau Sumba), panas bumi (Pulau Flores), penyediaan energi listrik melalui PLTB (Pulau Timor), biomassa, dan arus laut untuk memperbaiki bauran pembangkit listrik dan mendorong pengembangan ekonomi hijau (green economy);
 15. Mengembangkan jaringan listrik cerdas (smart grid) untuk mendukung peningkatan keandalan dan dekarbonisasi pasokan tenaga listrik;
 16. Mengembangkan interkoneksi dalam wilayah dan antarpulau (transmisi antara lain) untuk evakuasi daya listrik terbarukan dan peningkatan keandalan di Wilayah Sumbawa;
 17. Mengembangkan grid skala kecil terisolasi (isolated mini grid) untuk memperluas penyediaan layanan yang lebih berkualitas termasuk daerah kepulauan untuk Wilayah Sumbawa.

18. Untuk memperluas jangkauan promosi dan pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif yang menargetkan segmen pasar tertentu seperti wisata premium berkelas dunia atau ecotourbm;
19. Perluasan jaringan broadband hingga menjangkau ke seluruh pelosok;
20. Pemenuhan jaringan internet dan TIK yang inklusif serta menjangkau Wilayah-pulau kecil dan daerah afirmasi 3TP;
21. Peningkatan akses dan ketersediaan fasilitas pendidikan yang menyeluruh dan sesuai standar untuk tiap jenjang pendidikan dengan memaksimalkan pemanfaatan TIK dalam kegiatan belajar-mengajar;
22. Pemanfaatan TIK untuk memperluas jangkauan promosi dan pemasaran bagi pariwisata dan ekonomi kreatif
23. Penguatan TIK untuk memperluas akses pasar pada skala nasional hingga global, salah satunya dengan pemanfaatan e-commerce dan penguatan branding produk; dan
24. Peningkatan fasilitas pendukung transformasi digital melalui upaya meningkatkan literasi digital bagi masyarakat, menciptakan keamanan informasi dan siber serta kemampuan SDM digital atau digitat skill (antara lain melalui pelatihan talenta digital dasar, menengah, dan tinggi, serta kepemimpinan digital).
25. Peningkatan rantai nilai global melalui skema-skema kerja sama Nasional
26. Penyiapan sentra produksi di kawasan perdesaan dan sentra pengolahan dan pasar di kawasan perkotaan, serta penguatan keterkaitan desa-kota;
27. Peningkatan peran kawasan perkotaan sebagai kawasan penyangga di kawasan pariwisata premium yang akan dikembangkan;
28. Penguatan konektivitas antara sentra produksi, pengolahan, dan pasar baik dalam dan luar negeri;
29. Pengembangan kawasan perkotaan, termasuk Wilayah Metropolitan, yang terintegrasi dan berkelanjutan berbasis karakter wilayah dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung.

Selanjutnya transformasi Transformasi Pembangunan Ekonomi Daerah yang Maju dan berkelanjutan bertujuan untuk mengubah struktur perekonomian daerah dari berbasis pada komoditas bernilai rendah menjadi berbasis pada industri pengolahan yang bernilai tambah tinggi didukung oleh teknologi dan inovasi sehingga lebih produktif, efisien dan berdayasaing.

Gambar 5.2. Tahapan Misi 2 Transformasi Pembangunan Ekonomi Daerah yang Maju dan berkelanjutan



Tahap 1 Misi ke-2 Memperkuat ekosistem industrialisasi dan meningkatkan kompleksitas produk industry hilirisasi industri prioritas hingga produk akhir yang berbasis sumber daya alam tambang, critical minerals, serta sumber daya alam agro dan maritim (laut) berdasarkan komoditas unggulan wilayah:

- a. Pembangunan dan revitalisasi Sentra Industri Produk Unggulan yaitu: produk makanan minuman (food beverage), kriya tenun, fashion, kerajinan kayu, garam industri dan garam konsumsi, madu, rokok kretek, tembakau iris, kerajinan bambu, pengolahan produk perikanan dan kelautan, olahan kopi, olahan kemiri.
- b. Pengembangan klaster industri dan rantai nilai komoditas unggulan berbasis SDA yaitu udang, rumput laut, lobster, garam, tembakau, tenun, fashion, kopi, madu, vanili, susu kuda, mete, kemiri, bambu, padi, jagung, sapi.
- c. Penguatan inovasi dan riset untuk peningkatan produksi, produktifitas dan kualitas komoditas unggulan prioritas.
- d. Pembangunan sentra dan kawasan dengan infrastruktur memadai untuk penguatan rantai nilai komoditas unggulan yaitu: udang, rumput laut, lobster, kerapu, sapi, padi, jagung beserta produk olahan yang kompetitif dengan pola pemberian insentif dan kemudahan bagi investor.
- e. Penguatan BLK sebagai pusat pelatihan SDM Ketenagakerjaan terampil dan kompeten yang mendukung hilirisasi komoditas unggulan berbasis agro dan maritim serta mendukung sektor tambang berbasis bukti dan pengetahuan.
- f. Penguatan dan pembangunan seluruh infrastruktur/ sarana prasarana penunjang hilirisasi dan infrastruktur perdagangan, transportasi dan logistik bagi komoditas unggulan.
- g. Pembangunan dan revitalisasi infrastruktur penunjang yang menghasilkan efektifitas dan efisiensi sentra pengolahan komoditas unggulan sesuai dengan daya tampung dan daya dukung wilayah.
- h. Penguatan kelembagaan ekosistem industri Halal dimotori oleh Pusat Halal Kabupaten Sumbawa.
- i. Penguatan regulasi kemudahan dan kepastian berusaha sesuai dengan daya tampung, daya dukung dan komoditas unggulan daerah

Tahap 2 Misi ke-2 Meningkatkan kompleksitas produk industri peningkatan investasi dan ekspansi industri prioritas yang padat karya terampil, berorientasi ekspor, berbasis teknologi menengah dan tinggi, serta diutamakan di luar Jawa :

- a. Peningkatan produktifitas sentra klaster industri produk unggulan yaitu: produk makanan minuman (food beverage), kriya tenun, fashion, kerajinan kayu, garam industri dan garam konsumsi, madu, rokok kretek, tembakau iris, kerajinan bambu, pengolahan produk perikanan dan kelautan, kopi, olahan kemiri.
- b. Akselerasi peningkatan produktifitas klaster industri komoditas unggulan berbasis SDA yaitu udang beku, refined carrageenan, lobster, garam industri dan garam konsumsi, tembakau, tenun, fashion, kopi, madu, vanili, susu kuda, mete, kemiri, bambu, padi, jagung, sapi.
- c. akselerasi penerapan inovasi dan riset guna menghasilkan produk berdaya saing tinggi.
- d. Masifikasi produksi dan produktifitas yang mempengaruhi PDRB wilayah dengan membangun integrasi antar kawasan antar komoditas dengan ditunjang dengan infrastruktur yang memadai.
- e. Integrasi BLK dan BRIDA dalam Penerapan inovasi dan teknologi sebagai institusi penunjang (supporting institution) dalam klaster industri komoditas dan produk unggulan berbasis agro, maritim, dan tambang mineral.
- f. Akselerasi peningkatan produksi dan produktifitas pada tiap rantai nilai dan rantai pasok komoditas unggulan yang kompetitif.
- g. Peningkatan produktifitas komoditas unggulan yang masif dalam sentra dengan skema triple helix dengan meningkatkan keunggulan komparatif menjadi keunggulan kompetitif.
- h. akselerasi pembentukan ekosistem industri halal terhadap produk yang dikonsumsi masyarakat dan produk yang digunakan masyarakat dari hulu sampai hilir.
- i. Penerapan kemitraan antara pelaku usaha menengah-besar dengan pelaku usaha industri kecil dan penerapan inovasi di sektor industrialisasi.
- j. Masifikasi produksi dan produktifitas klaster perbenihan komoditas unggulan sektor pertanian, perikanan, perkebunan dengan penerapan inovasi dan teknologi baru serta kalender musim yang presisi.

Tahap 3 Misi ke-2 Memantapkan daya saing industri menuju ekspansi memantapkan daya saing industri menuju ekspans antara lain :

- a. Modernisasi sentra industri produk unggulan yaitu: produk makanan minuman (food beverage), kriya tenun, fashion, kerajinan kayu, garam industri dan garam konsumsi, madu, rokok kretek, tembakau iris, kerajinan bambu, pengolahan produk perikanan dan kelautan, kopi, olahan kemiri.
- b. Pemenuhan standar industri sesuai permintaan negara tujuan ekspor untuk komoditas unggulan berbasis SDA dan pelayanan ekspor dengan

- gerbang kepabeanan di Kabupaten Sumbawa melalui gerbang Bandara Sultan Kaharuddin IV Sumbawa, Bandara Lunyuk, dan Pelabuhan Badas.
- c. Ekspansi inovasi dan riset berbasis bukti dan pengetahuan untuk meningkatkan pemanfaatan komoditas unggulan prioritas yang berkelanjutan.
 - d. Ekspansi komoditas unggulan dan produk olahan di tingkat nasional dan kompetitif di tingkat global dengan pendekatan pentahelix.
 - e. Penguatan regulasi ketenagakerjaan dalam pengembangan komoditas dan produk unggulan berbasis agro, maritim, dan penyerapan SDM terampil dalam operasi produksi tambang mineral.
 - f. Pembentukan jaringan dan ekosistem produk olahan dan komoditas unggulan secara klaster industry.
 - g. Pembentukan dan penguatan rantai pasok dan rantai nilai komoditas unggulan yang kompetitif.
 - h. Penerapan insentif dan disinsentif bagi pelaku usaha.

Tahap 4 Misi ke-2 Terwujudnya sumbawa sebagai kabupaten industri berkelanjutan antara lain:

- a. Sentra industri terhubung dengan seluruh aktor perdagangan dan jasa yang menjadi komoditas ekspor.
- b. Pelaksanaan Linkage Agenda rantai nilai komoditas unggulan berbasis SDA yaitu: SDA yaitu udang beku, refined carrageenan, lobster, garam industri dan garam konsumsi, tembakau, tenun, fashion, kopi, madu, vanili, susu kuda, mete, kemiri, bambu, padi, jagung, sapi.
- c. Aktualisasi potensi SDA yang inovatif, efektif, efisien, dan berkelanjutan.
- d. Perwujudan investasi yang memiliki daya tarik tinggi dengan ragam produk inovatif sebagai komoditas ekspor melalui gerbang kepabeanan dari Kabupaten Sumbawa.
- e. Perwujudan peningkatan produktifitas dan efisiensi pada tiap investasi dalam pengembangan komoditas dan produk unggulan berbasis agro, maritim, dan operasi produksi tambang mineral.
- f. Perwujudan produk olahan berkualitas tinggi dan komoditas unggulan dengan brand global.
- g. Klaster Industri dan ekosistem bisnis tiap komoditas unggulan terbentuk secara efektif.
- h. perwujudan produk halal menjadi life style masyarakat yang ditandai dengan mudahnya menemukan produk halal.
- i. perwujudan ekosistem bisnis yang kondusif dan berkelanjutan.

5.3. Arah Kebijakan Misi 3 Transformasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah

Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik atau lebih dikenal dengan istilah *good governance* merupakan salah satu wujud untuk terselenggaranya

negara yang menjunjung kepentingan rakyat. Membangun good governance adalah sebuah harapan yang harus dapat dilaksanakan. Dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah, terdapat beberapa hal substansial yang tersirat yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah diantaranya:

- a) Kewenangan / urusan pemerintahan daerah (wajib, pilihan, dan administratif);
- b) Kelembagaan / penataan organisasi perangkat daerah;
- c) Pengelolaan keuangan daerah;
- d) Penyelenggaraan pelayanan publik; dan
- e) Manajemen Aparatur Sipil Negara.

Tata kelola pemerintahan yang berjalan dengan baik secara efektif dan efisien diharapkan dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Cerminan tata kelola pemerintahan yang berkualitas dapat dilihat dari penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang di dukung oleh sistem penegakan hukum dan kondusivitas daerah serta kompetensi SDM aparatur dan kemandirian fiskal yang baik dengan pendekatan yang transparan, akuntabel dan responsif. Tata kelola dengan pengelolaan sektor publik yang efisien, efektif dan akuntabel didasarkan atas pertukaran informasi yang terbuka, transparan serta mematuhi kerangka hukum.

Arah kebijakan transformasi tatakelola untuk Kabupaten Sumbawa fokus pada arah pembangunan Regulasi dan Tata kelola yang Berintegritas dan Adaptif sebagai berikut:

1. Optimasi regulasi, termasuk proses pra-regulasi yang memadai di daerah.
2. Peningkatan partisipasi bermakna masyarakat sipil dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan.
3. Peningkatan respons terhadap laporan pelayanan publik masyarakat.
4. Penguatan kapasitas aparatur daerah dan lembaga dalam hal manajemen data dan keamanan informasi, kapasitas digital SDM ASN, dan pengelolaan aset daerah.
5. Percepatan digitalisasi layanan publik dan pelaksanaan audit SPBE untuk penguatan aspek pemerintahan digital.
6. Peningkatan pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui pendidikan anti korupsi.
7. transparansi proses perencanaan, penganggaran, dan pengadaan jasa-jasa; serta transparansi layanan perizinan berbasis digital.
8. Pengawasan proses pengembangan karier, promosi mutasi ASN dan manajemen kinerja dengan pemanfaatan teknologi informasi;
9. Penguatan kerja sama antar daerah khususnya Wilayah Sumbawa, dengan mengoptimalkan kembali kerja sama yang telah dilakukan sebelumnya;
10. Penguatan skema kerja sama dengan kabupaten tetangga antara lain Kabupaten Dompu, dan Kabupaten Sumbawa Barat untuk memperluas pasar internasional; dan
11. Penguatan regulasi penataan jalur lalu lintas laut dan penangkapan ikan serta peningkatan kapasitas masyarakat.

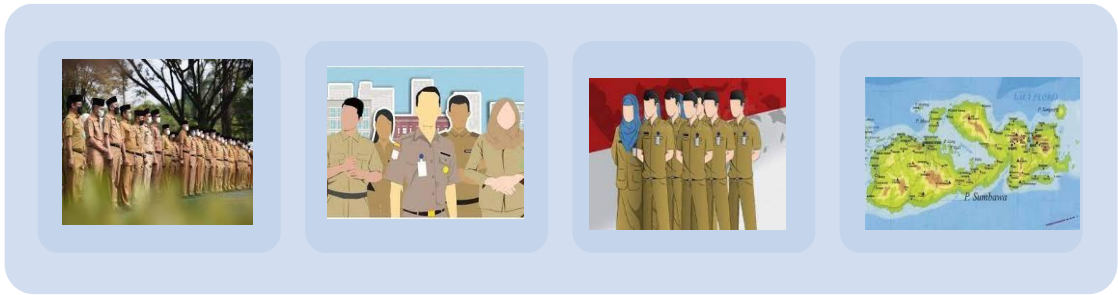
Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif

Arah kebijakan untuk mewujudkan proses bisnis yang adaptif difokuskan pada penyederhanaan proses bisnis yang kolaboratif dan terintegrasi melalui *reengineering* proses bisnis pemerintahan dengan melakukan (a) pemetaan proses bisnis tematik berdasarkan isu prioritas dan (b) pengembangan sistem manajemen kinerja pembangunan yang berdasarkan *shared outcomes*. Selanjutnya dalam mewujudkan manajemen talenta, arah kebijakan difokuskan pada penguatan manajemen talenta ASN di seluruh perangkat daerah dilingkup Provinsi NTB melalui pembangunan talent pool di unit kerja kepegawaian dengan pembangunan sistem informasi manajemen talenta, penuntasan asesmen kompetensi, penguatan manajemen kinerja dan pengembangan kompetensi ASN, serta perbaikan kebijakan penghargaan bagi ASN.

Untuk isu strategis tata kelola yang terakhir yakni mewujudkan relasi pemerintah dan masyarakat sipil dirumuskan arah kebijakan yang berfokus pada penguatan kapasitas dan peningkatan partisipasi bermakna (*meaningful participation*) masyarakat sipil melalui penguatan kapasitas SDM, kapasitas kelembagaan, dan lingkungan pendukung masyarakat sipil, serta fasilitasi penyediaan dana abadi untuk masyarakat sipil. Selain itu diperlukan adanya pengarusutamaan terhadap nilai-nilai keterbukaan pemerintah di seluruh sektor pembangunan dan pelayanan publik.

Untuk tranformasi tatakelola diperlukan dalam rangka memungkinkan pemerintah daerah bekerja dengan kerangka kerja yang lebih efektif dan akuntabel sehingga dapat menyediakan pelayanan public yang berkualitas. Tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan transformasi tatakelola adalah menciptakan lingkungan kelembagaan yang memungkinkan tercapainya regulasi tata Kelola yang berinteritas dan adaftif.

Gambar 5.3. Tahapan misi 3 Transformasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah



Tahapan Misi 3 : Transformasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah

Tahap 1 Memperkuat kualitas Aparatur Sipil Negara, regulasi yang efektif, digitalisasi pelayanan publik, peningkatan integritas partai politik dan pemberdayaan masyarakat sipil

a Transparansi dan Akuntabilitas:

- ✓ Reformasi Administrasi Publik: Menerapkan sistem pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel, termasuk penggunaan teknologi informasi untuk mempermudah akses informasi publik.
- ✓ Pengawasan dan Pengendalian: Memperkuat mekanisme pengawasan untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan wewenang.

b Pelayanan Publik dan Partisipasi Masyarakat:

- ✓ Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik: Meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan publik dengan fokus pada kepuasan masyarakat.
- ✓ Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan: Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan.

Tahap 2 Meningkatkan kelembagaan kolaborasi SDM ASN yang berkualitas, regulasi berbasis teknologi informasi, partai politik berintegritas dan masyarakat sipil yang partisipatif

a Reformasi Administrasi Publik dan Efisiensi:

- Digitalisasi Pelayanan Publik: Menerapkan sistem digital untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi pelayanan publik serta mempermudah akses informasi.
- Penguatan Kapasitas Aparatur: Mengembangkan kapasitas dan kompetensi aparatur pemerintah melalui pelatihan dan pengembangan profesional.

b Partisipasi dan Akuntabilitas:

- Keterlibatan Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan: Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan.
- Mekanisme Pengaduan dan Pengawasan: Memperkuat mekanisme pengaduan dan pengawasan untuk memastikan akuntabilitas dan mengatasi penyalahgunaan wewenang.

Tahap 3 Memantapkan kelembagaan adaptif SDM ASN yang kompetitif, partai politik modern, regulasi adaptif dan masyarakat sipil yang mandiri

a Reformasi Tata Kelola dan Efisiensi:

- Peningkatan Kualitas Layanan Publik: Memperbaiki efisiensi dan kualitas layanan publik dengan menggunakan teknologi digital dan meningkatkan integrasi antar lembaga pemerintah.
- Penguatan Sistem Pengawasan: Mengembangkan sistem pengawasan yang lebih transparan dan efektif untuk mencegah korupsi dan meningkatkan akuntabilitas.

b Partisipasi dan Keterlibatan Masyarakat:

- Penguatan Partisipasi Masyarakat: Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan untuk memastikan kebijakan sesuai dengan kebutuhan lokal.
- Kemitraan Publik-Swasta: Memperkuat kemitraan antara sektor publik dan swasta untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas proyek pembangunan.

Tahap 4 Terwujudnya Sumbawa Yang berintegritas

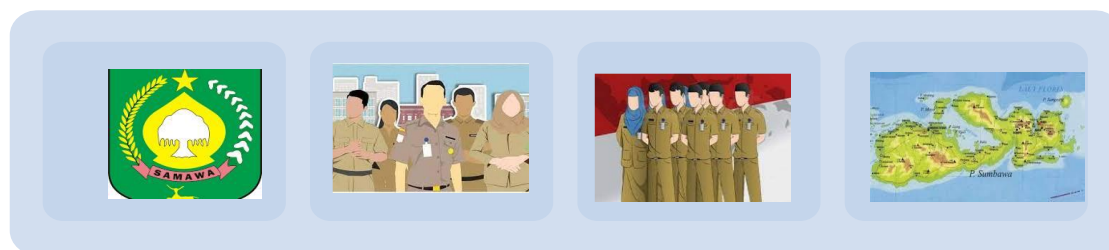
- a Reformasi dan Peningkatan Kinerja Pemerintah:
 - Tata Kelola yang Transparan dan Akuntabel: Memperkuat tata kelola pemerintahan dengan meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam pengambilan keputusan.
 - Kapasitas dan Kompetensi Aparatur: Meningkatkan kapasitas dan kompetensi aparatur pemerintahan melalui pelatihan berkelanjutan dan pengembangan profesional.
- b Penerapan Teknologi dan Digitalisasi:
 - Digitalisasi Layanan Publik: Memperluas penggunaan teknologi digital dalam pelayanan publik untuk meningkatkan efisiensi, aksesibilitas, dan transparansi.
 - Sistem Informasi Terintegrasi: Membangun sistem informasi yang terintegrasi untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis data dan meningkatkan koordinasi antar lembaga pemerintah.

5.4. Arah Kebijakan Misi 4 Stabilitas Daerah yang demokratis dan akuntabel

Dalam rangka mewujudkan visi NTB Sumbawa Maju Adil sejahtera dan berkelanjutan 2045 dan Indonesia Emas 2045, keberhasilan pencapaian transformasi sosial, ekonomi dan tata kelola di tingkat Kabupaten Sumbawa perlu di dukung oleh penegakan supremasi hukum, stabilitas ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta kondusifitas daerah serta jalinan koordinasi dan kerjasama yang erat sebagai faktor pendukung. Arah kebijakan Stabilitas daerah yang demokratis dan akuntabel pada sebagai berikut:

- (1) Peningkatan kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan;
- (2) Peningkatan keamanan untuk mengurangi tingkat kriminalitas lokal dan lintas batas;
- (3) Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), pemanfaatan pembiayaan alternatif terutama KPBU, peningkatan kualitas belanja daerah untuk mendukung potensi komoditas unggulan, optimalisasi pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD), sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional; dan
- (4) Penguatan Pengendalian inflasi daerah

Gambar 5.4. Misi 4 : Stabilitas daerah yang demokratis dan akuntabel



Tahapan Misi ke 4 selama 4 periode

1. Tahap 1 Misi ke-4 Memperkuat stabilitas daerah yang demokratis dan akuntabel sebagai landasan transformasi pembangunan

Arah kebijakan penegakan hukum, stabilitas dan kerjasama daerah difokuskan pada (1) penegakan supremasi hukum nasional dan daerah; (2) stabilitas dan kondusifitas daerah; dan (3) koordinasi dan kerjasama daerah. Sedangkan untuk sasaran dari transformasi penegakan supremasi hukum, stabilitas dan kerjasama daerah meliputi : (a) terwujudnya penegakan supremasi hukum nasional dan daerah yang berkeadilan, berkepastian hukum, berkualitas dan bermanfaat serta berlandaskan nilai humanis dan hak asasi manusia; (b) terwujudnya stabilitas dan kondusifitas ketertiban umum dan ketentraman masyarakat guna memberikan jaminan berkehidupan dan beraktivitas sosial dan ekonomi; dan (c) terwujudnya jalinan koordinasi dan kerjasama yang erat dan saling menguntungkan baik di kawasan regional, nasional dan internasional sesuai kewenangan.

2. Tahap 2 Misi ke-4 Meningkatkan stabilitas daerah yang demokratis dan akuntabel untuk mewujudkan landasan kokoh bagi transformasi pembangunan

Arah kebijakan penegakan supremasi hukum dilaksanakan dengan memperkuat penerapan penegakan supremasi hukum serta regulasi kebijakan perundang-undangan nasional dan daerah yang efisien, terpadu dan mengedepankan nilai-nilai kearifan lokal, humanis dan hak asasi manusia serta melibatkan kementerian/lembaga, masyarakat dan komunitas penggiat masyarakat melalui mekanisme mediasi dan forum lainnya di luar pengadilan. Selanjutnya melaksanakan akselerasi transformasi dengan mempercepat implementasi penegakan supremasi hukum yang lebih tegas dan konkrit dalam semua aspek kehidupan masyarakat dengan memperluas substansi regulasi kebijakan, mekanisme penyelesaian hukum serta peran para stakeholder. Tahap selanjutnya adalah pengembangan transformasi dengan melakukan pemantapan penegakan supremasi hukum nasional dan daerah melalui mekanisme

penyelesaian persoalan hukum dan regulasi yang lebih efektif dan humanis. Kemudian tahap yang terakhir adalah perwujudan penegakan supremasi hukum nasional dan daerah yang kuat yang dicapai melalui penerapan regulasi yang terpadu dan menyeluruh melibatkan stakeholder terkait dengan pendekatan yang lebih humanis, berkeadilan, bernafaskan nilai-nilai kearifan lokal dan menghormati hak asasi manusia.

3. Tahap 3 Misi Ke-4 Memantapkan Sumbawa yang berkeadilan, bebas korupsi, menjunjung tinggi HAM berdemokrasi yang aman dan nyaman

Arah kebijakan stabilitas dan kondusifitas daerah dilaksanakan dengan memperkuat penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat untuk mencegah dan mengurangi konflik sosial serta kriminalitas yang terjadi di masyarakat melalui forum yang melibatkan pemuka adat dan tokoh agama dan masyarakat dengan pendekatan yang berbasis modal sosial dan kearifan lokal serta meningkatkan peran kepolisian daerah dan pemerintah kabupaten/kota dalam menghadapi kompleksitas ancaman gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Tahap berikutnya adalah dengan melakukan percepatan terwujudnya stabilitas dan kondusifitas daerah melalui penguatan kelembagaan dan pranata sosial dan pendeteksian serta penanganan gangguan terhadap ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Kemudian pada tahap berikutnya yakni pengembangan transformasi dengan melakukan pemantapan stabilitas ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta kondusifitas daerah untuk mewujudkan landasan yang kokoh bagi transformasi pembangunan. Tahap terakhir dalam arah kebijakan stabilitas dan kondusifitas daerah adalah perwujudan NTB Emas yang kondusif, aman dan nyaman melalui penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang adaptif, kolaboratif dan sinergi antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, TNI/Polri dan penggiat masyarakat.

4. Tahap 4 Misi ke-5 Terwujudnya Sumbawa yang berdaulat, aman dan nyaman

Arah kebijakan koordinasi dan kerjasama daerah dilaksanakan dengan memperkuat jalinan koordinasi dan kerjasama yang telah dilakukan dengan daerah/lembaga lain yang mendukung transformasi sosial, ekonomi dan tata kelola pemerintahan. Kemudian pada tahap selanjutnya, yakni dilakukannya akselerasi transformasi dengan melakukan percepatan koordinasi dan kerjasama melalui implementasi, pengendalian dan evaluasi tindak lanjut kerjasama sehingga memberikan manfaat bagi daerah. Pada tahap selanjutnya, dilakukan pengembangan transformasi melalui perluasan kerjasama daerah baik pihak dan substansi kerjasama sesuai dengan kebutuhan yang menguntungkan bagi daerah tidak hanya pada antar daerah/regional tetapi juga dengan internasional. Sedangkan untuk tahap terakhir dalam arah kebijakan koordinasi dan kerjasama daerah adalah perwujudan NTB Emas yang maju dan kolaboratif melalui peningkatan jejaring kerjasama regional dan internasional yang intens dan berkelanjutan dengan prinsip saling menguntungkan bagi daerah dan menjadikan NTB menjadi masyarakat global. Keberhasilan transformasi perlu didukung oleh

penciptaan supremasi hukum, demokrasi substansial, keamanan, stabilitas ekonomi dan kerjasama sebagai faktor pendorong.

5.5. Arah Kebijakan Misi 5 Ketahanan Sosial Budaya, Ekologi dan Adaptasi Masyarakat terhadap Perubahan Iklim

Kearifan lokal/adat istiadat daerah dipegang teguh sebagai karakter masyarakat dan menjadi modal dasar pembangunan terutama untuk menggerakkan transformasi sosial dan transformasi ekonomi, termasuk juga untuk membentengi masyarakat terutama generasi muda dari budaya luar yang berdampak negatif. Nilai-nilai agama terutama terkait kemampuan literasi keagamaan dalam mendukung pembangunan inklusif, moderat serta berorientasi kemaslahatan perlu terus di tingkatkan.

Perencanaan pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim dengan pendekatan ekonomi hijau di Kabupaten Sumbawa. Penerapan ekonomi hijau akan menjamin ketersediaan sumber daya alam yang dimiliki daerah dalam jangka panjang (keberlanjutan). Proses dekarbonisasi juga berfungsi ganda sebagai penjaga kelestarian lingkungan sekaligus sebagai sumber pertumbuhan investasi serta kesempatan kerja hijau yang layak. Sehingga pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan didukung oleh daya tampung lingkungan akan berkelanjutan.

Sebagai daerah kepulauan, seluruh pemangku kepentingan dan setiap kegiatan ekonomi harus berorientasi lingkungan dan keberlanjutan dengan kepedulian untuk menjaga dan terus memperbaiki kualitas lingkungan hidup, termasuk laut, supaya tidak menimbulkan efek samping akibat adanya pencemaran. Kualitas lingkungan yang semakin baik akan menjamin semakin baiknya keberlanjutan kegiatan-kegiatan perekonomian.

Tempat Pembuangan Akhir (TPA) ada saat ini perlu direvitalisasi kembali dan harus berorientasi keberlanjutan, di antaranya melalui gerakan pemilahan sampah, daur ulang, *waste to energy*, dan penguraian sampah organik menjadi biogas, serta metode pengelolaan sampah lainnya. Selain itu perlu dilakukan juga upaya preventif seperti pembatasan penggunaan plastik sekali pakai, atau dengan memfasilitasi kegiatan swadaya masyarakat seperti Bank Sampah sebagai salah satu upaya masyarakat untuk mendapatkan keuntungan ekonomi.

Arah kebijakan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi untuk Sumbawa difokuskan pada arah pembangunan Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju, Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif, Lingkungan Hidup Berkualitas, Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan dan Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim sebagai berikut:

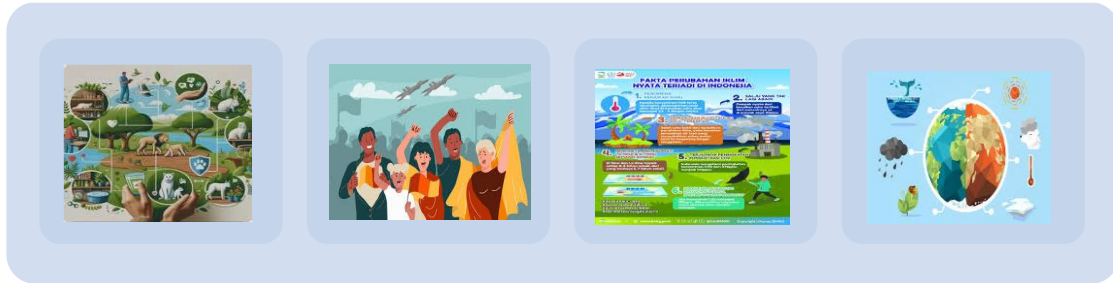
1. Penguatan pendidikan yang berbasis kerukunan antar etnis dan agama.
2. Peningkatan pengakuan dan penghormatan pada lembaga-lembaga adat dan hak ulayat masyarakat sumbawa.
3. Peningkatan upaya pelestarian adat, tradisi, budaya, dan lingkungan sebagai identitas dan citra Wilayah Sumbawa dalam mendukung

pengembangan destinasi pariwisata kebudayaan yang dapat menggerakkan perekonomian lokal.

4. Penguatan kerja sama dan pelibatan tokoh adat/agama di Wilayah Sumbawa sebagai penggerak masyarakat dan mitra utama pemerintah dalam perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan.
5. Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal;
6. Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan, termasuk perkawinan anak dan perdagangan orang, dengan pelibatan tokoh adat dan agama di Wilayah Sumbawa;
7. Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia, melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan; dan
8. Penguatan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan Sumbawa.
9. Penguatan upaya mempertahankan ekosistem alami berupa hutan daratan dan bakau serta luasan hutan sebagai tempat wilayah jelajah satwa (home range) dan konektivitas spesies yang dilindungi;
10. Rehabilitasi dan pemanfaatan lahan pasca tambang;
11. Pengembangan pangan lokal untuk mendukung diversifikasi pangan (padi, jagung, dan sorgum) di sentra-sentra produksi pangan food estate termasuk kawasan transmigrasi lokal yang didukung penyediaan sarana dan prasarana, SDM unggul dan kompeten, serta modernisasi pertanian dan irigasi yang berbasis teknologi termasuk pertanian berkelanjutan sebagai penopang kegiatan ekonomi wilayah
12. Penguatan kemandirian menuju kedaulatan pangan dan ketahanan air melalui diversifikasi pangan, riset dan inovasi sistem dan teknologi pertanian dengan memperhatikan kelestarian lingkungan khususnya lokasi prioritas kekeringan;
13. Modernisasi Irigasi
14. Perlindungan pulau-pulau kecil dari resiko abrasi
15. Pengelolaan risiko bencana melibatkan multi-aktor pemerintah dalam pembangunan dengan memperkuat kesadaran masyarakat akan potensi bahaya dan pengembangan mitigasi struktural dan non-struktural di wilayah rawan bencana tinggi;
16. Pembangunan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dengan menerapkan prinsip rendah karbon dan berketahanan iklim, untuk mewujudkan masyarakat tangguh iklim dan lingkungan hidup yang berkelanjutan dalam mendukung ketahanan energi dan air.
17. Perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan karakteristik daerah kepulauan, daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, luasan hutan, wilayah jelajah satwa spesies dilindungi, serta risiko bencana, dengan penguatan mitigasi risiko pada Wilayah Sumbawa;

18. Pengendalian banjir terpadu di wilayah pariwisata dan perlindungan pulau-pulau kecil dari risiko abrasi;

Gambar 5.5. Misi-5 : Ketahanan Sosial Budaya, Ekologi dan Adaptasi Masyarakat terhadap Perubahan Iklim



Tahapan Misi ke 5 selama 4 periode

Tahap 1 Misi ke-5 : Memperkuat ketahanan sosial budaya dan ekologi sebagai landasan dan modal dasar pembangunan

- 1. Perlindungan dan pelestarian kearifan lokal yang mendukung ketahanan pangan**
 - a Revitalisasi dan pengembangan praktik pertanian tradisional:
 - Melestarikan dan mengembangkan praktik-praktik pertanian berbasis kearifan lokal, seperti sistem irigasi tradisional (subak, semacamnya), pengetahuan lokal tentang musim dan cuaca, serta teknik pertanian organik yang ramah lingkungan.
 - Meningkatkan kapasitas petani lokal melalui pelatihan berbasis kearifan lokal untuk meningkatkan produksi pangan yang berkelanjutan tanpa merusak ekosistem.
 - b Pengembangan produk pangan lokal:
 - Mendorong diversifikasi pangan lokal yang berbasis pada tanaman asli NTB, seperti sorgum, jagung lokal, dan tanaman herbal yang memiliki nilai gizi tinggi dan adaptif terhadap perubahan iklim.
 - Mengembangkan pasar dan promosi untuk produk pangan lokal agar lebih dikenal dan diminati, baik di dalam maupun luar daerah, sehingga dapat meningkatkan ketahanan pangan sekaligus perekonomian lokal.
 - c penguatan peran tokoh adat dan masyarakat dalam ketahanan pangan:

- Melibatkan tokoh adat, pemuka masyarakat, dan petani lokal dalam perumusan kebijakan dan program ketahanan pangan yang berbasis kearifan lokal.
- Mendukung program komunitas yang mempromosikan ketahanan pangan dengan pendekatan budaya, seperti ritual panen dan upacara adat yang terkait dengan pertanian.

2. Optimalisasi tata kelola perlindungan ekologi untuk mendukung ketahanan pangan

- a Konservasi sumber daya alam dan ekosistem pendukung pertanian:
 - Melakukan konservasi terhadap lahan pertanian yang produktif serta ekosistem yang mendukung seperti hutan, sumber air, dan kawasan pesisir yang penting untuk irigasi dan budi daya pangan.
 - Mengintegrasikan upaya pelestarian lingkungan dengan praktik pertanian berkelanjutan untuk mencegah degradasi lahan dan menjaga kualitas tanah, air, dan udara.
- b Pengembangan infrastruktur pertanian yang ramah lingkungan:
 - Meningkatkan infrastruktur irigasi yang efisien dan ramah lingkungan untuk mendukung sistem pertanian berkelanjutan, termasuk penggunaan teknologi irigasi hemat air.
 - Membangun infrastruktur penyimpanan dan distribusi pangan yang berkelanjutan untuk mengurangi kerugian pasca-panen dan menjaga stabilitas pasokan pangan.
- c Penerapan teknologi dan inovasi untuk ketahanan pangan:
 - Mendorong adopsi teknologi ramah lingkungan dan inovasi dalam pertanian, seperti agroforestri, pertanian terpadu, dan teknologi pengolahan pangan yang meminimalkan dampak lingkungan.
 - Mengembangkan riset dan pengembangan (R&D) dalam bidang pertanian dan pangan yang berbasis ekologi untuk meningkatkan efisiensi produksi serta mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan.

3. Penguatan kelembagaan dan kebijakan untuk mendukung kearifan lokal dan ekologi dalam ketahanan pangan

- a Penguatan kebijakan dan regulasi yang mendukung kearifan lokal:
 - Menyusun kebijakan daerah yang mendukung perlindungan kearifan lokal dalam praktik pertanian dan ketahanan pangan, serta mengintegrasikannya dalam rencana pembangunan daerah.
 - Mengembangkan regulasi yang mengakomodasi perlindungan ekologi di kawasan pertanian dan lingkungan hidup, dengan memberikan insentif bagi praktik pertanian yang berkelanjutan.
- b Peningkatan kapasitas kelembagaan untuk pengelolaan ekologi dan ketahanan pangan:
 - Meningkatkan kapasitas institusi pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan ketahanan pangan melalui pelatihan, workshop, dan program-program kolaboratif.

- Memperkuat kerjasama antara pemerintah daerah, lembaga riset, dan masyarakat untuk mengembangkan program ketahanan pangan yang selaras dengan pelestarian lingkungan.

4. Pemberdayaan masyarakat dan edukasi lingkungan untuk mendukung ketahanan pangan

- a Edukasi dan kesadaran lingkungan di kalangan masyarakat:
 - Mengadakan program edukasi lingkungan yang mengedepankan pentingnya kearifan lokal dalam menjaga ketahanan pangan dan kelestarian ekologi.
 - Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan sebagai bagian dari upaya mempertahankan dan meningkatkan ketahanan pangan.
- b pemberdayaan komunitas dalam pengelolaan pangan dan lingkungan:
 - Memberdayakan komunitas petani dan masyarakat lokal melalui program pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan dan berbasis pada potensi lokal.
 - Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan, melalui program-program seperti pertanian organik dan agroforestri.

Tahap 2 Misi ke-5 : Meningkatkan ketahanan sosial budaya dan ekologi sebagai pendorong pembangunan ekonomi yang setara dan inklusi

1. Penguatan Karakter Sosial Budaya Berbasis Kearifan Lokal

- a Pengembangan dan Revitalisasi Nilai-Nilai Kearifan Lokal:
 - Mengintegrasikan nilai-nilai kearifan lokal dalam kurikulum pendidikan formal dan non-formal untuk memperkuat karakter sosial budaya masyarakat NTB.
 - Mendorong pengajaran dan praktik nilai-nilai budaya seperti gotong royong, solidaritas, dan kebersamaan dalam kehidupan sehari-hari dan kegiatan komunitas.
- b Peningkatan Peran Tokoh Adat dan Masyarakat dalam Pelestarian Budaya:
 - Melibatkan tokoh adat dan pemuka masyarakat dalam penyusunan dan implementasi kebijakan budaya untuk memastikan kearifan lokal tetap relevan dan berdaya guna.
 - Mendukung kegiatan budaya tradisional yang mendukung ketahanan pangan, seperti festival panen dan acara adat yang berkaitan dengan pertanian.
- c Penguatan Identitas Budaya sebagai Modal Sosial:
 - Mengembangkan program-program yang memperkuat identitas budaya lokal, termasuk dokumentasi dan promosi budaya lokal untuk generasi muda.

- Mendorong partisipasi generasi muda dalam kegiatan budaya dan adat istiadat untuk memastikan kelangsungan budaya dan ketahanan sosial.

2. Ketahanan Ekologi untuk Mendukung Ketahanan Pangan yang Berkelanjutan

- a Penguatan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Ekologi:
 - Mengimplementasikan kebijakan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, dengan fokus pada konservasi lahan pertanian, hutan, dan kawasan pesisir yang vital bagi produksi pangan.
 - Mendorong praktik pertanian ramah lingkungan dan penggunaan teknologi hijau untuk memastikan produksi pangan yang berkelanjutan.
- b Adaptasi Terhadap Perubahan Iklim dan Variabilitas Cuaca:
 - Meningkatkan kapasitas petani dan masyarakat dalam menghadapi perubahan iklim melalui pelatihan, penyuluhan, dan adopsi teknologi pertanian adaptif.
 - Mengembangkan sistem informasi iklim yang berbasis kearifan lokal untuk membantu petani dalam perencanaan musim tanam yang lebih baik.
- c Pengembangan Infrastruktur Hijau dan Energi Terbarukan:
 - Mendorong pembangunan infrastruktur yang mendukung ketahanan pangan seperti irigasi hemat air dan sistem pengelolaan limbah pertanian yang ramah lingkungan.
 - Mengembangkan dan mempromosikan penggunaan energi terbarukan di sektor pertanian untuk mengurangi dampak lingkungan dan meningkatkan efisiensi produksi.

3. Kolaborasi dan Sinergi dalam Penguatan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi

- a Penguatan Kerjasama Antar-Sektor:
 - Meningkatkan kerjasama antara pemerintah, lembaga adat, LSM, dan sektor swasta dalam pelestarian budaya dan lingkungan yang mendukung ketahanan pangan.
 - Mendorong program-program sinergis yang menggabungkan aspek sosial budaya dan ekologi, seperti program pertanian berbasis komunitas yang juga berfungsi sebagai pelestari budaya.
- b Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan dan Budaya:
 - Meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam upaya konservasi lingkungan dan pelestarian budaya, melalui program pendidikan lingkungan dan pelatihan berbasis komunitas.
 - Mengembangkan inisiatif-inisiatif masyarakat yang mempromosikan praktik-praktik pertanian berkelanjutan dan pelestarian lingkungan sebagai bagian dari budaya lokal.
- c Pemantapan Kebijakan dan Regulasi yang Mendukung Ketahanan Pangan dan Lingkungan:

- Menyusun dan memperkuat regulasi yang mendukung pengelolaan lingkungan dan ketahanan pangan berkelanjutan, dengan melibatkan pemangku kepentingan lokal dalam proses pengambilan keputusan.
- Memberikan insentif bagi program dan praktik yang menunjukkan kontribusi nyata terhadap pelestarian budaya dan lingkungan, terutama yang berdampak langsung pada ketahanan pangan.

4. Pendidikan dan Kesadaran Lingkungan serta Budaya untuk Ketahanan Pangan

- a Edukasi dan Kampanye Kesadaran Budaya dan Lingkungan:
 - Mengimplementasikan program edukasi yang menekankan pentingnya pelestarian budaya dan lingkungan dalam mendukung ketahanan pangan yang berkelanjutan.
 - Melaksanakan kampanye publik yang mengajak masyarakat untuk aktif berperan serta dalam menjaga kearifan lokal dan lingkungan sebagai bagian dari ketahanan pangan.
- b Pemberdayaan Generasi Muda dalam Pelestarian Budaya dan Lingkungan:
 - Mengembangkan program-program yang melibatkan generasi muda dalam kegiatan pelestarian budaya dan lingkungan, seperti lomba kreatif berbasis budaya lokal dan proyek konservasi lingkungan.
 - Mendorong keterlibatan pemuda dalam inovasi di bidang pertanian dan lingkungan yang memadukan nilai-nilai kearifan lokal dan teknologi modern.

Tahap3 Misi ke-5 : Memantapkan ketangguhan masyarakat beserta alam dan lingkungan dalam menghadapi berbagai perubahan iklim

1. Pemantapan Jati Diri Sosial Budaya Berbasis Kearifan Lokal

- a Pemberdayaan Komunitas Lokal:
 - Meningkatkan kapasitas komunitas lokal dalam melestarikan nilai-nilai budaya dan tradisi yang mendukung ketahanan pangan, seperti teknik pertanian tradisional, pengelolaan hutan adat, dan praktik konservasi sumber daya alam.
 - Mendorong keterlibatan komunitas adat dalam proses pengambilan keputusan terkait pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan, serta perlindungan budaya lokal.
- b Revitalisasi dan Pelestarian Warisan Budaya:
 - Mengidentifikasi dan melestarikan situs-situs budaya dan tradisi yang memiliki nilai sejarah dan ekologi penting, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam upaya pelestarian ini.
 - Mendokumentasikan dan mempromosikan praktik-praktik budaya yang berkontribusi pada ketahanan pangan, serta mendukung pengembangan ekonomi kreatif berbasis budaya lokal.

2. Pengarusutamaan Inklusivitas Gender dalam Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi

- a Penguatan Peran Perempuan dalam Pembangunan Berkelanjutan:
 - Meningkatkan partisipasi perempuan dalam sektor pertanian, pengelolaan sumber daya alam, dan konservasi lingkungan, melalui pelatihan dan pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan.
 - Mendorong kesetaraan gender dalam akses terhadap sumber daya, pendidikan, dan peluang ekonomi, khususnya dalam konteks pengelolaan lingkungan dan ketahanan pangan.
- b Pengembangan Kebijakan Inklusif Berbasis Gender:
 - Mengembangkan dan menerapkan kebijakan yang memastikan inklusivitas gender dalam semua aspek pembangunan, termasuk dalam perencanaan dan pelaksanaan program ketahanan pangan dan ekologi.
 - Meningkatkan kesadaran dan pendidikan tentang kesetaraan gender dalam masyarakat, serta mempromosikan peran perempuan dalam melestarikan budaya dan lingkungan.

3. Penguatan Ketahanan Ekologi untuk Ketahanan Pangan Berkelanjutan

- a Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan:
 - Mendorong pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan ramah lingkungan, dengan memadukan pengetahuan lokal dan teknologi modern untuk meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan pertanian.
 - Mengembangkan sistem pertanian yang beradaptasi terhadap perubahan iklim, serta mempromosikan diversifikasi tanaman pangan yang tahan terhadap kondisi lokal dan perubahan cuaca.
- b Perlindungan dan Konservasi Lingkungan:
 - Mengimplementasikan program konservasi lingkungan yang berkelanjutan, seperti reboisasi, pengelolaan hutan berbasis masyarakat, dan restorasi ekosistem pesisir yang mendukung ketahanan pangan.
 - Mendorong penggunaan teknologi ramah lingkungan dalam pertanian dan pengelolaan sumber daya alam, seperti penggunaan energi terbarukan dan praktik pertanian organik.

4. Pendidikan dan Kesadaran Publik tentang Jati Diri Sosial Budaya dan Ekologi

- a Edukasi tentang Kearifan Lokal dan Konservasi Lingkungan:
 - Mengintegrasikan pendidikan tentang kearifan lokal dan konservasi lingkungan ke dalam kurikulum formal dan non-formal, dengan tujuan meningkatkan kesadaran dan keterlibatan generasi muda dalam pelestarian budaya dan lingkungan.
 - Mendorong kampanye publik yang berfokus pada pentingnya menjaga jati diri budaya dan lingkungan untuk mendukung ketahanan pangan yang berkelanjutan.
- b Pengembangan Kapasitas dan Inovasi dalam Pengelolaan Lingkungan:

- Meningkatkan kapasitas masyarakat dan pemerintah dalam menerapkan inovasi dan praktik terbaik dalam pengelolaan lingkungan yang mendukung ketahanan pangan, seperti teknik irigasi efisien, pengelolaan limbah, dan sistem agroforestri.
- Mendukung penelitian dan pengembangan teknologi yang dapat meningkatkan produktivitas pertanian dan keberlanjutan lingkungan, sambil tetap menghormati nilai-nilai dan tradisi lokal.

Tahap 4 Misi ke-5: Terwujudnya Kabupaten Sumbawa yang adaptif terhadap perubahan iklim

- **Penguatan Budaya Lokal dan Identitas Daerah:**
 - Revitalisasi dan Pelestarian Budaya: Memperkuat dan melestarikan budaya lokal melalui dukungan pada seni, adat istiadat, dan warisan budaya. Program ini mencakup pendidikan budaya di sekolah, pembuatan pusat kebudayaan, dan dukungan untuk komunitas seni tradisional.
 - Pengembangan Pariwisata Budaya: Mengembangkan pariwisata yang berbasis budaya lokal, dengan menjaga keaslian dan kelestarian warisan budaya.
- **Peningkatan Pendidikan dan Literasi Sosial Budaya serta Ekologis:**
 - Integrasi Pendidikan Budaya dan Lingkungan: Mengintegrasikan pendidikan mengenai budaya lokal dan lingkungan hidup ke dalam kurikulum pendidikan formal dan non-formal.
 - Kampanye dan Edukasi Lingkungan: Meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pelestarian lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan melalui kampanye publik dan program pendidikan.
- **Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan:**
 - Perlindungan Ekosistem Kritis: Melindungi dan merehabilitasi ekosistem yang kritis seperti hutan, kawasan pesisir, dan sumber daya air dengan melibatkan komunitas lokal dalam upaya konservasi.
 - Pertanian dan Perikanan Berkelanjutan: Mendorong praktik pertanian dan perikanan yang berkelanjutan, dengan fokus pada teknik ramah lingkungan dan perlindungan terhadap keanekaragaman hayati.
- **Penguatan Ketahanan Pangan Lokal:**
 - Diversifikasi Pangan Lokal: Memperluas dan meningkatkan produksi pangan lokal dengan mengembangkan varietas tanaman dan hewan yang adaptif terhadap perubahan iklim dan tahan terhadap hama penyakit.
 - Pengembangan Teknologi Pertanian: Mengadopsi teknologi pertanian yang inovatif dan ramah lingkungan untuk meningkatkan produktivitas tanpa merusak ekosistem.
- **Pengembangan Ekonomi Berbasis Lingkungan dan Budaya:**

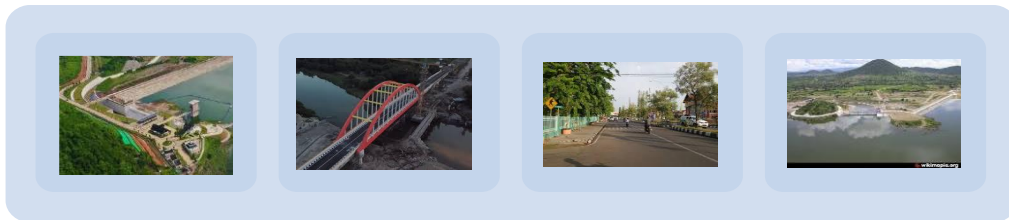
- Industri Kreatif dan Ekonomi Hijau: Mendukung perkembangan industri kreatif yang berbasis budaya dan industri hijau yang berkelanjutan sebagai upaya untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat.
- Pariwisata Berkelanjutan: Mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menjaga kelestarian lingkungan dan budaya lokal, serta memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat setempat.
- **Penguatan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologis:**
 - Program Adaptasi Perubahan Iklim: Mengembangkan program-program adaptasi terhadap perubahan iklim yang terintegrasi dengan pembangunan sosial dan ekonomi, termasuk penguatan infrastruktur yang tahan bencana.
 - Pemberdayaan Komunitas Lokal: Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian budaya melalui program pemberdayaan yang inklusif dan partisipatif.
- **Kolaborasi Antar-Pemangku Kepentingan:**
 - Kerjasama Multisektoral: Mendorong kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, masyarakat, dan akademisi dalam perencanaan dan implementasi program pembangunan yang berkelanjutan dan berbasis pada kearifan lokal.
 - Partisipasi Publik: Memperkuat mekanisme partisipasi publik dalam perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan terkait pembangunan, lingkungan, dan budaya.

5.6. Arah Kebijakan Misi 6 Pembangunan Kewilayahan yang merata dan adil

Dalam Pembangunan kewilayahan, Sumbawa memiliki potensi wisata yang beraham, mulai wisata alam, wisata bahari, wisata budaya, dll. Serta juga memiliki potensi ekonomi kreatif berbasis komoditas unggulan dan budaya tradisi lokal. Arah Kebijakan pembangunan kewilayah yang merata dan adil antara lain :

1. Penuntasan RDTR kabupaten/kota. serta kewenangan tata ruang laut;
2. Peningkatan pelaksanaan reforma agraria
3. Pelaksanaan kerja sama antardaerah khususnya Wilayah Sumbawa dalam menopang pembangunan pariwisata dan penggerak ekonomi lainnya serta meningkatkan kerja sama perdagangan antardaerah.
4. Pengembangan pelabuhan-pelabuhan simpul utama di Sumbawa untuk mendukung pengembangan kawasan ekonomi termasuk pariwisata di antaranya pengembangan Pelabuhan Pulau Moyo, , serta pelabuhan lainnya secara terpadu;
5. Pemanfaatan ALKI II di sisi wilayah Selat Alas serta ALKI III di Nusa Tenggara Barat secara optimal untuk menghubungkan rantai pasok/nilai domestik dan global;
6. Peningkatan sarana dan prasarana transportasi laut dan penyeberangan antar pulau untuk penumpang dan logistik terutama antara Pulau Sumbawa dan Lombok (Tano - Kayangan), dan pengembangan konektivitas

- feeder angkutan laut termasuk melalui pembangunan infrastruktur dan sarana kapal RoRo (Roll-On/Roll-Off) angkutan barang untuk mengangkut komoditas perkebunan, perikanan dan peternakan sebagai bagian transportasi multimoda yang menjangkau seluruh Wilayah Sumbawa;
7. Pengembangan bandara utama (Bandara Sultan Muhammad Kaharuddin III di Sumbawa) yang terintegrasi dengan pengembangan wilayah termasuk aerocity serta pengembangan bandara perairan dan seaplane di Wilayah Sumbawa untuk mendukung pariwisata dan konektivitas daerah afirmasi 3TP;
 8. Pembangunan dan rehabilitasi pangkalan kenavigasian pelayaran bangunan dan fasilitasnya;
 9. Penyelesaian jalan Trans Sumbawa (NTB) serta jalan trans pada pulau-pulau 3TP serta pembangunan dan peningkatan jalan termasuk jalan daerah;
 10. Pengembangan transportasi perkotaan termasuk sistem angkutan umum massal perkotaan di Wilayah Sumbawa serta Kecamatan dan Desa yang andal dan modern dalam melayani mobilitas penumpang; dan
 11. Peningkatan kegiatan ekonomi dan keamanan perbatasan.
 12. Pembangunan tampungan air serba guna yang memberikan manfaat secara cepat bagi kebutuhan air masyarakat sehari-hari;



Tahapan Misi ke-6 Pembangunan Kewilyahan yang merata dan adil
Tahap 1 Misi ke 6 : Memperkuat pemerataan dan kualitas konektivitas infrastruktur wilayah

Fokus arah kebijakan Sumbawa Antara Lain

- **Peningkatan infrastruktur yan merata**
 - a. Pembangunan Infrastruktur Dasar di Daerah Tertinggal:
 - Pembangunan dan Perbaikan Jalan, Jembatan, dan Transportasi Umum: Memprioritaskan pembangunan infrastruktur dasar di daerah tertinggal, termasuk jalan, jembatan, dan transportasi umum untuk menghubungkan wilayah terpencil dengan pusat pertumbuhan ekonomi.

- Peningkatan Akses terhadap Listrik dan Air Bersih: Memperluas jaringan listrik dan penyediaan air bersih ke seluruh pelosok NTB, terutama di daerah pedesaan dan terpencil.
- b. Pengembangan Infrastruktur Digital:
 - Perluasan Jaringan Internet dan Telekomunikasi: Memperluas akses internet dan jaringan telekomunikasi ke seluruh wilayah NTB untuk mendukung transformasi digital dan meningkatkan konektivitas antarwilayah.
 - Pembangunan Pusat Layanan Digital: Mendirikan pusat layanan digital di wilayah strategis untuk mendukung pengembangan ekonomi digital dan memberikan layanan publik yang lebih efisien.
- **Pengembangan ekonomi lokal dan potensi wilayah**
 - a. Penguatan Ekonomi Wilayah Berbasis Potensi Lokal:
 - Pengembangan Sektor Pertanian, Perikanan, dan Pariwisata Berbasis Wilayah: Mendorong pengembangan sektor-sektor ekonomi yang berbasis pada potensi lokal, seperti pertanian, perikanan, dan pariwisata, sesuai dengan karakteristik masing-masing wilayah.
 - Dukungan untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM): Memberikan dukungan terhadap UMKM di setiap wilayah, termasuk akses ke permodalan, pelatihan, dan pemasaran produk untuk meningkatkan daya saing ekonomi lokal.
 - b. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia di Wilayah:
 - Pelatihan dan Pendidikan Vokasional Berbasis Wilayah: Menyediakan program pelatihan dan pendidikan vokasional yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja lokal untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja di setiap wilayah.
 - Pengembangan Kewirausahaan Berbasis Komunitas: Mendorong pengembangan kewirausahaan berbasis komunitas dengan memberikan pelatihan, akses permodalan, dan pendampingan kepada calon wirausahawan di wilayah-wilayah tertentu.
- **Perencanaan dan Pengelolaan Tata Ruang yang Adil**
 - a. Pengelolaan Tata Ruang yang Berkeadilan:
 - Penyusunan Rencana Tata Ruang yang Berbasis Kebutuhan Wilayah: Menyusun rencana tata ruang yang memperhitungkan kebutuhan dan potensi masing-masing wilayah, sehingga pembangunan dapat dilaksanakan secara adil dan merata.
 - Pengendalian Alih Fungsi Lahan: Menerapkan pengendalian ketat terhadap alih fungsi lahan, terutama lahan pertanian produktif, untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan keberlanjutan sumber daya alam.
 - b. Pemanfaatan Teknologi untuk Perencanaan Wilayah:
 - Penggunaan Sistem Informasi Geografis (SIG) dalam Perencanaan Wilayah: Menggunakan teknologi SIG untuk mengoptimalkan perencanaan dan pengelolaan tata ruang, sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara lebih akurat dan tepat sasaran.

- Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Tata Ruang: Memberikan pelatihan dan pengembangan kapasitas kepada pemerintah daerah dalam pengelolaan tata ruang untuk memastikan implementasi kebijakan yang konsisten dan berkelanjutan.
- **Penguatan Kolaborasi Antarwilayah**
 - a. Kolaborasi Antarwilayah dalam Pengembangan Ekonomi:
 - Pengembangan Kawasan Perdesaan Terpadu: Mendorong pengembangan kawasan perdesaan terpadu yang mengintegrasikan berbagai sektor ekonomi untuk menciptakan pusat-pusat pertumbuhan baru yang dapat menyeimbangkan pembangunan antarwilayah.
 - Kemitraan Antarwilayah untuk Peningkatan Daya Saing: Membangun kemitraan antarwilayah di NTB untuk saling mendukung dalam pengembangan potensi lokal dan peningkatan daya saing regional.
 - b. Penguatan Peran Pemerintah dan Masyarakat dalam Pembangunan Wilayah:
 - Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Wilayah: Menguatkan peran serta masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan wilayah untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil sesuai dengan kebutuhan lokal.
 - Pengembangan Forum Koordinasi Antarwilayah: Mendirikan forum koordinasi antarwilayah untuk membahas dan menyelesaikan isu-isu strategis yang berkaitan dengan pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan.
- **Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan Kewilayahan**
 - a. Monitoring dan Evaluasi Berbasis Data:
 - Penggunaan Data Terintegrasi untuk Monitoring: Menerapkan sistem monitoring dan evaluasi berbasis data yang terintegrasi untuk memantau kemajuan pembangunan kewilayahan secara berkala.
 - Penilaian Kinerja Pembangunan Wilayah: Melakukan penilaian kinerja pembangunan wilayah berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan untuk memastikan bahwa pembangunan berjalan sesuai dengan rencana yang telah disusun.

Tahap 2 Misi ke-6 : Meningkatkan pemerataan dan kualitas konektivitas infrastruktur wilayah

- **Peningkatan Efisiensi dan Kualitas Infrastruktur Wilayah**
 - a. Penguatan Konektivitas Antarwilayah:
 - Penyelesaian Proyek Infrastruktur Prioritas: Mempercepat penyelesaian proyek-proyek infrastruktur prioritas yang menghubungkan wilayah terpencil dengan pusat ekonomi untuk meningkatkan mobilitas dan aksesibilitas.
 - Optimalisasi Jaringan Transportasi Multimoda: Mengintegrasikan berbagai moda transportasi untuk memperlancar arus barang dan jasa antarwilayah, sehingga distribusi ekonomi lebih merata.

- b. Pemeliharaan dan Modernisasi Infrastruktur:
 - Program Pemeliharaan Infrastruktur yang Berkelanjutan: Melaksanakan program pemeliharaan infrastruktur yang berkelanjutan untuk memastikan infrastruktur yang sudah dibangun dapat berfungsi dengan baik dan memiliki umur panjang.
 - Penerapan Teknologi Baru dalam Infrastruktur: Mengadopsi teknologi terbaru dalam pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan publik.
- **Penguatan Ekonomi Lokal melalui Diversifikasi dan Inovasi**
 - a. Diversifikasi Ekonomi Wilayah Berbasis Potensi Lokal:
 - Pengembangan Sektor Ekonomi Unggulan di Setiap Wilayah: Mendorong diversifikasi sektor ekonomi berdasarkan potensi lokal, seperti pertanian berkelanjutan, pariwisata berbasis alam dan budaya, serta industri kreatif.
 - Dukungan Inovasi untuk UMKM dan Start-up Lokal: Memberikan dukungan untuk inovasi dan pengembangan usaha kecil menengah (UMKM) serta start-up di berbagai wilayah, agar mereka dapat berkontribusi lebih besar terhadap ekonomi lokal.
 - b. Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Pusat Pertumbuhan Baru:
 - Pendirian Kawasan Ekonomi Khusus di Wilayah Strategis: Membangun Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di wilayah-wilayah strategis untuk menarik investasi dan menciptakan lapangan kerja.
 - Pengembangan Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru: Mengidentifikasi dan mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di seluruh wilayah NTB untuk mempercepat pemerataan pembangunan ekonomi.
- **Pemerataan Layanan Publik dan Peningkatan Kualitas Hidup**
 - a. Akses Merata terhadap Layanan Pendidikan, Kesehatan, dan Sosial:
 - Perluasan Akses Pendidikan Berkualitas di Seluruh Wilayah: Memperluas akses ke pendidikan berkualitas dengan membangun dan memperbaiki fasilitas pendidikan di daerah terpencil, serta meningkatkan kapasitas guru dan tenaga pendidik.
 - Peningkatan Layanan Kesehatan di Daerah Terpencil: Meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan di daerah-daerah terpencil dengan memperbanyak fasilitas kesehatan dan tenaga medis yang terlatih.
 - b. Peningkatan Kualitas Hidup melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana:
 - Penyediaan Perumahan Layak dan Fasilitas Sosial: Melaksanakan program pembangunan perumahan layak huni dan penyediaan fasilitas sosial di seluruh wilayah, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
 - Program Pengentasan Kemiskinan Terpadu: Melaksanakan program-program pengentasan kemiskinan secara terpadu yang

menggabungkan pemberdayaan ekonomi, peningkatan pendidikan, dan akses layanan kesehatan.

- **Penguatan Tata Kelola dan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Wilayah**

- a. Tata Kelola Pembangunan yang Transparan dan Akuntabel:
 - Penerapan Sistem Tata Kelola Berbasis Teknologi: Menerapkan sistem tata kelola pembangunan yang berbasis teknologi informasi untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat.
 - Pengawasan dan Evaluasi Pembangunan yang Partisipatif: Melibatkan masyarakat dalam pengawasan dan evaluasi proyek-proyek pembangunan untuk memastikan pembangunan dilaksanakan sesuai dengan rencana dan kebutuhan lokal.
- b. Pemberdayaan Masyarakat untuk Pembangunan Berkelanjutan:
 - Pemberdayaan Komunitas dalam Perencanaan Pembangunan: Memberdayakan komunitas lokal dalam proses perencanaan pembangunan agar aspirasi masyarakat di setiap wilayah dapat terakomodasi.
 - Pengembangan Kemitraan Publik-Swasta untuk Pembangunan Wilayah: Mendorong kemitraan antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam pelaksanaan proyek-proyek pembangunan wilayah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi.

- **Optimalisasi Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan**

- a. Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan:
 - Pemanfaatan Sumber Daya Alam secara Bijak dan Berkelanjutan: Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam dengan pendekatan yang berkelanjutan untuk memastikan kesejahteraan generasi mendatang.
 - Rehabilitasi dan Konservasi Lingkungan Hidup: Melaksanakan program rehabilitasi lingkungan dan konservasi sumber daya alam secara masif di seluruh wilayah untuk menjaga kelestarian alam dan mendukung pembangunan berkelanjutan.
- b. Pengembangan Energi Terbarukan di Wilayah-wilayah Tertentu:
 - Pemanfaatan Potensi Energi Terbarukan: Mengembangkan potensi energi terbarukan seperti tenaga surya, angin, dan biomassa di wilayah-wilayah yang memiliki sumber daya tersebut untuk mendukung keberlanjutan energi.
 - Peningkatan Kapasitas dalam Pengelolaan Energi Terbarukan: Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan teknologi dalam pengelolaan energi terbarukan untuk mendukung kemandirian energi di NTB.

Tahap ke 3 Misi ke-6 : Memantapkan konektivitas infrastruktur wilayah di kawasan-kawasan pusat pertumbuhan

- **Peningkatan Inklusivitas dalam Pembangunan Infrastruktur**

- a. Pengembangan Infrastruktur Wilayah yang Inklusif:

- Penyediaan Infrastruktur Ramah Difabel: Membangun dan menyesuaikan infrastruktur publik yang ramah bagi penyandang disabilitas serta kelompok rentan lainnya di seluruh wilayah.
- Peningkatan Akses Infrastruktur di Daerah Tertinggal dan Terpencil: Memastikan semua wilayah, termasuk daerah tertinggal dan terpencil, mendapatkan akses yang sama terhadap infrastruktur dasar seperti jalan, listrik, air bersih, dan telekomunikasi.
- b. Pendekatan Terpadu dalam Pengelolaan Infrastruktur:
 - Pemanfaatan Teknologi dalam Pembangunan Infrastruktur: Menerapkan teknologi canggih dalam pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur untuk memastikan efisiensi dan aksesibilitas yang lebih luas.
 - Kolaborasi Antar Wilayah: Meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar wilayah dalam pembangunan infrastruktur untuk memaksimalkan dampak dan memastikan manfaat dirasakan secara merata.
- **Penguatan Ekonomi Lokal Berbasis Kearifan Lokal**
 - a. Pengembangan Sektor Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan:
 - Pemberdayaan UMKM dan Koperasi di Seluruh Wilayah: Meningkatkan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta koperasi di berbagai wilayah untuk menciptakan lapangan kerja dan mengurangi kesenjangan ekonomi.
 - Promosi Produk Lokal dan Potensi Wisata Berbasis Komunitas: Mendorong pengembangan produk lokal dan pariwisata berbasis komunitas dengan fokus pada keunikan dan kearifan lokal untuk meningkatkan pendapatan masyarakat setempat.
 - b. Diversifikasi Ekonomi untuk Mengurangi Kesenjangan:
 - Diversifikasi Sumber Pendapatan Wilayah: Memfasilitasi diversifikasi sumber pendapatan wilayah dengan mengembangkan sektor-sektor ekonomi baru yang potensial dan sesuai dengan kondisi lokal.
 - Pelatihan dan Pendidikan untuk Meningkatkan Keterampilan: Memberikan pelatihan dan pendidikan untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja lokal, khususnya di sektor-sektor yang sedang berkembang, guna menciptakan kesetaraan dalam peluang ekonomi.
- **Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Publik**
 - a. Akses yang Merata terhadap Pendidikan dan Kesehatan:
 - Perluasan Akses Pendidikan Berkualitas untuk Semua: Menyediakan pendidikan berkualitas yang dapat diakses oleh semua kelompok masyarakat, termasuk mereka yang berada di daerah terpencil atau terpinggirkan.
 - Peningkatan Layanan Kesehatan yang Inklusif: Meningkatkan layanan kesehatan yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan spesifik dari berbagai kelompok masyarakat, terutama mereka yang rentan.
 - b. Optimalisasi Pelayanan Publik dengan Pendekatan Partisipatif:

- Keterlibatan Masyarakat dalam Perencanaan dan Pengawasan: Memastikan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pelayanan publik untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi.
- Penerapan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi: Memperluas penerapan teknologi informasi dalam pelayanan publik untuk meningkatkan efisiensi, aksesibilitas, dan kualitas pelayanan.
- **Penguatan Tata Kelola dan Partisipasi Sosial dalam Pembangunan Wilayah**
 - a. Tata Kelola yang Transparan dan Inklusif:
 - Pengembangan Sistem Tata Kelola yang Adil: Mengembangkan dan menerapkan sistem tata kelola yang adil dan transparan, yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat dalam pengambilan keputusan.
 - Penerapan Prinsip-prinsip Good Governance: Memastikan bahwa prinsip-prinsip good governance, seperti akuntabilitas, partisipasi, dan transparansi, diterapkan dalam semua aspek tata kelola pemerintahan dan pembangunan.
 - b. Penguatan Partisipasi Sosial dalam Pembangunan:
 - Pemberdayaan Komunitas dalam Pembangunan Wilayah: Meningkatkan pemberdayaan komunitas lokal untuk berperan aktif dalam pembangunan wilayah, termasuk dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan proyek-proyek pembangunan.
 - Pengembangan Kemitraan Pemerintah dan Masyarakat: Membangun kemitraan yang erat antara pemerintah dan masyarakat dalam mengatasi masalah-masalah pembangunan, serta memastikan bahwa kebijakan pembangunan mencerminkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat.
- **Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan**
 - a. Pemanfaatan Sumber Daya Alam secara Berkelanjutan:
 - Penerapan Konsep Ekonomi Hijau dalam Pembangunan: Mengintegrasikan konsep ekonomi hijau dalam setiap rencana pembangunan wilayah, untuk memastikan bahwa pembangunan tidak merusak lingkungan dan dapat memberikan manfaat jangka panjang.
 - Rehabilitasi dan Konservasi Ekosistem: Melaksanakan program rehabilitasi dan konservasi ekosistem yang kritis, seperti hutan, lahan basah, dan kawasan pesisir, untuk mendukung keberlanjutan sumber daya alam dan meningkatkan ketahanan lingkungan.
 - b. Pengembangan Program Pengelolaan Lingkungan yang Partisipatif:
 - Pelibatan Komunitas dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam: Mendorong pelibatan komunitas lokal dalam pengelolaan sumber daya alam untuk memastikan bahwa mereka dapat berkontribusi dan mendapatkan manfaat dari program-program lingkungan.
 - Penguatan Kapasitas Masyarakat dalam Konservasi Lingkungan: Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam konservasi lingkungan

melalui pendidikan, pelatihan, dan program-program pemberdayaan lingkungan.

Tahap ke 4 Misi ke-7 : Terwujudnya Sumbawa yang mantap konektivitas dan aksesibilitas wilayahnya

- **Pemantapan Daya Saing Wilayah melalui Inovasi dan Teknologi**

- a. Pengembangan Ekonomi Berbasis Inovasi dan Teknologi:
 - Penerapan Teknologi Canggih dalam Sektor Ekonomi Utama: Mendorong adopsi teknologi canggih, seperti otomatisasi dan digitalisasi, dalam sektor-sektor ekonomi utama di seluruh wilayah NTB untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing.
 - Penguatan Ekosistem Inovasi Regional: Membangun ekosistem inovasi yang mendukung kolaborasi antara pemerintah, industri, universitas, dan komunitas untuk menciptakan solusi inovatif yang relevan dengan kebutuhan lokal.
- b. Promosi Investasi Berkelanjutan dan Berkualitas:
 - Peningkatan Daya Tarik Investasi Asing dan Domestik: Mengembangkan kebijakan yang menarik bagi investor, termasuk penyediaan insentif, penyederhanaan regulasi, dan peningkatan kualitas infrastruktur, untuk mendorong investasi yang berkelanjutan.
 - Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus yang Kompetitif: Mengembangkan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang didukung oleh infrastruktur kelas dunia dan fasilitas pendukung yang memadai untuk menarik investasi di sektor-sektor strategis.

- **Pengembangan Wilayah yang Inklusif dan Berkeadilan**

- a. Pemerataan Pembangunan Antar Wilayah:
 - Pengembangan Wilayah Terpencil dan Terpinggirkan: Memastikan bahwa wilayah-wilayah terpencil dan terpinggirkan mendapatkan perhatian khusus dalam pembangunan, dengan fokus pada penyediaan infrastruktur dasar, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.
 - Integrasi Wilayah Urban dan Rural: Mengembangkan kebijakan yang mengintegrasikan pembangunan wilayah urban dan rural, sehingga terjadi sinergi dan keterkaitan yang kuat antara kedua wilayah dalam pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan.
- b. Perlindungan dan Pemberdayaan Kelompok Rentan:
 - Penguatan Kebijakan Sosial untuk Kelompok Rentan: Menerapkan kebijakan sosial yang efektif untuk melindungi dan memberdayakan kelompok rentan, termasuk penyandang disabilitas, perempuan, anak-anak, dan masyarakat adat.
 - Inklusi Sosial dan Ekonomi yang Berkelanjutan: Mendorong inklusi sosial dan ekonomi yang berkelanjutan dengan memberikan akses yang lebih luas terhadap peluang ekonomi, layanan sosial, dan pendidikan untuk seluruh lapisan masyarakat.

- **Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) untuk Daya Saing Global**

- a. Pendidikan dan Pelatihan yang Berorientasi Masa Depan:
 - Pengembangan Pendidikan yang Adaptif dan Futuristik: Mengembangkan sistem pendidikan yang adaptif dan futuristik, yang mempersiapkan generasi muda dengan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan masa depan, termasuk dalam bidang teknologi, sains, dan kewirausahaan.
 - Pelatihan Berbasis Kompetensi Global: Menyediakan pelatihan berbasis kompetensi yang sesuai dengan standar global, untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja NTB di pasar nasional dan internasional.
- b. Penguatan Kolaborasi antara Pendidikan dan Industri:
 - Link and Match antara Pendidikan dan Industri: Membangun kemitraan strategis antara lembaga pendidikan dan industri untuk memastikan lulusan memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.
 - Pengembangan Pusat Inovasi dan Kewirausahaan: Mendirikan pusat-pusat inovasi dan kewirausahaan di berbagai wilayah untuk mendorong kreativitas, inovasi, dan pengembangan usaha baru yang berdaya saing.
- **Optimalisasi Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup**
 - a. Pemanfaatan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan:
 - Penerapan Prinsip Ekonomi Hijau dalam Pembangunan: Mengintegrasikan prinsip-prinsip ekonomi hijau dalam semua aspek pembangunan wilayah, untuk memastikan pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.
 - Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Komunitas: Mendorong pengelolaan sumber daya alam berbasis komunitas untuk memastikan keterlibatan masyarakat lokal dalam menjaga kelestarian lingkungan dan mendapatkan manfaat ekonomi dari sumber daya tersebut.
 - b. Peningkatan Kapasitas dalam Pengelolaan Lingkungan:
 - Pengembangan Teknologi Ramah Lingkungan: Mengembangkan dan mengadopsi teknologi ramah lingkungan dalam semua sektor ekonomi, termasuk energi terbarukan, pengelolaan limbah, dan rehabilitasi lingkungan.
 - Pendidikan dan Kesadaran Lingkungan yang Intensif: Melaksanakan program pendidikan dan peningkatan kesadaran lingkungan di seluruh lapisan masyarakat, untuk menciptakan budaya pelestarian lingkungan yang kuat.
- **Penguatan Tata Kelola yang Transparan dan Efisien**
 - a. Penerapan E-Government secara Menyeluruh:
 - Digitalisasi Tata Kelola Pemerintahan: Melaksanakan digitalisasi penuh dalam tata kelola pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelayanan publik.
 - Pengembangan Platform Partisipasi Publik Berbasis Teknologi: Membangun platform digital yang memungkinkan partisipasi publik

dalam pengambilan keputusan, pengawasan, dan evaluasi kebijakan pemerintah.

b. Pengembangan Tata Kelola yang Berdaya Saing Global:

- Penerapan Standar Internasional dalam Tata Kelola: Menerapkan standar-standar tata kelola internasional dalam administrasi pemerintahan dan pengelolaan sumber daya, untuk memastikan NTB berdaya saing di tingkat global.
- Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah: Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah melalui pelatihan dan pendidikan berkelanjutan, agar mampu menghadapi tantangan pembangunan yang semakin kompleks dan dinamis.

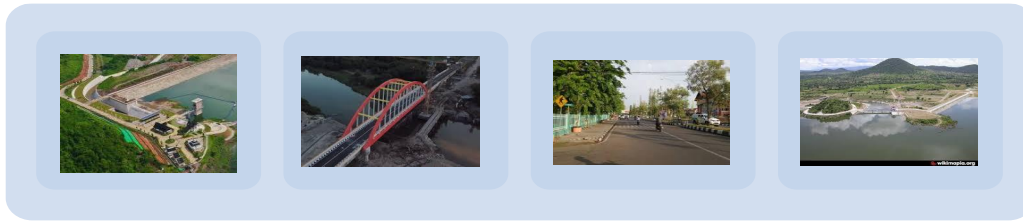
5.7. Arah Kebijakan Misi 7: Sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan

Keberhasilan mewujudkan Sumbawa maju, adil sejahtera dan berkelanjutan 2045 tercermin dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Sumbawa yang diikuti dengan pengurangan kesenjangan antar wilayah dan kelompok pendapatan yang dinikmati oleh seluruh masyarakat termasuk kelompok rentan. Dalam mewujudkan pembangunan wilayah, faktor kunci yang sangat menentukan adalah pembangunan sarana dan prasarana terutama konektivitas, sumber daya energi, teknologi informasi dan komunikasi serta sarana dan prasarana dasar.

Kabupaten Sumbawa memiliki 65 pulau, yang berpenghuni 6 pulau, yang tidak berpenghuni 59 pulau. Dimana pembangunan Kabupaten Sumbawa ditekankan pada pola pengelolaan sumberdaya alam agar tetap lestari dan dapat dipergunakan untuk kesejahteraan masyarakat. Pendekatan ini juga mempertimbangkan faktor kebencanaan, dimana pengurangan resiko bencana masih merupakan isu besar yang digaungkan dalam perencanaan tata ruang. Arah kebijakan sarana prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan antara lain :

1. Pemenuhan rumah layak huni berdasarkan karakteristik adat dan budaya dengan mempertimbangkan konstruksi yang tahan bencana;
2. Optimalisasi sumber daya air dan pengembangan teknologi yang efektif dan efisien dalam pemenuhan akses air minum aman terutama untuk daerah kepulauan dan rawan air;
3. Penyediaan air siap minum dari keran melalui jaringan perpipaan
4. Penyediaan akses sanitasi melalui sistem terpusat di Wilayah Sumbawa;
5. Eliminasi praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di seluruh rumah tangga melalui pemacuan perubahan perilaku masyarakat serta penyediaan sarana dan prasarana rantai layanan sanitasi yang aman; dan
6. Peningkatan komitmen daerah pada pengelolaan dan pemilahan sampah yang terpadu sejak dari sumber dengan target 100 persen sampah terangkut dan tertangani di TPST dengan berorientasi ekonomi sirkuler dan disesuaikan dengan karakteristik daerah.

Gambar 5.7. Tahapan Arah Kebijakan Misi 7: Sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan



Tahapan Misi ke-7 : Sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan

Tahap 1 Misi ke-7 : Memperkuat pembangunan sarana prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan

1. Pengembangan Infrastruktur berkualitas dan ramah lingkungan, meliputi:

- a Pembangunan Infrastruktur dengan Prinsip berkualitas dan ramah lingkungan:
 - o Integrasi Prinsip Ekonomi Hijau dalam Infrastruktur: Mengintegrasikan prinsip-prinsip ekonomi hijau dalam pembangunan infrastruktur, seperti pengurangan emisi karbon, efisiensi energi, dan penggunaan material ramah lingkungan.
 - o Penggunaan Energi Terbarukan dalam Proyek Infrastruktur: Mendorong penggunaan energi terbarukan dalam pembangunan dan operasional infrastruktur, termasuk solar, angin, dan bioenergi.
- b Pengelolaan Lingkungan dalam Pembangunan Infrastruktur:
 - o Pengembangan Sistem Drainase dan Pengelolaan Air Limbah yang Efektif: Membangun sistem drainase dan pengelolaan air limbah yang tidak hanya efektif, tetapi juga ramah lingkungan untuk mencegah banjir dan pencemaran.
 - o Rehabilitasi dan Konservasi Lingkungan di Area Proyek: Melaksanakan rehabilitasi dan konservasi lingkungan di area sekitar proyek infrastruktur, termasuk reboisasi dan pengelolaan lahan secara berkelanjutan.

2. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Publik, meliputi:

- a Pembangunan Infrastruktur yang Tahan Lama dan Efisien:
 - o Peningkatan Standar Kualitas Material dan Konstruksi: Mengadopsi standar kualitas internasional dalam pemilihan material dan teknik

konstruksi untuk memastikan infrastruktur yang dibangun tahan lama dan efisien.

- o Pemeliharaan Infrastruktur secara Berkala: Menyusun dan melaksanakan program pemeliharaan infrastruktur secara berkala untuk memastikan infrastruktur tetap berfungsi dengan baik dan memiliki umur panjang.
- b Pembangunan Infrastruktur yang Inklusif dan Aksesibel:
 - o Penyediaan Akses yang Merata terhadap Infrastruktur: Memastikan bahwa semua wilayah, termasuk yang terpencil dan terpinggirkan, memiliki akses yang merata terhadap infrastruktur dasar seperti jalan, air bersih, dan listrik.
 - o Pembangunan Infrastruktur yang Inklusif untuk Semua Kalangan: Membangun infrastruktur yang dapat diakses oleh semua kalangan, termasuk penyandang disabilitas, lansia, dan kelompok rentan lainnya.

3. Pengembangan Infrastruktur Berbasis Teknologi, meliputi:

- a Pengelolaan Infrastruktur Berbasis Data:
 - o Implementasi Sistem Pemantauan dan Pengelolaan Berbasis Data: Menggunakan sistem pemantauan dan pengelolaan infrastruktur berbasis data real-time untuk meningkatkan respons terhadap masalah dan pengelolaan sumber daya.
 - o Penggunaan Big Data dalam Perencanaan dan Pemeliharaan Infrastruktur: Memanfaatkan big data untuk perencanaan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur yang lebih akurat dan efisien.

4. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dan Kolaborasi dalam Pembangunan Infrastruktur, meliputi

- a Kolaborasi dengan Sektor Swasta dan Komunitas:
 - o Kemitraan Pemerintah-Swasta (Public-Private Partnership): Mendorong kemitraan antara pemerintah dan sektor swasta dalam pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan kualitas, efisiensi, dan pembiayaan proyek.
 - o Pemberdayaan Komunitas dalam Pengembangan Infrastruktur Lokal: Melibatkan komunitas lokal dalam perencanaan, pembangunan, dan pemeliharaan infrastruktur untuk memastikan infrastruktur yang dibangun sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- b Edukasi dan Kesadaran Masyarakat tentang Infrastruktur Ramah Lingkungan:
 - o Kampanye Publik tentang Pentingnya Infrastruktur Ramah Lingkungan: Mengadakan kampanye edukasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya infrastruktur yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.
 - o Partisipasi Masyarakat dalam Proyek Infrastruktur: Mendorong partisipasi masyarakat dalam proyek infrastruktur, mulai dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan, untuk meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap infrastruktur publik.

5. Optimalisasi Pembiayaan dan Investasi dalam Infrastruktur, meliputi:

- a Diversifikasi Sumber Pembiayaan Infrastruktur:
 - o Menggali sumber pembiayaan alternatif seperti obligasi hijau, dana kelolaan masyarakat, dan investasi sosial untuk mendanai proyek infrastruktur yang ramah lingkungan.
 - o Memastikan alokasi dan penggunaan dana pemerintah yang efisien dan tepat sasaran dalam pembangunan infrastruktur yang berkualitas.
- b Mendorong Investasi dalam Infrastruktur Ramah Lingkungan:
 - o Memberikan insentif kepada investor yang berpartisipasi dalam proyek infrastruktur yang ramah lingkungan, seperti keringanan pajak atau fasilitas kredit.
 - o Kolaborasi dengan Institusi Keuangan untuk Membangun kerjasama dengan institusi keuangan, termasuk bank dan lembaga pembiayaan, untuk mendukung pendanaan proyek infrastruktur hijau di Sumbawa.

Dengan kebijakan-kebijakan tersebut, diharapkan dapat membangun sarana dan prasarana infrastruktur yang tidak hanya berkualitas tinggi, tetapi juga ramah lingkungan, mendukung keberlanjutan, dan berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara luas.

Tahap 2 Misi ke-7 : Meningkatkan pembangunan sarana prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan

1. Percepatan Pembangunan Infrastruktur berkualitas dan ramah lingkungan, meliputi

- a Penguatan Implementasi Prinsip Pembangunan berkualitas dan ramah lingkungan:
 - Mengutamakan teknologi dan material konstruksi yang ramah lingkungan serta memperkuat analisis dampak lingkungan (AMDAL) untuk memastikan bahwa setiap proyek infrastruktur tidak merusak ekosistem.
 - Mengembangkan kebijakan tata ruang yang mendukung pembangunan infrastruktur hijau, dengan mempertimbangkan kapasitas daya dukung lingkungan dan mitigasi risiko bencana.
- b Pengembangan Infrastruktur Hijau dan Energi Terbarukan:
 - Memperluas penggunaan energi terbarukan dalam penyediaan listrik dan energi lainnya di sektor infrastruktur, seperti pemasangan panel surya pada fasilitas umum dan pengembangan mikrohidro di daerah pedesaan.
 - Mempercepat pembangunan sistem transportasi publik yang rendah emisi, seperti kereta listrik, bus listrik, dan jalur sepeda, untuk mengurangi ketergantungan pada kendaraan berbahan bakar fosil.

2. Peningkatan Efisiensi dan Kualitas Infrastruktur, meliputi:

- a Optimalisasi Proses Perencanaan dan Implementasi Proyek:

- Mengintegrasikan teknologi seperti BIM (Building Information Modeling) dalam perencanaan dan desain proyek untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, dan kualitas konstruksi.
- Meningkatkan kapasitas manajemen proyek infrastruktur, termasuk pengawasan, kontrol kualitas, dan pengelolaan risiko, untuk memastikan proyek selesai tepat waktu, sesuai anggaran, dan memenuhi standar kualitas.

b Peningkatan Standar dan Regulasi Kualitas Infrastruktur:

- Memperbarui dan menegakkan standar konstruksi dan pemilihan material yang lebih tinggi dan ramah lingkungan, untuk memastikan ketahanan dan keberlanjutan infrastruktur.
- Mengembangkan regulasi yang mendorong penerapan teknologi hijau dan praktik konstruksi yang ramah lingkungan dalam setiap proyek infrastruktur.

3. Peningkatan Akses dan Konektivitas Infrastruktur, meliputi:

a Ekspansi dan Modernisasi Infrastruktur Konektivitas:

- Mempercepat pembangunan dan modernisasi jaringan jalan, pelabuhan, bandara yang menghubungkan berbagai wilayah di Sumbawa, guna meningkatkan mobilitas dan aksesibilitas.
- Memperluas jangkauan infrastruktur digital, termasuk jaringan internet broadband dan telekomunikasi, untuk mendukung pertumbuhan ekonomi digital dan inklusi sosial.

b Pengembangan Infrastruktur untuk Daerah Terpencil:

- Memfokuskan pembangunan infrastruktur dasar seperti air bersih, listrik, dan sanitasi di daerah terpencil dan kurang berkembang, untuk mengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah.
- Pengembangan Transportasi Antar-Wilayah: Mengembangkan transportasi yang menghubungkan wilayah terpencil dengan pusat ekonomi dan layanan publik, guna mendukung pertumbuhan ekonomi lokal dan akses ke layanan dasar.

4. Penguatan Kolaborasi dan Partisipasi dalam Pembangunan Infrastruktur, meliputi:

a Kolaborasi dengan Sektor Swasta dan Lembaga Internasional:

- Mendorong kerjasama yang lebih erat antara pemerintah dan sektor swasta dalam pendanaan, pembangunan, dan pemeliharaan infrastruktur, termasuk proyek-proyek infrastruktur hijau.
- Menggali peluang investasi dari lembaga keuangan internasional dan organisasi global yang mendukung proyek infrastruktur berkelanjutan di NTB.

b Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Infrastruktur:

- Melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan pengambilan keputusan terkait proyek infrastruktur, guna memastikan bahwa kebutuhan dan aspirasi masyarakat terpenuhi.
- Mengadakan program pendidikan dan kampanye untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya

infrastruktur ramah lingkungan dan berkelanjutan, serta mendorong partisipasi aktif dalam menjaga lingkungan.

5. Penguatan Pembiayaan dan Investasi Infrastruktur, meliputi:

- a Diversifikasi Sumber Pembiayaan Infrastruktur Hijau:
 - Mengembangkan instrumen pembiayaan inovatif seperti obligasi hijau dan skema pembayaran berbasis hasil (result-based financing) untuk mendanai proyek infrastruktur yang ramah lingkungan.
 - Meningkatkan efisiensi dalam alokasi dan penggunaan dana publik untuk proyek infrastruktur, dengan fokus pada prioritas pembangunan yang mendukung keberlanjutan dan pertumbuhan ekonomi.
- b Mendorong Pembiayaan Berkelanjutan melalui Insentif:
 - Memberikan insentif pajak, tarif, dan dukungan lainnya kepada investor dan pengembang yang terlibat dalam proyek-proyek infrastruktur hijau.
 - Membangun kerjasama dengan lembaga keuangan nasional dan internasional untuk menyediakan pembiayaan yang mendukung pembangunan infrastruktur berkualitas dan ramah lingkungan.

Tahap 3 Misi ke-7 : Memantapkan pembangunan sarana prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan

1. Peningkatan Kualitas Infrastruktur, meliputi:

- a Memastikan bahwa semua proyek infrastruktur yang direncanakan memenuhi standar kualitas yang tinggi, dengan fokus pada daya tahan, keamanan, dan kenyamanan pengguna.
- b Mengintegrasikan teknologi canggih dalam pembangunan infrastruktur, seperti sistem manajemen cerdas (smart management systems) dan material inovatif untuk meningkatkan efisiensi dan umur panjang.

2. Pendekatan Ramah Lingkungan, meliputi:

- a Mengadopsi prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, seperti penggunaan bahan bangunan yang ramah lingkungan, dan desain yang mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan.
- b Melakukan evaluasi dampak lingkungan secara menyeluruh untuk setiap proyek dan mengimplementasikan langkah-langkah mitigasi yang diperlukan.

3. Efisiensi Energi dan Sumber Daya, meliputi:

- a Mengintegrasikan penggunaan energi terbarukan, seperti tenaga surya atau angin, dalam proyek infrastruktur untuk mengurangi ketergantungan pada sumber energi fosil.
- b Menerapkan teknologi dan desain yang mendukung efisiensi energi, seperti sistem pencahayaan LED dan bangunan berstandar hijau (green buildings).

4. Peningkatan Aksesibilitas dan Konektivitas:

- a Memperbaiki dan mengembangkan jaringan transportasi untuk meningkatkan konektivitas antar daerah, serta memfasilitasi mobilitas yang lebih efisien.
- b Meningkatkan infrastruktur digital, termasuk jaringan internet cepat, untuk mendukung transformasi digital dan meningkatkan aksesibilitas informasi.

5. Pengembangan Infrastruktur Berbasis Komunitas:

- a Melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek infrastruktur untuk memastikan bahwa kebutuhan dan aspirasi lokal diperhatikan.
- b Fokus pada proyek-proyek yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, seperti fasilitas kesehatan, pendidikan, dan ruang publik.

6. Pemantauan dan Evaluasi:

- a Membangun sistem pemantauan yang efektif untuk mengevaluasi kinerja infrastruktur secara berkala dan melakukan perbaikan yang diperlukan.
- b Menilai dampak lingkungan dari infrastruktur yang telah dibangun dan melakukan penyesuaian sesuai kebutuhan untuk menjaga keberlanjutan lingkungan.

Tahap 4 Misi ke-7 : Terwujudnya Sumbawa Tangguh dan ramah lingkungan

1. Inovasi dalam Teknologi dan Material:

- a Mengintegrasikan teknologi hijau dan sistem infrastruktur pintar yang mengoptimalkan pen
- b Menggunakan material bangunan yang ramah lingkungan dan dapat didaur ulang, serta mengadopsi praktik konstruksi yang mengurangi jejak karbon.

2. Pembangunan Berkelanjutan:

- a Mengembangkan infrastruktur dengan mempertimbangkan keseimbangan ekosistem lokal, termasuk perlindungan terhadap habitat alami dan pengelolaan sumber daya secara berkelanjutan.
- b Implementasi sistem pengelolaan sampah yang efektif, termasuk daur ulang dan pengurangan limbah dalam proses konstruksi dan operasional infrastruktur.

3. Resiliensi dan Adaptasi Terhadap Perubahan Iklim:

- a Merancang infrastruktur yang tahan terhadap bencana alam dan perubahan iklim, seperti banjir, gempa bumi, dan cuaca ekstrem.
- b Mengembangkan dan menerapkan strategi adaptasi untuk menghadapi dampak perubahan iklim, termasuk pengelolaan air dan perlindungan pesisir.

4. Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat:

- a Meningkatkan kualitas fasilitas publik seperti taman, pusat komunitas, dan ruang terbuka yang mendukung kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.

- b Memastikan bahwa infrastruktur mendukung aksesibilitas yang inklusif, terutama untuk kelompok rentan, dan meningkatkan konektivitas antar wilayah.

5. Pengembangan Infrastruktur Berbasis Komunitas dan Partisipatif:

- a Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan dan pengelolaan proyek infrastruktur untuk memastikan bahwa proyek memenuhi kebutuhan lokal dan mendapatkan dukungan komunitas.
- b Melibatkan tenaga kerja lokal dan mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam proyek-proyek infrastruktur untuk meningkatkan dampak ekonomi lokal.

6. Sistem Pemantauan dan Evaluasi Terintegrasi:

- a Membangun sistem pemantauan yang komprehensif untuk menilai kinerja infrastruktur, termasuk dampak lingkungan dan kepuasan pengguna.
- b Melakukan evaluasi keberlanjutan secara berkala untuk memastikan bahwa infrastruktur yang dibangun tetap sesuai dengan prinsip-prinsip ramah lingkungan dan kualitas tinggi.

7. Kolaborasi dan Kemitraan:

- a Mendorong kemitraan antara sektor publik dan swasta untuk membiayai, merancang, dan mengelola proyek infrastruktur yang inovatif dan berkelanjutan.
- b Memanfaatkan kerjasama internasional dan pembelajaran dari pengalaman global untuk meningkatkan praktik dan teknologi dalam pembangunan infrastruktur.

5.8. Arah Kebijakan Misi 8 : Kestinambungan pembangunan

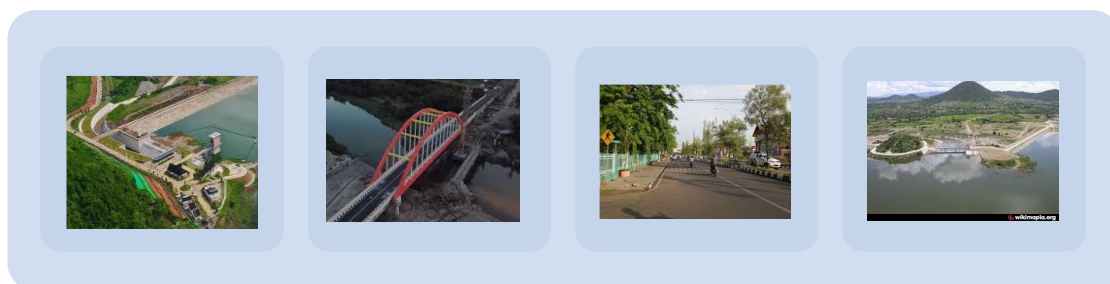
Kabupaten Sumbawa memiliki potensi yang besar untuk berkontribusi dalam pencapaian visi Indonesia Emas 2045, yaitu menjadi negara maju dengan ekonomi yang kuat, masyarakat yang sejahtera, serta lingkungan yang lestari. Untuk mencapai tujuan ini, pembangunan di Sumbawa difokuskan pada pembangunan yang maju, adil sejahtera dan berkelanjutan. Dengan mengoptimalkan sektor ekonomi unggulan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memperkuat infrastruktur, menjaga kelestarian lingkungan, dan memastikan pemerataan Pembangunan serta menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi. Kabupaten Sumbawa dapat berkontribusi secara signifikan terhadap visi besar Indonesia sebagai negara maju, sejahtera, dan berdaya saing tinggi pada tahun 2045.

Dalam mewujudkan kestinambungan pembangunan untuk mengawal Indonesia Emas 2045 diperlukan Arah kebijakan Implementasi transformasi di Sumbawa sebagai berikut:

- 6. Sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen perencanaan pusat dan daerah;
- 7. Sinkronisasi periodisasi RPJPD dan RTRW Kabupaten;
- 8. Peningkatan akuntabilitas kinerja Pemerintahan Daerah berdasarkan sasaran prioritas provinsi dan nasional;

9. Penguatan pengendalian pembangunan melalui penerapan manajemen resiko
10. Peningkatan sistem elektronik terpadu dan tata kelola data pembangunan;
11. Pengembangan pembiayaan inovatif termasuk KPBU dan blended finance

Gambar 5.8. Tahapan Arah Kebijakan Misi 7: Kestinambungan Pembangunan



Tahap 1 Misi ke-8 : Memperkuat sinkronisasi dan sinergitas perencanaan pembangunan antar pemerintah pusat provinsi dan daerah

Sinkronisasi Dokumen Perencanaan dari Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Tahap 2 Misi ke-8 : Meningkatkan sinkronisasi dan sinergitas perencanaan pembangunan antar pemerintah pusat, provinsi dan daerah

Sinkronisasi Dokumen Perencanaan dari Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Tahap 3 Misi ke-8 : Memantapkan sinkronisasi dan sinergitas perencanaan pembangunan antar pemerintah pusat provinsi dan daerah

Sinkronisasi Dokumen Perencanaan dari Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Tahap 4 Misi ke-8 : Terwujudnya sinkronisasi dan sinergitas perencanaan pembangunan antar pemerintah pusat provinsi dan daerah

Sinkronisasi Dokumen Perencanaan dari Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.

5.9. Upaya Transformatif Super Prioritas (Game Changers)

RPJP Nasional sebagai pedoman memuat seluruh aspek pembangunan. Meskipun demikian, dalam upaya mewujudkan Indonesia Emas 2045, terdapat 20 upaya transformatif super prioritas (Game Changer), yaitu: Tiga Belas (13) Upaya Transformatif Super Prioritas (Game Changers) untuk Transformasi Indonesia

Transformasi Sosial

1. Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun prasekolah dan L2 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah) serta efektivitas pengalokasian dan pemanfaatan anggaran wajib pendidikan.
2. Peningkatan partisipasi pendidikan tinggi dan lulusan STEAM berkualitas termasuk pemanfaatan dana abadi pendidikan.
3. Restrukturisasi kewenangan pengelolaan tenaga pendidikan dan kesehatan seperti guru, tenaga medis, dan tenaga kesehatan.
4. Investasi pelayanan kesehatan primer, penuntasan stunting, serta eliminasi penyakit menular dan penyakit tropis terabaikan (terutama: tuberkulosis dan kusta).
5. Penuntasan kemiskinan dengan satu sistem Regsosek dan perlindungan sosial adaptif terintegrasi.

Transformasi ekonomi

6. Peningkatan anggaran IPTEKIN nasional menuju komersialisasi oleh Industri.
12. Industrialisasi: hilirisasi industri berbasis SDA unggulan, industri padat karya terampil, padat teknologi dan inovasi, serta berorientasi ekspor.
13. Percepatan transisi energi berkeadilan menuju pemanfaatan energi baru dan terbarukan secara berkelanjutan didukung jaringan listrik terintegrasi serta transportasi hijau.
14. Superplatform untuk percepatan transformasi digital dan produksi talenta digital.
15. Integrasi infrastruktur konektivitas dengan kawasan pertumbuhan ekonomi.
16. Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Transformasi Tata Kelola

17. Transformasi manajemen ASN (terutama sistem penggajian tunggal dan pensiun), pemberantasan korupsi, dan pembentukan lembaga pengelola tunggal regulasi.
18. Penguatan tata kelola partai politik.

Tujuh (7) Upaya Transformatif Super Prioritas (Game Changers) untuk Landasan Transformasi

Landasan Transformasi

Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia

- 1. Transformasi Sistem Penuntutan menuju Single Prosecution System dan Transformasi lembaga Kejaksaan sebagai Advokat Jenderal.
- 2. Transformasi industri pertahanan menuju kemandirian melalui skema inovatif untuk adopsi teknologi dan penguatan value chain industri nasional.
- 3. Transformasi perencanaan dan fiskal: perencanaan dan pengendalian pembangunan berbasis risiko; penerapan aturan fiskal adaptif; reformasi APBN; serta transformasi perencanaan dan fiskal.
- 4. Reformasi subsidi terutama energi terbarukan dan pupuk tepat sasaran.

Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi

- 1. Penguatan karakter dan jati diri bangsa.
- 2. Reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir.
- 3. Ketahanan energi dan air serta kemandirian menuju kedaulatan pangan dengan pendekatan terpadu FEW nexus (food, energy, water).

Keterkaitan Game Changer RPJPN dan RPJPD Kabupaten Sumbawa

Transformasi Sosial	Transformasi Ekonomi	Transformasi Tata Kelola	Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia	Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi
Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah).	Peningkatan anggaran IPTEKIN nasional menuju komersialisasi oleh industri	Reformasi birokrasi dan tata kelola manajemen ASN	Transformasi sistem penuntutan menuju single prosecution system dan transformasi lembaga kejaksaan sebagai advokat jenderal	Penguatan karakter dan jati diri bangsa
Restrukturisasi kewenangan pengelolaan tenaga pendidikan dan kesehatan seperti guru, tenaga medis, dan tenaga kesehatan	Industrialisasi: hilirisasi industri berbasis SDA unggulan, industri padat karya terampil, padat teknologi dan inovasi, serta	Penguatan Tata Kelola Partai Politik	Transformasi industri pertahanan menuju kemandirian melalui skema inovasi untuk adopsi teknologi dan penguatan	Reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir.

Transformasi Sosial	Transformasi Ekonomi	Transformasi Tata Kelola	Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia	Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi
	berorientasi ekspor.		value chain industri nasional	
Investasi pelayanan kesehatan primer, penuntasan stunting, serta eliminasi penyakit menular dan penyakit tropis terabaikan (terutama: tuberkulosis dan kusta).	Percepatan transisi energi berkeadilan menuju pemanfaatan energi baru dan terbarukan secara berkelanjutan didukung jaringan listrik terintegrasi serta transportasi hijau.		Reformasi perencanaan dan fiskal: perencanaan dan pengendalian pembangunan berbasis risiko; penerapan aturan fiskal adaptif; reformasi APBN; serta transformasi kelembagaan perencanaan dan fiskal.	Ketahanan energi dan air serta kemandirian pangan dengan pendekatan terpadu FEW Nexus (Food, Energy, Water).
Penuntasan kemiskinan dengan satu sistem Regsosek dan perlindungan sosial adaptif terintegrasi.	<i>Superplatform</i> untuk percepatan transformasi digital dan produksi talenta digital.		Reformasi subsidi terutama energi terbarukan dn pupuk tepat sasaran	
	Integrasi infrastruktur konektivitas dengan kawasan pertumbuhan ekonomi			

5.2. Sasaran Pokok

Sasaran pokok RPJPD Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2045 merupakan gambaran kinerja daerah dalam pencapaian Pembangunan yang menggambarkan secara langsung terwujudnya visi tahun 2025-2045 yakni Sumbawa Maju Adil Sejahtera dan Berkelanjutan. Sasaran Pokok RPJPD Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2045 dirumuskan dengan mengacu pada arah Pembangunan hasil penyelarasan RPJPN Tahun 2025-2045 dengan RPJPD Tahun 2025-2045 seperti pada tabel dibawah ini :

Tabel 5. 2 Sasaran Pokok yang Bersesuaian dengan Arah Pembangunan Nasional

17 Arah Pembangunan Daerah	8 Arah Kebijakan	17 Sasaran Pokok	Indikator
1). Pelayanan kesehatan untuk semua	1). Memperkuat Pemenuhan Layanan Dasar Kesehatan, Pendidikan dan Perlindungan Sosial	1). Terwujudnya layanan kesehatan dasar dan pemenuhan mutu layanan kesehatan sesuai standar	a. Usia Harapan Hidup b. Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup) c. Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Balita (%) d. Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberculosis (Treatment Coverage) (%) e. Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis (Treatment Success rate) (%) f. Cakupan Kepersertaan Jaminan Kesehatan Nasional (%)

17 Arah Pembangunan Daerah	8 Arah Kebijakan	17 Sasaran Pokok	Indikator
2). Penyediaan Pendidikan berkuaitas yang merata		2). Terwujudnya usia wajib sekolah peserta didik tiap jenjang pendidikan dan pemenuhan standar mutu layanan pendidikan	a. Persentase Kabupaten/Kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk : - Literasi - Numerasi b. Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun) c. Harapan Lama Sekolah (tahun) d. Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%) e. Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang bekerja (%)
3). Penyelenggaraan perlindungan sosial yang adaptif		3). Terwujudnya sistem penjaminan sosial, rehabilitasi sosial, perlindungan sosial yang terintegrasi dan adaptif	a. Tingkat Kemiskinan (%) b. Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%) c. Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal (%)
4). Penguasaan IPTEK, pengembangan inovasi daerah dan peningkatan produktivitas ekonomi	2). Memperkuat sinkronisasi dan sinergitas perencanaan pembangunan antar pemerintah pusat, provinsi dan daerah	4). Terwujudnya pengembangan hasil kelitbangan dan inovasi di daerah dengan memanfaatkan kemajuan IPTEK	Indeks Kapabilitas Inovasi
5). Penerapan ekonomi hijau	3). Memperkuat stabilitas daerah yang demokratis dan akuntabel sebagai landasan	5). Terwujudnya pembangunan yang berdasarkan efektivitas	a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah

17 Arah Pembangunan Daerah	8 Arah Kebijakan	17 Sasaran Pokok	Indikator
	transformasi pembangunan ekonomi	transformasi ekonomi yang berkelanjutan dan rendah karbon	b. Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%) c. Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%) d. Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (%RT)
6). Transformasi digital	4). Memperkuat pemerataan dan kualitas konektivitas infrastruktur wilayah	6). Terwujudnya penyediaan infrastruktur TIK	Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI)
7). Integrasi ekonomi domestik dan global		7). Terwujudnya nilai ekspor barang dan jasa daerah	Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)
8). Peningkatan perekonomian perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan			
9). Menyusun regulasi dan tatakelola yang beintegritas dan adaptif	5). Memperkuat kualitas aparatur sipil negara, regulasi yang efektif digitalisasi pelayanan publik, peningkatan integrasi partai politik dan pemberdayaan masyarakat sipil	8). Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang berintegrasi dan adaptif	a. Indeks Reformasi Birokrasi b. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik c. Survey Penilaian Integritas Kabupaten
10). Penegakan hukum berkeadilan, keamanan nasional Tangguh dan demokrasi substansial		9). Terwujudnya penegakan hukum yang berkeadilan bagi masyarakat sumbawa	Indeks Reformasi Hukum
11). Penguatan stabilitas ekonomi makro		10). Terwujudnya stabilitas ekonomi pembangunan tingkat daerah dikabupaten sumbawa	a. Rasio PDRB Industri Pengolahan (%) b. Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)

17 Arah Pembangunan Daerah	8 Arah Kebijakan	17 Sasaran Pokok	Indikator
	meningkatkan kompleksitas produk industri		c. Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Hotel Berbintang) (Ribuan Orang) d. Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian pada Level Kabupaten (%) e. Proporsi Jumlah Industri usaha Kecil dan Menengah pada Level Kabupaten (%) f. Rasio Kewirausahaan Daerah (%) g. Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%) h. Return on Aset (ROA) BUMD (%)
ningkatan kerjasama Nasional	7). Memperkuat ketahanan sosial budaya dan ekologi sebagai landasan dan modal dasar pembangunan	11). Terwujudnya Kerjasama Daerah	a. Jumlah kerjasama yang difasilitasi b. Indeks Ketahanan Nasional
13). Pengembangan kehidupan beragama maslahat dan berkebudayaan maju		12). Terwujudnya masyarakat sumbawa yang menjaga konsep kebangsaan dan Penghormatan terhadap tradisi	a. Zero konflik kerukunan umat beragama (%) b. Jumlah Benda, bangunan, struktur, situs dan kawasan cagar budaya yang telah ditetapkan
14). Pembangunan keluarga berkualitas, kesetaraan gender dan masyarakat inklusif		13). Terwujudnya Keluarga Sejahtera	a. Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (iBangga) b. Indeks Ketimpangan Gender (IKG)
15). Pembangunan lingkungan hidup berkualitas	8). Memperkuat pembangunan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan	14). Terwujudnya tata kelola lingkungan hidup yang berkualitas	a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah b. Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%)

17 Arah Pembangunan Daerah	8 Arah Kebijakan	17 Sasaran Pokok	Indikator
			c. Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%) d. Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)*
16). Pembangunan ketahanan energi, air dan kemandirian pangan		15). Terwujudnya Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan	a. Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment) (%) / Pola Pangan Harapan (PPH) b. Indeks Ketahanan Pangan
17). Peningkatan resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim		16). Terwujudnya ketangguhan dan Kesiapsiagaan daerah terhadap bencana dan perubahan iklim 17). Terwujudnya Pembangunan Infrastruktur di wilayah-wilayah tertentu dengan tingkat kesulitan geografis	Indeks Risiko Bencana (IRB)

BAB VI. PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2045 memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah Kabupaten Sumbawa untuk periode pembangunan 20 tahun mendatang. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2045 merupakan pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah akan melakukan sosialisasi pemahaman risiko seluruh tingkatan perencanaan berkelanjutan, melakukan internalisasi pengelolaan risiko dalam proses pengambilan keputusan di seluruh tingkatan perencanaan pembangunan daerah.
2. Melakukan pengintegrasian manajemen risiko dalam proses perencanaan pembangunan dan memberikan penghargaan terhadap OPD dalam mengelola risiko yang baik dalam perencanaan pembangunan daerah.
3. Pemerintah daerah, serta masyarakat termasuk dunia usaha berkewajiban untuk mengacu pada rumusan visi, misi, dan arah pembangunan yang tertuang dalam RPJPD Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2045 dengan sebaik-baiknya.
4. Pemerintah daerah berkewajiban untuk menyusun RPJMD yang menjabarkan visi, misi, dan arah pembangunan menjadi strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pokok pembangunan dengan berpedoman pada RPJPD Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2045 yang nantinya akan menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
5. Pemerintah daerah berkewajiban menjamin konsistensi antara RPJPD Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2045 dengan RPJPN, RPJPD NTB dan RPJMD.
6. Dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan RPJPD Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2045, Pemerintah Daerah dan Legislatif secara bersama-sama berkewajiban untuk melakukan pemantauan terhadap penjabaran RPJPD Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2045 ke dalam RPJMD dan dokumen perencanaan daerah lainnya yang lebih operasional.

Sumbawa, November 2024

Bupati Sumbawa,

Mahmud Abdullah

LAMPIRAN

45 Indikator Utama Pembangunan Kabupaten Sumbawa

45 INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN KABUPATEN SUMBAWA					
NO		INDIKATOR MAKRO	Tahun 2023	SASARAN	
				2025	2045
TRANSFORMASI SOSIAL					
(1) KESEHATAN UNTUK SEMUA					
1		USIA HARAPAN HIDUP (UHH) (TAHUN)	72,41	72,76	79,16
2		KESEHATAN IBU DAN ANAK:			
	a	JUMLAH KASUS KEMATIAN IBU	6	5	0
	b	PREVALENSI <i>STUNTING</i> (PENDEK DAN SANGAT PENDEK) PADA BALITA (PERSEN)	25,70	24,68	4,68
3		INSIDENSI TUBERKULOSIS (PER 100.000 PENDUDUK):			
	a	CAKUPAN PENEMUAN KASUS TUBERKULOSIS (TREATMENT COVERAGE) (PERSEN)	54,33	62,00	91,00
	b	ANGKA KEBERHASILAN PENGOBATAN TUBERKULOSIS (TREATMENT SUCCESS RATE) (PERSEN)	94,22	98,93	100,00
4		CAKUPAN KEPESERTAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (PERSEN)	96,94	98,15	99,85
(2) PENDIDIKAN BERKUALITAS YANG MERATA					
5		HASIL PEMBELAJARAN:			
	a	PERSENTASE PESERTA DIDIK YANG MENCAPAI STANDAR KOMPETENSI MINIMUM PADA ASSESMENT TINGKAT NASIONAL UNTUK :			

	-	LITERASI MEMBACA	60,13	63,74	78,17
	-	NUMERASI	53,50	56,71	78,26
	b	PERSENTASE SATUAN PENDIDIKAN YANG MENCAPAI STANDAR KOMPETENSI MINIMUM PADA ASSESMENT TINGKAT NASIONAL UNTUK:			
	-	LITERASI MEMBACA	32,68	45,33	75,33
	-	NUMERASI	25,98	31,70	61,70
	c	RATA-RATA LAMA SEKOLAH PENDUDUK USIA 25 TAHUN (TAHUN)	8,52	8,65 - 8,75	10,84 - 11,11
	d	HARAPAN LAMA SEKOLAH	13,24	13,42 - 13,43	15,53 - 15,63
6		PROPORSI PENDUDUK BERUSIA 15 TAHUN KE ATAS YANG BERKUALIFIKASI PENDIDIKAN TINGGI (PERSEN)	10,39	10,76	11,27 - 12,88
7		PERSENTASE PEKERJA LULUSAN PENDIDIKAN MENENGAH DAN TINGGI YANG BEKERJA (PERSEN)	59,04	75,10	85,54
(3) PERLINDUNGAN SOSIAL ADAPTIF					
8		TINGKAT KEMISKINAN (PERSEN)	13,91	11,73 - 12,23	1,00 - 2,00
9		CAKUPAN KEPESERTAAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN KABUPATEN/KOTA (PERSEN)	17,11	24,45	97,85
10		PERSENTASE PENYANDANG DISABILITAS BEKERJA DI SEKTOR FORMAL	0,70	5,0	29,70
TRANSFORMASI EKONOMI					
(4) IPTEK, INOVASI, DAN PRODUKTIVITAS EKONOMI					
11		RASIO PDRB INDUSTRI PENGOLAHAN (PERSEN)	1,87	3,63	8,98 - 10,08
12		PENGEMBANGAN PARIWISATA			
	a	RASIO PDRB PENYEDIAAN AKOMODASI MAKAN DAN MINUM (PERSEN)	1,38	1,61	3,53

	b	JUMLAH TAMU WISATAWAN MANCANEGARA (ORANG)	3.868	4.852	46.823
13		NILAI TAMBAH EKONOMI KREATIF KABUPATEN/KOTA (MILYAR)	573,72	667,15	6.207,25
14		PRODUKTIVITAS UMKM, KOPERASI, BUMD			
	a - i	PROPORSI JUMLAH USAHA KECIL DAN MENENGAH NON PERTANIAN PADA LEVEL KABUPATEN/KOTA (PERSEN)	4,20	4,22	4,80
	a - i	PROPORSI JUMLAH INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH PADA LEVEL KABUPATEN/KOTA (PERSEN)	0,21	6,61	11,33
	b	RASIO KEWIRAUSAHAAN DAERAH (PERSEN)	2,00	2,63	3,40
	c	RASIO VOLUME USAHA KOPERASI TERHADAP PDRB (PERSEN)	0,44	0,85	2,22
	d	RETURN ON ASSET (ROA) BUMD (PERSEN)	7,48	18,3	23,75
15		PENCIPTAAN LAPANGAN KERJA YANG BAIK			
	a	TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA (PERSEN)	2,79	2,63	1,08
16		TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA PEREMPUAN (PERSEN)	59,09	60,11	70,02
17		TINGKAT PENGUASAAN IPTEK			
	a	INDEKS KAPABILITAS INOVASI	2,03	2,17	4,26
(5) PENERAPAN EKONOMI HIJAU					
18		TINGKAT PENERAPAN EKONOMI HIJAU			
	a	PORSI EBT DALAM BAURAN ENERGI PRIMER (PERSEN)		0,3	2,65
(6) TRANSFORMASI DIGITAL					
19a		INDEKS PEMBANGUNAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI	3,00	3,11	4,22
19b		INDEKS MASYARAKAT DIGITAL INDONESIA (IMDI)	41,26	45,53	85,00
(7) INTEGRASI EKONOMI DOMESTIK DAN GLOBAL					

20	KOEFSIEN VARIASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK ANTAR WAKTU			1,00	0,10
21	PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO (PERSEN PDRB)		40,70	42,46	48,48
22	NET EKSPOR BARANG DAN JASA		-23,93	-21,42	5,48
(8) PERKOTAAN DAN PERDESAAN SEBAGAI PUSAT PERTUMBUHAN EKONOMI					
23	KOTA DAN DESA MAJU, INKLUSIF, DAN BERKELANJUTAN				
	a	RUMAH TANGGA DENGAN AKSES HUNIAN LAYAK, TERJANGKAU DAN BERKELANJUTAN (PERSEN)	69,19	73,41	96,87
	b	PERSENTASE DESA MANDIRI (PERSEN)	26,11	29,94	68,15
TRANSFORMASI TATA KELOLA					
(9) REGULASI DAN TATA KELOLA YANG BERINTEGRITAS DAN ADAPTIF					
24	INDEKS REFORMASI HUKUM		57,60	70	100
25	INDEKS SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK		2,75	2,88	4,20
26	INDEKS PELAYANAN PUBLIK		2,94	3,09	4,49
27	SURVEI PENILAIAN INTEGRITAS (SPI) KABUPATEN/KOTA		71,86	74,86	104,86
(10) PENGARUH KEPEMIMPINAN PEMERINTAH DAERAH YANG EFEKTIF					
28	STABILITAS KEAMANAN DAERAH				
	a	PERSENTASE CAPAIAN PELAKSANAAN AKSI HAM DAERAH	100	100	100
	b	TINGKAT PENEGAKAN PERDA OLEH SATPOL PP	100	100	100
29	RASIO JUMLAH PETUGAS KEAMANAN DAN SEJENISNYA TERHADAP JUMLAH PENDUDUK		147	126	57
30	TINGKAT PARTISIPASI PEMILU		82,42	86,60	89,82
(11) STABILITAS EKONOMI MAKRO					

31		RASIO PAJAK DAERAH TERHADAP PDRB (PERSEN)	0,43	0,45	0,78
32		TINGKAT INFLASI (PERSEN)	2,91	2.50 - 3,00	1,50 - 2,00
33		PENDALAMAN/INTERMEDIASI SEKTOR KEUANGAN			
	a	TOTAL DANA BUMD/PDRB KABUPATEN/KOTA (NILAI TAMBAH BUMD KAB./KOTA TERHADAP PDRB KABUPATEN/KOTA)	0,000160	0,000387	0,001455
	c	NILAI REALISASI INVESTASI PER KABUPATEN/KOTA BERUPA NILAI RATA-RATA TAHUNAN	37,09	59,63	187,79
	d	RASIO PENDAPATAN PER KAPITA	33.981.230	36.486.042	57.918.571
34		PERSENTASE PENDUDUK YANG MEMILIKI REKENING TABUNGAN BANK	38,43	46,12	76,86
(12) KETANGGUHAN DIPLOMASI DAN PERTAHANAN BERDAYA GENTAR KAWASAN					
35		EFEKTIF KERJASAMA ANTAR DAERAH	82,61	95,00	95,00
36		INDEKS KETAHANAN NASIONAL	2,18	2,27	3,92
KETAHANAN SOSIAL BUDAYA DAN EKOLOGI					
(13) BERAGAMA MASLAHAT DAN BERKEBUDAYAAN MAJU					
37		INDEKS PEMBANGUNAN KEBUDAYAAN (IPK)			
	a	BENDA, BANGUNAN, STRUKTUR, SITUS DAN KAWASAN CAGAR BUDAYA YANG TELAH DITETAPKAN	12	2	2
38		ZERO KONFLIK KERUKUNAN UMAT BERAGAMA (PERSEN)	0	0	0
(14) KELUARGA BERKUALITAS, KESETARAAN GENDER, DAN MASYARAKAT INKLUSIF					
39		INDEKS PEMBANGUNAN KUALITAS KELUARGA	51,36	53,36	73,36
40		INDEKS KETIMPANGAN GENDER (IKG)	0,42	0,40	0,21
(15) LINGKUNGAN HIDUP BERKUALITAS					

41		PERSENTASE RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) TERHADAP LUAS WILAYAH DARATAN (PERSEN)	1,55	2,55	17,55
42		KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP			
	a	INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH	75,42	78,23	78,83
	b	RUMAH TANGGA DENGAN AKSES SANITASI AMAN (PERSEN)	7,49	10,91	95,28
	c	PENGELOLAAN SAMPAH			
	-	TIMBUNAN SAMPAH TEROLAH DI FASILITAS PENGOLAHAN SAMPAH (PERSEN)	48,39	48,58	50,13
	-	PROPORSI RUMAH TANGGA (RT) DENGAN LAYANAN PENUH PENGUMPULAN SAMPAH (PERSEN RT)	17,66	17,66	18,96
(16) BERKETAHANAN ENERGI, AIR, DAN KEMANDIRIAN PANGAN					
43		KETAHANAN ENERGI, AIR, DAN PANGAN			
	a	KETAHANAN ENERGI			
	-	KONSUMSI LISTRIK PER KAPITA (KWH)	729	828	3.175
	b	INDEKS KETAHANAN PANGAN	84	84,78	94,10
	c	KETAHANAN AIR			
	-	KAPASITAS AIR BAKU (m3/DETIK)	0,30	0,60	6,70
	-	AKSES AIR MINUM LAYAK	14,00	16,78	43,57
(17) RESILIENSI TERHADAP DAN PERUBAHAN IKLIM					
44		INDEKS RESIKO BENCANA	137,58	133,08	88,08
45		PERSENTASE PENURUNAN EMISI GRK (PERSEN)		2,72	9,91
	a	KUMULATIF			
	b	TAHUNAN			

